



**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 40 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2019**



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana APBD pada tahun mendatang yang akan dibahas dan disahkan menjadi APBD.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- (2) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;
 - b. acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

Pasal 3

Penyusunan RAPBD Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- b. OPD Provinsi Kepulauan Riau menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4

- (1) OPD Provinsi Kepulauan Riau membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.

- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD Provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran OPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Pasal 6

Jika terjadi perbedaan dalam pembahasan RAPBD Tahun 2020 antara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD Tahun 2020 dan semua aspek yang mempengaruhi penetapan RAPBD.

BAB II

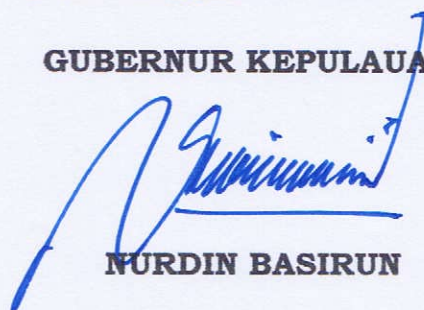
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal: 28 Juni 2019

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal: 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



T. S. ARIF FADILLAH



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-9
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-11
1.5 Sistematika RKPD.....	I-12
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	 II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-22
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum (per urusan)	II-39
2.1.4. Aspek Daya Saing	II-140
2.2 Permasalahan Pembangunan.....	II-147
2.2.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (Isu strategis)	II-147
2.2.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	II-149
 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Arah kebijakan ekonomi nasional	III-1
3.1.2 Arah kebijakan ekonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	III-6
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-12
3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	III-12
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	III-15
 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	 IV-1
4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020	IV-11
4.3. Arah Kebijakan Tahun 2020 berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD tahun 2016-2021	IV-15



4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020	IV-15
4.5. Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Pengarustamaan Pembangunan Tahun 2020.....	IV-52
4.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	IV-64
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
6.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VI-4
BAB VII PENUTUP	VII-1



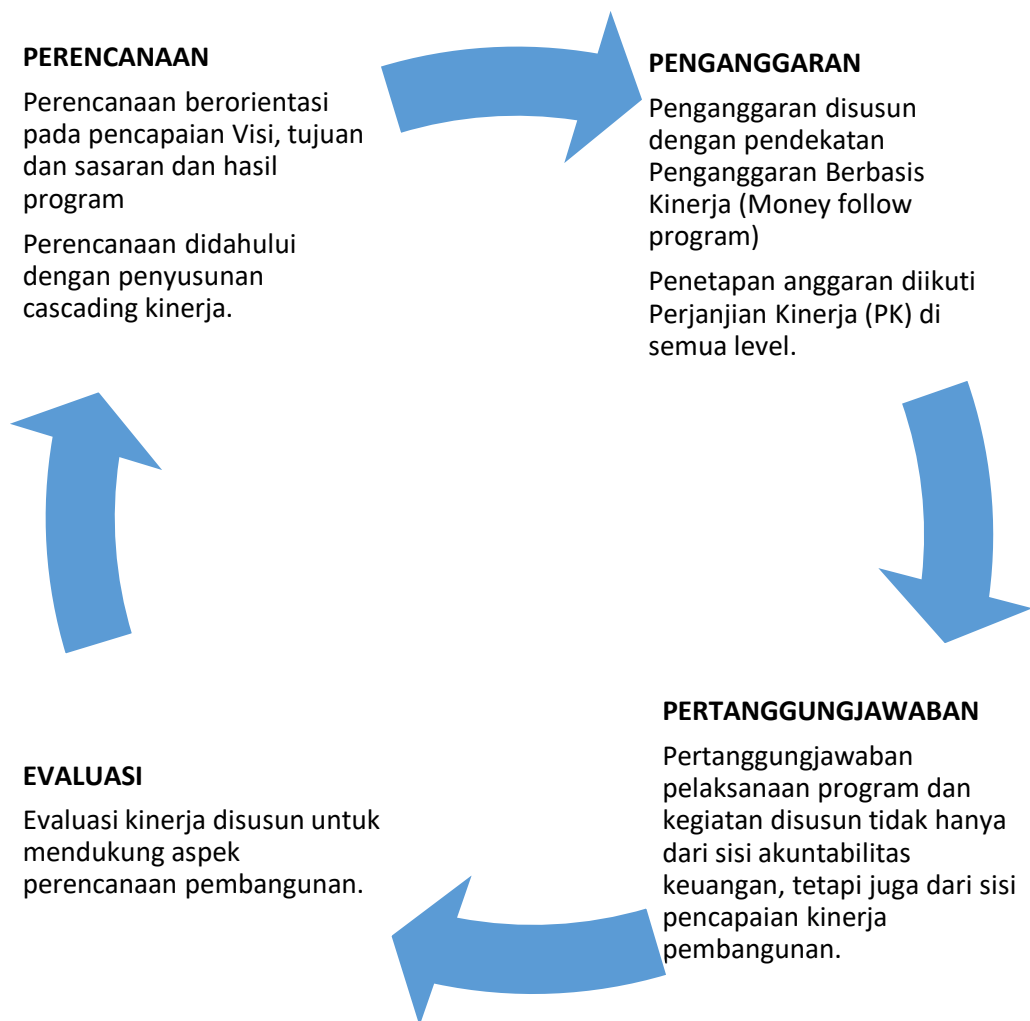
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai permasalahan yang dikelompokkan dalam beberapa isu strategis, terkait Kuantitas dan kualitas infrastruktur, Konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, pengembangan kemaritiman dan pariwisata, kualitas pembangunan manusia, pemerataan dan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, pelestarian budaya melayu, kapasitas fiskal daerah dan tata kelola pemerintahan, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan antar kelompok pendapatan, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman bencana, kesetaraan dan keadilan gender, kerentanan terhadap kerawanan pangan, dan pengembangan wilayah perbatasan. Isu strategis tersebut secara jelas tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

Berbagai isu strategis pembangunan daerah tentunya perlu ditangani secara bertahap didukung perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya. Sebagai implementasinya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang merupakan penjabaran atas dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021. RKPD memuat tentang kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan partisipasi masyarakat.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran, Provinsi Kepulauan Riau melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran sebagaimana tercantum pada skema berikut ini.



Gambar 1.1 Reformasi perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan RKPD ditujukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Secara substansi penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dan RKP tahun 2020. Penyusunan RKPD Tahun 2020 memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2020, pertimbangan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh perangkat daerah serta pihak-pihak pemangku kepentingan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau.



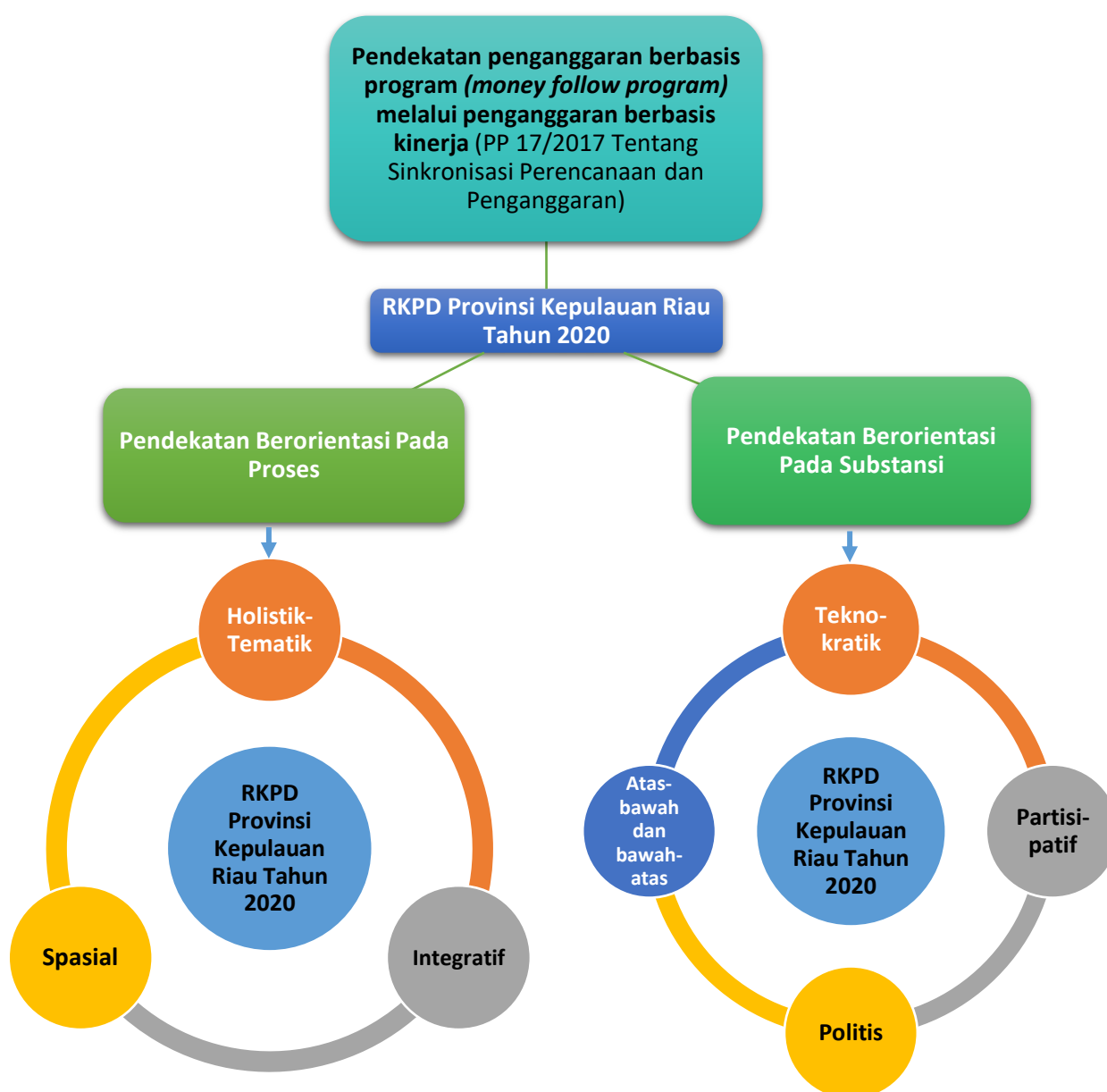
Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dilaksanakan melalui beberapa pendekatan berorientasi pada proses yaitu:

- 1) Pendekatan Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Komitmen ini telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2019 dimana Program dan Kegiatan Prioritas yang tertuang didalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau dibahas dan diselaraskan dengan Program, Kegiatan dan Proyek Strategis Nasional.
- 2) Pendekatan Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten/kota. Dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2019, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau.
- 3) Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- 4) Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

- 1) Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- 2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

- 3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RKPD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.
- 4) Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja yang merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan Kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian Kinerja tersebut. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran (*output*) dan/atau hasil, dari kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.



Gambar 1.2 Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Kepulauan Riau Tahun 2020



Berdasarkan Penyusunan RKPD tahun 2020 dilaksanakan menggunakan pendekatan baru serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan pendekatan ***money follows program, yaitu*** pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial dari berbagai Program Prioritas yang sejalan dengan visi misi Kepala Daerah. Tujuan dari pelaksanaan *money follow program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui e-Planning. Seluruh usulan perencanaan Perangkat Daerah, Masyarakat, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui e-planning.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD

Tahapan ini meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja, penyiapan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi perencanaan pembangunan daerah;

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Tahapan ini merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun rancangan Rencana Kerja perangkat daerah. Proses-proses penyusunan tersebut antara lain: Penelaahan tentang prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD pada tahun 2020, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, serta Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD.

3. Penyusunan rancangan RKPD

Tahapan ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dengan prioritas nasional dan RKP Tahun 2020. Rancangan RKPD disusun dengan memperhatikan Rakorteknis, dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Tahapan ini merupakan forum untuk menghasilkan sinergisitas rancangan RKPD dengan aspirasi masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Proses Musrenbang ini melibatkan berbagai *stakeholders*, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta

jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan kaum perempuan dan anak secara partisipatif.

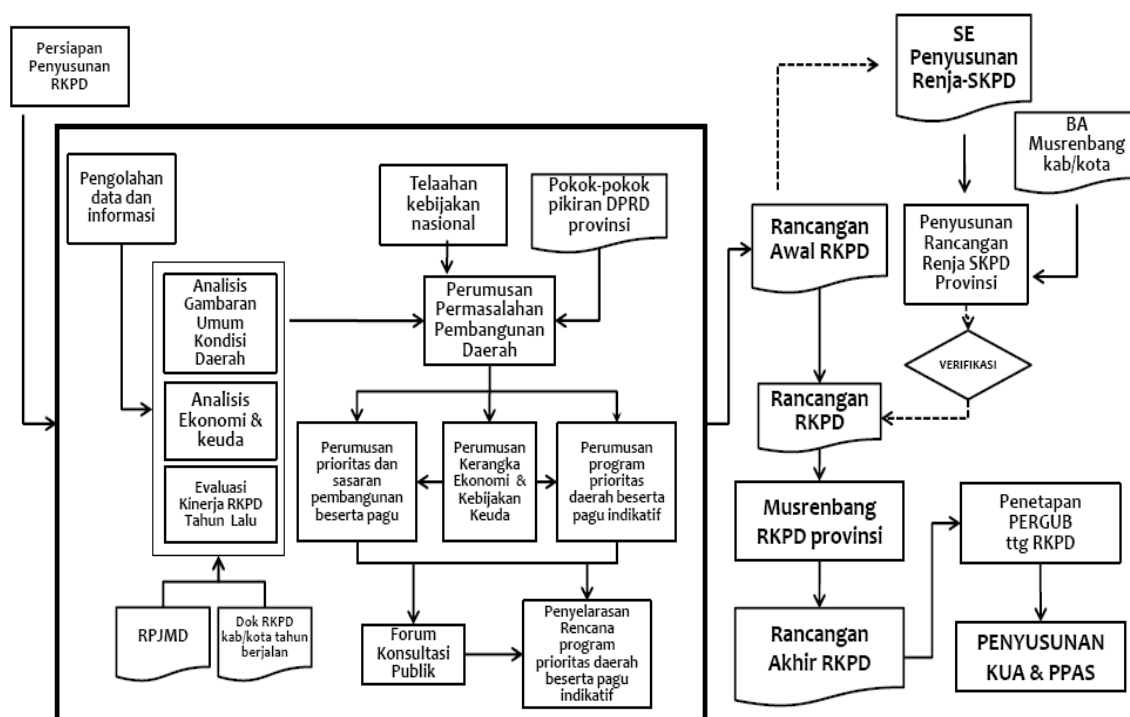
5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Tahapan ini merupakan perbaikan rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional.

6. Penetapan RKPD

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Skema penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 disajikan sebagai berikut:



Gambar 1. 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan penganggaran pembangunan tahunan. RKPD tahun 2020 setelah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. RKPD juga menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2020 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2020. Dengan adanya prioritas dan arah kebijakan tahunan pembangunan daerah



tercipta kepastian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021;
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
29. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa



penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berpedoman kepada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021.

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 memiliki keterkaitan erat antara dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagai berikut:

1. Hubungan RKPD tahun 2020 dengan Perubahan RPJMD tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD tahun 2020 merupakan RKPD tahun keempat dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

Dalam dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021, pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan kualitas Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, iklim investasi yang kondusif, dan Pemerataan Infrastruktur guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya”**, dengan prioritas pada:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
- b. Peningkatan Iklim investasi yang kondusif
- c. Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
- d. Peningkatan daya saing ekonomi
- e. Pengembangan pusat kebudayaan melayu.

2. Hubungan RKPD tahun 2020 dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 juga disusun dengan memperhatikan pada kebijakan RKP tahun 2020. RKP sebagai acuan untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional. Substansi dari dokumen RKP Tahun 2020 yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan tema dan kebijakan prioritas pembangunan nasional tahun 2020.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan Manusia



- b. Penguatan konektivitas
- c. Peningkatan nilai tambah ekonomi
- d. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air.
- e. Stabilitas keamanan Nasional.

3. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya Rencana Kerja PD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD.

4. Hubungan RKPD dengan KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.





3. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).
4. Dokumen RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pada saat pelaksanaan dan evaluasi pada saat akhir perencanaan.

1.5 Sistematika RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, terdiri dari enam (6) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup uraian tentang latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2020, rumusan maksud dan tujuan, penjelasan tentang hubungan RKPD Tahun 2020 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, serta Sistematika dokumen RKPD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD 2018 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menjelaskan tentang aspek kewilayahan Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai target sesuai tahun perencanaan di RPJMD Tahun 2016-2021.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah yaitu tantangan dan prospek perekonomian tahun 2019 dan 2020 arah kebijakan ekonomi daerah serta proyeksi kondisi keuangan daerah dan kerangka pendanaan pembangunan serta arah kebijakan pendapatan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Menjelaskan tentang visi dan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, isu-isu strategis pembangunan tahun 2020, tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020

Menjelaskan tentang rencana kerja kegiatan-kegiatan program prioritas, pencapaian visi dan misi dalam perubahan RPJMD tahun 2016-2021 dan rencana kerja pembangunan tahun 2020.



BAB VI PENUTUP

Merumuskan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD 2020 serta tindak lanjut yang diperlukan dalam implementasi RKPD tahun 2020 sebagai acuan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

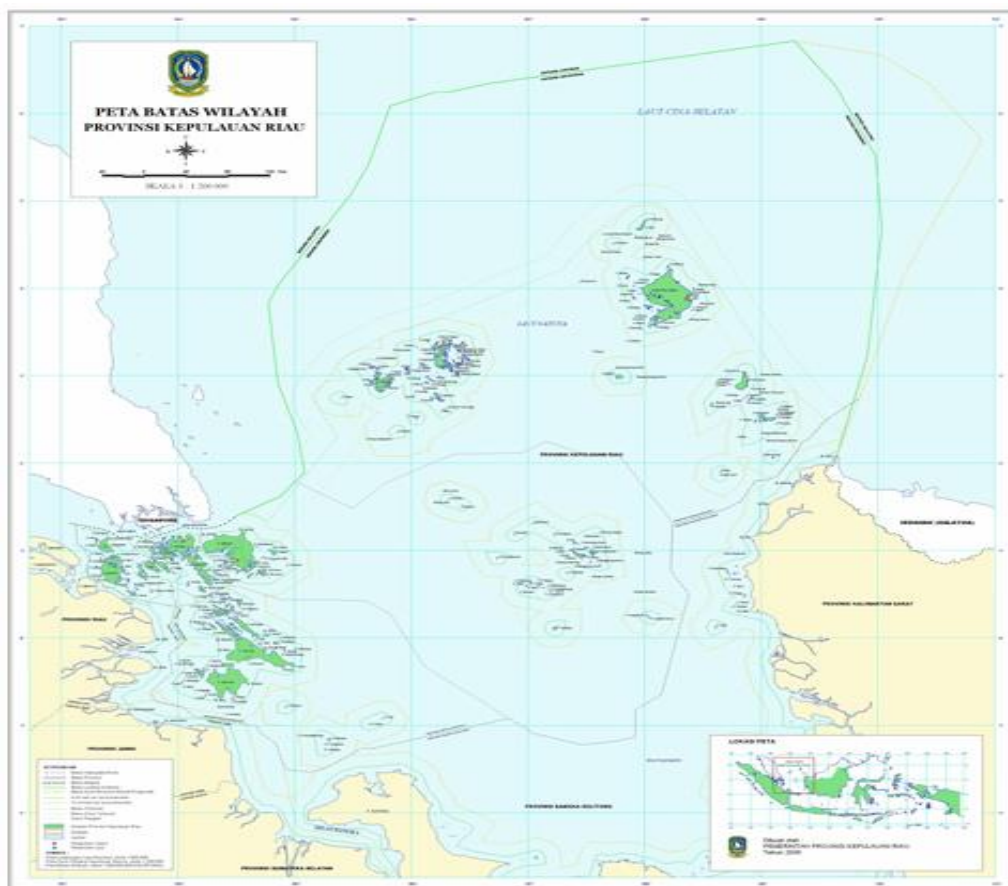
2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau



Gambar 2.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau



Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, dan lima kabupaten, yaitu : Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km², dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

NO	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)
1.	Kabupaten Karimun	912,75
2.	Kabupaten Bintan	1.318,21
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14
6.	Kota Batam	960,25
7.	Kota Tanjungpinang	144,56
	Total	8.201,72

Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Terkait dengan luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan
Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)
1	Kabupaten Karimun	4.698,09
2	Kabupaten Bintan	102.964,08
3	Kabupaten Natuna	216.113,42



No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)
4	Kabupaten Lingga	43.339,00
5	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00
6	Kota Batam	3.675,25
7	Kota Tanjungpinang	149,13
	Total	417.012,97

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, letak astronomis kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
5.	Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT
6.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
7.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT

Sumber: Biro Pemerintahan dan Perbatasan (Kepulauan Riau dalam Angka, 2018)

Setelah terbitnya Undang–Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian “Pulau” menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada diatas air pada



saat air pasang. Adapun hasil Verifikasi Tim Nasional dimaksud terdapat 1.795 pulau yang sudah bernama, kecuali satu pulau yaitu Pulau Berhala dimana saat itu masih dalam sengketa dengan Provinsi Jambi. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, maka pulau Provinsi Kepulauan Riau bertambah 1 (satu) buah menjadi 1.796 pulau, dengan perincian terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
1	Kota Batam	371	133
2	Kota Tanjungpinang	9	2
3	Kabupaten Bintan	241	48
4	Kabupaten Karimun	251	73
5	Kabupaten Natuna	392	62
6	Kabupaten Lingga	532	76
	Jumlah	1.796	394

Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Perkembangan terakhir pulau di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 125.1/4275/BAK, tanggal 12 Oktober 2015 perihal penyampaian data pulau, ada penambahan pulau di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 122 pulau. Namun demikian belum ada rincian penambahan pulau tersebut.

2.1.1.3 Kondisi Topografi

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggian wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.



2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Mengenai Ketinggian wilayah menurut kabupaten/kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah (surat terlampir), diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Karimun	5 m
2	Bintan	6 m
3	Natuna	14 m
4	Lingga	6 m
5	Kepulauan Anambas	6 m
6	Batam	8 m
7	Tanjungpinang	65 m

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, tertinggi Gunung Daik di Kabupaten Lingga setinggi 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Karimun	Gunung Jantan	478
2	Bintan	Gunung Bintan	380
3	Natuna	Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
4	Lingga	Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
5	Kepulauan Anambas	Gunung Punjang	443
		Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan (Kepulauan Riau Dalam Angka 2018)

2.1.1.4 Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama "paparan sunda" atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh



morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur.

Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempati di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik.

Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarung juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala. Ketiga pulau tersebut disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya- timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi tambang granit, sedangkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.



Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari *organosol*, *glei* humus, *podsolik* merah kunicng, *latosol* dan *aluvial*. Jenis tanah *Organosol* dan *glei* humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau *bulkdensity* kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah *Organosol* tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Jenis lainnya adalah tanah *Latosol*, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah *Aluvial* yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung *glei* dan bertotol kuning, merah dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Daerah Aliran Sungai mencakup sebanyak tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lingga. Mata air sebagai sumber air permukaan terdapat di lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Tanjungpinang dan Lingga. DAM/Waduk tersebar di seluruh kabupaten/kota. Beberapa DAM/Waduk/Embung yang direncanakan dibangun pada yaitu Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus di Kota Batam, dan DAM/Waduk/Embung Dompok di Kota Tanjungpinang. Sementara itu Kolong terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.

Secara rinci data mengenai potensi sumberdaya air di Kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.7.



Tabel 2.7
Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/ Embung	Kolong
1	Batam	Terong, Gading, Ladi, Pesung, Bukit Jodoh, Tiban Lama, Tiban Lama, Balo, Nongsa, Gata, Medang, Galang Baru, Galang, Kangka, Sembulang, Abang Besar	-	Duriangkang, Muka Kuning, Sei Ladi, Nongsa, Sei Harapan, Rempang, Sekanak I, Sekanak 2, Sei Tembesi, Rempang Utara, Sei Gong, Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus	-
2	Natuna	Midai, Kampung Hilir, Pajang, Serasan, Lagong, Batang, Tiga Sedanau, Selor, Segeram, Kelarik, Cinak, Cinak Besar, Kelarik Hulu, Hulu, Bunguran Timur, Binjai.	Nuraja, dan Gunung Datuk	Balau Sedanau, Ranai Darat, Selat Lampa, Kelarik, Tapau, Sebayar.	-
3	Kepulauan Anambas	Air Abu, Nyamuk, Telaga, Siantan, Batu Belah, Air Asuk, Wampu, Ladan, Mubur, Matak, Anambas, Panai	Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan Gunung Kesayana	Batu Tambun, Gunung Lintang, Batu Tabir, dan Gunung Samak	-
4	Bintan	Logo, Ekang, Bintan, Cikolek, Sumpai, Angus, Sopor, Mapor, Katubi, Pengibu, Tambelan, Benuwa, Tambang Besar.	Gunung Lengkuas	Waduk Tanjung Uban/Sei Jeram, Waduk Sei Jago, Waduk Lagoi, Waduk Gesek, Kolong Enam, Busung, Galang Batang, Kawal, Anculai, Kangboi, dan Sekuning	Danau Kolong Gunung Kijang, Danau Belakang Mesjid Raya, Ex. Galian Pasir Galang Batang, Ex. Galian Pasir Simpang Busung, Ex. Galian Pasir Pengujan, Bloreng, Katen, Nyirih, Tembeling dan Mantang
5	Karimun	Gemuruh, Urung, Ungar, Sawang, Teluk Radang, Bela, Rapit, Papan, Buru, Lebu,	-	Waduk Sei Bati, Pongkar 1, Pongkar 2, Sentani, Paya Manggis, Sei Gunung	Ex. Galian Timah Perayon, Ex. Galian Pasir

No	Kabupaten/ Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/ Embung	Kolong
		Pauh, Durian, Tjitim, Sebesi, Karimun, Moro, Sugi, Combol, Alai, Sanglar, Durai, Terong		Jantan (Pulau Karimun Besar), Waduk Tempan, Sawang (Pulau Kundur) dan Waduk Sidodadi, Sidomoro (Pulau Moro)	Kobel, Galian Pasir Tempan
6	Tanjungpinang	Dompok, Jang	Hutan Lindung (Pancur)	Waduk Sei Pulai, Sei Timun, Dompok	-
7	Lingga	Durslin, Selamak, Musal, Pengok, Sekarim, Buluh, Bidai, Posik, Mamut, Tjempah, Mentuda, Telok, Ketam, Canot, Selapan, Jelutung, Kredong, Awak, Duara, Resun, Tembok, Kerasing, Lieng, Dabo, Sergong, Kumbang, Langkap, Maroktua, Bajau, Ara, Temiang, Sebangka, Penuba, Air Merah	Gunung Daik, Gunung Muncung, Batu Ampar, Kampung Menserai, dan Kampung Tanjung Tinggi	Gemuruh	Ex. Galian Timah Singkep

Sumber: Kepmen PU No. 4/PRT/M/2015; BWSS IV Kepulauan Riau dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, 2016

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar 27,60 °C dan rata-rata terendah di Ranai (Natuna) 26,98°C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Ranai (Natuna) sebesar 89,00%, sedangkan rata-rata terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 83,00%. Curah hujan tertinggi di Ranai (Natuna) sebanyak 267,31 mm³ sedangkan curah hujan terendah di Tarempa (Kepulauan Anambas) 187,30 mm³. Tekanan Udara tertinggi di Tanjungpinang sebesar 1.011,50 mb, sedangkan tekanan udara terendah di Karimun sebesar 1.009,90 mb. Kecepatan Angin tertinggi di Tarempa (Kepulauan Anambas) sebesar 10 knot, terendah di Ranai (Natuna) sebesar 2 knot. Penyinaran matahari tertinggi di Ranai (Natuna) sebesar 57,00%, terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 19,70%.

Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di 6 stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran
Matahari Menurut Stasiun Tahun 2017

No	Uraian	Karimun	Ranai (Natuna)	Dabo (Lingga)	Terempa (Kepulauan Anambas)	Hang Nadim (Batam)	Tanjung-pinang
1	Suhu (°C)						
	Maksimum	33,10	33,03	31,10	34,40	33,32	34,20
	Minimum	24,60	23,00	23,40	20,00	22,58	25,40
	Rata-Rata	27,80	26,98	27,30	27,60	27,47	27,31
2	Kelembaban Udara (persen)						
	Maksimum	94,00	99,00	94,00	97,00	99,00	100
	Minimum	75,00	64,00	77,00	72,80	50,00	76
	Rata-Rata	84,70	89,00	85,00	83,20	83,00	86
3	Tekanan Udara (mb)	1.009,90	1.010,25	1.010,10	1.010,00	1.011,45	1.010,50
4	Kecepatan Angin (knot)	4	2	4	10	4,47	5
5	Curah Hujan (mm ³)	218,90	267,31	243,70	187,30	249,05	254,54
6	Penyinaran Matahari (persen)	34,35	57,00	45,00	50,00	19,70	48,78

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BPS Kepri, Kepulauan Riau Dalam Angka 2018).

2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 164.662 hektar, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebanyak 49.439 hektar, Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas 252.940.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas lebih kurang 231.441 hektar. Selain itu Kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 23.872 hektar. Non DPCLS seluas 207.569 hektar. Selanjutnya perubahan fungsi kawasan hutan seluas 60.299 hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 536 hektar.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian



Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 227.682,63 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

Sementara itu kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (*backyard farming*). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah *hinterland*. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Potensi perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah laut dan perairan umum Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah pengelolaan perikanan yang ada sudah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terkendala arah angin utara selama tiga bulan dalam setahun terjadi sehingga nelayan berhenti melaut.

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.



4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 13.759,28 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan dan Lingga; Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas; Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasiskan potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Arahan Pengembangan Kawasan Industri ditekankan pada pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, dengan berbasiskan potensi daerah yang berwawasan lingkungan. Rencana kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau seluas 28.434,12 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- a. Kawasan industri besar, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri-industri unggulan yang terdiri dari industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika.
- b. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata



Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Rencana kawasan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau seluas 37.929,83 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Adapun arahan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan kooperatif terdiri dari:

- a. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
- b. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- c. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
- d. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
- e. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
- f. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
- g. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 84.208,26 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

8. Pemanfaatan Ruang Laut

Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki *comparative advantage* yang tinggi karena posisi geografisnya. Indonesia belum memiliki kedaulatan negara ditandai dengan kapal-kapal yang melewati ruang laut Indonesia, tetapi melapor dan membayar retribusi ke Malaysia dan



Singapura. Juga potensi 37 kapal tenggelam (harta karun) di sekitar Pulau Bintan, ditengah Laut Natuna, serta adanya kawasan laut tertutup sebagai tempat pembuangan amunisi militer. Selain itu perairan lau Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral.

2.1.1.7 Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kerawanan bencana, meliputi sebagai berikut :

a. Kawasan Rawan Tanah Longsor/Gerakan Tanah

Kawasan rawan tanah longsor / gerakan tanah adalah kawasan yang memiliki kriteria berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran. Kawasan tanah longsor ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang penurunan muka tanahnya sedang sampai tinggi. Kawasan ini tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan tingkat bahaya sedang. Kawasan ini terdapat di area dan kawasan bekas tambang dan kawasan terkena pemotongan lereng di Pulau Karimun dan Pulau Kundur di Kabupaten Karimun, Pulau Singkep di Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara total luas bahaya tanah longsor sebesar 149.798 hektar. Berikut ini disajikan potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau. Secara rinci potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9

Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	13.397	Tinggi
2	Bintan	3.061	Sedang
3	Natuna	26.919	Tinggi
4	Lingga	49.963	Tinggi
5	Kepulauan Anambas	48.922	Tinggi
6	Batam	7.468	Tinggi
7	Tanjungpinang	68	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		149.798	TINGGI

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Berdasarkan Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020 diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat bahaya gempa bumi dengan luas bahaya mencapai 799,838 hektar. Tabel 2.10 berikut ini disajikan perincian potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.10
Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	88,931	Rendah
2	Bintan	130,314	Rendah
3	Natuna	196,386	Rendah
4	Lingga	214,712	Rendah
5	Kepulauan Anambas	59,014	Rendah
6	Batam	96,025	Rendah
7	Tanjungpinang	14,456	Rendah
Provinsi Kepulauan Riau		799,838	Rendah

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi

Kawasan rawan gelombang pasang berada sekitar pantai rawan terhadap gelombang pasang akibat angin kencang dengan kecepatan tinggi atau gravitasi bulan atau matahari. Kriteria kawasan ini adalah kawasan yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai 100 kilometer per jam yang timbul akibat kecepatan angin atau gravitasi bulan dan matahari. Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan ketentuan kawasan permukiman yang berada di sekitar pantai atau pesisir. Arah kebijakan kawasan rawan gelombang pasang adalah melalui pengamanan pantai dan penanaman *mangrove* untuk meredam dan agar terlindung dari gelombang pasang (rob). Gelombang pasang ini juga mengakibatkan terjadinya abrasi pantai.

Kawasan rawan abrasi meliputi kawasan yang mengalami perubahan bentuk pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut, arus laut dan pasang surut laut terutama yang berada di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar. Pantai-pantai yang rawan terhadap abrasi antara lain:

- a. Pulau Karimun: Pantai Tanjung Balai sepanjang ± 4 km, Pantai Pelawan sepanjang ± 3 km, Pantai Pongkar sepanjang ± 6 km, Pantai Tanjung Sebatok sepanjang ± 4 km dan Pantai Sepedas sepanjang ± 4 km.



- b. Pulau Kundur: Pantai Timur sepanjang ± 5 km, Pantai Selat Beliah sepanjang ± 7 km, Pantai Urung sepanjang ± 3 km dan Pantai Parit Jepang sepanjang ± 3 km.
- c. Pulau Bintan: Pantai Trikora sepanjang ± 10 km, Pantai Tanjung Uban sepanjang ± 5 km, Pantai Sei Kecil - Sakera sepanjang ± 10 km, Pantai Lobam sepanjang ± 4 km, Pantai Senggarang sepanjang ± 4 km, Pantai Penyengat sepanjang ± 8 km, Pantai Barat Tanjungpinang sepanjang ± 8 km, Pantai Pulau Dompak, Pantai Dompok Seberang sampai Tanjung Mochi serta pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang dan Tambelan.
- d. Pulau Singkep: Pantai Kota Dabo sepanjang ± 4 km, Pantai Kote sepanjang ± 3 km, Pantai Jagoh sepanjang ± 2 km dan Pantai Kebun Nyiur sepanjang ± 4 km
Pulau Batam: Pantai Jodoh sepanjang ± 3 Km, Pantai Punggur sepanjang ± 500 m, Pantai Nongsah sepanjang ± 5 Km dan Pantai Melayu sepanjang ± 10 km.
- e. Pulau Ranai: Pantai Kota Ranai sepanjang ± 8 km, Pantai Tanjung sepanjang ± 4 km.

Luas kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 125.040 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan bahaya kategori Sedang, dengan perincian pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	16.310	Sedang
2	Bintan	16.016	Sedang
3	Natuna	16.024	Sedang
4	Lingga	32.359	Sedang
5	Kepulauan Anambas	19.817	Sedang
6	Batam	22.745	Sedang
7	Tanjungpinang	1.769	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		125.040	Sedang

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Prov. Kepri 2016-2020

c. Kawasan Rawan Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan banjir terutama terdapat di kawasan tangkapan air yang daerah resapan airnya sudah mengalami kerusakan lingkungan (berubah fungsi lahan) seperti reklamasi dan wilayah



dengan drainase yang kurang berfungsi secara baik, sehingga sungai tidak mampu lagi menampung jumlah aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Kawasan rawan banjir tersebar di 7 kabupaten/kota dengan luasan mencapai 478.906 hektar. Untuk Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan termasuk kategori tinggi, sedangkan Kabupaten Karimun, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas termasuk kategori sedang. Kabupaten Anambas dan Natuna termasuk kategori ringan. Potensi luas bahaya banjir terlihat pada Tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.12
Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	60.696	Sedang
2	Bintan	95.717	Tinggi
3	Natuna	151.087	Sedang
4	Lingga	103.560	Sedang
5	Kepulauan Anambas	1.162	Sedang
6	Batam	54.975	Tinggi
7	Tanjungpinang	11.709	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		478.906	Tinggi

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Potensi bencana banjir bandang terdapat di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas, dengan luasan mencapai 6.886 hektar, dengan perincian tercantum pada Tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13
Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Natuna	6.327	Tinggi
2	Kepulauan Anambas	559	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		6.886	Tinggi

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

d. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Kawasan rawan angin puting beliung ditetapkan dengan ketentuan kawasan permukiman yang berada di sekitar pantai atau pesisir. Semua kabupaten/kota menjadi kawasan rawan bencana angin puting beliung.

e. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan kategori tinggi dengan luasan mencapai 409.760 hektar, dengan perincian pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	20.051	Tinggi
2	Bintan	51.372	Tinggi
3	Natuna	120.376	Tinggi
4	Lingga	155.443	Tinggi
5	Kepulauan Anambas	39.773	Tinggi
6	Batam	20.789	Tinggi
7	Tanjungpinang	1.956	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		409.760	Tinggi

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

2.1.1.8 Kondisi Demografis

Berdasarkan database kependudukan Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada pertengahan tahun 2017 sebanyak 2.082.694 jiwa, dengan perincian seperti terlihat pada Tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Kabupaten Bintan	156.313
2.	Kabupaten Karimun	229.194
3.	Kabupaten Natuna	76.192
4.	Kabupaten Lingga	89.330
5.	Kab. Kep. Anambas	41.412
6.	Kota Tanjungpinang	207.057
7.	Kota Batam	1.283.196
Provinsi Kepulauan Riau		2.082.694

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka (Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, 2018)

Berdasarkan data BPS pertengahan tahun 2017, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2.082.694 jiwa, Penyebaran penduduk di Provinsi



Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni sebesar 1.283.196 jiwa, sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 41.412 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2017 (Data BPS)

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Karimun	220.882	223.117	225.298	227.277	229.194
2	Bintan	149.120	151.123	153.020	154.584	156.313
3	Natuna	72.527	73.470	74.520	75.282	76.192
4	Lingga	87.867	88.274	88.591	88.971	89.330
5	Kepulauan Anambas	39.374	39.892	40.414	40.921	41.412
6	Kota Batam	1.094.623	1.141.816	1.188.985	1.236.399	1.283.196
7	Kota Tanjungpinang	196.980	199.723	202.215	204.735	207.057
	Provinsi Kepulauan Riau	1.861.373	1.917.415	1.973.043	2.028.169	2.082.694

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka (BPS, 2018)

Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data BPS tergolong tinggi, dengan rata-rata dari 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 2,90%, terutama dikontribusikan dari pertumbuhan penduduk Kota Batam yang mencapai rata-rata sebesar 4,14%. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota Batam lebih disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Batam yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain. Pertumbuhan penduduk terkecil berada di Kabupaten Lingga dengan rata-rata sebesar 0,42%. Secara rinci pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota tercantum pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Karimun	1,10	1,01	0,98	0,88	0,84	0,96
2	Bintan	1,30	1,34	1,26	1,02	1,12	1,21
3	Natuna	1,50	1,30	1,43	1,02	1,21	1,29
4	Lingga	0,44	0,46	0,36	0,43	0,40	0,42



No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
5	Kepulauan Anambas	1,39	1,32	1,31	1,25	1,20	1,29
6	Kota Batam	4,50	4,31	4,13	3,99	3,78	4,14
7	Kota Tanjungpinang	1,48	1,39	1,25	1,25	1,13	1,30
	Provinsi Kepulauan Riau	3,12	3,01	2,90	2,79	2,69	2,90

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau Tahun 2018

Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 sebesar 197 jiwa/km² naik dibandingkan tahun 2016 sebesar 191 jiwa/km². Meningkatnya kepada penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 terlihat dari peningkatan kepadatan penduduk Kota Batam dan Kota Tanjungpinang yang cepat, yaitu Kota Batam dari 787 jiwa/km² menjadi 817 jiwa/km² (3,81%) dan Kota Tanjungpinang dari 855 jiwa/km² menjadi 865 jiwa/km² (1,17%). Dilihat dari persebarannya pada tahun 2017, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Tanjungpinang sebesar 865 jiwa/km² selanjutnya Kota Batam sebesar 817 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Natuna dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 27 jiwa/Km². Secara rinci kepadatan penduduk per kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017 (Jiwa/km²)

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Karimun	145	146	148	149	251,10
2	Bintan	86	87	88	89	118,58
3	Natuna	26	26	26	27	37,92
4	Lingga	41	42	42	42	39,41
5	Kepulauan Anambas	67	68	68	69	70,17
6	Batam	697	727	755	787	1.336,31
7	Tanjungpinang	822	834	843	855	1.432,33
	Provinsi Kepulauan Riau	176	181	186	191	253,93

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau Tahun 2018, diolah



2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Evaluasi pencapaian aspek Kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari beberapa indikator, meliputi: Pertumbuhan Ekonomi; Laju inflasi; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Persentase Penduduk Miskin; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Indikator Gini; Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Nilai Keterbukaan informasi publik; dan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri.

Pertumbuhan ekonomi terlihat pada tahun 2018 telah mencapai target RPJMD dengan persentase capaian target sebesar 228,00%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 4,56% meningkat dari tahun 2017 sebesar 2,01%. Laju Inflasi tahun 2018 sebesar 3,47%, juga telah mencapai target tahun 2018 dengan persentase capaian target sebesar 122,89%. Persentase penduduk miskin tahun 2018 sebesar 5,83% telah mencapai target RPJMD dengan persentase capaian target sebesar 103,95%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017 sebesar 74,55 telah mencapai target RPJMD dengan persentase capaian target sebesar 100,11%. Indikator Gini tahun 2018 sebesar 0,339 telah mencapai target RPJMD dengan persentase capaian target sebesar 105,83%. Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik tahun 2018 sebesar 76,81 telah mencapai target RPJMD dengan persentase capaian target sebesar 122,88%. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 mencapai WTP, telah mencapai target RPJMD dengan persentase capaian target sebesar 100%.

Tiga indikator yang kinerjanya belum mencapai target yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Nilai Keterbukaan informasi publik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 terealisasi sebesar 7,12% dari target sebesar 7,02%, dengan persentase capaian target sebesar 98,58%. Nilai Keterbukaan informasi publik pada tahun 2018 sebesar 53,87 dari target sebesar 63,5, dengan persentase capaian target sebesar 84,83%. Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri realisasi sebesar 64,18 dari target sebesar 67, dengan persentase capaian target sebesar 95,79%.

Tabel 2.19
Evaluasi Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2018

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018		
					Target	Realisasi	% Capaian Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	2,01	3+1	4,56	228,00
2.	Laju inflasi	%	3,53	4,32	3,50±1	3,47	122,89
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,69	7,16	7,02	7,12	98,58
4.	Persentase Penduduk Miskin	%	5,84	6,13	6,07	5,83	103,95
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	73,99	74,23	74,47	74,55*	100,11
6.	Indikator Gini	Indeks	0,35	0,359	0,35±0,01	0,339	105,83
7.	Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik	Skor	NA	76,09	62,51	76,81	122,88
8.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00
9.	Nilai Keterbukaan informasi publik	Skor	59,5	13,03	63,5	53,87	84,83
10.	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Skor	60	64,18	67	64,18	95,79

Keterangan: *) Data Tahun 2017, untuk data tahun 2018 belum dirilis BPS

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan tahun dasar tahun 2010.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan kondisi yang positif, yaitu terus mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar Rp 163.261,57 miliar dan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 229.743,12 miliar. Saat ini pada Triwulan III tahun

2018 (y-on-y) PDRB Provinsi Kepulauan Riau masih menunjukkan nilai Rp 65.185,72 miliar. Perkembangan PDRB atas harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2013-2017 (Milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.816,52	6.449,93	7.076,95	7.678,38	7.942,44
2.	Pertambangan dan Penggalian	26.035,58	28.435,90	31.400,49	33.098,37	33.000,79
3.	Industri Pengolahan	63.641,75	69.122,84	74.966,24	80.842,35	84.434,95
4.	Pengadaan Listrik, Gas	1.918,47	2.052,65	2.218,91	2.468,48	2.689,98
5.	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	198,35	211,31	233,26	252,52	284,13
6.	Konstruksi	29.380,04	33.227,47	36.456,42	38.848,43	41.409,19
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.048,14	13.197,86	15.424,15	18.066,68	20.233,11
8.	Transportasi dan Pergudangan	4.609,38	5.374,60	6.260,55	7.070,85	7.771,38
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	3.086,31	3.481,01	3.951,43	4.358,14	5.061,47
10.	Informasi dan Komunikasi	2.870,45	3.255,46	3.603,55	3.969,12	4.575,79
11.	Jasa Keuangan	4.366,64	4.839,37	5.280,74	5.792,54	6.271,00
12.	Real Estate	2.367,49	2.639,90	2.863,61	3.171,44	3.518,74
13.	Jasa Perusahaan	7,84	8,32	9,15	10,10	11,67
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.722,47	4.038,04	4.627,75	5.158,22	5.990,48
15.	Jasa Pendidikan	2.117,87	2.286,14	2.569,03	2.931,37	3.428,41
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.390,85	1.518,62	1.737,40	1.882,15	2.119,22
17.	Jasa Lainnya	683,43	740,56	858,96	980,77	1.075,07
	Produk Domestik Regional Bruto	163.261,57	180.879,98	199.538,59	216.579,90	229.801,14

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka (BPS, 2018)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan kondisi yang



positif, yaitu terus mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar Rp 146.356 miliar dan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 166.191 miliar. Kemudian pada Triwulan III tahun 2018 (y-on-y) masih sebesar Rp 43.675 miliar. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010
Tahun 2013-2017 (Milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.000,01	5.378,15	5.689,22	5.977,99	5.899,68
2.	Pertambangan dan Penggalian	22.111,06	23.270,78	25.417,33	26.933,15	25.718,20
3.	Industri Pengolahan	53.173,70	56.338,04	59.498,19	61.497,86	62.458,86
4.	Pengadaan Listrik, Gas	1.209,17	1.326,22	1.400,52	1.523,11	1.621,70
5.	Pengadaan Air	184,03	187,76	193,11	203,26	223,77
6.	Konstruksi	23.802,36	25.954,83	26.871,95	28.073,93	29.042,76
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.955,71	10.803,00	11.738,60	12.858,55	13.665,03
8.	Transportasi dan Pergudangan	3.717,76	3.939,82	4.161,12	4.448,87	4.681,70
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	2.665,83	2.842,91	3.002,93	3.159,14	3.536,02
10.	Informasi dan Komunikasi	2.874,48	3.076,75	3.230,70	3.469,62	3.736,38
11.	Jasa Keuangan	3.750,61	3.967,87	4.087,05	4.323,70	4.474,48
12.	Real Estate	2.110,29	2.245,19	2.340,43	2.443,35	2.536,59
13.	Jasa Perusahaan	7,44	7,59	7,80	8,28	8,88
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.028,83	3.150,36	3.386,49	3.619,47	3.788,41
15.	Jasa Pendidikan	1.827,20	1.905,30	2.022,48	2.201,37	2.428,19
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.250,99	1.311,57	1.405,32	1.467,87	1.618,90
17.	Jasa Lainnya	594,37	619,10	659,67	712,98	758,86
	Produk Domestik Regional Bruto	137.263,85	146.325,23	155.112,88	162.922,50	166.198,42

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka (BPS, 2018)



Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2013-2017 didominasi oleh tiga sektor perekonomian utama yaitu: (1) sektor industri pengolahan; (2) sektor konstruksi dan (3) sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor industri pengolahan fluktuatif pada kisaran antara 37,33% - 39,02%. Kontribusi sektor konstruksi juga fluktuatif pada kisaran antara 17,03%-18,21%. Sementara itu kontribusi sektor pertambangan dan penggalian menurun dari sebesar 15,96% pada tahun 2013 menjadi 14,36 % pada tahun 2017, seperti terlihat pada Tabel 2.22.

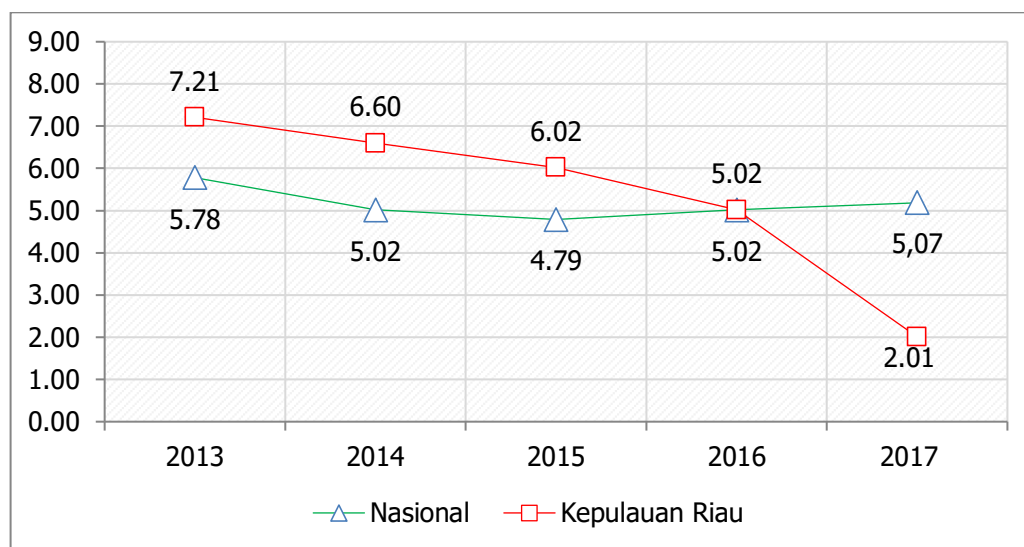
Tabel 2.22
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun 2013-2017 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,57	3,40	3,57	3,55	3,46
2.	Pertambangan dan Penggalian	15,96	15,26	14,27	15,28	14,46
3.	Industri Pengolahan	39,02	38,70	38,63	37,33	36,75
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin dan Produksi Es	1,17	1,05	1,09	1,14	1,17
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12
6.	Konstruksi	18,11	18,21	17,03	17,94	18,02
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,64	7,02	8,03	8,34	8,81
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,80	3,37	3,22	3,26	3,27
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,89	2,32	2,16	2,01	2,20
10.	Informasi dan Komunikasi	1,76	1,71	1,87	1,83	1,99
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,67	2,65	2,60	2,67	2,73
12.	Real Estate	1,45	1,44	1,48	1,46	1,53
13.	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0	0,01
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	2,28	2,27	2,45	2,38	2,61
15.	Jasa Pendidikan	1,30	1,25	1,26	1,35	1,49
16.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	0,85	0,83	0,85	0,87	0,92
17.	Jasa Lainnya	0,42	0,41	0,45	0,45	0,47
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka (BPS, 2018)

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan

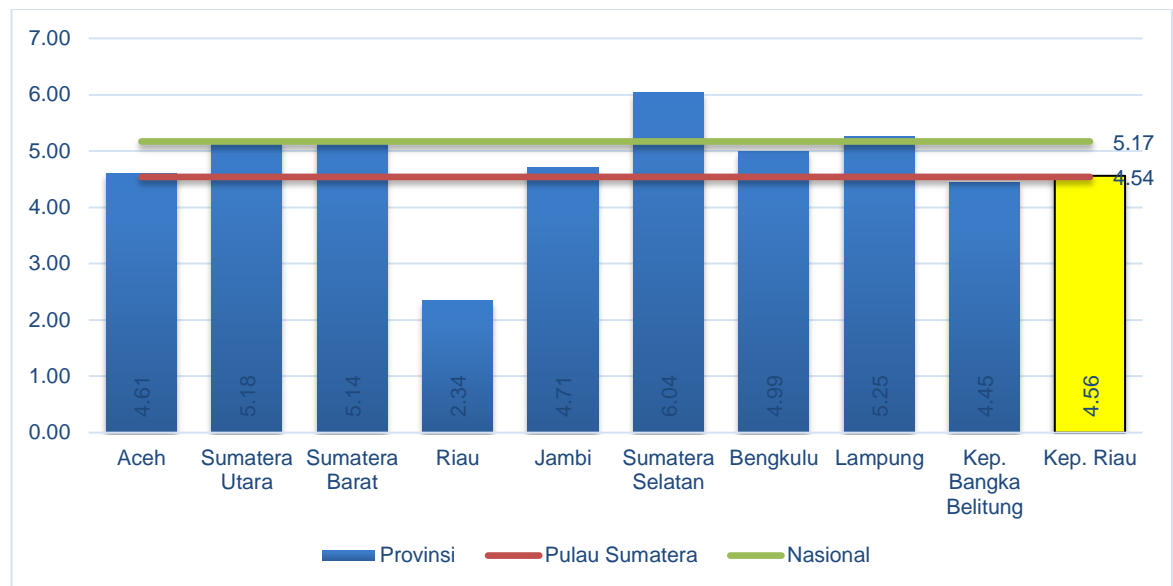
pembangunan. Dalam kurun waktu tahun 2013-2017, trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,21% terus menurun menjadi 2,01% pada tahun 2017. pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional. Secara lengkap perbandingan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber: BPS Kepri, 2018 (Berita resmi statistik "Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan IV 2017")

Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2013-2017

Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 sebesar 3,56 berada di atas rata-rata Pulau Sumatera sebesar 4,54% dan di bawah capaian Nasional sebesar 5,17%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2018, Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi terendah ketiga setelah Provinsi Riau (2,34%) dan Kepulauan Bangka Belitung (4,45%). Perbandingan pertumbuhan ekonomi diantara provinsi di wilayah Sumatera, terlihat pada Gambar 2.3.

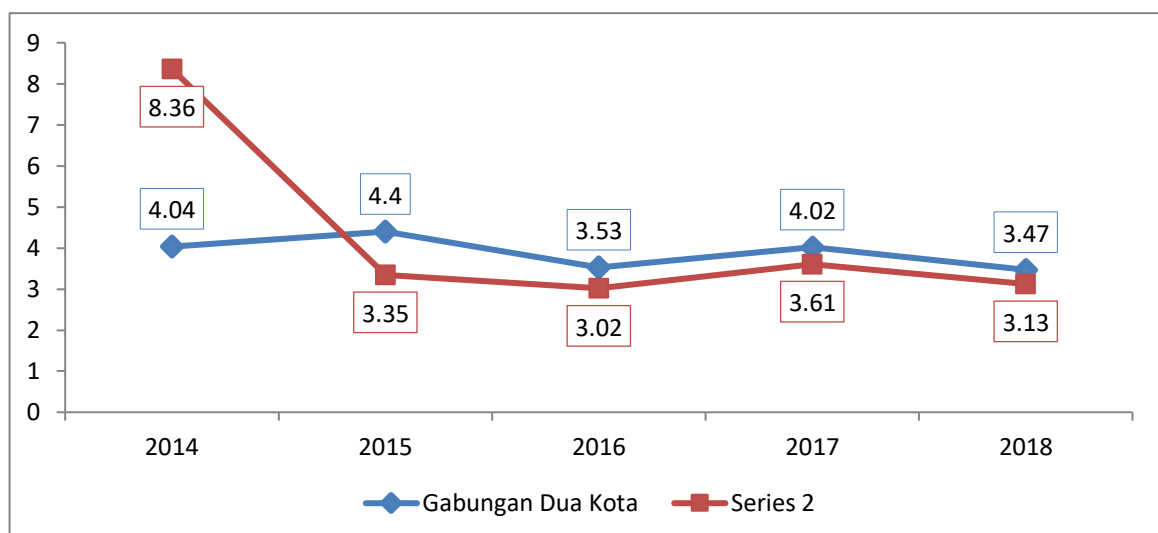


Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik "Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau, 2019"

Gambar 2.3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2018 (%)

2. Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan kegiatan industri. Laju inflasi gabungan dua kota di provinsi kepulauan kepri di pada tahun 2018 sebesar 3,47%, lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional sebesar 3,13% .Perkembangan laju inflasi gabungn dua kota dapat dilihat pada Gambar 2.4.



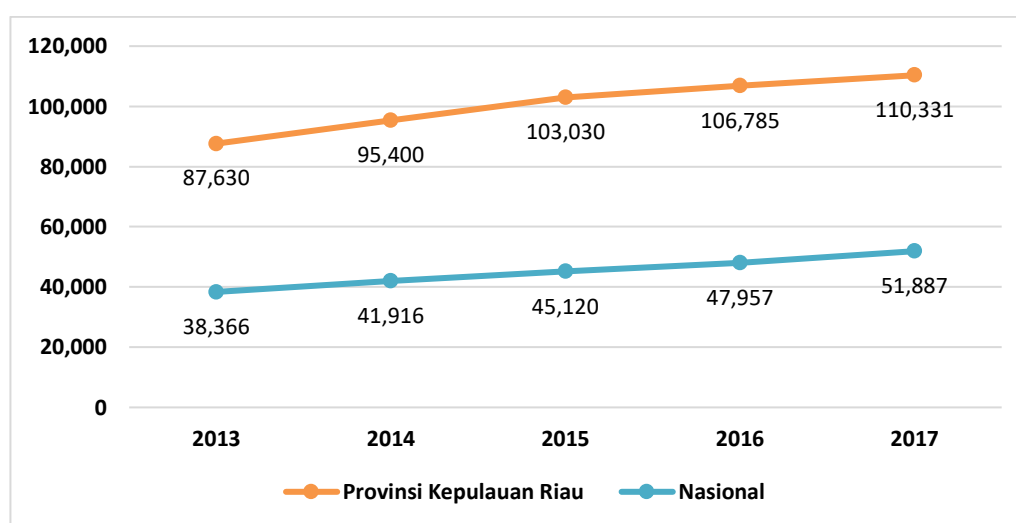
Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Kepulauan Kepri, 2019

Gambar 2.4 Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Riau (Gabungan 2 Kota) dengan Nasional Tahun 2014-2018 (%)

Capaian inflasi Provinsi Kepri yang lebih tinggi dibandingkan nasional terutama komoditas volatile food menjadi penyumbang inflasi terbesar. Oleh karena itu, koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu terus diperkuat. Sejalan dengan hal ini, untuk menciptakan sinergi pengendalian inflasi di wilayah Kepri, kami mendorong setiap kabupaten kota untuk menyusun peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi dengan merujuk pada Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Kepri.

3. PDRB per Kapita

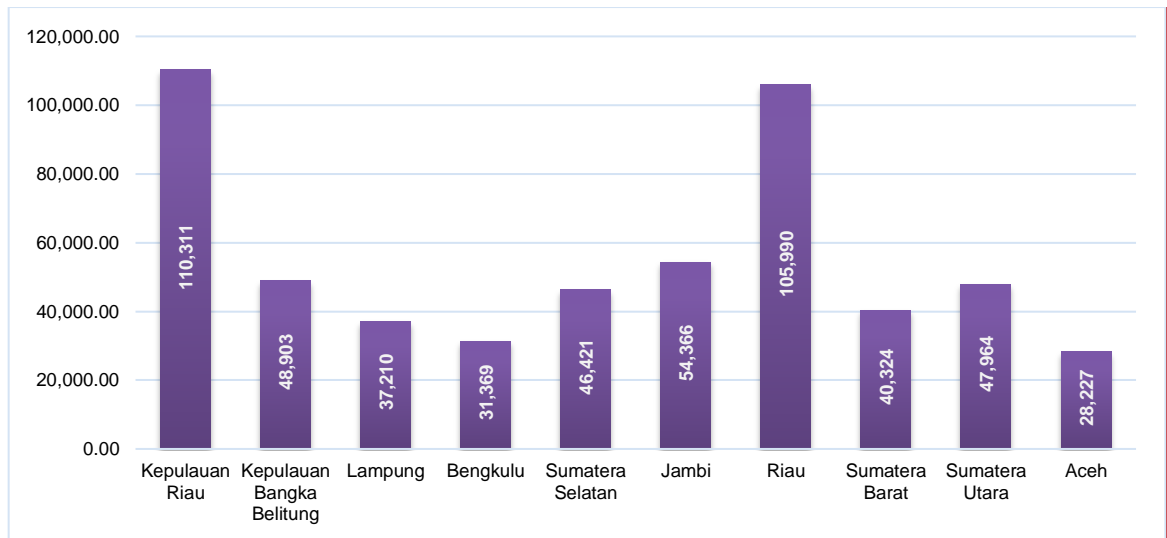
PDRB per kapita secara relatif menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp 110.331 ribu. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 87.630 ribu. Perkembangan PDRB per kapita terlihat pada Tabel 2.23.



Sumber: BPS Tahun 2018

Gambar 2.5 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)

Posisi relatif PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 sebesar Rp 110.311 ribu merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera, diikuti Provinsi Riau pada urutan kedua sebesar Rp. 105.990 ribu. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.6.

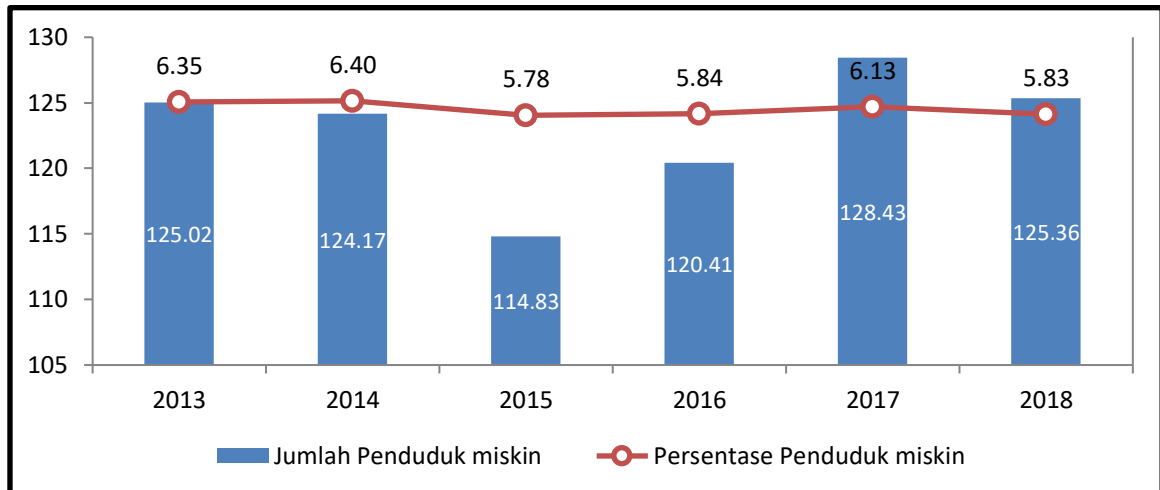


Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2018

Gambar 2.6 Perbandingan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2017 (ribu rupiah)

4. Persentase Penduduk Miskin

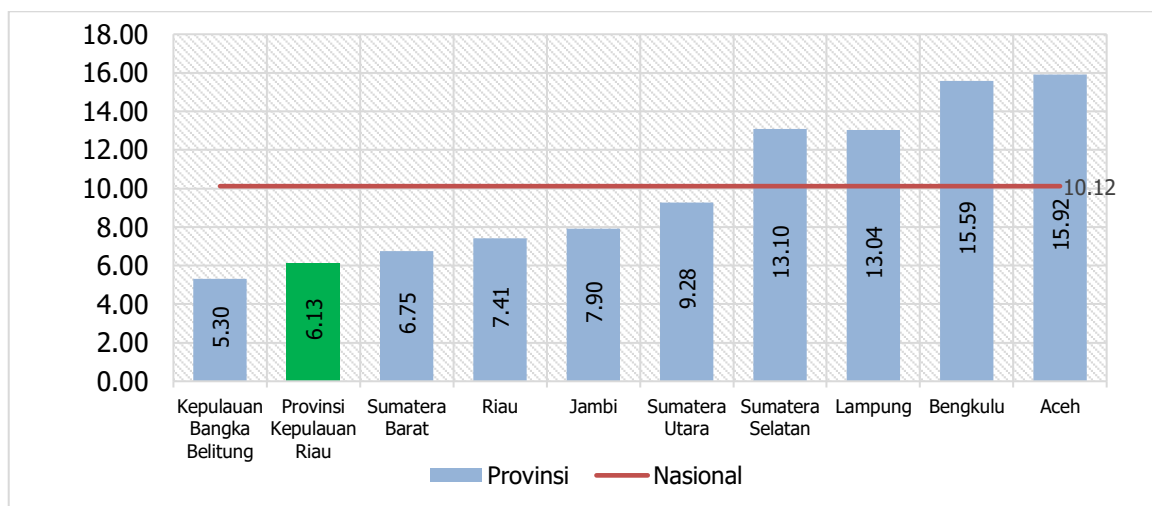
Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dalam lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan kecenderungan semakin menurun, yaitu dari sebesar 6,35% pada tahun 2013 menjadi 5,83% pada tahun 2018. Namun dilihat dari kondisi tiga tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat, yaitu tahun 2016 sebesar 5,84%, tahun 2017 naik menjadi 6,13% dan tahun 2018 kembali naik menjadi 5,83%. Selain itu secara absolut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu tahun 2016 sebanyak 120,41 ribu jiwa dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 128,43 ribu jiwa, kemudian turun menjadi 125,36 ribu jiwa pada tahun 2018. Secara rinci perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Sumber : BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, 2019

Gambar 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2018 (September)

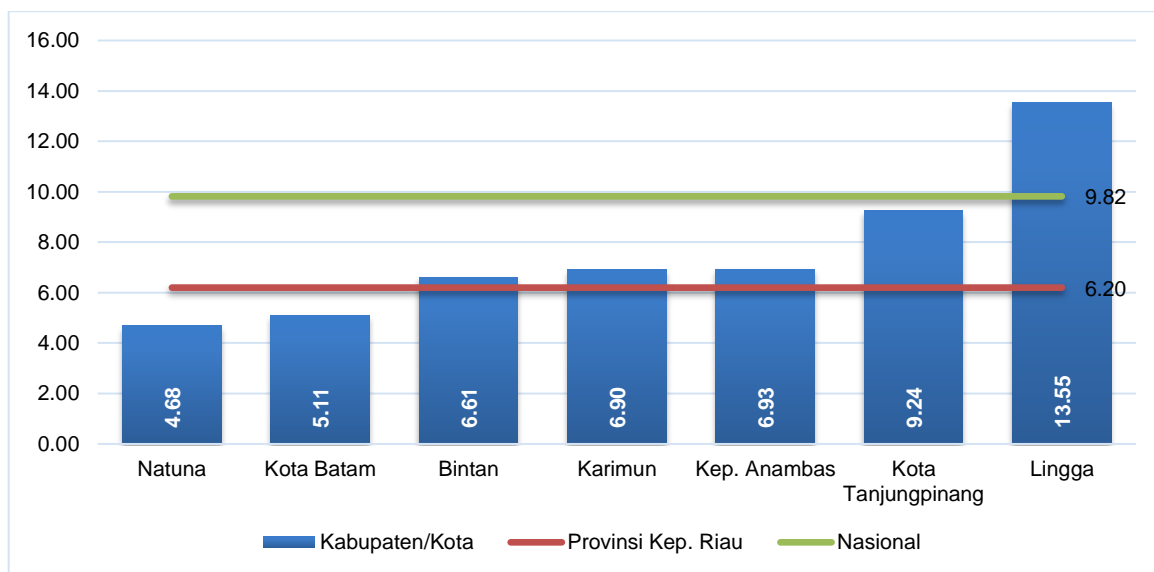
Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 sebesar 6,13% berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional sebesar 10,12%. Jika dilihat berdasarkan provinsi di wilayah Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi terendah kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (5,30%). Posisi relatif tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dikemukakan pada Gambar 2.8.



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Kepulauan Riau, 2018

Gambar 2.8 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera dan Nasional Tahun 2017 (September)

Penyebaran kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada periode Maret tahun 2018, diketahui Kabupaten Lingga sebesar 13,55% menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se provinsi Kepulauan Riau dan berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,20%, serta di atas Nasional sebesar 9,82%. Sementara itu tingkat kemiskinan terendah berada di Kabupaten Natuna sebesar 4,68% dan berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,20%, serta di bawah Nasional sebesar 9,82%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Gambar 2.9 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 (Maret)

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, di Provinsi Kepulauan Riau terdapat sebanyak 396.889 jiwa (20,12%) penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah. Jumlah terbanyak di Kota Batam, dan paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah
1	Kabupaten Bintan	36.288
2	Kabupaten Karimun	55.123
3	Kabupaten Natuna	15.872
4	Kota Batam	211.670
5	Kota Tanjungpinang	40.710

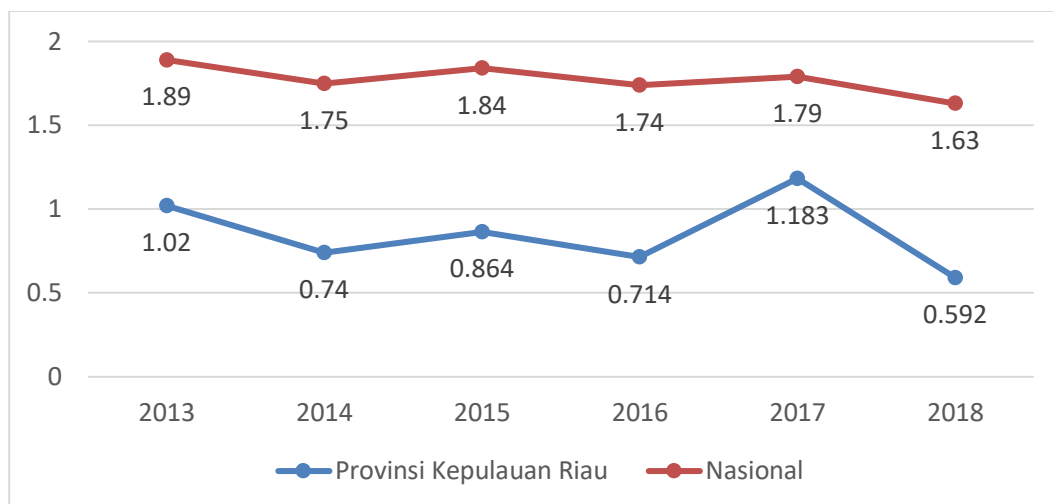


No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah
6	Kabupaten Lingga	28.570
7	Kabupaten Kep. Anambas	8.656
Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah		396.889
Jumlah Penduduk Kepri		1.973.043
Persentase (%) Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah		20,12

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 (diolah)

Perlunya di tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memfasilitasi program-program penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota lebih diarahkan pada pembangunan perdesaan, wilayah tertinggal dan pulau-pulau kecil, mengembangkan sarana dan prasarana dasar (jalan, jembatan, air bersih, pelabuhan desa) untuk mempermudah angkutan dan distribusi barang dan jasa dari kabupaten/kota ke pusat-pusat aktivitas perekonomian daerah. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat perdesaan/pesisir, maka perlu tindak lanjut pemberdayaan perempuan, penganggur di perdesaan/pesisir, pengembangan usaha mikro dan kecil termasuk usaha non formal dan mengembangkan akses permodalan masyarakat berbasis pada potensi unggulan lokal.

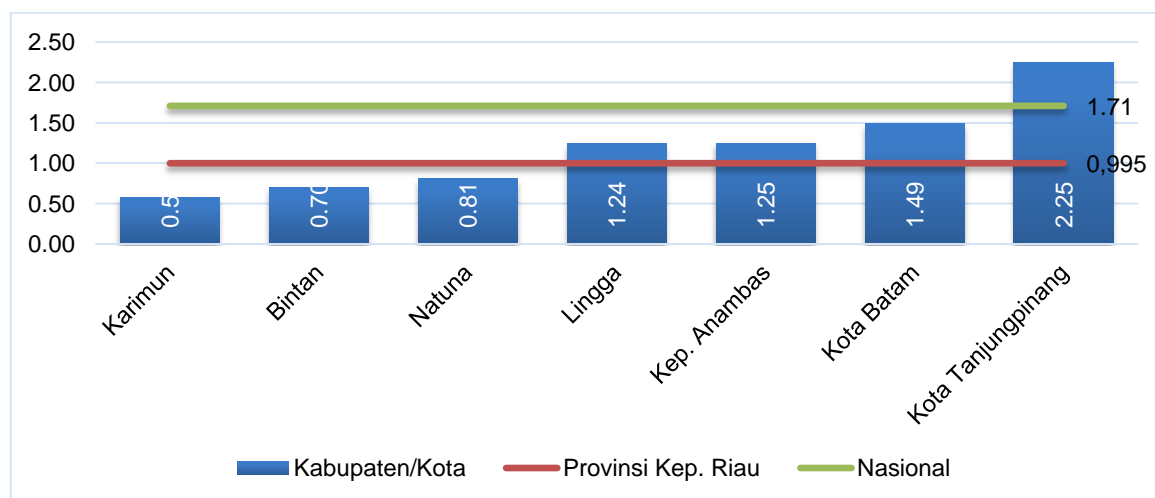
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*). Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang sangat tinggi,. P1 Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dari 1,02 pada tahun 2013 menjadi 0,592 pada tahun 2018 . Dengan menurunnya P1 di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan setiap tahunnya semakin menurun. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

Gambar 2.10 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017 (September)

Penyebaran indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada periode Maret tahun 2018, diketahui Kota Tanjungpinang sebesar 2,25 menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se provinsi Kepulauan Riau dan berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,995, serta di atas Nasional sebesar 1,71. Sementara itu indeks kedalaman kemiskinan terendah berada di Kabupaten Karimun sebesar 0,58 dan berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,995, serta di bawah Nasional sebesar 1,71. Perbandingan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.11.

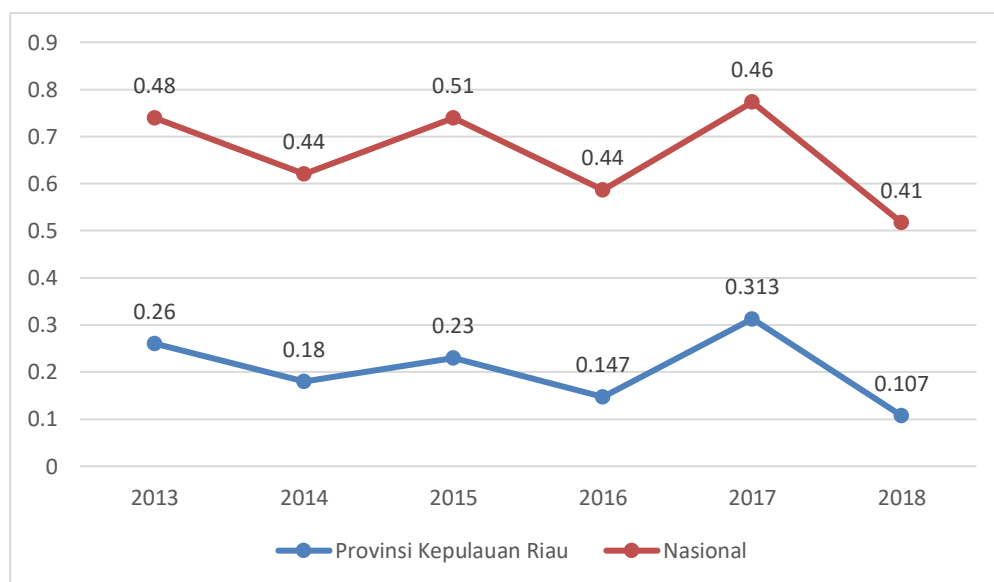


Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik masing masing provinsi

Gambar 2.11 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 (Maret)

Untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin itu sendiri diukur dengan menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P2*), yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama kurun waktu 2013-2018 indeks keparahan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau cenderung meningkat dari sebesar 0,26 pada tahun 2013 menjadi 0,107 pada tahun 2017, yang menunjukkan ada pergeseran penurunan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri. Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif rendah.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 2.12.

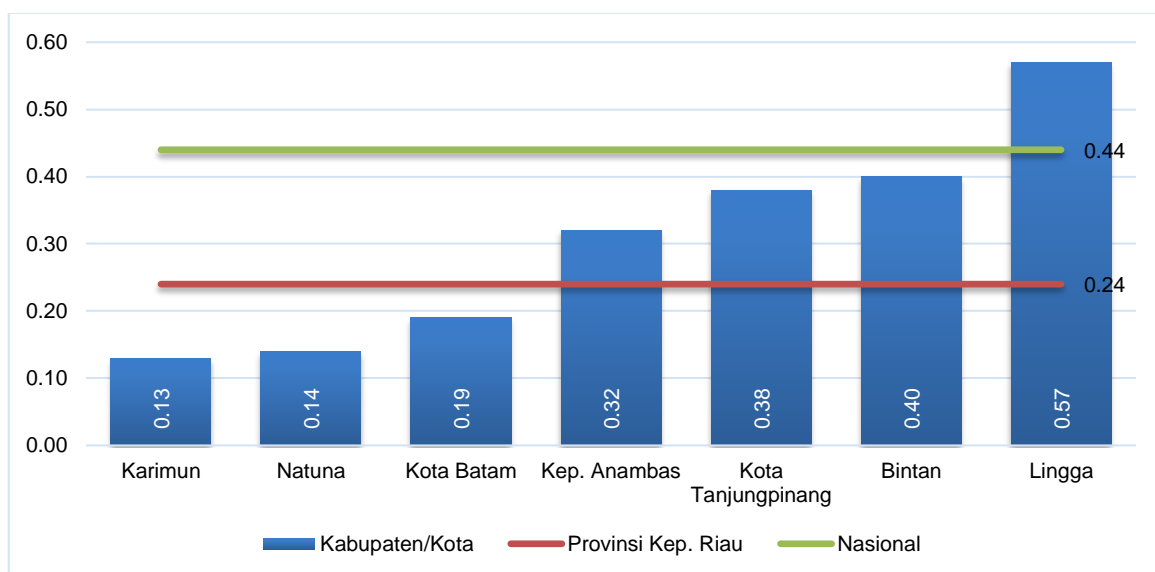


Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik masing masing provinsi

Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2013 – 2018 (Maret)

Penyebaran indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada periode Maret tahun 2018, diketahui Kabupaten Lingga sebesar 0,57 menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se provinsi Kepulauan Riau dan berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,24, serta di atas Nasional sebesar 0,44. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan terendah berada di Kabupaten Karimun sebesar 0,13, dan berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,24, serta di bawah Nasional sebesar 0,44. Penyebaran indeks keparahan kemiskinan

Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.13 berikut.

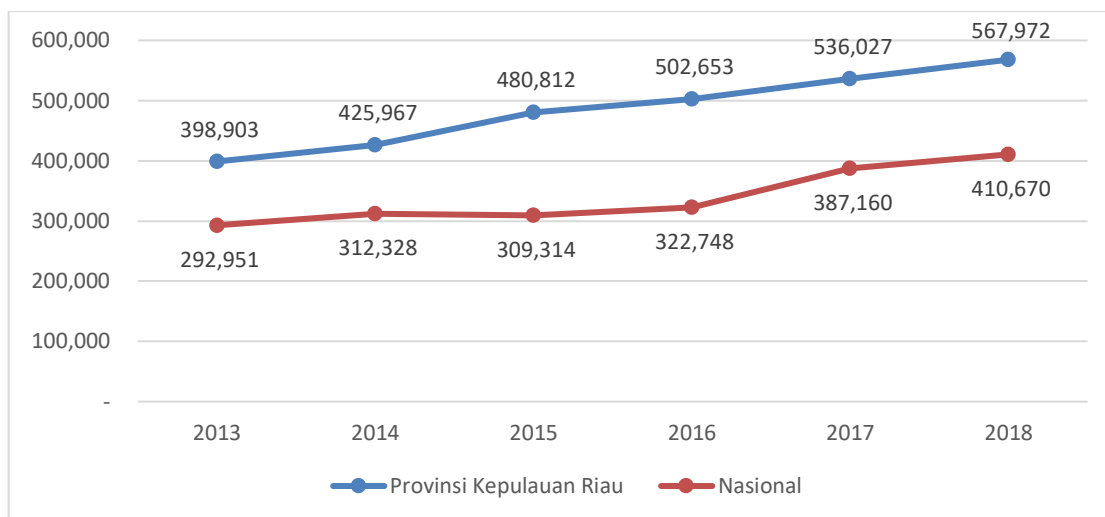


Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik masing masing provinsi

Gambar 2.13 Perbandingan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 (Maret)

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan garis kemiskinan yaitu nilai rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum pangan dan non-pangan esensial. Garis Kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya.

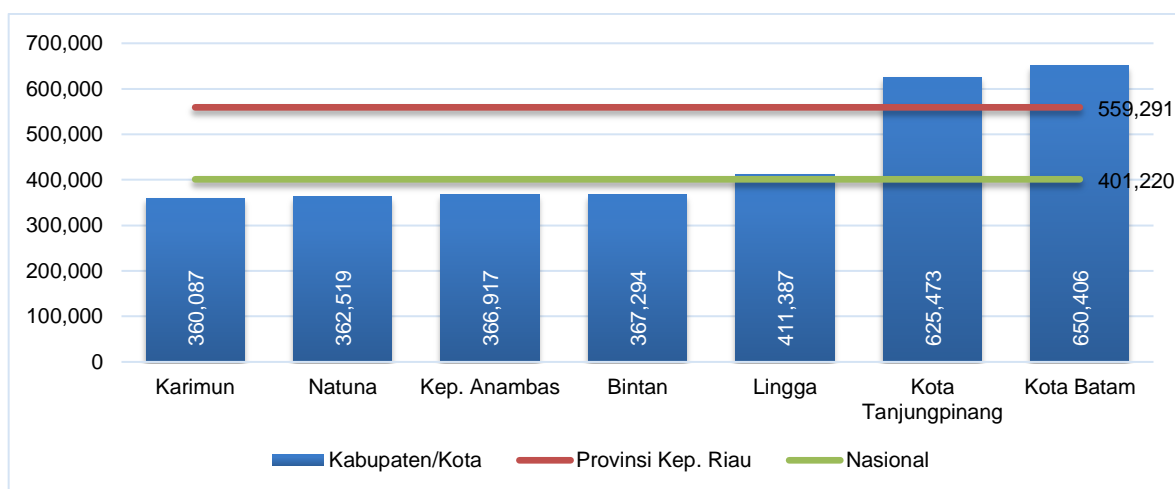
Tren garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan. Tahun 2013 garis kemiskinan sebesar Rp 398.903,-/kapita/bulan meningkat menjadi sebesar Rp 567.972,-/kapita/bulan pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Nasional sebesar Rp 410,670-/kapita/bulan maka garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih tinggi. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.12.



Sumber : BPS, Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, September 2018

Gambar 2.14 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2013–2018 (September) (Rupiah)

Penyebaran garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada periode Maret tahun 2018, diketahui Kota Batam sebesar Rp 650.406,-/kapita/bulan menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se provinsi Kepulauan Riau dan berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 559.291,-/kapita/bulan, serta di atas Nasional sebesar Rp 301.220,-/kapita/bulan. Sementara itu garis kemiskinan terendah berada di Kabupaten Karimun sebesar Rp 360.087,-/kapita/bulan, dan berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 559.291,-/kapita/bulan, serta di bawah Nasional sebesar Rp 301.220,-/kapita/bulan. Penyebaran garis kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

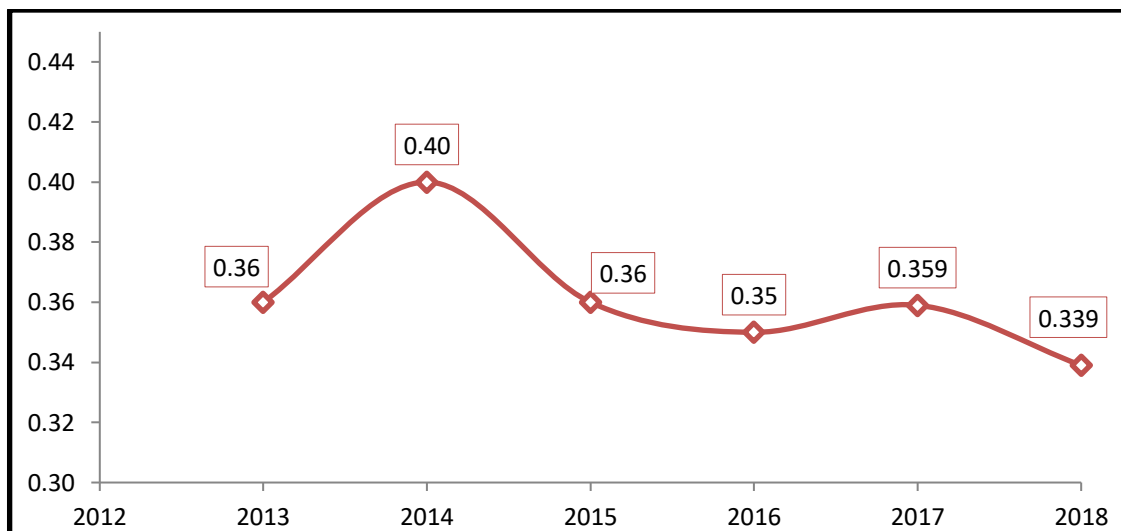


Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Nasional, 2018

Gambar 2.15 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 (Maret)

5. Indeks Gini

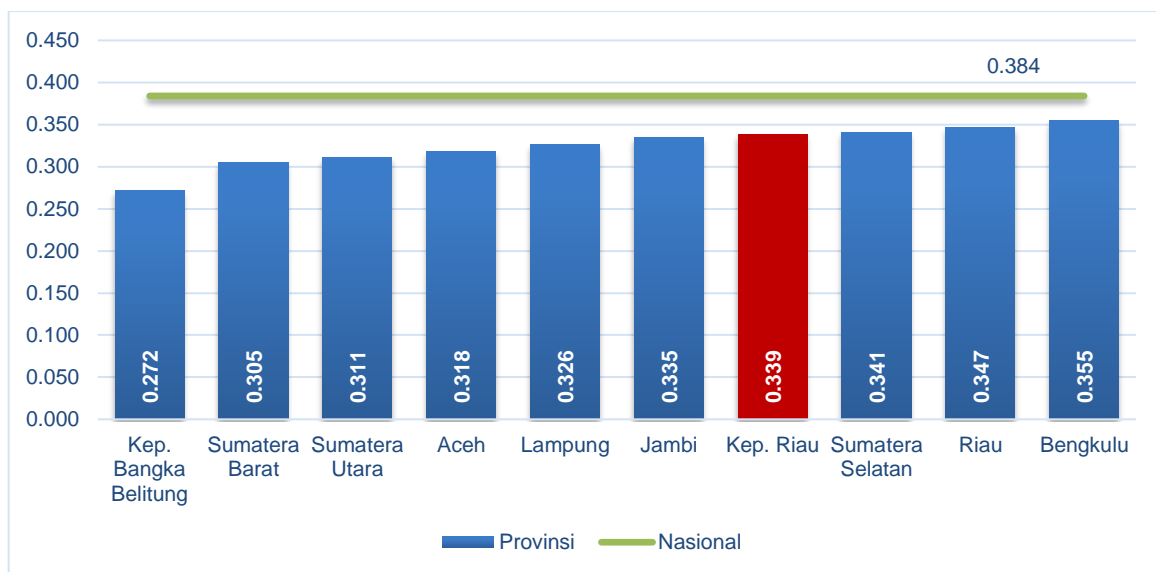
Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “rendah” bila indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “sedang” bila indeks Gini antara $> 0,3 - 0,4$; dan Ketimpangan “tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4. Nilai indeks gini Provinsi Kepulauan Riau antara tahun 2013–2015 stabil dari sebesar 0,36 menurun menjadi sebesar 0,339 pada tahun 2018 (Bulan September). Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.16.



Sumber : BPS, Berita Resmi statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2019

Gambar 2.16 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2018

Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2018, indeks ini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,339 menempati posisi ke-4 tertinggi, setelah Provinsi Bengkulu (0,355), Riau (0,347) dan Sumatera Selatan (0,341). Secara rinci perbandingan indeks gini provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Sumber : BPS, Berita resmi statistik nasional, 2018

Gambar 2.17 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2018

2.1.3 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan metode baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 72,36 pada tahun 2012 menjadi 74,84 pada tahun 2018. Selama periode tersebut, IPM Kepulauan Riau rata-rata tumbuh sebesar 0,57 persen per tahun. Pada periode 2017-2018, IPM Kepulauan Riau tumbuh 0,52 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut sedikit melambat bila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2016-2017 yang tumbuh sebesar 0,62 persen. Selama periode 2012 hingga 2018 IPM Kepulauan Riau menunjukkan kemajuan yang besar dan pembangunan manusia Kepulauan Riau masih berstatus “tinggi”.



IPM Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat ke-4 di Indonesia, dengan capaian lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera dan nasional. Perbandingan IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut ini.

Tabel 2.24
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera Tahun 2013-2018

No	Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Aceh	68,30	68,81	69,95	70,00	70,60	71,19
2.	Sumatera Utara	68,36	68,87	69,51	70,00	70,57	71,18
3.	Sumatera Barat	68,91	69,36	69,98	70,73	71,24	71,73
4.	Riau	69,91	70,33	70,84	71,20	71,79	72,44
5.	Jambi	67,76	68,24	68,89	69,62	69,99	70,65
6.	Sumatera Selatan	66,16	66,75	67,46	68,24	68,86	69,39
7.	Bengkulu	67,50	68,06	68,59	69,33	69,95	70,64
8.	Lampung	65,73	66,42	66,95	67,65	68,25	69,02
9.	Kep. Bangka Belitung	67,92	68,27	69,05	69,55	69,99	70,67
10.	Kepulauan Riau	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84
	Indonesia	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39

Sumber : BPS Pusat Jakarta Tahun 2018

Kemajuan pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau bervariasi. Variasi tersebut tentunya disebabkan oleh faktor sumber daya (alam dan manusia) dan kebijakan pemerintah daerah yang berbeda. Capaian pembangunan manusia tercermin dari besarnya angka IPM perlu terus ditingkatkan dan diawasi agar pembangunan manusia dapat terlaksana dengan baik dan merata. Kota Batam sebesar 80,26, menempati peringkat pertama se-Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Kabupaten Lingga menempati peringkat terbawah (sebesar 63,45). Peringkat kedua sampai peringkat keenam berturut-turut diduduki oleh Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas. Perbandingan capaian IPM ketujuh kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Perkembangan Unsur Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	PPP (ribu rupiah)	IPM
1	Karimun	70,52	12,16	7,81	11.945	70,56
2	Bintan	70,21	12,75	8,35	14.256	73,41
3	Natuna	64,57	13,88	8,71	14.217	72,10
4	Lingga	61,44	12,43	6,27	11.499	64,06
5	Kepulauan Anambas	66,91	12,32	6,70	11.894	67,53
6	Kota Batam	73,24	12,95	11,12	17.560	80,54
7	Kota Tanjungpinang	71,93	14,08	9,98	15.292	78,33
	Kepulauan Riau	69,64	12,82	9,81	13.976	74,84

Sumber: Berita Resmi Statistik (BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018)

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 sebesar 9,81 tahun. Dengan kondisi tersebut, rata-rata lama sekolah telah mampu memenuhi wajib belajar 9 tahun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Angka tertinggi dicapai Kota Batam sebesar 11,10 tahun (setara dengan kelas 11 SLTA) dan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 6,27 tahun (setara dengan lulus SD/ sederajat).

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka



Harapan Lama Sekolah pada tahun 2018 sebesar 12,82 tahun, dengan angka tertinggi dicapai Kota Tanjungpinang sebesar 14,08 tahun, dan terendah di Kabupaten Karimun sebesar 12,16 tahun.

4. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. AHH Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sebesar 69,64 tahun, dengan kategori capaian tergolong tinggi. Sedangkan kabupaten/kota diketahui angka tertinggi dicapai Kota Batam sebesar 73,24 tahun dan terendah di Kabupaten Lingga 61,44 tahun.

5. Pengeluaran Riil Perkapita (Daya Beli)

Pengeluaran riil perkapita menunjukkan daya beli, yaitu kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pengeluaran riil perkapita Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sebesar 13.976 ribu rupiah, dengan angka tertinggi dicapai Kota Batam sebesar 17.560 ribu rupiah, dan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 11.499 ribu rupiah.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum (Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2018 dan Pencapaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2018)

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pelayanan pendidikan yang berkualitas akan memiliki kontribusi yang tinggi dalam perwujudan sumberdaya manusia yang berulalitas. Pelaksanaan urusan pendidikan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Pengelolaan pendidikan menengah; Pengelolaan pendidikan khusus; Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus; Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi; Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.



Kinerja penyelenggaraan pendidikan dilihat dari sisi ketersediaan pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK sudah baik, antara lain terlihat dari capaian Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 92,12%, Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 77,30%, Angka Putus Sekolah sebesar 0,42%. Sementara itu capaian Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMA/MA/SMK/MAK telah mencapai target tahun 2018, karena baru mencapai sebesar 94% dari target 86%. Pada jenjang SLB, Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) telah mencapai sebesar 72,00% telah mencapai target tahun 2018. Sementara itu capaian Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik baru mencapai 94,00% dari target sebesar 86,00%, tentunya perlu menjadi perhatian dalam perencanaan tahun mendatang.

Dilihat dari sisi mutu pendidikan, Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4 pada tahun 2018 mencapai 95,99% telah melampaui target. Begitu juga dengan indikator Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi dengan capaian sebesar 43,00%, dan Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha sebesar 50,00%. Indikator Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B belum mencapai target dengan capaian sebesar 74,00% dari target sebesar 78,00%. Begitu juga dengan Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SMK/MAK baru mencapai 50,59% dari target sebesar 54,20%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pendidikan ditunjukkan melalui 14 Indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke 14 indikator yang telah rilis data tahun 2018, terdapat sebanyak 11 indikator telah mencapai target tahun 2018, dan 3 indikator belum mencapai target tahun 2018. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
					Tahun 2018					
1)	Program Pendidikan Menengah dan Khusus									
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,69	9,69	9,69	10	9,79 (tahun 2017)	97,90	Belum Tercapai	10,15



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK	%	85,17	85,17	87,11	87,00	92,12	105,89	Tercapai	88,00
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	NA	NA	70,12	69,00	72,00	104,35	Tercapai	70,00
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK	%	74,59	74,59	75,87	76,00	77,300	101,71	Tercapai	76,50
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK	%	0,5	0,5	0,44	0,44	0,42	104,55	Tercapai	0,42
	Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik	%	86,68	86,68	85,1	87,5	92,10	105,26	Tercapai	88,00
	Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	%	NA	NA	70	86,00	94,00	109,30	Tercapai	88,00
	Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Unit	18	18	112	50,00	60,00	120,00	Tercapai	50
	Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	1:40	1:40	1:35	1:36	1:33	103,13	Tercapai	1:36
2)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	%	80	84	90,15	93,00	95,99	103,22	Tercapai	94,00
3)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (2018-2021)/ Penggabungan dari 4 Program tahun 2017 yaitu: Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Non Formal									
	Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B	%	75	75,8	72,81	78,00	74,00	94,87	Belum Tercapai	80,00
4)	Program Peningkatan Mutu Pendidikan									
	Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi	%	NA	15	35,42	40,00	43,00	107,50	Tercapai	50,00
	Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	%	NA	15	50	40,00	50,00	125,00	Tercapai	50,00



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional(UN) SMA/MA/SMK/MAK	Angka	53,14	53,87	53,87	54,20	50,59	93,34	Belum Tercapai	54,40

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

2) Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat tergambarkan dari Angka kematian ibu di Kepri dengan capaian sebesar 130 per 100.000 KH, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 15 per 1.000 KH, persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2018 mencapai sebesar 13%, dan Cakupan Kabupaten/Kota Sehat sebesar 71%. Capaian Angka kematian ibu, Angka kematian bayi, dan persentase kekurangan gizi (underweight) pada tahun 2018 menunjukkan penurunan dari tahun 2017.

Kasus kematian Ibu di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan sulitnya menjangkau akses pelayanan kesehatan. Kematian ibu dikarenakan oleh keputusan dalam penyelamatan kehamilan. Keputusan tertinggi berada pada suami, pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Selain itu penyebab non medis adalah rendahnya kapasitas perempuan untuk mengambil sementara suami yang memiliki mata pencaharian nelayan tidak selalu mendampingi istri dalam persiapan kelahiran.

Kematian pada bayi antara lain disebabkan oleh asfeksia, BBLR, Tetanus Neonatorum (TN), Sepsis, kelainan congenital, dan Icterus. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang adalah ketersediaan bahan pangan pada tingkat rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, dan faktor geografis kepulauan yang menghambat dalam mengakses bahan pangan. Dalam penanganannya, kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi dilakukan dengan kerjasama lintas sektor antar instansi pemerintah.

Berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, kinerja ditunjukkan beberapa indikator, antara lain Insidens rate DBD per 100.000 penduduk pada tahun 2018 sebesar 56. Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB 177 per 100.000 penduduk, belum mencapai target tahun 2018 sebesar 160 per 100.000 penduduk. Namun dilihat dari persentase usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap belum mencapai target tahun 2018

capiannya hanya sebesar 86% sedangkan target yang harus dicapai sebesar 91%.

Kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan, terlihat dari Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi mencapai sebesar 100%; Persentase Puskesmas terakreditasi hanya sebesar 41,4%, Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS 82,6%; Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS) tingkat Paripurna dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80,42; Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS) tingkat Paripurna dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80; Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 56,32%; Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang 73,68%; Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD dan Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang 84,04%; dan Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa sebesar 53,33%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kesehatan ditunjukkan melalui 25 indikator yang tersebar pada 7 program (program pembangunan). Dari ke 25 indikator yang telah rilis data tahun 2018, terdapat sebesar 24 indikator dengan telah mencapai target tahun 2018. Sedangkan 1 indikator lainnya belum mencapai target tahun 2018. Secara rinci realisasi kinerja indikator program pembangunan urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Kesehatan Masyarakat									
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 KH	per 100,000 KH	144	120	131	131	130	100,76	Tercapai	130
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1,000 KH	per 1,000 KH	35*	35	18	33	15	153,71	Tercapai	32



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	17,07	17,7	16,4	17,1	13	123,98	Tercapai	16,80
	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	%	14,3	43	57	57	71	125,31	Tercapai	57,00
2	Program pencegahan dan pengendalian penyakit									
	Prevalensi HIV	%	0,38	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	100,00	Tercapai	<0,5
	Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100,000 penduduk	per 100,000 penduduk	139	171	181	160	177	110,45	Tercapai	165
	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	41	78,6	88	81	81	100,00	Tercapai	82,00
	Insidens rate DBD Per 100,000 penduduk	Per 100,000 penduduk	98	102	38,2	97	56	142,27	Tercapai	94
	API (Annual Paracite Incidence) per 1,000 penduduk	per 1,000 penduduk	0,41 (*rata-rata 2011-2015)	0,37	0,2	0,33	0,14	157,80	Tercapai	0,31
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	74,5	88,7	94	91	91	100,00	Tercapai	92,00
	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	35	22,4	27	28,5	27,4	104,00	Tercapai	28,30
3	Program pelayanan kesehatan									
	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	9,09	28,6	71,4	42,8	100	233,64	Tercapai	57,14
	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	0	6,49	19,48	25	79,30	317,20	Tercapai	38,00
	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan	%	61	63	71,49	70	82,6	117,97	Tercapai	72,00



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Kesehatan Nasional/KIS									
	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	-	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00	Tercapai	Paripurna
	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00	Tercapai	Paripurna
4	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan									
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	75	77,9	78	78	80,42	103,10	Tercapai	80,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban	%	67	71,7	76,5	76	80	105,26	Tercapai	77,00
5	Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan									
	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	58	53	50	58	56,32	97,11	Belum Tercapai	60,00
	Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang	%	59	54,5	58	60	73,68	122,81	Tercapai	63,00
	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	55	61	70,2	65	84,04	129,29	Tercapai	67,00



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	0	0	26,7	45	53,33	118,52	Tercapai	65,00
6	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan									
	Persentase ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar	%	77	75,5	88,5	81	93,10	114,94	Tercapai	82,00
7	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya									
	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan	%	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100,00
	Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik	%	99	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

3) Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya) mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Sumber Daya Air (SDA); Air Minum; Persampahan; Air Limbah; Drainase; Permukiman; Bangunan Gedung; Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan; Jasa Konstruksi; dan Penataan Ruang



Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagian besar sudah mencapai 100 % yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 42,64 % terealisasi sebesar 46,5 %; Persentase jalan provinsi berkondisi baik, ditargetkan sebesar 69,73 % terealisasi pada tahun 2018 sebesar 70,31%; panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi ditargetkan sebesar 18,75 % terealisasi 28,67%. Untuk indikator yang belum tercapai antara lain: Persentase jembatan provinsi berkondisi baik ditargetkan sebesar 81,24 % baru terealisasi sebesar 80,11%; Pelatihan tenaga kerja konstruksi (tenaga ahli konstruksi) ditargetkan sebesar 150 orang terealisasi sebesar 147 orang dan jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda ditargetkan 1 perda, belum terealisasi pada tahun 2018.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan melalui 12 Indikator yang tersebar pada 8 program (program pembangunan). Dari ke-12 indikator yang telah rilis data tahun 2018 yang tercapai sebanyak 9 indikator sedang yang tidak tercapai 3 indikator. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air									
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	33.64	36,64	35,05	42,64	46,5	109,05	Tercapai	45.64



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	62.6	64,1	64,82	70,2	70,42	100,31	Tercapai	73.10
	Jumlah titik rawan banjir	Lokasi	32	30	28	25	25	100,00	Tercapai	22.00
2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan									
	Persentase jalan Provinsi berkondisi baik	%	71.37	66,22	67,3	69,73	70,31	100,83	Tercapai	71.49
	Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik	%	71.27	78,67	80,11	81,24	80,11	98,61	Belum Tercapai	82.3
3	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan									
	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis)	km	2.89	4,65	6,97	16,19	16,2	100,06	Tercapai	24.99
	panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi	km	8.81	14,59	25,47	18,75	28,67	152,91	Tercapai	38.47
4	Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi									
	Persentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI	%	0	0	30	50	80	160,00	Tercapai	80.00
5	Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi									
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi)	Orang	NA	NA	60	150	147	98,00	Belum Tercapai	150
6	Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi									



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Persentase capaian kontribusi retribusi laboratorium pengujian jasa konstruksi terhadap total retribusi daerah	%	0	1,6	1,26	0,068	1,6	2.352,94	Tercapai	0.07
7	Program pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang									
	persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya	%	NA	NA	14,28	28,57	28,57	100,00	Tercapai	57.14
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang									
	Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda	perda	0	0	0	1	0	0,00	Belum Tercapai	2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, 2019

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu adanya adanya penciptaan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman. Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Perumahan; Kawasan Permukiman; Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Gambaran perkembangan indikator tahun 2018 untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman cukup baik, hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi kerja yang sebagian besar mencapai 100%. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mengurangi luasan kawasan kumuh, dimana target tahun 2018 dengan luasan kumuh 627,7 Ha berkurang



menjadi 382,97 Ha. Untuk Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman, sudah tercapai 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,15 %, sehingga masih kurang 7,85% untuk mencapai universal acces pada tahun 2019.

Indikator Cakupan pelayanan Sanitasi, dibagi menjadi air limbah, persampahan dan drainase, ketiga komposit sanitasi tersebut pada tahun 2018 yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu persampahan dari target 59 % tercapai 59,93 % sedangkan yang belum tercapai adalah air limbah dari target 89,09% tercapai 86,62%; dan drainase dari target 37,24% tercapai 36,48%. Indikator cakupan pelayanan sanitasi perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terkait target universal acces limbah yang harus tercapai pada tahun 2019.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ditunjukkan melalui 6 Indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke-6 indikator yang telah rilis data tahun 2018 bahwa 3 indikator tercapai dan 3 indikator tidak tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan									
	Luas kawasan kumuh	ha	823,44	823,44	752,62	627,7	529,82	118,47	Tercapai	549,53
2	Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum									
	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman	%	72,01	72,01	89,44	92,19	92,15	99,96	Belum Tercapai	96,79
3	Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi									
	Cakupan pelayanan Sanitasi :									65,37
	Air Limbah	%	81,81	81,81	86,41	89,09	86,62	97,23	Belum Tercapai	92,72
	Persampahan	%	54	54	56	59	59,93	101,58	Tercapai	61,00



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2018				Tahun 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Drainase	%	27,24	27,24	32,24	37,24	36,48	97,96	Belum Tercapai	42,4
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan									
	Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun	%	0	0	15	18	18	100,00	Tercapai	20,00

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, (2) Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur, (3) Pembinaan PPNS provinsi, (4) Penanggulangan bencana provinsi, dan (5) Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

Terkait dengan ketentram dan ketertiban umum, capaian kinerja indikator-indikator kuncinya masih belum optimal. Kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kinerjanya cukup baik karena trennya menurun dari 272 kasus pada 2016 menjadi 240 kasus pada 2017 dan 2018. Jumlah PPNS di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau jumlahnya semakin meningkat dari 16 orang menjadi 22 orang di tahun 2018. Indikator lain yaitu persentase demo yang berjalan aman, dan Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan juga menunjukkan tren yang positif karena trennya semakin meningkat dari kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hanya indikator Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran yang trennya negatif karena menurun kondisinya. Meskipun secara tren banyak indikator yang meningkat, namun jika dilihat dari sisi pencapaian target di tahun 2018 maka dapat diketahui bahwa capaian kinerja belum cukup baik. Dari lima indikator yang ada hanya satu indikator yang dapat memenuhi target yang ditetapkan, yakni persentase demo yang berjalan aman.

Secara lengkap kinerja ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM									
	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Kasus	NA	272	240	230	240	95,65	Belum Tercapai	200
	Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri	Orang	NA	16	16	27	22	81,48	Belum Tercapai	36
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal									
	Persentase demo yang berjalan aman	%	90	91	92	93	100	107,53	Tercapai	94,00
3	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan									
	Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan	%	7,3	55	41	65	42	64,62	Belum Tercapai	70,00
4	Program Penanggulangan Kebakaran									
	Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran	%	0	0	29	57	0	0,00	Belum Tercapai	71,43

Sumber: Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau, 2019

Selain mengenai ketentraman dan ketertiban, kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga dapat dilihat dari sisi wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat. Dilihat dari wawasan kebangsaan, dapat dilihat kinerja yang baik karena indikator



persentase konflik yang tertangani trennya positif karena semua dapat ditangani dengan baik. Hal tersebut sama dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Adapun untuk kinerja pendidikan politik masyarakat, pada tahun 2018 dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pemilik hak suara dalam memberikan suara pada pemilihan walikota Kota Tanjungpinang dimana tingkat partisipasinya mencapai 59%, masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 65,5%. Sedangkan untuk indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan, kinerjanya semakin baik karena mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Wawasan Kebangsaan dan pendidikan Politik Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan									
	Persentase Konflik Sosial Tertangani	%	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100
2	Program Pendidikan Politik Masyarakat									
	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES)	%	Pilgub (2015): 55,25; Pileg (2014): 71,65; Pilpres (2014): 59,43	0	0	Pilwak o : 65,50	59	89,94	Belum Tercapai	Pileg: 73.50; Pilpres: 64.75
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan	Ormas	0	0	18,00	81,82	163,64	200,00	Tercapai	82,35

Sumber: Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, 2019

Selain indikator kinerja tersebut di atas, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga dapat dilihat kinerjanya dari permasalahan kebencanaan yang tertangani dengan baik. Kinerja pengelolaan bencana di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2016-2018 menunjukkan kondisi yang semakin membaik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja

masing-masing indikator yang semuanya sudah sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Kebencanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana									
	Persentase desa/kel tangguh bencana	%	NA	NA	1,2	1,2	100	100	Tercapai	1,68
2	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana (2018-2021) / Program Penanggulangan Bencana (2017)									
	Persentase kejadian bencana kab/kota yang tertangani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai	100,00
3	Program Pemulihan Pasca Bencana (2018-2021) / Program Penanggulangan Bencana (2017)									
	Jumlah wilayah pasca bencana yang terpulihkan	Jumlah	NA	NA	1	2	2	100	Tercapai	2

Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Riau, 2019

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 11 Indikator yang tersebar pada 9 program (program pembangunan). Dari ke 11 indikator yang telah rilis data tahun 2018, terdapat sebanyak 6 indikator yang telah tercapai, dan 5 indikator yang belum tercapai targetnya.

6) Sosial

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Sosial seperti yang termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: (1)



Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi; (3) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal; (4) Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti; (5) Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; (6) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi; (7) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin. Dari tahun 2015 sampai tahun 2018 keluarga miskin yang telah mendapatkan bantuan melalui mekanisme usaha ekonomi produktif terlihat meningkat, meskipun capaiannya masih sangat kecil yakni 0,61%. Sedangkan untuk keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya kondisinya fluktuatif, yakni dari 5,59% di tahun 2015 meningkat menjadi 51,53% di tahun 2017, lalu turun lagi menjadi 38,09% pada tahun 2018.

Permasalahan lain yang ditangani dalam urusan sosial adalah penanganan PMKS (Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial). Penanganan PMKS didasarkan atas jenis-jenis PMKS yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian kinerja penanganan PMKS belum begitu optimal dikarenakan rata-rata capaiannya masih rendah dibandingkan dengan total PMKS yang ada.

Sementara itu, untuk menunjang kinerja penanganan PMKS, pemerintah Provinsi juga melibatkan lembaga-lembaga penyelenggara pemberdayaan sosial, dan juga tenaga-tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Lembaga/organisasi sosial yang bergerak dalam penanganan PMKS tersebut secara rutin dan berkala selalu mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Frekuensi pembinaan terhadap lembaga tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun. Demikian pula terkait dengan tenaga kesejahteraan sosial kemasayarakatan yang dibina, perenstasinya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Secara lengkap kinerja urusan sosial sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Penanggulangan Kemiskinan									
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	0,27	0,37	0,61	0,61	0,61	100,00	Tercapai	1,00
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	5,59	26,88	51,53	38,09	38,09	100,00	Tercapai	39,64
2	Program Rehabilitasi Sosial									
	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,1	0,19	0,24	0,25	0,27	108,00	Tercapai	0,28
	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,13	2,1	4,91	5,96	6,03	101,17	Tercapai	7,94
	Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,56	1,4	23,06	25,23	23,76	94,17	Belum Tercapai	26,97
	Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,68	0,85	1,3	1,54	1,42	92,21	Belum Tercapai	1,75
	Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang	%	78,37	78,37	44,76	78,37	9,81	12,52	Belum Tercapai	78,37



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)									
	Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas	%	26,49	35,68	38,92	49,19	43,78	89,00	Belum Tercapai	57,30
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial									
	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	0	19,67	19,33	25	25,00	100,00	Tercapai	25,00
	Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	30,36	30,36	30,36	60,35	39,37	65,24	Belum Tercapai	60,35
4	Program Pemberdayaan Sosial									
	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas	%	8,03	11,04	20,4	29,43	28,43	96,60	Belum Tercapai	40,47
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitas	%	0	0	8,12	32,49	32,49	100,00	Tercapai	47,72
	Persentase pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat	%	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100,00



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	bantuan kesejahteraan sosial									
5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial									
	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan	unit	1	1	1	1	1	100,00	Tercapai	1,00
	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara	unit	1	1	1	1	1	100,00	Tercapai	3,00
6	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya									
	Persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial	%	1,44	1,44	7,22	9,42	9,42	100,00	Tercapai	9,87
	Persentase kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendapat monitoring dan evaluasi	%	28,57	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	Tercapai	50,00

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2019

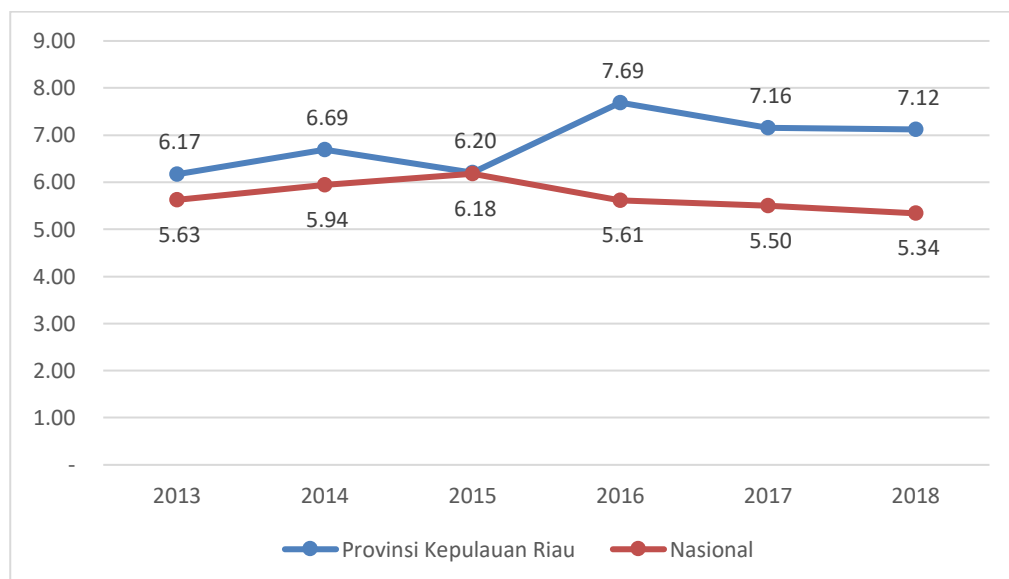
Kinerja indikator program pembangunan pada urusan sosial di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 17 Indikator yang tersebar pada 6 program (program pembangunan). Dari ke 17 indikator yang telah rilis data tahun 2018, terdapat sebanyak 11 indikator yang telah tercapai, dan 6 indikator yang belum tercapai targetnya.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi pada urusan tenaga kerja memiliki kewenangan terkait dengan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial.

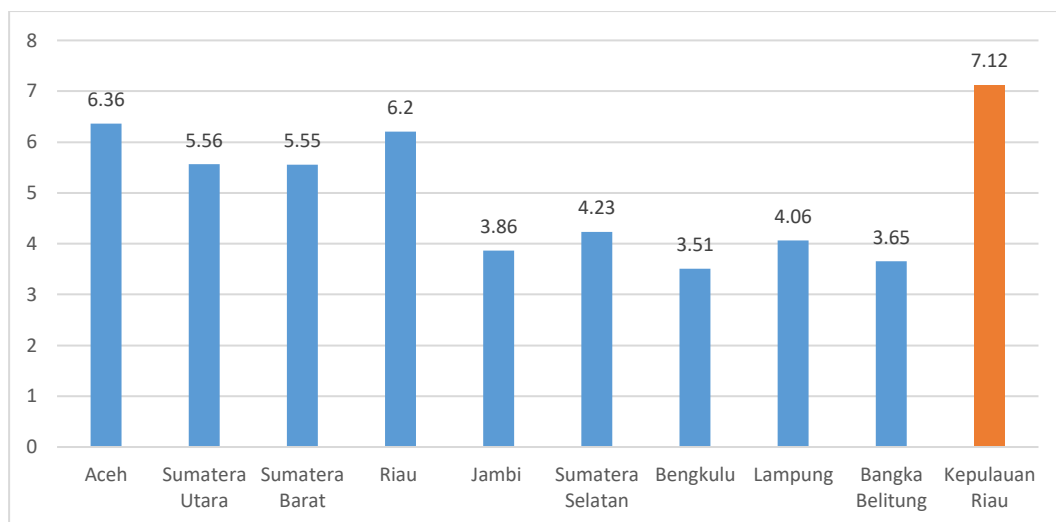
Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 mencapai sebanyak 970.132 orang. Dari angkatan kerja tersebut, penduduk yang bekerja pada tahun 2018 sebanyak 901.109 orang dan penganggur sebanyak 69.023 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus 2018 mencapai 7,12 persen, mengalami penurunan TPT jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2018 sebesar 7,12 persen. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT Nasional yaitu sebesar 5,50%.



Sumber : BPS Prov. Kepulauan Riau, 2019

Gambar 2.18 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2013-2018

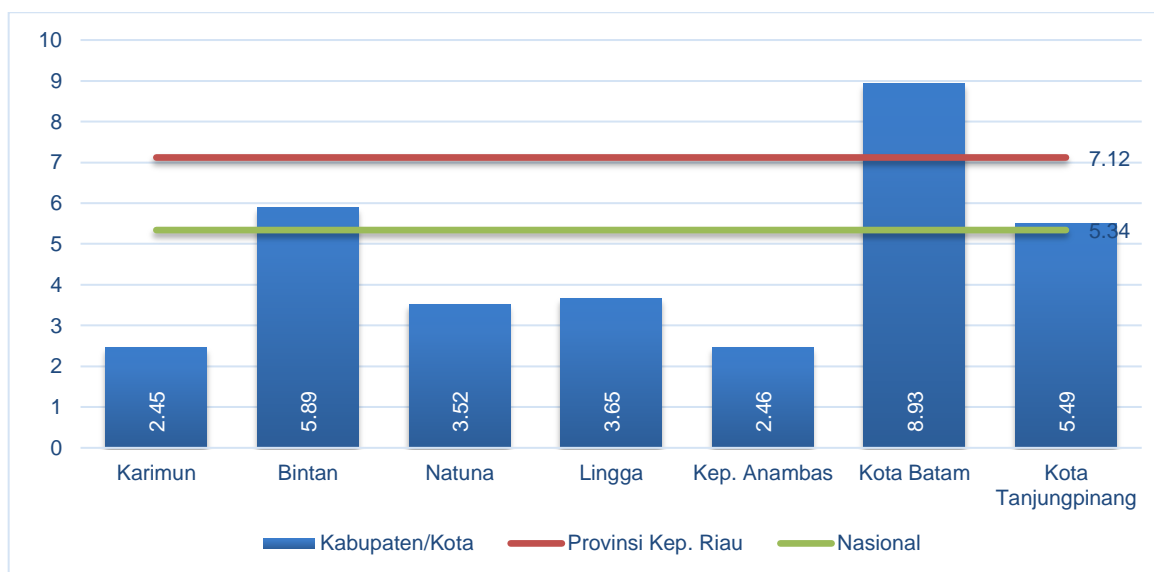
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 mencapai 7,12%, tertinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau paling tinggi, seperti terlihat pada Gambar 2.17.



Sumber: BPS, berita resmi statistik nasional, 2018

Gambar 2.19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2018 (%).

Posisi relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018, ditunjukkan bahwa Kota Batam (8,93%) berada di atas Provinsi Kepulauan Riau (7,12) dan Nasional (5,34%). Kabupaten Bintan (5,89%) dan Kota Tanjungpinang (5,49%) berada di bawah Provinsi Kepulauan Riau (7,12) dan di atas Nasional (5,34%). Sedangkan 4 kabupaten lainnya berada di bawah Provinsi Kepulauan Riau (7,12) dan Nasional (5,34%), secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Nasional, 2018

Gambar 2.20 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

Kinerja urusan tenaga kerja dalam kurun waktu 2015-2018 di Provinsi Kepulauan Riau dapat dikatakan cukup baik karena banyak indikator yang capaiannya membaik. Terkait dengan kualitas tenaga kerja, dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan pelatihan dan penyiapan calon tenaga kerja mengalami peningkatan. Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi meningkat dari 47,63% di 2016 menjadi 48,49% di 2018. Sedangkan calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan meningkat dari 42,63% menjadi 52,3%. Dan lulusan BLK yang diterima di dunia kerja meningkat menjadi 86,04% dari sebelumnya 80%.

Sedangkan untuk kesempatan kerja, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami penurunan dari 7,69% di 2016 menjadi 7,12% di 2018. Adapun untuk tingkat partisipasi angkatan kerja mendingkat dari 66% menjadi 66,68%. Dan pencari kerja yang ditempatkan meningkat dari 54% menjadi 60,5%. Demikian pula dengan upaya perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan. Capaiannya meningkat dari tahun ke tahun. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja									
	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	95	47,63	100	47,88	48,49	101,27	Tercapai	48,00
	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	85	42,63	0	42,88	52,3	121,97	Tercapai	43,00
	Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	80	80	75	86	86,04	100,05	Tercapai	87,00
	Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman	orang	0	0	32	16	20	125,00	Tercapai	16,00



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
2	Program Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja									
	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	52	54	48,8	58	60,5	104,31	Tercapai	60,00
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,07	66	66,41	66,68	64,72	97,06	Belum Tercapai	67,05
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,2	7,69	7,16	7,02	7,12	98,58	Belum Tercapai	6,88
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja.									
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	42,75	70	70	80	89%	111,25	Tercapai	85,00
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3	%	0,7	1	1,2	2	12%	600,00	Tercapai	2,50
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	65	65	62	75	100	133,33	Tercapai	80,00
4	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja									
	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	%	20	23	97,4	25	100	400,00	Tercapai	26,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 11 Indikator pada 4 program (program pembangunan). Dari 1 indikator yang telah rilis data tahun 2018, hanya ada 2 indikator yang belum tercapai targetnya yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).



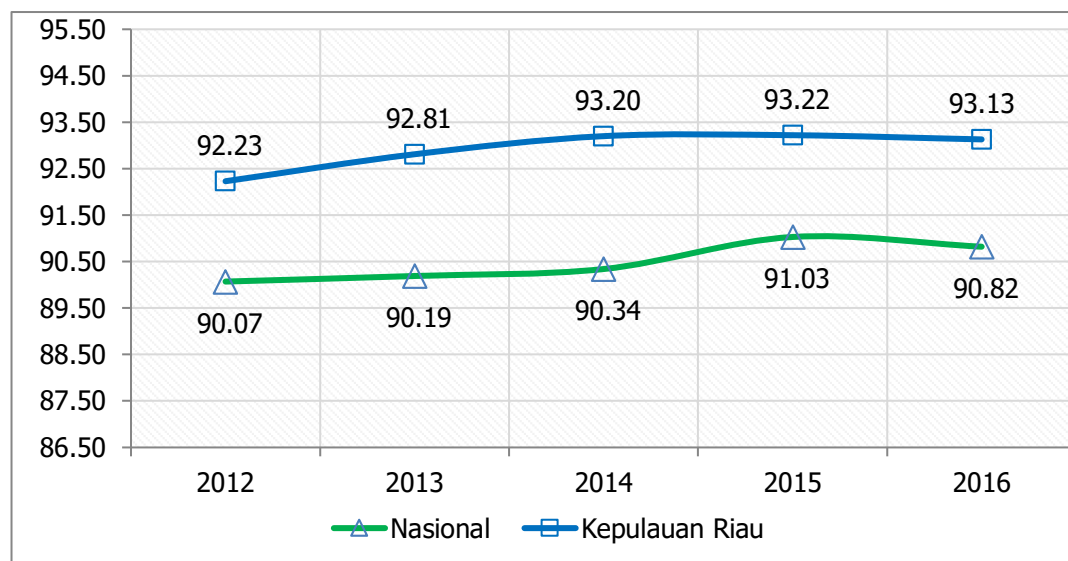
2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi:

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi.
- b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi.
- d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
- e. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
- f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi.
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
- h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.
- i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.
- j. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi.
- k. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi.
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
- m. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
- n. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi.

- o. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.

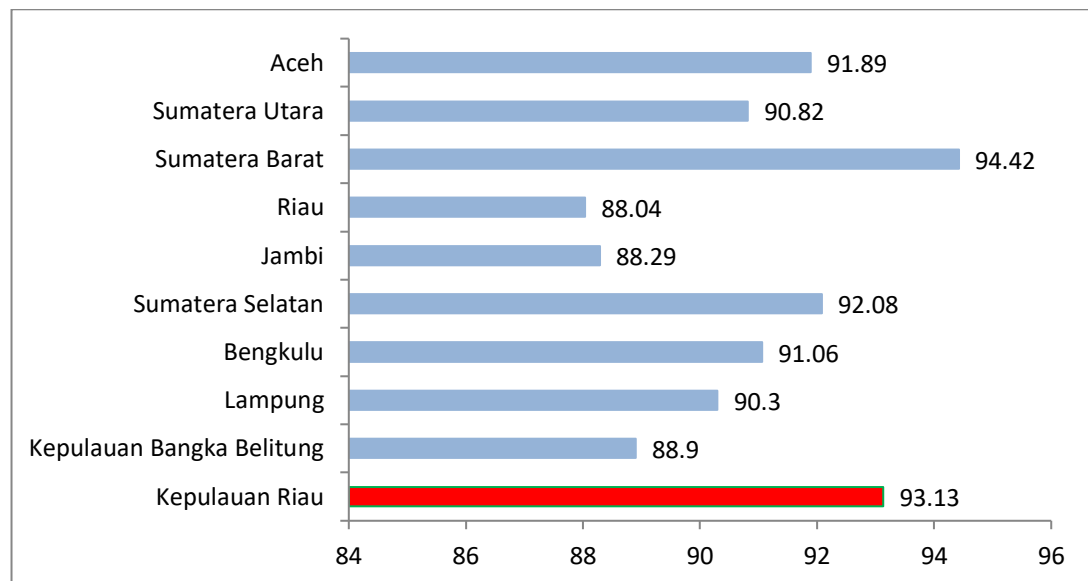
Kinerja pemberdayaan perempuan antara lain dapat diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender (perbandingan laki-laki dengan perempuan). Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 93,13. Hal ini menandakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau tergolong baik. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100. Gambaran perkembangan IPG dapat dilihat pada Gambar 2.21.



Sumber: Buku "Pembangunan Manusia Berbasis Gender Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017"

Gambar 2.21 Perbandingan IPG Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2012-2016

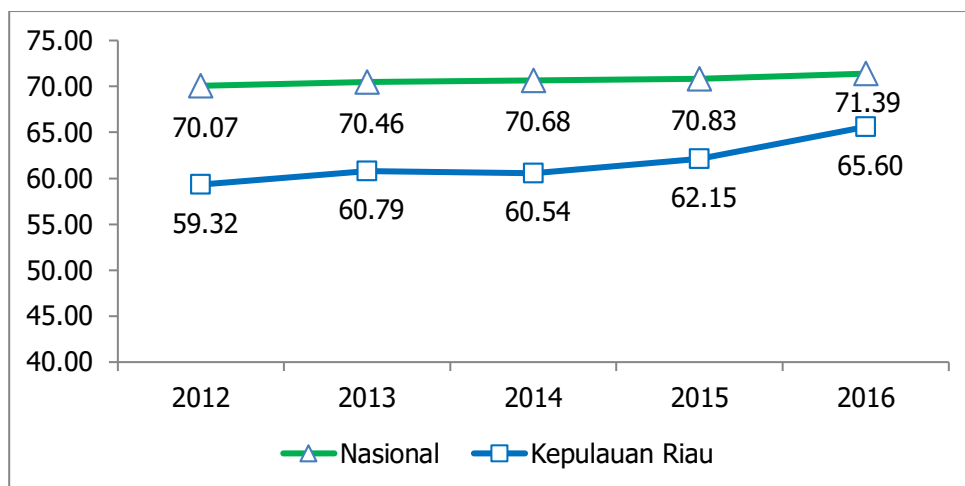
Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 93,13 diantara provinsi lain di wilayah Sumatera merupakan tertinggi kedua setelah Sumatera Barat seperti terlihat pada Gambar 2.22 berikut ini.



Sumber: Buku "Pembangunan Manusia Berbasis Gender Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017"

Gambar 2.22 Perbandingan IPG Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Sumatera Tahun 2016

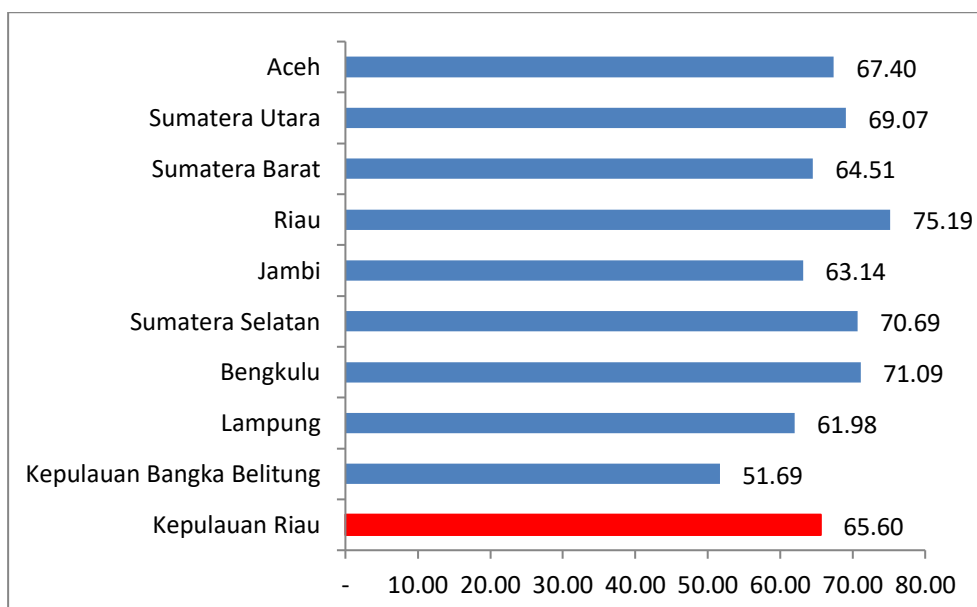
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Capaian IDG Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan dari sebesar 59,32 pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 65,60 pada tahun 2016, seperti terlihat pada Gambar 2.23 berikut ini.



Sumber: Buku “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017”

Gambar 2.23 Perbandingan IDG di Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2012–2016

Capaian IDG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 65,60 apabila dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera lebih rendah dari Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, dan Sumatera Barat. Data perbandingan IPG Kepulauan Riau lebih dengan provinsi lain dapat dilihat pada Gambar 2.24 berikut.



Sumber: Buku “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017”

Gambar 2.24 Perbandingan IDG Provinsi Kepulauan Riau Dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016



Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerjanya yang semakin membaik. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui komitmen pengarusutamaan gender di dalam penyusunan program dan kegiatan responsif gender semakin membaik, dilihat dari semakin meningkatnya proporsi anggaran yang responsif gender dibandingkan dengan belanja langsung APBD. Pada tahun 2015 proporsinya hanya 4,1%, di tahun 2018 meningkat menjadi 9,32%.

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan juga semakin membaik. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO meskipun angkanya fluktuatif namun secara keseluruhan trennya menurun. Jika pada tahun 2015 terjadi 33,19 kasus per 100.000 perempuan, maka di tahun 2018 turun menjadi 28,08 kasus per 100.000 perempuan. Demikian pula dengan kasus kekerasan terhadap anak, turun dari 4,28 kasus per 10.000 anak menjadi 2,56 kasus per 10.000 anak.

Secara lengkap kinerja ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak									
	Persentase anggaran rensponsif gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	4,10	4,68	6,4	5,5	9,32	169,45	Tercapai	5,70
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan									
	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000 Perempuan	33,19	33,18	27,7	32,6	28,08	116,10	Tercapai	31,49
3	Program Perlindungan Anak									



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	%	28,57	28,57	57	42,86	71,43	166,66	Tercapai	71,42
	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Per 10.000 anak	4,28	4,22	3,4	3,94	2,56	153,90	Tercapai	3,80
4	Program Kualitas Keluarga									
	Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill	%	0,44	0,59	0,76	1	1,13	113,00	Tercapai	1,16

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2019

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 5 Indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke 5 indikator yang telah rilis data tahun 2018, semua sudah mampu tercapai targetnya.

3) Pangan

Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: sub urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian meliputi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi. Sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi, Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. Sub urusan Penanganan Kerawanan Pangan meliputi Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan



kabupaten/kota, Penanganan kerawanan pangan provinsi, Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Sub urusan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap warga. Ketahanan pangan mencakup sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi pangan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang sangat luas dengan jumlah pulau berpenghuni yang cukup banyak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Dalam rangka menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan dan keamanan pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Tanjungpinang dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2014. Kerjasama diarahkan pada pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan keterjangkauan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, kekurangan pangan, kerawanan pangan sebesar 200 ton ekuivalen beras. Pemerintah mendorong agar seluruh kabupaten/kota memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (lumbung pangan masyarakat desa).

Gambaran capaian kinerja urusan ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sudah baik. Dilihat dari 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2018, sebanyak 1 indikator memiliki status belum tercapai dan 5 indikator memiliki status telah tercapai. Indikator yang belum tercapai yaitu ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Hal ini dikarenakan masih belum berkembangnya Teknologi pengolahan pangan dan tepat guna pada pertanian lokal. Untuk mengatasi hal ini di harapkan pemerintah provinsi bisa memfasilitasi kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36



Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan,									
	(1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	87,76	88	83,09	90	82,29	91,43	Belum tercapai	91,00
	(2) Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	15,2	12,6	9,2	CV < 10	9,2	108,00	Tercapai	CV < 10
2	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan									
	(1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor	83,8	84,5	88,4	87	87	100,00	Tercapai	88,00
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan									
	(1) Angka Rawan Pangan	%	18,58	17,58	10,07	17,32	11,32	134,6	Tercapai	17,19
4	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan									
	(1) Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	70	75	76	80	82,61	103,26	Tercapai	80,00
5	Program Pengembangan SDM dan Penyuluh pertanian									
	(1) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya/kompe tensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	30,91	30,91	31	34,55	34,55	100,00	Tercapai	36,36

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2019

4) Pertanian



Kewenangan pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan meliputi: Pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi; Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; dan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; serta Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota.

Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Urusan Pertanahan ditunjukkan dengan indikator Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi. Capaian indikator ini sampai dengan tahun 2018 sebesar 100% secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah									
	(1) Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi	%	NA	NA	100	100	100	100,00%	Tercapai	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan

5) Lingkungan hidup



Lingkungan dengan kualitas baik sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Pelaksanaan urusan lingkungan hidup di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait pengelolaan: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu RPPLH provinsi; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP provinsi; 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); (7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; (8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan (11) Persampahan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagian besar sudah mencapai 100 % yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 70,34; Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu sebesar 57,14%; Persentase pelaku usaha/ industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar sebesar 20,02%; Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai Baku Mutu sebesar 95,47 %. Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional Untuk indikator Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu belum mencapai target yang ditetapkan, dari target 2018 sebesar 71,43% telah tercapai 100%. Indikator Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar nominasi Adipura juga belum mencapai target yang ditetapkan, dari target tahun 2018 sebesar 85,71 telah tercapai sesuai target 85,71.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan lingkungan hidup ditunjukkan melalui 9 Indikator yang tersebar pada 3 program (program pembangunan). Dari ke 9 indikator yang telah rilis data tahun 2018, semuanya telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.38



**Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018**

No	Program Dan Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									
	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,97	66,97	70,19	68,10	70,34	103,29	Tercapai	68,90
	2) Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	63,64	63,64	80	72,73	100,00	137,50	Tercapai	81,82
	3) Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu	%	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14	100,00	Tercapai	71,43
	4) Persentase pelaku usaha /industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar	%	15	19	20,6	20,6	22,02	106,89	Tercapai	20,60
	5) Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai Baku Mutu	%	57,14	57,14	78,6	71,43	100,00	139,99	Tercapai	85,71
	6) Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar nominasi Adipura	%	71,43	71,43	71,43	85,71	85,71	100,00	Tercapai	85,71
2	Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam									
	7) Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional	Sekolah	8	10	25	26	51	196,15	Tercapai	



No	Program Dan Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	8) Luas Kawasan mangrove yang terehabilitasi	Ha	1	5	2	3	5	166,67	Tercapai	30
3	Program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup									
	9) Program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kewenangan provinsi pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu penyusunan profil kependudukan provinsi. Kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyusun profil kependudukan. Selain penyusunan profil kependudukan, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain: rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah dan Persentase kepemilikan kartu keluarga.

Perkembangan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan sebanyak 2 indikator kinerja program dengan pencapaian keduanya kategori satu kategori telah mencapai target dan 1 kategori lainnya belum mencapai target. Rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2018 terealisasi sebesar 94,71%; sedangkan Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran mencapai sebesar 86,63%. Walaupun telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018, namun masih perlu ada peningkatan kinerja agar lebih optimal. Secara rinci kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan									
	Rasio penduduk ber-KTP	%	85,4	89,68	90,7	95	94,71	99,99	Belum Tercapai	95,00
	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	%	64	75,00	83,19	77	86,63	112,51	Tercapai	79,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2018 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif dengan realisasi sebesar 46,63%; Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif sebesar 80 unit; Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat sebesar 33,33%; dan Jumlah Desa Cepat Berkembang sebanyak 28 desa.

Kinerja program pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan melalui 4 indikator yang tersebar pada 4 program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari ke 4 indikator yang ditargetkan pada tahun 2018, realisasinya telah mampu mencapai target tahun 2018. Secara rinci realisasi kinerja indikator program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan									
	(1) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	0	36,62	40	44,23	46,63	105,43	Tercapai	48,64
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan									
	(1) Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Unit BUMDesa	0	0	35	40	80	200,00	Tercapai	45,00
3	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna									
	(2) Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat	%	0	0	16,67	16,67	33,33	199,96	Tercapai	16,67
4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (2017)									
	(1) Jumlah Desa Cepat Berkembang	Desa	0	0	15	22	28	127,27	Tercapai	30

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: (1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; (2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi; (3) Pengembangan desain program,



pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local; (4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; (5) Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan (6) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Implementasi program Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang belum begitu baik. Tahun 2018 persentase penggunaan alat kontrasepsi baru sebesar 79,81%. Angka tersebut meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 46,2%. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah karena dibentuknya kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh pemerintah dan masyarakat. Tahun 2018 baru ada 1 kampung KB yang difasilitasi untuk dibentuk.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 2 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dari 2 indikator yang telah rilis data tahun 2018, semuanya sudah tercapai targetnya. Secara lengkap kinerja urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Keluarga Berencana									
	Pembentukan Kampung KB	Angka	NA	NA	NA	1	1	100,00	Tercapai	1,00
	Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR)	%	46,2	46,5	46,73	47,73	79,81	167,21	Tercapai	79,20

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019



9) Perhubungan

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan mendukung terciptanya kemadirian ekonomi suatu negara. Pelaksanaan urusan Perhubungan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); (2) Pelayaran; dan (3) Perkeretaapian.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagian sudah mencapai 100 % yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase ketersediaan pelabuhan penyeberangan ro-ro sebesar 71,43 %; persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis sebesar 71,43 %; persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis pada tahun 2018 sebesar 91,67 %; persentase ketersediaan pelabuhan laut sebesar 73,53 %. Untuk indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan antara lain persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyeberangan perintis, dari target yang ditetapkan sebesar 76,92 baru tercapai 53,85 %; persentase pelabuhan penyeberangan terkelola dengan baik dari target 81,82 % baru tercapai 72,73 %; persentase ketersediaan kapal angkutan laut baru tercapai 55,56 % dari target sebesar 66,67 %.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perhubungan ditunjukkan melalui 15 Indikator yang tersebar pada 7 program (program pembangunan). Dari ke 15 indikator yang telah rilis data tahun 2018, terdapat sebanyak 8 indikator tercapai, dan 7 indikator belum tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perhubungan dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Tahun 2019
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat									
	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	57.14	57,14	71,43	71,43	71,43	100,00	Tercapai	85.71
	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	77.78	77,78	77,78	77,78	77,78	100,00	Tercapai	88.89
	Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis	%	46.15	46,15	53,85	76,92	53,85	70,00	Belum Tercapai	76.92
	Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik	%	70	70	72,73	81,82	72,73	88,89	Belum Tercapai	90.91
2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas									
	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	39.94	64,32	67,27	74,86	70,88	94,68	Belum Tercapai	83.27
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									
	Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas	%	6.67	6,67	7,67	10,17	9,67	95,08	Belum Tercapai	14.33
	Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis	%	7.14	21,43	42,86	57,14	71,43	125,01	Tercapai	71.43
4	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara									
	Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis	%	66.67	66,67	75	83,33	91,67	110,00	Tercapai	91.67



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2018				Tahun 2019
					Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	%	NA	NA	NA	25,00	0,00	0,00	Belum Tercapai	50.00
	Persentase ketersediaan Bandar Udara	%	66.67	66,67	77,78	77,78	88,89	114,28	Tercapai	88.89
5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut									
	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	58.82	58,82	58,82	73,53	73,53	100,00	Tercapai	82.35
6	Program Pembangunan Transportasi Laut									
	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	44.44	44,44	55,56	66,67	55,56	83,33	Belum Tercapai	77.78
	Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis	%	33.33	33,33	55,56	66,67	55,56	83,33	Belum Tercapai	77.78
	Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik	%	58.33	75	75	83,33	83,33	100,00	Tercapai	91.67
7	Program Intensifikasi dan Ekstenfikasi Pendapatan Daerah									
	Persentase peningkatan retribusi pendapatan dari urusan perhubungan	%	NA	NA	0	10	216,00	2160,00	Tercapai	20.00

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

10) Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi; pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh



Pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.

Kinerja urusan Komunikasi dan informatika dilihat dari akses dan kualitas informasi publik, terlihat capaian nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepri mengalami fluktuasi tetapi cenderung menurun yaitu capaian pada tahun 2015 sebesar 59,5 menurun menjadi sebesar 53,87 pada tahun 2018.

Sedangkan dilihat dari E-Government mengalami perkembangan yang cukup baik yaitu Nilai e-government provinsi kepri/nilai indeks SPBE mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 1,85 kemudian naik menjadi 2,1 pada tahun 2018. Dan indikator Persentase Domain dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatkan cainya sebesar 47,82% telah melampaui target tahun 2018 sebesar 35%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan melalui 3 Indikator yang tersebar pada 2 program (program pembangunan). Dari ke 3 indikator yang telah rilis data tahun 2018, 2 indikator tersebut masih belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Tahun 2019
1)	Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik									
	Nilai keterbukaan informasi provinsi Kepri	skala nilai 0-100	59,5	59,5	13,03	63,5	53,87	84,83	Belum Tercapai	65,00
2)	Program e-government									
	Nilai e-government provinsi kepri/nilai indeks SPBE	skala nilai 1-4	1,85	1,85	2,1	2,2	2,1*	95,45	Belum Tercapai	2,3
	Persentase domain dan subdomain di lingkungan pemerintah provinsi kepri yang telah dimanfaatkan	%	-	-	25	35	47,82	136,6	Tercapai	45

Keterangan:

*) Realisasi Tahun 2017

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019



11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; (6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM.

Kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilihat dari kualitas kelembagaan koperasi sudah cukup baik yaitu persentase koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Riau mengalami perkembangan yang meningkat dimana pada tahun 2015 sebesar 49,00% meningkat menjadi sebesar 54,95% pada tahun 2018, sedangkan pertumbuhan koperasi di Provinsi Riau pada tahun 2018 sebesar 5,10%. Dilihat dari daya saing UKM dan koperasi di Kepulauan Riau yaitu Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi mengalami perkembangan yang meningkat dari sebesar 17,80% pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 19,30% pada tahun 2018.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah ditunjukkan melalui 5 Indikator yang tersebar pada 3 program (program pembangunan). Dimana 5 indikator urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah pada tahun 2018 telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja Tahun 2017	Pencapaian Target Kinerja Program 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Tahun 2019
1)	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi									
	Persentase Koperasi Aktif	%	49,00	49,04	51,80	53,30	54,95	103,10	Tercapai	55,80
	Persentase KSP/USP sehat	%	NA	7,60	8,40	23,00	36,11	157,02	Tercapai	30,60



No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Tahun 2019
	Pertumbuhan koperasi	%	NA	NA	3,30	1,50	5,10	339,70	Tercapai	2,00
2)	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan									
	Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif	%	0	0,21	0,33	0,34	0,41	120,17	Tercapai	0,48
3)	Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi									
	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	NA	17,8	19,8	19,2	19,3	100,62	Tercapai	20,19

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2019

12) Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan penanaman modal di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Gambaran perkembangan indikator urusan penanaman modal, secara umum capaian kinerjanya tergolong cukup baik. Dilihat dari nilai investasi (PMA) pada tahun 2018 sebesar Rp 11.139 milyar dengan jumlah investor berskala nasional sebesar 157 investor. Nilai ini menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan nilai Investasi (PMA) sebesar Rp 13.823 milyar dengan jumlah investor berskala nasional sebesar 291 investor. Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN) sebesar 4.385 milyar pada tahun 2018 dengan jumlah investor sebanyak 120 investor. Distribusi investasi di Provinsi Kepulauan Riau belum merata, dengan kecenderungan investasi terbesar di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Beberapa upaya peningkatan investasi terus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan promosi investasi, baik secara nasional maupun internasional.

Kinerja pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditunjukkan dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu



(PTSP) sebesar 92% dari target sebesar 84%; dan Persentase Pelayanan Sesuai SOP dengan capaian sebesar 123,46%. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan penanaman modal melalui 6 indikator yang tersebar pada 3 program pembangunan. Dari ke 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2018, 1 indikator memiliki status belum tercapai dan 5 indikator memiliki status telah tercapai. Indikator yang memiliki status belum tercapai diantaranya yaitu : Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP).

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									
	1) Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Milyar	10.065	7.108	13.823	7.500	11.139	148,52	Tercapai	7.700
	2) Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Milyar	1.384	492,5	1.398	600	4.385	731	Tercapai	700
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									
	3) Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	160	191	291	140	157	112,14	Tercapai	145
	4) Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	226	175	203	102	120	117,65	Tercapai	104
3	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan									
	5) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	NA	81	76,61	84	77,2	91,90	Belum Tercapai	86,00
	6) Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	80	100	100	81	100	123,46	Tercapai	82,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019



13) Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk: Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan (SLTA) yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi; dan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi .

Kinerja terkait dengan kepemudaan terlihat dari pemuda pelopor semakin meningkat yaitu pada tahun 2015 sebanyak 650 orang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung menurun menjadi sebesar 557 orang pada tahun 2018, dan jumlah pemuda yang berwirausaha masih terbilang sedikit yaitu sebanyak 12 orang tahun 2015 menurun menjadi 25 orang pada tahun 2018. Hal ini relatif kecil dibandingkan dengan jumlah pemuda di Provinsi Kepulauan Riau diperkirakan sebanyak 15 – 20% dari jumlah penduduk.

Kinerja terkait dengan olahraga prestasi terlihat dari indikator jumlah prestasi olahraga tingkat nasional, dengan capaian sebanyak 17 penghargaan pada tahun 2018. Dalam rangka memacu prestasi olahraga, jumlah event olahraga yang diselenggarakan masyarakat pada tahun 2018 sebanyak 17 event. Sedangkan dari sisi jumlah kader pemuda anti narkoba pada tahun 2018 berjumlah 55 orang.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan melalui 6 Indikator yang tersebar pada 5 program pembangunan. Dari ke 6 indikator yang telah rilis data tahun 2018, semuanya telah mampu mencapai target tahun 2018. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan									
	Jumlah pemuda pelopor	Orang	672	650	2.287	25	557	2.228,00	Tercapai	800
2	Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda									
	Jumlah pemuda yang berwirausaha	Orang	56	12	22	25	25	100,00	Tercapai	30
3	Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga									
	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional	Penghargaan	6	5	21	5	17	340,00	Tercapai	17
	Jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan masyarakat	Event	10	3	16	0	17	1.700,00	Tercapai	14
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga									
	Persentase sarana dan prasarana yang dibangun terhadap kebutuhan masyarakat	%	14,29	14,29	76	76,19	90,48	118,76	Tercapai	61,90
5	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba									
	Jumlah kader pemuda anti narkoba	Orang	50	100	34	55	55	100,00	Tercapai	60

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2019

14) Statistik

Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan, mengembangkan sistem yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan urusan statistik di tingkat Provinsi



berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi.

Kinerja urusan statistik dapat dilihat dari persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau yang pada tahun 2018 mencapai 25% dimana pada tahun-tahun sebelum masih belum ada data statistik sektoral di Provinsi Kepulauan Riau.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan statistik ditunjukkan melalui 1 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dimana 1 indikator urusan statistik pada tahun 2018 telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan statistik dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Tahun 2019
1)	Program pengembangan data/informasi statistik sektoral									
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral provinsi kepri	%	NA	NA	NA	25	25	125,00	Tercapai	30

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

15) Persandian

Pelaksanaan urusan persandian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah provinsi.

Kinerja urusan persandian di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi yang mengalami perkembangan kenaikan cukup signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar 2,5% meningkat menjadi sebesar 20% pada tahun 2018.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Persandian ditunjukkan melalui 1 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dimana

1 indikator urusan persandian pada tahun 2018 telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan persandian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Tahun 2019
1)	Program persandian untuk pengamanan informasi									
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	%	NA	NA	2,5	20	20	100	Tercapai	30

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

16) Kebudayaan

Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Disamping itu peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah.

Pelaksanaan urusan kebudayaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota Pembinaan sejarah lokal provinsi; Penetapan cagar budaya peringkat provinsi; Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi dan Pengelolaan museum provinsi.

Gambaran perkembangan indikator dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indikator Presentase Nilai Adat



dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Terlihat capaian pada tahun 2016 sebesar 4,87% meningkat menjadi 19,98% pada tahun 2018. Pada gambaran kinerja pada indikator Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju, dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Capain pada tahun 2017 sebesar 14,49% meningkat menjadi 37,68 pada tahun 2018.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kebudayaan melalui 5 indikator yang tersebar pada 3 progam pembangunan. Dari ke 5 indikator yang ditargetkan pada tahun 2018, 3 indikator memiliki status belum tercapai dan 2 indikator memiliki status telah tercapai. Indikator yang belum tercapai yaitu Persentase bangunan yang berciri khas melayu, hal ini dikarenakan Perda bangunan yang berciri khas melayu tidak dapat di selesaikan pada tahun 2018 dikarenakan adanya kendala di lapangan pada saat pelaksanaan dan akan dilanjutkan pada tahun 2019 dan sudah di jadwal kan Pembahasan pada bulan Pebruari. Indikator lain yang belum tercapai yaitu Persentase warisan budaya tangible yang lestari, indikator ini belum tercapai dikarenakan adanya efisiensi pada anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan cagar budaya makam sultan mahmud riayat syah III, sehingga 2 cagar budaya yang ditargetkan hanya 1 yang dilakukan pelestarian oleh Dinas Kebudayaan. Dalam hal ini perlunya dukungan anggaran pelestarian cagar yang lebih bsar di APBD Provinsi kepulauan riau, mengingat banyaknya sebaran bangunan/struktur/situs cagar budaya yang menagalami kerusakan dan pelapukan sehingga mengancam keberadaan warisan budaya bangsa berupa cagar budaya. Indikator lain yang belum tercapai yaitu persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Pengembangan Nilai Budaya									
	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	NA	5,28	8,28	16,54	11,68	70,62	Belum Tercapai	32,33
	Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi	%	NA	4,87	10,2	16,48	19,98	121,24	Tercapai	32,78
2	Program pengelolaan kekayaan budaya									
	Persentase warisan budaya tangible yang lestari	%	14,97	18,53	19,58	20,28	19,93	98,27	Belum Tercapai	20,98
3	Program pengelolaan keragaman budaya									
	Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju	%	NA	0	14,49	28,99	37,68	129,98	Tercapai	43,48
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	NA	3,1	6,49	21,06	13,29	63,11	Belum Tercapai	35,62

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2019

17) Perpustakaan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Dari fakta tersebut, perpustakaan diharapkan sebagai pusat kegiatan pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Perpustakaan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan dan pengembangan minat dan kegemaran membaca. Hal ini dilatari oleh peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pengembangan minat baca. Pelaksanaan urusan Perpustakaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki



kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi; (2) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi; (3) Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi; (4) Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah; (5) Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi; dan (6) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sudah mencapai 100 % yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase peningkatan bahan pustaka dari target yang ditetapkan sebesar 44,60 % pada tahun 2018, realisasi capaian sebesar 48,88 %; IKM pelayanan perpustakaan tahun 2018 sebesar 84,35 dan persentase peningkatan pengunjung perpustakaan terealisasi sebesar 28 % dari target 25 % pada tahun 2018.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perpustakaan ditunjukkan melalui 3 Indikator yang tersebar pada 2 program (program pembangunan). Dari ke 3 indikator yang telah rilis data tahun 2018 semuanya tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif				
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Target
1	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan									
	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka	%	-	26,72	41,32	44,6	45,88	102,87	Tercapai	53.55
2	Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan									



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif				
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Target
	IKM Pelayanan Perpustakaan	poin	-	75	81,94	84	84,35	100,42	Tercapai	86
	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	-	20,25	27,65	25	28	112,00	Tercapai	26.58

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2019

18) Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Manfaat arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah dan juga dapat dijadikan alat pertanggungjawaban manajemen serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi. Arsip dapat bermanfaat secara optimal bagi organisasi apabila dikelola dengan tertib dan teratur, namun sebaliknya apabila arsip dikelola dengan tidak tertib akan menimbulkan masalah bagi suatu organisasi.

Pelaksanaan urusan Kearsipan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD provinsi; (2) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi; (3) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi; (4) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; (5) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi; (6) Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah



Kabupaten/kota; (7) Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi; (8) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip; (9) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sudah mencapai 100 % yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan dari target yang ditetapkan sebesar 1,18 terealisasi sebesar 1,21 % dan Persentase perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku dari target sebesar 68,09 % pada tahun 2018 terealisasi sebesar 74,47 %.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kearsipan ditunjukkan melalui 2 Indikator yang tersebar pada 2 program (program pembangunan). Dari ke-2 indikator yang telah rilis data tahun 2018 semuanya tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif				
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2018				Tahun 2019
					Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja	Capaian	Target
1	Program Pengelolaan dan Pengolahan Arsip								
	Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan	%	10.439 arsip	0,22	1,18	1,21	102,54	Tercapai	1,66
2	Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola Kearsipan								



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif				
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2018				Tahun 2019
					Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja	Capaian	Target
	Persentase perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku	%	42,55	48,94	68,09	74,47	109,37	Tercapai	82,98

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2019

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: pada sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yaitu Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi., Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pada sub urusan Perikanan Tangkap meliputi Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, pada sub urusan Perikanan Budidaya meliputi Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, pada sub urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pada sub urusan Pengolahan dan Pemasaran meliputi Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar karena memiliki 96% wilayah berupa laut dan merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang potensial. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi



kelautan, industri sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut (seaweed), ikan dan biota laut bernilai ekonomi tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.

Gambaran perkembangan indikator dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik. Pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap, capaian kinerja nya cenderung fluktuatif. Terlihat pada tahun 2018 sebesar 304.975,02 ton menurun jika di bandingkan dengan tahun 2015 sebesar 375.411,66 ton. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya persentase kapal penangkap ikan bermotor berbanding armada perikanan tangkap yang ada termasuk kapal tanpa motor (perahu nelayan tradisional). Sedangkan untuk produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dari 33.515,48 ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 34.399,86 ton pada tahun 2018. Hal ini di sebabkan karena potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar yaitu sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan, luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km² dengan panjang garis pantai 2.367,6 km sedangkan luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km². Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari berbagai hasil perikanan laut (perikanan tangkap dan budidaya) wisata bahari dan pantai, ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut serta beragam jenis biota laut lainnya.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan melalui 15 indikator yang tersebar pada 12 progam pembangunan. Dari ke 12 indikator yang ditargetkan pada tahun 2018, 2 indikator memiliki status belum tercapai dan 13 indikator memiliki status telah tercapai. Indikator yang belum tercapai yaitu Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III dan Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kelautan Dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019
							Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja	
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap									
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	375.411,66	303.411,28	304.038,71	304.628,57	304.975,02	100,11	Tercapai	305.239,05
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		107,14	109,36	110,70	109,84	115,26	104,93	Tercapai	110,08
2	Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya									
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.515,48	77.746,10	34.302	33.717,38	34.399,86	102,02	Tercapai	33.784,95
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		108,43	107,28	107,23	107,75	108,20	100,42	Tercapai	107,99
3	Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan									
	Jumlah produk olahan Hasil perikanan	Ton	1.315,67	1.318,30	1.902,48	1.323,58	1.336,82	101,00	Tercapai	1.326,23
4	Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan									
	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US \$	30.789.629	31.766.987	27.371.747	31.779.695	70.168.692,13	220,80	Tercapai	31.786.051,00
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
	Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III	Kawasan	-	-	1	3	1,00	33,33	Belum Tercapai	4



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019
					Target		Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja	Status	
	Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Dokumen/ Peraturan an			1 (dok. pendukung RZWP3K)	1 (Perda RZWP3K)	-	-	Belum Tercapai	1 (Pergub Rencana Pengelol aan WP3K)
6	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan									
	% Jumlah kasus Iuu Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	75	100	89	75	100,00	133,33	Tercapai	100
7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan									
	Persentase kelompok (KUB,Poklaksar, Pokdakan) yang dibina disuluh	%	7,20	9,00	10,42	11,77	12,00	101,92	Tercapai	13,13
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	Penyelenggaraan pelayanan urusan umum dan kepegawaian,	Bulan	12	12	12	12	12,00	100,00	Tercapai	12
9	Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparaur									
	Penyediaan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Bulan	12	12	12	12	12,00	100,00	Tercapai	12



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja	Status	
10	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	63	64	80	70,00	78,27	111,81	Tercapai	70
11	Program Pengembangan Data/Informasi									
	Data/informasi dan aplikasi sistem informasi terkelola dengan baik	Dokumen	1	1	1	1	1,00	100,00	Tercapai	1
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan, dan dokumen pelaporan kegiatan	Dokumen	4	4	4	1	1,00	100,00	Tercapai	1

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2019

2) Pariwisata

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata provinsi ; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi; Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi; Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.



Gambaran perkembangan urusan pariwisata dari tahun 2015-2019 menunjukkan kinerja cukup baik. Dengan luas wilayah yang didominasi oleh lautan (sebesar 94% wilayah), menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata kemaritiman/bahari. Terdapat beberapa potensi yang belum dikembangkan sebagai pariwisata bahari, seperti: (1) potensi keindahan alam bawah laut di Kabupaten Kepulauan Anambas; (2) keindahan pasir putih di beberapa kawasan di Kabupaten Natuna dan Lingga; (3) dan kawasan industri pariwisata taraf dunia di Kabupaten Bintan. Kedepan potensi wisata bahari perlu dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik dan memiliki daya saing, sehingga kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara semakin meningkat.

Dilihat dari indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau dari tahun 2015-2018 mempunyai kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 2,07 juta orang dengan rata-rata tingkat hunian hotel sebesar 52,65% meningkat pada tahun 2018 dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 2,32 juta orang dengan rata-rata tingkat hunian hotel sebesar 53,75%. Namun pada indikator rata-rata lama tinggal wisatawan di kepulauan Riau pada satu tahun terakhir cenderung menurun, terlihat dari capaian tahun 2017 sebesar 2,09 hari menurun menjadi 1,87 hari pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan daya tarik wisata di Provinsi Kepulauan Riau menurun.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pariwisata ditunjukkan melalui 7 indikator yang tersebar pada 5 program pembangunan. Dari 7 indikator yang ditargetkan pada tahun 2018, terdapat sebanyak 5 indikator dengan status telah tercapai dan 2 indikator dengan status belum tercapai. Beberapa indikator kinerja yang capaiannya perlu dioptimalkan karena persentase capaian targetnya belum mencapai angka 100%, yaitu indikator: Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau; dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata									
	(1) Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau	hari	1,84	1,9	2,09	2,05	1,87	91,30	Belum Tercapai	2,10
2	Program Pengembangan Industri Pariwisata									
	(1) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,16	2,34	2,2	2,4	2,32	96,67	Belum Tercapai	2,45
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata									
	(1) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	Juta orang	2,03	2,1	2,07	2,25	2,6356	117,14	Tercapai	2,30
	(2) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	Juta orang	NA	1,48	2,89	1,54	3,547	230,32	Tercapai	1,57
	(3) Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	NA	NA	NA	11.654	14.299	122,70	Tercapai	13.409
4	Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata									
	(1) Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	49.15	48,19	52,66	50,5	53,75	106,44	Tercapai	51,00
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif									
	(1) Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif aktif	%	-	-	2,73	10	13,3	133,00	Tercapai	20,00

Sumber: Dinas Pariwisata, 2019



3) Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup sub urusan: (1) Sarana Pertanian; (2) Prasarana Pertanian; (3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; (4) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; dan (5) Perizinan Usaha Pertanian.

Sebagian kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Sektor pertanian menjadi sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Disamping palawija dan hortikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit.

Gambaran capaian indikator dari urusan pertanian dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 relatif baik. Pada Sektor pertanian memberikan kontribusi kecil terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau, yaitu hanya 2,5 %. Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Kepulauan Riau tergolong baik namun belum optimal, ditandai dengan Nilai Tukar petani sebesar 99,45% pada tahun 2015 menurun menjadi 97,02% pada tahun 2018.

Pada Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan, pada indikator Produksi padi masih belum optimal terlihat pada tahun 2015 sebanyak 959 ton, menurun menjadi sebesar 833 ton pada tahun 2018. Penurunan produksi padi lebih disebabkan penurunan pemanfaatan lahan. Pada indikator jumlah Produksi tanaman palawija dalam kurun waktu 2015-2018 memiliki kecenderungan meningkat, terlihat dari capaian tahun 2015 sebesar 12.637 ton meningkat menjadi 14.957 ton pada tahun 2018.

Dalam sektor pertanian di Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2018 masih belum berkembang dengan optimal, hal ini ditandai dengan hasil buah-buahan dan sayuran yang didatangkan dari Provinsi lain bahkan impor. Masalah yang terjadi di Kepulauan Riau diantaranya yaitu karena terbatasnya lahan, kondisi tanah yang kurang subur, dan minimnya sumber daya air. Untuk mengatasi kendala tersebut ada baiknya di buat Program sertifikasi lahan baik itu dari Pemerintah Daerah maupun dari pusat untuk lahan-lahan pertanian khususnya lahan sawah sehingga para petani juga bisa memanfaatkan lahan-lahan persawahan yang ada. Untuk mengatasi minimnya sumber daya air, bisa



untuk membangun embung, sumur resapan dan pengembangan sumber air atau melalui pipanisasi.

Di bidang peternakan, pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak terdapat 2 indikator yang capaiannya belum tercapai, yaitu indikator Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar yang pada tahun 2018 masih mencapai 93,3% dan Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Kecil baru mencapai 92% pada tahun 2018. Untuk mencegah prevalensi penyakit ternak, maka akan di dukung oleh Operasional Puskesmas dan Laboratorium. Ini merupakan salah satu lembaga pelayanan di sub sektor peternakan yang berfungsi sebagai ujung tombak bidang kesehatan hewan yang mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan diwilayah pedesaan atau kecamatan yang kegiatannya khusus memberikan pelayanan bidang kesehatan hewan. Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas ditujukan untuk menciptakan, memelihara, dan meningkatkan kualitas status kesehatan hewan atau ternak agar produktifitasnya dan reproduktivitas daripada ternak dapat optimal yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari pada peternak itu sendiri.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pertanian melalui 12 indikator yang tersebar pada 5 progam pembangunan. Dari ke 12 indikator yang ditargetkan pada tahun 2018, 4 indikator memiliki status belum tercapai dan 8 indikator memiliki status telah tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program peningkatan kesejahteraan Petani									
	(1) Nilai Tukar Petani (NTP)	%	99,45	98,16	97,98	98	97,02	99	Belum Tercapai	98,70
	(2) Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	1,21	1,16	1,16	1,18	1,2	101,69	Tercapai	1,21



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
2	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan									
	(1) Jumlah Produksi Padi (ton)	ton	959	627	601	850	833	98,00	Belum Tercapai	1.020
	(2) Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.637	12.637	19531,5	12.679	14.957	117,97	Tercapai	12.679
	(3) Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	14.000	38.338	40301	41.692	55.055	132,1	Tercapai	43.239
	(4) Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	21.694	21.694	47930	31.590	40.916	129,5	Tercapai	31.796
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak									
	(1) Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar	%	0,042	0,042	0,04	0,03	0,032	93,3	Belum Tercapai	0,025
	(2) Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Kecil	%	0,0045	0,0035	0,0035	0,0025	0,0027	92,0	Belum Tercapai	0,002
	(3) Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	51,27	76,34	78,84	55,4	85,71	154,71	Tercapai	56,20
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan									
	(1) Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	5,98	5,98	4,67	5	5,05	101,00	Tercapai	5,00
5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan									
	(1) Persentase Peternak yang memanfaatkan teknologi tepat guna	%	3,11	3,11	3	5	5	100,00	Tercapai	5,28



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	(2) Persentase Kelompok Tani Menerapkan Teknologi pertanian /perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	%	3,28	3,28	4,53	4,63	4,63	100,00	Tercapai	4,63

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2019

4) Kehutanan

Perkembangan indikator kinerja pada urusan kehutanan Provinsi Riau dapat dilihat pada 5 indikator, terdapat 3 indikator yang mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2018 yaitu: Presentase terbentuk dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau; Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dan Luas lahan kritis terehabilitasi.

Dari ke ima indikator tersebut terdapat 1 indikator yang belum mampu mencapai target tahun 2018 dan mengalami perkembangan yang cenderung menurun yakni infikator Presentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB dengan capaian 0,01% sedangkan target tahun 2018 sebesar 0,03%. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program Dan Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program pengembangan dan pemanfaatan kawasan hutan									
	1) Persentase terbentuknya dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di	Angka	0	0	66,66	83,3	100	120,05	Tercapai	100



No	Program Dan Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	seluruh Provinsi Kepulauan Riau									
	2) Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,03	0,03	0,01	0,03	0,01	33,33	Belum Tercapai	0,03
	3) Luas lahan kritis terehabilitasi	Ha	200	313	243	220	335	152,27	Tercapai	225
	4) Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat	%	0	19	20,6	50	100	200,00	Tercapai	20,60
	5) Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	%	70	72,73	75	80	87,5	109,37	Tercapai	85,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumberdaya mineral sebagai salah satu sumberdaya alam, merupakan sumber yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Bahkan beberapa jenis mineral, yakni minyak dan gas bumi, pernah menjadi soko guru perekonomian Pemerintah. Dalam skala global, mineral khususnya penghasil energi utama; bahkan berperan strategis dalam menentukan peta geopolitik dunia. Sementara mineral dalam bentuk logam mulia emas juga memiliki posisi penting dalam perekonomian dunia. Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait sub urusan: (1) geologi; (2) mineral dan batubara; (3) Energi Baru Terbarukan; dan (4) Ketenagalistrikan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagian besar sudah mencapai 100 % yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan



aturan sebesar 23 %; Persentase pelayanan perizinan IUP mineral logam, bukan logam dan batuan sesuai SOP sebesar 100 %; rasio elektrifikasi sebesar 0,06 dan rasio desa/ kelurahan berlistrik sebesar 6,5 %. Untuk indikator yang belum tercapai adalah: 1). Rasio desa/ kelurahan berlistrik dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 7.0 % baru terealisasi 6,5 %; 2). Persentase pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan dari target yang ditetapkan sebesar 11,31 % baru tercapai 10,52 %.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan melalui 9 Indikator yang tersebar pada 5 program (program pembangunan). Dari ke 9 indikator yang telah rilis data tahun 2018, terdapat sebanyak 6 indikator tercapai, dan 3 indikator belum tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Tahun 2019
1	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah									
	(1) Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	%	-	13	20	35	23	65,71	Belum Tercapai	50.00
	(2) Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Kab/Kota	-	-	-	3,00	3,00	100,00	Tercapai	4.00
2	Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara									
	(1) Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	-	65	70	75	100	133,33	Tercapai	80.00



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	(2) Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	-	65	70	75	85,71	114,28	Tercapai	80.00
	(3) Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah	%	-	0,84	1,91	1,20	1,28	106,67	Tercapai	1.40
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan									
	(1) Rasio Elektrifikasi	%	83.72	89,14	91,44	90,5	91,50	101,10	Tercapai	91.50
	(2) Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	-	74,6	78,61	88,5	85,1	96,16	Belum Tercapai	95.45
4	Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan									
	(1) Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan	%	-	5	21,58	45	32,10	71,33	Belum Tercapai	64.00
5	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi									
	(1) Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0.0005	0,0005	0,0006	0,0007	0,0007	100,00	Tercapai	0.0008

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019

6) Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; (2) Sarana Distribusi Perdagangan; (3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (4) Pengembangan Ekspor; dan (5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Kinerja urusan perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari efisiensi perdagangan dalam negeri yaitu pada indikator Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk setiap tahun mengalami peningkatan pada tahun 2015

sebesar 80% meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 84%. Sedangkan dilihat pada perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yaitu pada indikator persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) menurun yaitu pada tahun 2015 sebesar 40% menurun menjadi sebesar 34% pada tahun 2018, sedangkan pada indikator Persentase penyelesaian kasus pengaduan perlindungan konsumen (melalui BPSK) mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2015 sebesar 42% meningkat menjadi 100% pada tahun 2018.

Dilihat dari sisi peningkatan dan pengembangan ekspor di Provinsi Kepulauan Riau yaitu terutama pada indikator Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepulauan Riau selalu meningkat pada tahun 2015 sebesar US \$.1.112,40 meningkat menjadi sebesar US \$.3.034,45 pada tahun 2018.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan perdagangan ditunjukkan melalui 9 Indikator yang tersebar pada 3 program (program pembangunan). Dari ke 9 indikator yang telah rilis data tahun 2018, terdapat sebanyak 8 indikator dengan status Tercapai, dan 1 indikator dengan status Belum Tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perdagangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Tahun 2019
1)	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2018-2021)									
	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	Persen	7,2	7,6	7,5	< 10%	2,54	174,60	Tercapai	< 10%
	Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	Persen	80	80	83	84	84	100	Tercapai	89,00
2)	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan									



No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Tahun 2019
	Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Persen	40	38	37	34	34	100	Tercapai	31,00
	Persentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen (melalui BPSK)	%	42	40	100	100	100	100	Tercapai	100,00
3)	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor									
	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	juta US \$	1.112,40	1.185,67	2.915,73	1.332,21	3.034,45	227,78	Tercapai	1.405,48
	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$	8.657.953	8.019,70	8.654.142	8.657.950	8.489.050,00	98,05	Belum Tercapai	9.100.000
	Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	6.879	7.962	27.721	9.765	28.725	294,16	Tercapai	10.000
	Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	21	22	23	23	23	100,00	Tercapai	23
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	7,73	8,34	7	8,27	8,56	103,52	Tercapai	8,35

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2019

7) Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Pelaksanaan urusan perindustrian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penetapan rencana pembangunan industri Provinsi; Penerbitan IUI besar; Penerbitan IPUI bagi industri besar; Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah



kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Besar dan Izin perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.

Kinerja urusan perindustrian dilihat dari sentra-sentra industri potensial yaitu indikator jumlah sentra industri dilengkapi Infrastruktur penunjang sejumlah 8 sentra pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dilihat dari penataan struktur industri yaitu pada indikator jumlah kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 26 kawasan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 kemudian pada indikator jumlah kelompok klaster industri mengalami penurunan pada tahun 2017 sejumlah 2 klaster kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi 1 klaster

Dilihat dari pengembangan industri kecil dan menengah yaitu pada indikator jumlah industri Kecil dan menengah yang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sejumlah 1.632 unit meningkat menjadi sejumlah 2.200 unit pada tahun 2018 kemudian pada indikator peningkatan omset industri pengolahan berbahan baku lokal juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 11,57% meningkat menjadi sebesar 11,85% pada tahun 2018.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan perindustri ditunjukkan melalui 10 Indikator yang tersebar pada 5 program (program pembangunan). Dari ke 10 indikator yang telah rilis data tahun 2018, terdapat sebanyak 7 indikator dengan status Tercapai, dan 3 indikator dengan status Belum Tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perindustrian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja Tahun 2017	Pencapaian Target Kinerja Program 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Tahun 2019
1)	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial									
	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	2	4	6	7	8	114,29	Tercapai	8
2)	Program Penataan Struktur Industri									
	Jumlah Industri Besar	Unit	751	761	779	781	553	70,81	Belum Tercapai	785



No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja Tahun 2017	Pencapaian Target Kinerja Program 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Tahun 2019
	Jumlah kawasan industri	kawasan	26	26	26	26	26	100,00	Tercapai	26
	Jumlah Kelompok Klaster Industri	Klaster	0	0	2	1	1	100,00	Tercapai	1
3)	Program Pengembangan Industri Unggulan									
	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	38,60	38,60	37,00	37,00	36,12	97,62	Belum Tercapai	37,50
	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas	orang	125.575	125.575	137.396	131.150	121.026	92,28	Belum Tercapai	133.060
4)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah									
	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	1.632	1.723	2.000	2.200	2.200	100,00	Tercapai	2.400
	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	1.251	1.276	1.750	1.850	1.850	100,00	Tercapai	1.969
	Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	11,57	11,60	11,60	11,85	11,85	100,00	Tercapai	12,10
5)	Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi									
	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Industri yang bersertifikasi di Provinsi Kepri	Persen	-	0,013	0,026	0,058	0,058	100,00	Tercapai	0,091

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2019

8) Transmigrasi

Salah satu urusan wajib pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah urusan ketenagakerjaan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan terkait dengan ketenagakerjaan adalah (1) Pencadangan



tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan (3) Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan.

Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari dua indikator, yakni Jumlah KK yang sudah bertransmigrasi di Kepri, dan Jumlah kawasan permukiman transmigrasi yang tertata. Capaian untuk indikator Jumlah KK yang sudah bertransmigrasi di Kepri sudah sesuai dengan target, dimana jumlahnya tetap 1.471 KK dari tahun 2015-2018. Sedangkan untuk indikator Jumlah kawasan permukiman transmigrasi yang tertata, capaiannya juga sama yakni sudah memenuhi target dengan jumlah kawasan 2 dari tahun 2015-2018.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi									
	Jumlah KK yang sudah bertransmigrasi di Kepri	KK	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	100,00	Tercapai	1.471
	Jumlah kawasan permukiman transmigrasi yang tertata	Kawasan	2	2	2	2	2	100,00	Tercapai	2

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 2 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dari 2 indikator yang telah rilis data tahun 2018, semuanya sudah mampu mencapai target yang ditetapkan.



2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Upaya-upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin ditingkatkan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021, dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021. Perencanaan pembangunan tahunan berupa RKPD disusun setiap tahunnya. Selain itu untuk mendukung perencanaan yang komprehensif, dilakukan pula penyusunan beberapa dokumen perencanaan multi sektoral.

Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Setiap tahun Bapelitbang Provinsi Kepulauan Riau melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Kinerja dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan kedepannya masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Indikator Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD hanya memiliki capaian 95,39% pada tahun 2018. Selain itu Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD, keselarasan Renstra PD dengan RPJMD memiliki capaian 99,85% sesuai dengan target tahun 2018. Dilihat dari persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir di tahun 2018 sebesar 87,15%.

Di sisi lain untuk indikator persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai



amanat pemerintah; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sesuai amanat pemerintah; Persentase kerjasama yang diimplementasikan; dan Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang meskipun telah memiliki realisasi 100% sesuai dengan target tahun 2018.

Penyelenggaraan fungsi Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui 8 program dan 12 indikator. Dari 10 indikator telah mencapai target tahun 2018 dan 2 indikator belum mencapai target tahun 2018. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Fungsi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program perencanaan Pembangunan Daerah									
	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	%	84	90	80	96	91,57	95,39	Belum Tercapai	100,00
	Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	NA	NA	NA	84	83,87	99,85	Belum Tercapai	85,00
	Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	%	71	73	100	96	100	104,17	Tercapai	100,00
	Persentase kegiatan prioritas yang didanai	%	NA	NA	80	80	80	100,00	Tercapai	81,00
	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	%	25	28	86,25	>31,00	87,15	281,13	Tercapai	>33,00
2	Program perencanaan Perekonomian									
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai	100,00



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi i Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
3	Program Perencanaan sosial budaya									
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai	100,00
4	Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup									
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai	100,00
5	Program Perencanaan Pemerintahan									
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai	100,00
6	Program Kerjasama Pembangunan									
	Persentase kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai	100,00
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang									
	Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	0	20	100	100	100,00	100,00	Tercapai	80,00



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
8)	Program Pengendalian dan Evaluasi									
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan	%	NA	NA	NA	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2019

2) Penelitian dan Pengembangan

Kewenangan pemerintah daerah provinsi pada fungsi Penelitian dan Pengembangan mencakup menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, menyusun program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah provinsi, pelaksanaan inovasi daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan berada dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Kinerja penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan dilihat dari persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder. Capaian pada tahun 2018 sebesar 55% sesuai dengan target tahun 2018, dengan realisasi capaian target 100%.nSecara lebih rinci capaian kinerja penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan									
	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	NA	NA	59	55	55	100	Tercapai	

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2019



3) Keuangan

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan, dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kewenangan dalam menjalankan fungsi keuangan meliputi kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Fungsi Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijalankan oleh dua perangkat daerah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

Kinerja Fungsi Keuangan Daerah dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan sudah 90 perangkat daerah yang menyampaikan laporan. Namun persentase kepuasan pelayanan masih bernilai 85% pada tahun 2018. Persentase aset (barang milik daerah) Pemerintah daerah hanya sebesar 55%. Namun rata-rata nilai hasil evaluasi APBD dan LPP APBD Kabupaten Kota masih belum diketahui skor nilai yang telah dicapai .

Selain itu dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2015-2018 selalu mengalami peningkatan dari 1.013 Triliun Rupiah pada tahun 2015 menjadi 1.229 triliun rupiah pada tahun 2018. Kondisi realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2018 telah melebihi target tahun 2018 sebesar 1.224 triliun rupiah. Sejauh dalam tahapan optimalisasi teknologi untuk meningkatkan kinerja fungsi keuangan daerah telah menggunakan E-samsat dan E-payment untuk mengurangi adanya korupsi dan mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Meskipun telah menggunakan teknologi namun dilihat dari persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat masih sangat sedikit, dilihat dari realisasi kinerja pada tahun 2018 hanya 30% saja masyarakat yang menggunakan layanan inovasi teknologi samsat. Kondisi tersebut perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan pengenalan secara lebih luas kepada masyarakat terkait inovasi teknologi samsat yang telah digunakan.

Kinerja indikator urusan keuangan ditunjukkan melalui 13 indikator yang tersebar pada 7 program. Dari 13 indikator tersebut terdapat 11 indikator dengan



status telah mencapai target tahun 2018; dan 2 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program urusan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Fungsi Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi	Status	Tahun 2019
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan	%	80	82	88	90	90	100,00	Tercapai	93.55
	Persentase Kepuasan Pelayanan	%	80	80	82	85	85	100,00	Tercapai	90.00
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah									
	Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah Daerah	%	3.54	46,5	71,43	68,93	65	94,30	Belum Tercapai	74.07
	Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah Daerah	%	17.78	24,44	41,95	55,56	55	98,99	Belum Tercapai	71.11
3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota									
	Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi APBD dan LPP APBD Kabupaten/Kota	Skor	NA	NA	BB	BB	BB	100,00	Tercapai	BB
4	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah									
	Realisasi pendapatan asli daerah	Triliun Rupiah	1.013	1.079	1.091	1.224	1.229	100,41	Tercapai	1,330
	Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah	%	40,3	37,03	33,59	36,85	34,68	94,11	Tercapai	37,76
	Persentase tunggakan pajak daerah yang tertagih	%	NA	9	17,17	15	17	113,33	Tercapai	18,00



No	Program dan indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi	Status	Tahun 2019
5	Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Daerah									
	Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan	%	88,45	90	97,04	90	93,99	104,43	Tercapai	90,00
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									
	Jumlah jenis inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi	Jenis layanan	Samsat online	Samsat Link	Samsat Link	E-Samsat dan e-payment	E-Samsat dan e-payment	100,00	Tercapai	E-Samsat dan E-payment
	Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat	%	2	6	7	10	10	100,00	Tercapai	20,00
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi Publik									
	Rata-rata lamanya waktu pelayanan Samsat (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor)	Waktu (menit)	-	35	30	30	20	150,00	Tercapai	25
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT	Kategori (scoring)	Baik (7,25)	-	7,5	7,75	7,75	100,00	Tercapai	Baik (8.00)

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2019

4) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peran dan fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan



pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 salah satunya adalah fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pelatihan meliputi penyusunan formasi; pengangkatan ASN daerah; penetapan kenaikan pangkat ASN daerah, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN; Pemberhentian sementara dari jabatan; dan penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kompetensi ASN. Dalam penyelenggaraan fungsi kepegawaian dan diklat di Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDM).

Kinerja fungsi kepegawaian dan diklat masih belum bisa memenuhi kebutuhan ASN di daerah Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut dilihat dari indikator persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan yang hanya memiliki realisasi capaian 55,13% pada tahun 2018. Dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 58%, sehingga persentase realisasi indikator persentase ketersediaan ASN hanya sebesar 95,05% dengan status belum mencapai target tahun 2018. Selain itu indikator penurunan kasus indisipliner pegawai tingkat sedang dan berat mengalami penurunan pada tahun 2018 yang realisasinya hanya 13 kasus dibandingkan tahun 2018 sebanyak 13 kasus dengan persentase realisasi sebesar 107,14%. Kondisi penurunan kasus indisipliner tersebut memperlihatkan kinerja yang baik dari penyelenggaraan fungsi kepegawaian dan diklat.

Fungsi Kepegawaian memiliki 2 program dan 6 indikator, dari 6 indikator tersebut terdapat 3 indikator yang belum mencapai target dan 2 indikator lainnya telah mencapai target tahun 2018. Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja Tahun 2017	Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2018				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	Tahun 2019
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
	Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	50	52	55,87	58	55,13	95,05	Belum Tercapai	60,00
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan	%	NA	NA	97,02	80	84,80	106,00	Tercapai	82,00
	Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat	Kasus	13	8	15	14	13	107,14	Tercapai	12 Kasus
	Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik	%	62	70	92,7	92	100	108,69	Tercapai	93,00
	Indeks Kepuasan Pelayanan ASN	indeks	B	B	B	B	B	100,00	Tercapai	B
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi	%	5,3	8,5	17,17	19,64	13,68	69,65	Belum Tercapai	25,21

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

5) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan rancangan Perda, dan menyusun serta menetapkan RKPD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau memiliki 3 program yakni Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat; Program Penantuan



Peraturan Perundang-Undangan; dan Program Peningkatan Publikasi, komunikasi dan informasi.

Kinerja penyelenggaraan fungsi kesekretariatan DPRD sejauh ini dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD capaiannya sudah 100% sesuai SOP. Kondisi tersebut telah mampu mencapai target tahun 2018 sebesar 90% sehingga persentase capaian indikator sebesar 111,11%. Hal yang sama juga terjadi pada persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD yang sudah 100% sesuai SOP pada tahun 2017. Namun dilihat dari Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD masih berada pada skor 64. Meskipun kondisi tersebut telah mencapai target tahun 2018 namun masih perlu adanya peningkatan untuk mencapai target 2019 dengan skor 66.

Penataan peraturan perundang-undangan juga menunjukkan perkembangan yang baik dilihat dari persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sudah 100% sesuai SOP. Namun terkait dengan Jumlah Reses Anggota DPRD masih belum menunjukkan perkembangan yang baik karena belum mampu mencapai target tahun 2018 sebesar 135 orang/kali.

Penyelenggaraan Fungsi Sekretariat DPRD dilakukan melalui 3 program dan 7 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2018 keseluruhan telah mencapai target tahun 2018. Secara lebih rinci capaian kinerja fungsi sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									
	Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP	%	85	87	100	90	100	111,11	Tercapai	92,00
	Persentase pelayanan administrasi	%	85	87	100	90	100	111,11	Tercapai	92,00



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	keuangan DPRD sesuai SOP									
	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Skor	-	60	62	64	64	100,00	Tercapai	66,00
	Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100,00
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan									
	Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP	%	85	87	100	90	100	111,11	Tercapai	92,00
3	Program Peningkatan Publikasi, Komunikasi dan Informasi									
	Jumlah Media Massa yang berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	MoU				95	163	171,58	Tercapai	95
	Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi	Orang Kali				135	135	100,00	Tercapai	135

Sumber: Sekretariat DPRD, 2019

6) Sekretariat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah



Provinsi Kepulauan Riau memiliki 9 biro penunjang yakni Biro Pemerintahan dan Perbatasan; Biro Hukum; Biro Administrasi Pembangunan; Biro Administrasi Layanan Pengadaan; Biro Umum; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Administrasi Perekonomian; Biro Organisasi dan Korpri; dan Biro Humas, Protokol, dan Penghubung.

Secara keseluruhan dalam Biro Pemerintahan dan Perbatasan pada tahun 2018 telah mencapai indikator kinerja dengan capaian 100% sesuai target baik indikator peringkat LPPD dengan Status Sangat Tinggi; indikator Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dengan capaian 100%; Indikator Persentase Fasilitas Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota dengan capaian 100%; dan indikator Persentase Lokalisasi prioritas dan PKSB dengan capaian 100%.

Kinerja Biro hukum pada tahun 2018 masih perlu ditingkatkan, dilihat dari Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan baru terealisasi 6 dokumen masih belum mampu memenuhi target tahun 2018. Selain itu jumlah kasus masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum oleh pemprov kepri hanya ada 4 kasus, masih belum memenuhi target. Sedangkan Jumlah MoU antara Gubernur Kepri dengan LBH dan atau OBH yang terverifikasi pada tahun 2018 hanya teralisasi 1 MoU masih dibawah target tahun 2018 sebesar 3 MoU. Kinerja Biro administrasi Pembangunan juga perlu di tingkatkan kedepannya. Dilihat dari Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target pada tahun 2018 juga memiliki realisasi fisik sebesar 98,50% sedangkan realisasi keuangan sudah mencapai 95,98%. Indikator Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Biro Administrasi Layanan Pengadaan juga belum mampu mencapai target, realisasi pada tahun 2018 hanya sebesar 69,64%.

Kinerja Biro umum dan Biro Kesejahteraan Rakyat dilihat dari indikatornya secara keseluruhan telah mencapai target tahun 2018 dengan persentase realisasi sebesar 100%. Biro Administrasi Perekonomian, dilihat dari Rata-rata tingkat kesehatan BUMD masih belum mampu mencapai target, realisasinya pada tahun 2018 hanya 56,06%. Sedangkan pada Biro Organisasi dan Korpri indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh kementerian masih sangat rendah karena hanya terdapat 4 perangkat daerah saja, masih sangat kurang jika dibandingkan target tahun 2018 sebanyak 23 perangkat daerah. Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga masih rendah belum mampu



mencapai target tahun 2018. Biro Humas, Protokol dan Penghubung juga perlu meningkatkan kinerjanya dilihat dari indikator Jumlah Kerjasama Yang Difasilitasi Oleh Bagian Penghubung dan Kerja sama di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepulauan Riau masih rendah, hanya 9 kerja sama saja sedangkan target tahun 2018 sebanyak 10 kerja sama yang difasilitasi.

Penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah dilakukan melalui 25 program dan 48 indikator kinerja. Dilihat dari capaian tahun 2018 terdapat 7 indikator yang belum mencapai target tahun 2018 dan 41 indikator yang telah mencapai target tahun 2018. Secara lebih rinci dapat dilihat apada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Biro Pemerintahan dan Perbatasan									
1	Program Peyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah									
	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Peringkat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100%	Tercapai	Tinggi
	Presentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	%	100	100	94,21	100	100	100%	Tercapai	100,00
2	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan									
	Presentase Fasilitas Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota	%	80	80	85	95	95	100%	Tercapai	100
	Presentase Lokasi Prioritas dan PKSB yang di data/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	%	9,76	34,15	N/A	100	100	100%	Tercapai	100



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Biro hukum									
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan									
	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Jumlah	NA	NA	10	7	6	85,71	Belum Tercapai	7
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum									
	Persentase Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi	%	16	49	100	100	100	100	Tercapai	100,00
3	Program Pembinaan Hukum									
	Persentase ranperda yang diusulkan pemrakarsa yang diakomodir dalam propemperda	%	21	15	67	72,72	73	100,39	Tercapai	76,00
4	Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum									
	persentase perkara perdata dan TUN yang dihadapi oleh pemprov yang tertangani	%	2	5	57	30	48	160	Tercapai	40,00
	jumlah kasus masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum oleh pemprov kepri	Kasus	NA	NA	NA	5	4	80	Belum Tercapai	5
	Jumlah MoU antara Gubernur Kepri dengan LBH dan atau OBH yang terverifikasi	Dokumen	NA	NA	NA	3	2	66,66	Belum Tercapai	3



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Biro Administrasi Pembangunan									
5	Program e-Government									
	Jumlah sistem informasi administrasi pembangunan yang terintegrasi	Unit Sistem	NA	NA	2	3	3	100	Tercapai	5
6	Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan									
	Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	%	Fisik 93,00 Keu 90,00	Fisik 94,00 Keu 89,00	Fisik 84,55 Keu 88,04	Fisik 100,00 Keu 95,00	Fisik 98,50 Keu 95,98	Fisik 98,50 Keu 101,03	Tercapai	Fisik 100,00 Keu 95,00
7	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan									
	Persentase dokumen administrasi pembangunan tersusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai	100,00
8	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi									
	Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah	Kab/Kota	NA	NA	1	3	3	100	Tercapai	4
	Biro Administrasi Layanan Pengadaan									
9	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah									
	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan	%	NA	NA	65,26	75,00	69,64	92,86	Belum Tercapai	80,00



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	pemerintah Provinsi Kepulauan Riau									
10	Program e-procurement									
	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (E-Procurement)	%	NA	NA	82,76	70,00	74,58	101,54	Tercapai	75,00
	Biro Umum									
11	Program Pelayanan KDH/WKDH yang di fasilitasi (2018-2021)									
	Jumlah layanan kedinasan KDH/WKDH yang sesuai prosedur	layanan	2	2	2	2	2	100	Tercapai	2
	Jumlah layanan rumah tangga KDH/WKDH yang dilayani sesuai prosedur	layanan	2	2	2	2	2	100	Tercapai	2
12	Program Dukungan Pelayanan Umum									
	Persentase pelaksanaan pelayanan umum sesuai SOP	%	50	50	100	100	100	100	Tercapai	100,00
	Skor Kepuasan Masyarakat	Skor	NA	NA	NA	75	75	100	Tercapai	80
13	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan sekretariat daerah									
	Persentase barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah yang terjamin keamanannya	%	80	100	100	100	100	100	Tercapai	100,00



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Persentase barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah yang dikelola sesuai dengan standar	%	80	90	100	90	90	100	Tercapai	90,00
	Biro Kesejahteraan Rakyat									
14	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan									
	Persentase pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	%	NA	NA	100	100	100	100	Tercapai	100,00
	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	NA	NA	Na	25	25	100	Tercapai	50,00
15	Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat									
	Persentase Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat tingkat provinsi	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai	100,00
	Persentase Pembinaan , Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai	100,00
	Persentase Pembinaan , Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai	100,00
	Biro Administrasi Perekonomian									
16	Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Pembangunan									
	Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang	rekomendasi	NA	NA	13	5	13	260	Tercapai	6



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				Tahun 2019
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	perekonomian yang dihasilkan									
	Jumlah koordinasi bidang perekonomian yang terlaksana	Angka	NA	NA	13	14	18	129	Tercapai	14
	Jumlah monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian yang dilaksanakan	Laporan	NA	NA	NA	7	7	100	Tercapai	7
17	Program Peningkatan Kinerja BUMD									
	Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD	Skor	NA	NA	0	32	*56,06	175,19	Tercapai	35,00
	Biro Organisasi dan Korpri									
18	Program kelembagaan organisasi pemerintah daerah									
	Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	%	NA	NA	116	87	90	103,45	Tercapai	90,00
19	Program pembinaan dan pengembangan aparatur									
	Persentase Jabatan yang telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	%	63	66	56	61	68,3	111,97	Tercapai	76,00
	Persentase Perangkat daerah yang telah memiliki dokumen evaluasi jabatan	%	53	53	67	61	68,3	111,97	Tercapai	76,00
	Persentase jabatan struktural yang telah disusun standar kompetensi Jabatan managerial sesuai ketentuan	%	50	58	99	99	99	100	Tercapai	99,00
20	Program peningkatan kualitas pelayanan									



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
			Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018			
					Target		Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	dan informasi publik									
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan standar pelayanan publik	%	55	71	74,83	74	77,42	104,62	Tercapai	84,00
	Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh kementerian	%	NA	NA	4	23	4	17,39	Belum Tercapai	46,00
	Persentase SOP pada seluruh Opd yang tersusun.	%	NA	NA	NA	57,00	62,28	109,26	Tercapai	71,00
	Persentase SOP pada seluruh OPD yang telah diimplementasikan	%	66	71	78	85	88,88	104,56	Tercapai	95,00
	Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik	Skor SKM	NA	NA	76,09	62,51	NA	122,88	Tercapai	67,00
21	Program pembentukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih									
	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	41,15	60	64,18	67	NA	95,79	Belum Tercapai	67,00
22	Program Kesejahteraan Anggota Korpri									
	Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Provinsi	Angka	NA	NA	11	NA	NA	100	Tercapai	70



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Nasional	Angka	NA	NA	2	NA	NA	100	Tercapai	4
	Biro humas, Protokol dan Penghubung									
23	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH									
	Persentase Pelayanan KDH/WKDH Bidang Kehumasan, Keprotokolan, dan Penghubung dan Kerjasama Yang Sesuai Dengan SOP	%	18	81	100	100	100	100,00	Tercapai	100,00
24	Program Pengembangan Publikasi, Komunikasi dan Informasi									
	Jumlah Media Massa Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Media Massa	NA	NA	128	10	172	1720,00	Tercapai	10,00
	Persentase Media Informasi Yang Digunakan	%	NA	NA	142,86	100	100	100,00	Tercapai	100,00
25	Program Fasilitasi dan Kerjasama dengan Berbagai Pihak									
	Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri yang Difasilitasi di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri	Kegiatan	7	2	4	4	4	100,00	Tercapai	4



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	Jumlah Kerjasama Yang Difasilitasi Oleh Bagian Penghubung dan Kerjasama di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri	Mou	-	-	8	10	9	60,00	Belum Tercapai	10

Ket: *) Nilai BUMD PDAM Tirta Kepri, sehubungan 2 BUMD lainnya belum memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian yang berpedoman pada Modul penilaian BUMD yang dikeluarkan oleh Mendagri pada Oktober 2017.

Sumber: Sekretariat Daerah, 2019

7) Pengawasan

Kinerja indikator program pembangunan pada fungsi pengawasan ditunjukkan melalui 9 indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke 9 indikator yang telah rilis data tahun 2018, secara keseluruhan indikator dengan status telah mencapai target.

Pencapaian kinerja pengawasan tahun 2018 dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi 100%; Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Level 6; Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau 100%; Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai sebesar 92%; Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri dengan status WTP; Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Level 6; Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Zona Kuning; Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P sebesar 96%; dan Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri Status Hijau. Indikator kinerja yang capaiannya perlu dioptimalkan karena persentase capaian targetnya belum mencapai angka 100%, yaitu indikator: Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan fungsi pengawasan dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 2.66
Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.									
	1) Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi	%	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100,00
	2) Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	100,00	Tercapai	3
	3) Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se- Provinsi Kepulauan Riau	%	100	85,71	116	100	100	100,00	Tercapai	100,00
2	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan									
	4) Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai	%	30	30	60	50	92	184,00	Tercapai	60,00
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah									



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				Target Kinerja
						Tahun 2018				Tahun 2019
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
	5) Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	Tercapai	WTP
	6) Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	100,00	Tercapai	3
	7) Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Zona	Hijau	Kuning	Kuning	Hijau	Hijau	100,00	Tercapai	Hijau
4	Program Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri									
	8) Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P	%	60	60	100	85	96	112,94	Tercapai	85,00
	9) Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri	Status	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	100,00	Tercapai	Hijau

Sumber: Inspektorat Daerah

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Nilai rata-rata konsumsi penduduk Provinsi Kepulauan Riau selama satu tahun, yang diukur melalui konsumsi rumah tangga per kapita, selama kurun waktu 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Nilai rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita riil pertahun tahun 2011 sebesar 25.008,07 ribu rupiah menjadi 28.922,11 ribu rupiah pada tahun 2015, artinya selama kurun waktu 5 tahun konsumsi rumah tangga per kapita Kepulauan Riau meningkat sebesar 15,65 persen, seperti terlihat pada Tabel berikut ini.



Tabel 2.67
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	43.734,37	46.714,29	49.858,73	53.284,03	57.063,33
2.	Persentase Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terhadap PDRB	36,10	34,81	34,77	35,51	36,50

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi salah satu indikator produksi untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Dengan kata lain, NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Pada tahun 2013 hingga 2017 NTP di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 NTP di Provinsi Kepulauan Riau tercatat 97,02 mengalami penurunan sebesar 0,45 persen dibanding NTP bulan November 2017. NTP subsektor Tanaman Pangan tercatat sebesar 97,27; NTP subsektor Hortikultura sebesar 98,41; NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 80,15; NTP subsektor Peternakan sebesar 104,76; dan NTP subsektor Perikanan sebesar 111,70.

Dari lima subsektor yang menyusun NTP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017, tercatat sektor yang melebihi 100 yaitu pertanian Terernakan dan perikanan, sedangkan sektor pertanian tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan rakyat, dan umum (NTP) kurang dari 100, seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.68
Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tanaman Pangan (NTP-P)	72,48	99,95	99,50	98,57	97,27
2.	Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTP-H)	126,25	99,18	102,68	102,53	98,41
3.	Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-Pr)	119,41	92,53	85,49	80,15	80,15
4.	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTP-Pt)	90,07	106,33	104,66	104,05	104,76
5.	Nilai Tukar Petani Perikanan (NTP-Pi)	108,15	107,26	107,39	108,98	111,7
	Nilai Tukar Petani (NTP) umum	104,96	100,93	99,45	98,16	97,98

Sumber : BPS Kepri 2018, Berita Resmi Statistik "Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau Desember 2018

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan

Di Provinsi Kepulauan Riau terjadi peningkatan panjang jalan Provinsi dari 679,49 km pada tahun 2011 meningkat menjadi sepanjang 890,11 km pada tahun 2016. Sementara itu jumlah kendaraan mencapai sebanyak 1.086.087 unit, terdiri dari sejumlah 124.664 mobil penumpang; sebanyak 2.310 unit bus; sebanyak 30.004 unit truk, dan sebanak 929.109 unit sepeda motor. Jumlah kendaraan terbanyak di Kota Batam; Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Gambaran jumlah kendaraan bermotor dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Kendaraan				Jumlah
		Mobil Penumpang	Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	
1.	Karimun	6.415	70	2.426	99.736	108.647
2.	Bintan	6.125	314	2.528	105.337	114.304
3.	Natuna	1.157	52	544	19.537	21.290
4.	Lingga	861	75	530	31.566	33.032
5.	Kepulauan Anambas	NA	NA	NA	NA	0
6.	Batam	106.203	1.784	20.962	605.872	734.821
7.	Tanjungpinang	18.212	226	5.448	141.633	165.519
	Provinsi Kepulauan Riau	138.973	2.521	32.438	1.003.681	1.177.613

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2017

2. Jumlah Bank dan Kantor Cabang

Keberadaan lembaga keuangan/perbankan sangat penting dalam menjaga kelangsungan perekonomian daerah dan ketersediaan dana bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Tidak saja sebagai sarana penyaluran dana tetapi juga berfungsi sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Terdapat sebanyak 418 unit Bank Umum di Kepulauan Riau pada tahun 2017, dengan perincian tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Jenisnya Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017

No	Jenis	Kantor Pusat	Kantor	Cabang Pembantu	Kantor Kas	Jumlah
1.	Bank Umum Pemerintah	0	12	75	83	170
2.	Bank Pembangunan Daerah	0	7	17	13	37
3.	Bank Swasta Nasional	0	35	75	21	131
4.	Bank Asing dan Campuran	0	4	1	4	9
5.	Bank Perkreditan Rakyat	43	28	0	0	71
	Jumlah	43	86	168	121	418

Sumber: BPS Kepri, Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2018

3. Jumlah Penginapan dan Hotel

Perkembangan jumlah perhotelan di Provinsi Kepri terdiri dari hotel berbintang dan hotel non-bintang. Banyaknya hotel pada tahun 2017 sebanyak 429 hotel meningkat dari sebanyak 410 unit tahun 2014. Demikian pula jumlah kamar dari sebanyak 16.851 kamar pada tahun 2014 meningkat menjadi sebanyak 23.821 unit pada tahun 2017. Secara rinci jumlah hotel dan jumlah kamar hotel berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71
Jumlah Hotel dan Kamar Hotel di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2014-2017

No	Kabupaten/Kota	Hotel				Kamar			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.	Karimun	68	69	72	65	1.099	1.174	2.355	2230
2.	Bintan	35	36	38	42	1.308	1.416	2.339	2921
3.	Natuna	41	44	42	39	283	320	532	523
4.	Lingga	20	22	20	23	311	360	451	513
5.	Kepulauan Anambas	20	21	20	16	90	100	323	263
6.	Batam	182	190	191	203	12.183	13.388	12.983	15.146
7.	Tanjungpinang	44	44	46	45	1.577	1.660	2.211	2.225
	Kepulauan Riau	410	426	429	433	16.851	18.418	21.194	23.821

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2017

4. Jumlah Restoran

Jumlah restoran di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari sebanyak 552 unit pada tahun 2013 menjadi sebanyak 735 unit pada tahun 2017, dengan perincian dan penyebaran restoran tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Karimun	36	36	36	49	49
2.	Bintan	49	69	69	141	141
3.	Natuna	45	45	45	39	39
4.	Lingga	79	72	72	70	70
5.	Kepulauan Anambas	30	30	47	20	20
6.	Batam	230	495	495	375	375
7.	Tanjungpinang	83	158	163	41	41
	Kepulauan Riau	552	905	927	735	735

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2017

5. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Penggunaan air minum yang disalurkan oleh PDAM Tirta Kepulauan Riau Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 sebanyak 3.183.898 m³. Di samping itu, dibangun pula sarana dan prasarana air bersih berbasis masyarakat. Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman menunjukkan peningkatan dari sebesar 65,50% pada tahun 2013 menjadi 89,44% pada tahun 2017 seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.73
Persentase Pelayanan Akses Air Bersih/Minum yang Aman di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2017

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%	65,50	67,10	88,50	89,23	89,44

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman

6. Ketersediaan daya listrik

Pembangunan suatu wilayah yang cukup pesat seperti di Provinsi Kepulauan Riau tentu membutuhkan sarana pendukung seperti ketersediaan sumber energi. Berdasarkan data yang diperoleh dari PLN, di tahun 2017 daya terpasang yang tersedia sebesar 245.847 KWh. Produksi listrik sebesar 2.681.761.619 KWh dengan listrik terjual sebanyak 2.823.163.123 KWh. Kebutuhan listrik sangat besar, sehingga perlu ada penambahan daya terpasang. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



Tabel 2.74
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero)
pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Daya Terpasang (KWh)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)
1	Karimun	81.100	17.386.552	196.870.370
2	Bintan	32.960	17.267.229	158.369.112
3	Natuna	29.337	4.128.601	43.996.559
4	Lingga	13.079	3.073.019	33.845.702
5	Kepulauan Anambas	11.185	1.935.853	17.182.568
6	Batam	3.272	2.612.240.558	2.077.735.974
7	Tanjungpinang	74.914	25.729.807	295.162.838
	Kepulauan Riau	245.847	2.681.761.619	2.823.263.123

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2018

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Jumlah Tindak Pidana

Jumlah tindak pidana menggambarkan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu di suatu daerah. Jumlah tindak pidana menunjukkan jumlah dari sebanyak 5.220 kasus pada tahun 2013 menurun menjadi 4.350 kasus pada tahun 2017. Hal ini perlu mendapatkan perhatian untuk penanganan. Gambaran penyebaran berdasarkan kabupaten/kota dengan perincian sebagai berikut ini.

Tabel 2.75
Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017

No	Kepolisian Resort	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Karimun	208	314	535	529	382
2.	Bintan	318	220	220	166	144
3.	Natuna	75	116	148	104	90
4.	Lingga	51	47	74	66	70
5.	Kepulauan Anambas	-	-	-	-	21
6.	Batam	3.591	3.885	4.270	3.701	2.925
7.	Tanjungpinang	732	559	685	673	519
	POLDA Kepulauan Riau	245	265	252	235	199
	Jumlah Total	5.220	5.406	6.184	5.474	4.350

Sumber: BPS Kepri, Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2017

2. Pelayanan Perizinan

Pelayanan Perizinan di Provinsi Kepulauan Riau secara bertahap dipindahkan dari perangkat daerah ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan



Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), sebagai suatu kemudahan pelayanan dan keterpaduan pelayanan. Jumlah Izin dan non perizinan yang dilayani sampai dengan tahun 2016 sebanyak 928 jenis perizinan/ non perizinan. Sedangkan jenis izin dan non perizinan yang diterbitkan oleh BPMPTSP hanya sebanyak 107 jenis. Masih terdapat beberapa jenis perizinan yang ditangani oleh PD sektoral. Sementara itu, jumlah permohonan izin yang terlayani melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) semakin menunjukkan peningkatan. Sedangkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2016 sebesar 80 seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Pelayanan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Izin dan nonperizinan yang dilayani oleh Pelayanan terpadu satu pintu	izin	114	450	1.264	1.264
2	Jumlah jenis Izin dan non Izin yang diterbitkan BPMPTSP	jenis	104	104	110	110
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	%	70	80	81,25	76,61

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

3. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penyerapan tenaga kerja (hingga Agustus 2017) terbesar adalah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 259.131 orang (28,89 persen) dan Sekolah Dasar ke bawah sebanyak 205.942 orang (22,96 persen). Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) menurun dari 353.581 orang (41,12 persen) pada Agustus 2016 menjadi 337.386 orang (37,62 persen) pada Agustus 2017. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) mengalami peningkatan dari sebanyak 140.516 orang (16,34 persen) pada Agustus 2016 meningkat menjadi sebanyak 147.268 orang (16,42 persen) pada Agustus 2017.

Tabel 2.77
Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2015-2017

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2015	2016	2017
1	SD Ke bawah	190.044	219.943	205.942
2	Sekolah Menengah Pertama	138.202	133.638	131.444
3	Sekolah Menengah Atas Umum	265.733	229.176	259.131
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	115.422	136.540	153.146
5	Perguruan Tinggi	127.269	140.516	147.268
	Jumlah	836.670	859.813	896.931

Sumber : BPS, berita resmi statistik "Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, Agustus 2017", 2018

b. Rasio ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Riau (tahun 2018) diketahui sebesar 41,69%. Perincian angka ketergantungan terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.78
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

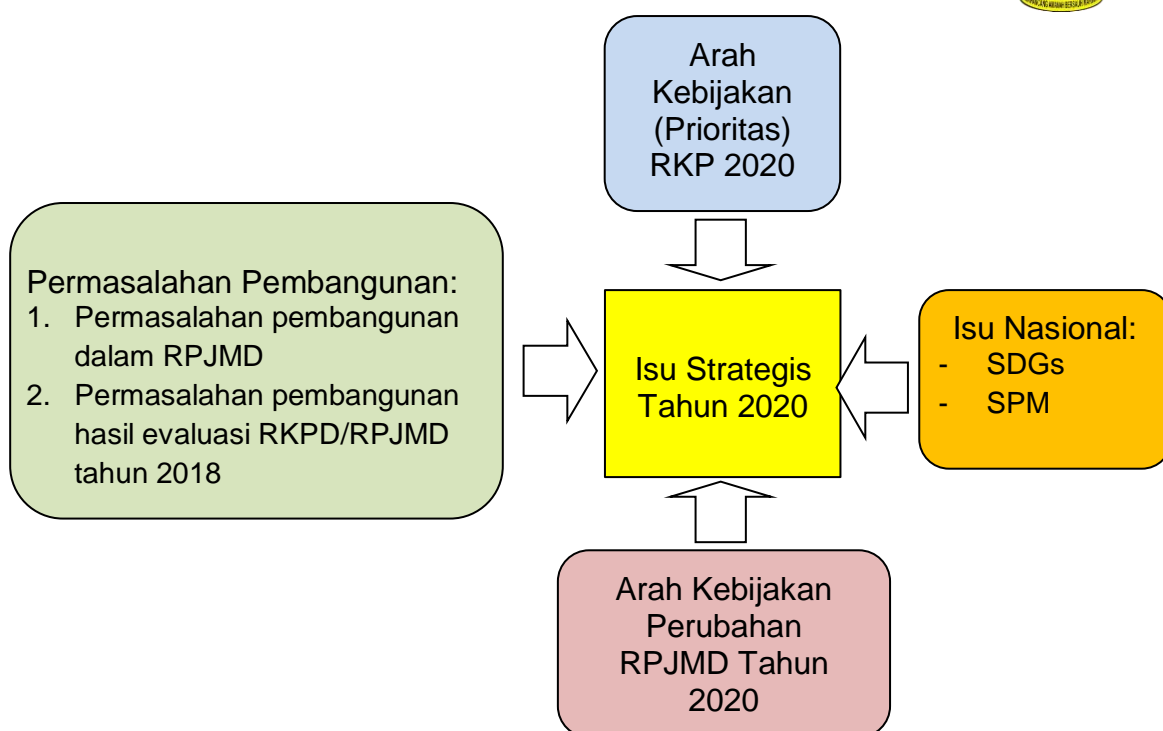
No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk Usia Tidak Produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas)	248.137	335.260	583.397
2	Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	714.555	684.742	1.399.297
3	Jumlah penduduk	962.692	1.020.002	1.982.694
4	Rasio Ketergantungan	34,73	48,96	41,69

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2018

2.2 Permasalahan Pembangunan

2.2.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (Isu strategis)

Perumusan isu strategis tahun 2020 dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik yang bersumber dari tiga (3) aspek penting, yaitu: (1) Hasil Evaluasi capaian indikator RPJMD tahun 2018, (2) rumusan isu strategis berdasarkan hasil Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Secara skematik dikemukakan pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.25 Skema Perumusan Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020

Hasil perumusan isu strategis dalam pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79
Perumusan Isu Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Isu strategis Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021	Arah Kebijakan (Prioritas Nasional) Tahun 2020	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2020	Isu strategis Daerah tahun 2020
<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Pembangunan Manusia Belum Optimal Pemerataan dan Mutu Pendidikan Masih Kurang Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Optimal 	(1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat 	1. Kualitas sumberdaya manusia yang masih relatif rendah.
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kemaritiman dan Pariwisata Pengangguran Cukup Tinggi Kemiskinan Perlu Terus Diturunkan Kesenjangan Antar Kelompok Pendapatan Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi 	(3) Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja; dan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan iklim investasi yang kondusif Peningkatan daya saing ekonomi 	2. Pertumbuhan investasi yang rendah dan belum mengarah pada investasi di bidang kemaritiman dan pariwisata. 3. Daya saing produk dan jasa usaha ekonomi yang masih rendah.



Isu strategis Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021	Arah Kebijakan (Prioritas Nasional) Tahun 2020	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2020	Isu strategis Daerah tahun 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Pelestarian Budaya Melayu 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat kebudayaan melayu 	4. Lambatnya pengembangan Kepri sebagai Pusat Kebudayaan melayu.
<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai • Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten/Kota • Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Ancaman Bencana • Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal 	(2) Konektivitas dan Pemerataan (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing ekonomi 	5. Kurangnya kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah
<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas dan Tata kelola pemerintahan belum optimal • Kesenjangan dan Keadilan Gender Masih Rendah 	(5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan 	6. Inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang belum maksimal.

2.2.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan penyajiannya dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan. Perumusan permasalahan dilakukan dengan mendasarkan pada data hasil evaluasi RKPD tahun 2018.

2.2.2.1 Urusan Pemerintahan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan menengah. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya APM SMA/MA/SMK pada tahun 2018, APM SMA/MA/SMK baru mencapai sebesar 77,30%.
- Masih terdapatnya ruang kelas SMA/SMK/MA dalam kondisi rusak. Hal ini ditunjukkan dengan persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK dalam kondisi baik baru mencapai sebesar 92,10% dan kurang baik/rusak sebesar 7,90%, hal ini belum mencapai target tahun 2018.
- Masih terbatasnya SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B, hanya 74% yang sudah terakreditasi minimal B.
- Relatif rendahnya rata-rata Nilai UN untuk jenjang SLTA, capaian tahun 2018 baru sebesar 50,59 hal ini perlu mendapatkan perhatian.



- e. Adanya permasalahan lahan dalam pengusulan kegiatan yang tidak diikuti dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.

2) Kesehatan

- a. Persentase Puskesmas minimal dengan 5 jenis tenaga kesehatan masih terbatas, hanya 56,32% dari total keseluruhan puskesmas.
- b. Masih minimnya pelayanan imunisasi dasar lengkap bagi usia 0-11 bulan, hanya 91% saja belum 100%.
- c. Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi serta balita.

3) Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

- a. Masih terdapat jembatan dalam kondisi rusak sebesar 19,89%;
- b. Masih terdapat jalan dalam kondisi kurang baik sebesar 29,69 %
- c. Belum optimalnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, baru 46,5 %;
- d. Belum semua penduduk terlayani kebutuhan air baku, pada tahun 2018 baru sekitar 70,42 %

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih luasnya kawasan kumuh di perkotaan yang harus segera ditangani yaitu sedangkan yang baru tertangani baru sebesar 529,82 Ha;
- b. Terbatasnya ketersediaan dan pasokan air bersih bagi masyarakat, masih terdapat 7,85 % masyarakat yang belum dapat mengakses air bersih/minum yang aman;
- c. Belum optimalnya pelayanan sanitasi.
- d. Belum tertatanya Bangunan dan Lingkungan di kawasan strategis Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

- a. Masih terbatasnya jumlah PPNS yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dimana tahun 2018 baru ada sebanyak 22 orang dari 27 orang yang ditargetkan.
- b. Masih tingginya kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan juga Peraturan Gubernur. Tahun 2018 masih terjadi 240 kasus pelanggaran, sama dengan tahun 2017 dan masih di atas target yang ditetapkan yakni 230 kasus.



- c. Masih terbatasnya personil Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam bidang pengendalian dan kenyamanan lingkungan. Tahun 2018 baru 42% dari total personil Satlinmas yang memiliki kompetensi tersebut.
- d. Masih adanya kabupaten/kota yang belum memiliki peta rawan kebakaran. Dari total 7 kabupaten/kota yang ada, baru 28,57% atau 2 kabupaten/kota yang memiliki peta rawan kebakaran.
- e. Belum optimalnya kesadaran pemilik hak suara untuk menggunakan hak mereka dalam pelaksanaan pemilihan umum.
- f. Masih sedikitnya desa/kelurahan yang terbentuk menjadi desa/kelurahan tangguh bencana, sampai tahun 2018 baru sebesar 1,2% dari total desa/kelurahan yang telah menjadi desa/kelurahan tangguh bencana.

6) Sosial

- a. Masih rendahnya keluarga miskin yang mendapatkan bantuan, baik melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun bantuan sosial lainnya. Tahun 2018 hanya 0,61% dan 38,09%.
- b. Belum optimalnya upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja penanganan berbagai jenis PMKS yang belum mampu mencapai 100%.
- c. Belum optimalnya pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang berfungsi mendukung upaya penanganan PMKS. Yakni baru 28,43% dan 32,49%.

2.2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja

- a. Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), belum mencapai target tahun 2018, dengan sumbangan pengangguran didominasi oleh Lulusan SMK.
- b. Belum optimalnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Belum optimalnya PUG dalam perencanaan dan penggaran daerah. Dapat dilihat dari persentase anggaran responsif gender dibandingkan dengan belanja daerah yang baru mencapai 9,32%.
- b. Masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, yakni kekerasan terhadap perempuan sebesar menjadi 28,08



kasus per 100.000 perempuan. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak, sebanyak 2,56 kasus per 10.000 anak.

- c. Rendahnya Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill, tahun 2018 hanya 1,13%.

3) Pangan

- a. Belum berkembangnya Teknologi pengolahan pangan dan tepat guna pertanian lokal, terlihat dari capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan masih 91,43%
- b. Kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan belum memadai
- c. Masih rendahnya ketersediaan pangan di Kepulauan Riau, terlihat dari ketersediaan Beras sebagai komoditas utama yang masih tergantung dari daerah lain.
- d. Masih rendahnya Kualitas konsumsi pangan, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat
- e. Masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah.
- f. Masih terbatasnya Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu. Diharapkan Kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur dan komprehensif guna mendorong percepatan diversifikasi pangan

4) Pertanahan

Belum optimalnya pengadaan dan sertifikat tanah

5) Lingkungan hidup

- a. Belum semua waduk memenuhi standart kualitas air sesuai baku mutu, yang sudah memenuhi standart baku mutu air baru dengan realisasi capaian 100%.
- b. Belum semua kab/kota memenuhi standart nominasi adipura, capaian tahun 2018 baru 85,71%

6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- a. Terbatasnya kewenangan dan komunikasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi disebabkan oleh ketimpangan SOTK.



- b. Terbatasnya anggaran APBD dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya partisipasi kader LKMD dalam mengikuti Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel.
- b. Pembentukan BUM Desa masih didominasi intervensi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- c. Belum Optimalnya kemampuan Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa dalam mendayagunakan potensi desa.
- d. Masih Lemahnya dukungan lintas program/lintas sektor dalam mendukung pengembangan BUM Desa.
- e. Lemahnya kualitas SDM di Desa.
- f. Belum Optimalnya Pembinaan PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap Posyantek.
- g. Masih minimnya TTG yang dimanfaatkan masyarakat, akibat dari belum bersedianya inovator terhadap alat TTG nya untuk digunakan oleh masyarakat.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya fasilitasi pembentukan kampung KB. Tahun 2018 baru 1 kampung KB yang terfasilitasi.
- b. Masih rendahnya cakupan masyarakat yang memakai kontrasepsi untuk menunjang program KB. Tahun 2018 baru 57,70%.

9) Perhubungan

- a. Pelayanan jaringan trayek angkutan penyeberangan perintis yang belum optimal, tahun 2018 baru sebesar 53,85 %.
- b. Pengelolaan pelabuhan penyeberangan yang kurang optimal, tahun 2018 baru sebesar 72,73%.
- c. Kurangnya ketersediaan prasarana lalu lintas, pada tahun 2018 tercatat sebesar 9,67 %.
- d. Kurangnya ketersediaan kapal angkutan, pada tahun 2018 sebesar 55,56 %.

10) Komunikasi dan Informatika

- a. Belum diumumkannya peraturan dan rancangan peraturan yang terkait dengan keterbukaan informasi public maupun peraturan yang dihasilkan oleh badan public, guna peningkatan peran serta masyarakat dalam penyusunan



- kebijakan public, misalnya perda/pegub tentang keterbukaan informasi public.
- b. Belum semuanya informasi berkala dan informasi terbuka diumumkan pada website PPID provinsi kepri seperti Rencana kerja dan anggaran badan public tahun 2018, kalender kegiatan yang berisi rencana pelaksanaan program kerja tahun 2018 dan ringkasan informasi public yang berisi alasan penolakan permohonan informasi publik, LHKPN, LAKIP 2017 Provinsi kepri, laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2017
 - c. Masih banyaknya OPD melakukan hosting di luar
 - d. Belum adanya regulasi yang mengatur tata kelola domain dan sub domain Pemerintah Provinsi Kepri
 - e. Kurangnya SDM di bidang programmer dan ilmu komputer

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Kualitas sumber daya pengurus koperasi kurang dan kurangnya pengawas koperasi yang dapat memeriksa, menilai dan membina koperasi.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian KSP/USP sehat, dikarenakan keterbatasan anggaran.
- c. Masih rendahnya UKM yang mengakses modal dari perbankan dan kelompok UKM terbina.
- d. Terbatasnya klaster UKM yang telah dibina dan difasilitasi pengembangannya.

12) Penanaman modal

- a. Belum optimalnya pengawasan aparat dan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) dari kalangan pelaku usaha;
- b. Belum optimalnya promosi dan pameran pengembangan penanaman modal yang dilakukan;
- c. Masih kurangnya sarana dan prasana pendukung pelayanan perizinan melalui pelayanan PTSP;
- d. Masih terdapat kekurangan dalam memberikan pelayanan terhadap perizinan dan non perizinan, baik itu SDM maupun Sarana dan Prasarana pelayanan
- e. Masih terdapat indikator yang target nya terlalu tinggi, akan tetapi tidak di barengi dengan anggaran yang memadai, contoh indikator Nilai IKM yang capaian sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 77,2%.

**13) Kepemudaan dan olah raga**

- a. Kurangnya kemampuan pemuda dalam pengembangan kewirausahaan
- b. Kurangnya prestasi pemuda dan olahraga tingkat nasional/internasional;
- c. Terbatasnya SDM pelatih secara kuantitas dan kualitas untuk menyiapkan bibit unggul penyumbang prestasi keolahragaan.
- d. Rendahnya budaya berolahraga pada masyarakat secara umum.

14) Statistik

- a. Data Sektoral Provinsi pada masing-masing OPD masih terbatas serta sering terjadi perbedaan data BPS dengan OPD
- b. Belum optimalnya pelaksanaan forum data serta Kurangnya SDM yang menguasai ilmu statistik.
- c. Keanggotaan belum mencakup seluruh OPD dan tidak permanen
- d. Konsistensi data statistik lintas sektor, pelaksanaan survey yang tumpang tindih dan penyebaran SDM yang tidak memadai
- e. Kurangnya koordinasi yang baik antara OPD, BPS tingkat provinsi dan kab/kota, LSM, dan perguruan tinggi dengan dinas kominfo provinsi kepri
- f. Data-data statistik yang disajikan melalui kerjasama dengan BPS merupakan data tahun sebelumnya (baru tersaji pada bulan Juli-agustus) sehingga belum bisa melihat data kondisi terkini.

15) Persandian

- a. Masih kurangnya SDM yang memahami tentang persandian;
- b. Belum optimalnya pegawai di lingkungan Pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang memanfaatkan email Aksara yang sudah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi.

16) Kebudayaan

- a. Belum optimalnya bangunan berciri khas melayu, terlihat dari capaian indikator Persentase warisan budaya tangible yang lestari sampai dengan tahun 2018 masih sebesar 19,93%.
- b. Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya, dilihat dari capaian indikator Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi local sampai dengan tahun 2018 masih sebesar 13,29%, hal ini dikarenakan kurangnya efisiensi pada anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan cagar budaya.

**17) Perpustakaan**

- a. Peningkatan Bahan pustaka pada tahun 2018 hanya sebesar 45,83%.
- b. Kurangnya minat baca dan promosi perpustakaan bagi masyarakat secara umum.
- c. IKM pelayanan perpustakaan yang baru mencapai nilai 84,35.

18) Kearsipan

- a. Belum semua perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku, tahun 2018 baru 74,47 %.
- b. Belum optimalnya pemeliharaan arsip dinamis dan statis.

2.2.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan**1) Kelautan dan Perikanan**

- a. Belum tersedianya SDM dalam unit organisasi pengelola pada 2 kawasan konservasi yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai level 3 (kawasan konservasi dikelola minimum)
- b. Ranperda dan Dokumen Final RZWP3K telah disampaikan ke DPRD Prov. Kepri- Ranperda dan Dokumen Final RZWP3K telah disampaikan ke DPRD Prov. Kepri. Saat ini sedang menunggu Proses Pembahasan di DPRD

2) Pariwisata

- a. Belum dimilikinya Grand Desain Pengembangan Pariwisata Provinsi Kepri.
- b. Kunjungan wisatawan asing dan wisatawan nusantara terpusat di Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun serta kurangnya promosi dan pemasaran potensi wisata di Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas. Hal ini dilihat dari rata-rata lama tinggal wisatawan pada tahun 2018 hanya 1,88 hari
- c. Belum tercapainya target kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Kepri, disebabkan pelaku usaha pariwisata, kemitraan pelaku usaha, perhotelah, travel biro dan restoran belum optimal. Hal ini terlihat dari capaian indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB sampai dengan tahun 2018 baru sebesar 2,32%
- d. Belum optimalnya pengembangan Wisata Bahari andalan Provinsi Kepulauan Riau, paket wisata dan pembinaan pemangku kepentingan pariwisata.
- e. Budaya sadar pariwisata belum melekat pada sikap dan perilaku masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata bahari untuk menunjang daya tarik wisata di Provinsi Kepulauan Riau.



- g. Belum optimalnya kunjungan wisatawan di hari-hari kerja/ weekdays dibandingkan dengan padatnya kunjungan wisman Singapura dan Malaysia di akhir pekan.
- h. Rendahnya kompetensi SDM pariwisata bahari dalam manajemen dan pengelolaan obyek wisata dan kerjasama antar pelaku usaha wisata.

3) Pertanian

- a. Rendahnya daya dukung pengembangan pertanian, hal ini ditandai dengan ketersediaan lahan terbatas, kondisi tanah kurang subur, daya dukung sumberdaya air yang kurang, minat petani semakin menurun, penerapan teknologi yang masih rendah (masih konvensional), jumlah penyuluh pertanian yang masih kurang dan terbatasnya sarana prasarana penyuluhan. Sehingga mengakibatkan capaian indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sampai dengan tahun 2018 belum sebesar 97,02%.
- b. Belum optimalnya produksi bibit bersertifikasi untuk pemenuhan kebutuhan bibit di Provinsi Kepulauan Riau, hal ini terlihat dari capaian indikator Jumlah Produksi Padi (ton) masih cukup rendah yaitu 833 ton pada tahun 2018.
- c. Tingginya resiko Kepulauan Riau terkena virus/penyakit tanaman akibat dari banyaknya bibit/benih atau produk pertanian yang masuk Kepulauan Riau dari luar negeri.
- d. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung transportasi produk-produk pertanian
- e. Banyaknya tanaman tua, sehingga produksi dan produktivitas mengalami penurunan;
- f. Tidak adanya peremajaan tanaman, baik secara swadaya masyarakat maupun dukungan anggaran dari pemerintah (APBD/APBN).

4) Kehutanan

- a. Masih rendahnya KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat
- b. Penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti masih sangat rendah, dilihat dari capainnya pada tahun 2018 hanya 87,5% saja yang ditangani.
- c. Masih banyaknya lahan kritis yang belum terehabilitasi, hanya 335 Ha lahan kritis yang telah terehabilitasi.

**5) Energi dan Sumber Daya Mineral**

- a. Belum semua desa/ kelurahan di Provinsi Kepri berlistrik, baru sekitar 85,18% desa/ kelurahan yang berlistrik.
- b. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan baru 32,10%.
- c. Terjadinya kerusakan lahan akibat pertambangan bauksit.

6) Perdagangan

- a. Menurunnya nilai bersih ekspor dan terbatasnya jenis produk asal Kepulauan Riau yang dapat diterima pasar internasional.
- b. Belum optimalnya peran sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
- c. Belum optimalnya pengawasan terhadap pasar tradisional yang dapat berakibat pada inflasi dan tidak terlindunginya konsumen.
- d. Masih banyaknya pasar yang belum memenuhi standar.

7) Perindustrian

- a. Kurangnya kemampuan teknologi produksi, manajerial dan pemasaran produk industri kecil dan menengah.
- b. Belum optimalnya pengembangan kawasan industri dan sarana prasarana pendukung diseluruh kabupaten/kota kecuali Batam.
- c. Lemahnya sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengelola (BP) Batam dalam pengelolaan sektor industri.
- d. Kurang memadainya infrastruktur yang menunjang berkembangnya industri.

8) Transmigrasi

- a. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai instansi pembina dalam hal ketransmigrasian.

2.2.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**1) Perencanaan**

- a. Belum 100% keselarasan program RKPD dengan RPJMD (hanya 91,57%); Renja PD dengan Renstra PD (hanya 83,87); dan Renstra PD dengan RPJMD.
- b. Masih rendahnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang, hanya 31% saja.
- c. Masih belum lengkapnya ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi; dokumen perencanaan sosial budaya; dokumen perencanaan sarana



prasarana wilayah dan lingkungan hidup; dan dokumen perencanaan pemerintahan.

- d. Masih rendahnya kerjasama yang telah diimplementasikan.
- e. Masih belum optimalnya informasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

2) Penelitian dan Pengembangan

- a. Hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder belum mampu dimanfaatkan secara keseluruhan oleh stakeholder, hanya 55% saja yang dimanfaatkan.
- b. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan untuk menunjang pembangunan daerah.
- c. Belum terimplementasikannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan.

3) Keuangan

- a. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan teknologi inovasi Samsat. Hal ini dilihat dari persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi Samsat hanya 10% saja, sedangkan 90% lainnya masih menggunakan pelayanan manual.
- b. Belum optimalnya intensifikasi pemungutan pendapatan asli daerah, sehingga diperlukan upaya sinergis untuk peningkatan PAD.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Belum optimalnya pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi (TI).
- e. Masih rendahnya penerimaan retribusi daerah dibandingkan potensinya.
- f. Belum optimalnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual.

4) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- a. Kurangnya pemenuhan ASN sesuai kebutuhan, hal tersebut dilihat dari masih rendahnya persentase ketersediaan ASN sesuai kebutuhan yang realisasinya sebesar 55,13%.
- b. Masih rendahnya ASN yang memiliki penilaian kinerja baik.
- c. Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi yang masih rendah, sehingga perlu adanya peningkatan pengembangan kompetensi ASN.



- d. Belum adanya inovasi sistem kepegawaian daerah untuk mewujudkan transparansi dan pengawasan ASN daerah.

5) Sekretariat DPRD

- a. Masih rendahnya Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dilihat dari skornya yang masih 64.
- b. Masih rendahnya realisasi jumlah reses Anggota DPRD yang difasilitasi.
- c. Perlunya adanya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyelarasan atau penataan peraturan perundang-undangan.
- d. Belum optimalnya pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

6) Sekretariat Daerah

- a. Masih sedikitnya pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan peraturan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan kesusilaan. Hal tersebut dilihat dari capaian pada tahun 2018 hanya sebesar 6 produk hukum.
- b. Jumlah kasus pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin masih rendah, pada tahun 2018 hanya 4 kasus saja yang diberikan bantuan.
- c. Jumlah MoU antara Gubernur Kepulauan Riau dengan LBH atau OBH yang terverifikasi masih sedikit hanya 2 dokumen MoU saja pada tahun 2018.
- d. Masih rendahnya realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBD. Pada tahun 2018 realisasi fisiknya hanya 97,04% sedangkan persentase keuangan masih 95,98%.
- e. Masih rendahnya ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari realisasinya hanya 69,64% saja.
- f. Masih rendahnya rata-rata tingkat kesehatan BUMD, dilihat tahun 2018 skor yang dicapai hanya 56,06 skor.
- g. Masih terbatasnya perangkat daerah yang mengikuti kompetensi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian, dilihat dari data tahun 2018 hanya 4 perangkat daerah saja.
- h. Masih rendahnya Nilai reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2018 tidak memiliki nilai.
- i. Masih minimnya jumlah kerja sama yang difasilitasi oleh bagian penghubung, berdasarkan data hanya 9 kerja sama saja yang di fasilitasi.



7) Pengawasan

- a. Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas organisasi inspektorat
- b. Belum optimalnya pengawasan kebijakan Kepala Daerah.
- c. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dalam upaya pencegahan penyimpangan pada pengelolaan pemerintahan daerah.



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan daerah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi makro nasional, dan perkembangan kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian nasional ke depan diperkirakan relatif stabil dan menunjukkan optimisme dalam jangka menengah. Kinerja ekonomi makro cenderung membaik yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang memiliki tendensi meningkat yang didukung oleh peningkatan investasi, terjaganya konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor, dan inflasi yang relatif rendah.

Dari sisi perekonomian global, walaupun perekonomian AS menunjukkan perbaikan, perekonomian dunia masih dibayangi risiko ketidakpastian. Beberapa risiko yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi global antara lain kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Risiko lain bersumber dari normalisasi moneter di beberapa negara maju yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global serta situasi geopolitik yang memanas di berbagai belahan dunia.

Perkembangan perekonomian global ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Tren perkembangan yang positif perekonomian domestik masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) adanya supply constraints karena daya dukung infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai memerlukan terobosan-terobosan untuk mendorong produktivitas; (ii) masih kurang kuatnya daya saing ekonomi membutuhkan efisiensi sistem logistik dan birokrasi; (iii) permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang perlu diatasi melalui kebijakan afirmasi dalam mewujudkan ketahanan energi dan ketahanan pangan serta penciptaan lapangan kerja; dan (iv) isu-isu terkait dinamika ketenagakerjaan dan skill gap antara tenaga kerja yang tersedia



dengan pasar tenaga kerja membutuhkan penguatan kuantitas dan kualitas pendidikan vokasional.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh pada kisaran 5,5 hingga 6,5 persen secara bertahap meningkat per tahun, yang didukung oleh kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Upaya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional ke depan membutuhkan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan investasi serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Upaya peningkatan kinerja investasi sebagai salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai dengan upaya menjaga dan meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat dan investor melalui peningkatan stabilitas politik dan keamanan, serta kepastian hukum dan kebijakan.

2. Inflasi

Pemerintah bersama dengan otoritas moneter dan Pemerintah daerah akan semakin memperkuat koordinasi kebijakan sebagai bentuk komitmen untuk mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemenuhan tersebut diantaranya dengan melanjutkan pelaksanaan program-program perbaikan dan peningkatan infrastruktur sehingga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional, menjamin kelancaran distribusi antarwilayah serta mendorong terjaganya pasokan barang serta monitoring pergerakan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. Di sisi permintaan, Pemerintah akan selalu berupaya menjaga tingkat konsumsi masyarakat, diantaranya melalui kebijakan stabilisasi harga dan bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Dalam jangka menengah, inflasi telah ditetapkan dalam tren menurun dan rendah dalam rangka mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi pencapaian ini dilakukan sesuai dengan koridor inflation targeting framework agar dapat menjangkarkan ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang relatif rendah. Melalui serangkaian kebijakan tersebut, Pemerintah menargetkan inflasi dalam jangka menengah dapat bergerak stabil dan menurun pada rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar $3,0 \pm 1,0$ persen.



3. SPN 3 bulan

Pasar keuangan global sangat fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, terutama disebabkan oleh kebijakan moneter di negara maju dan selanjutnya berdampak pada pasar keuangan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Melihat kecenderungan normalisasi kebijakan moneter yang masih akan dilakukan AS ke depan, pasar keuangan domestik diperkirakan berpotensi menghadapi risiko tekanan, termasuk terhadap pasar surat berharga negara.

Dari sisi domestik, beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan antara lain yaitu stabilitas perekonomian nasional yang akan tetap terjaga dengan baik dengan laju inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial semakin besar. Di sisi lain, kondisi fiskal yang sehat dan disiplin fiskal yang terus dijalankan Pemerintah akan memperkuat fundamental perekonomian domestik agar semakin kondusif, sehingga diharapkan mampu menjaga permintaan terhadap surat berharga negara, termasuk SPN 3 bulan. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2020-2022 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4,4-5,4 persen.

4. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam jangka menengah akan dipengaruhi dari faktor fundamental permintaan dan penawaran di pasar keuangan dan faktor nonfundamental seperti sentimen dan psikologis pasar. Penawaran akan valuta asing dalam jangka menengah akan bersumber antara lain dari pendapatan valuta asing dari kegiatan ekspor, arus modal masuk (baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun portofolio), dan pihak-pihak yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Sementara dari sisi permintaan, kebutuhan impor barang-barang modal dan input kegiatan produksi (antara lain mesin-mesin dan bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri), serta pembayaran utang dalam denominasi valuta asing, akan menentukan besarnya permintaan akan valuta asing terutama dolar AS.

Masih tingginya kebutuhan barang modal dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi serta potensi peningkatan konsumsi domestik, termasuk terhadap barang-barang impor, diperkirakan akan menjadi faktor utama yang



akan mendorong permintaan valas. Kehati-hatian pembiayaan APBN melalui pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing dari Pemerintah, semakin meluasnya penerapan skema hedging untuk pinjaman valuta asing oleh BUMN dan sektor swasta, dan ketersediaan cadangan devisa yang memadai akan mengurangi risiko tekanan bagi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Pemerintah juga akan menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah agar dapat memperkuat daya saing produk dalam negeri, khususnya ekspor produk manufaktur dan bernilai tambah tinggi yang akan memberikan dampak positif bagi ketersediaan valas di dalam negeri.

Di sisi lain, fundamental perekonomian yang kuat, fiskal yang sehat dan iklim investasi yang semakin kondusif diharapkan akan mampu menciptakan insentif bagi arus modal masuk, baik dalam bentuk penanaman modal asing jangka panjang maupun arus modal dalam bentuk portofolio. Namun demikian, pasokan valas ke dalam negeri diperkirakan akan mendapat tantangan dari kebijakan normalisasi moneter Amerika Serikat yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini selanjutnya akan mendorong semakin ketatnya likuiditas di pasar keuangan global yang dapat menyebabkan penurunan capital inflow ke negara berkembang bahkan dapat memicu sentimen negatif sehingga mendorong capital outflow. Berdasarkan gambaran dan faktor-faktor tersebut di atas, nilai tukar selama tahun 2020 hingga 2022 diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp14.200-14.500.

5. Harga Minyak Mentah Indonesia

Pergerakan harga minyak mentah dunia jangka menengah diperkirakan akan secara bertahap mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian dunia. Namun demikian, adanya potensi kenaikan cadangan minyak AS, penggunaan energi alternatif, seperti shale gas dan biofuel, serta produksi minyak negara-negara Non OPEC dapat menjadi faktor penahan peningkatan harga minyak mentah dunia. Namun demikian, faktor-faktor lain yang cukup berpotensi menyebabkan gejolak harga minyak mentah tetap harus diwaspadai, seperti perkembangan geopolitik internasional serta gangguan cuaca yang dapat mengganggu proses produksi. Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) tentunya akan mengikuti harga minyak dunia. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, dalam jangka menengah 2020-2022, ICP diperkirakan akan bergerak pada kisaran harga US\$65-75 per barel.



6. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Secara alamiah, dalam jangka menengah lifting minyak akan mengalami penurunan terutama dikarenakan kapasitas sumur yang semakin menua dan belum optimalnya upaya eksplorasi lapangan minyak yang baru. Lifting minyak bumi dalam jangka menengah diperkirakan berada pada kisaran 589-840 ribu bph. Pemerintah akan berupaya menahan penurunan alamiah (natural declining) dengan upaya teknis antara lain: (1) mempertahankan program kerja utama hulu minyak (pengeboran, kerja ulang dan perawatan sumur); (2) mempertahankan kegiatan eksplorasi (studi, survei, dan pengeboran); dan (3) mendorong komersialisasi teknologi produksi yang tepat guna (misalnya: mengefisienkan kegiatan EOR). Dalam kaitannya dengan peningkatan daya tarik investasi, Pemerintah akan memperkuat skema kontrak bagi hasil Gross Split dan dukungan insentif fiskal serta dukungan lainnya dalam bentuk regulasi.

Sementara itu, lifting gas bumi dalam jangka menengah diperkirakan relatif stabil dan berpotensi untuk dapat ditingkatkan pada kisaran 1,19-1,30 juta bsmph. Untuk mendukung pencapaian lifting gas bumi pada jangka menengah tersebut, Pemerintah telah menyiapkan beberapa proyek strategis yang menjadi andalan peningkatan produksi gas bumi, antara lain: (1) Lapangan Jangkrik; (2) Blok Muara Bakau; (3) lapangan laut dalam di Selat Makassar yang terdiri atas lima lapangan, yaitu Lapangan Bangka, Gehem, Gendalo, Maha, dan Gadang; serta (4) Lapangan Jambaran Tiung Biru. Pemerintah terus berupaya agar lifting gas bumi tersebut dapat tercapai sehingga dapat mengkompensasi turunnya lifting minyak, antara lain melalui upaya optimalisasi, pengembangan lapangan baru, intensifikasi, dan ekstensifikasi kegiatan eksplorasi, serta mendorong investasi di sektor gas.

Asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah
Tahun 2020-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,3	5,5-6,2	5,5-6,4	5,8-6,5
Inflasi (%,yoy)	3,5	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0
Tingkat Suku Bunga SPN 3	5,3	4,4-5,4	4,4-5,3	4,4-5,3



Indikator	2019	2020	2021	2022
Bulan (%)				
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.400	14.200- 14.500	14.200- 14.500	14.200- 14.500
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	70	65-75	65-75	65-75
Lifting Minyak Mentah (ribu barell per hari)	750	695-840	651-802	589-800
Lifting Gas (ribu barell setara minyak per hari)	1.250	1.191- 1.300	1.226- 1.300	1.250- 1.300

Sumber : Kementerian Keuangan (Nota Keuangan beserta RAPBN 2019)

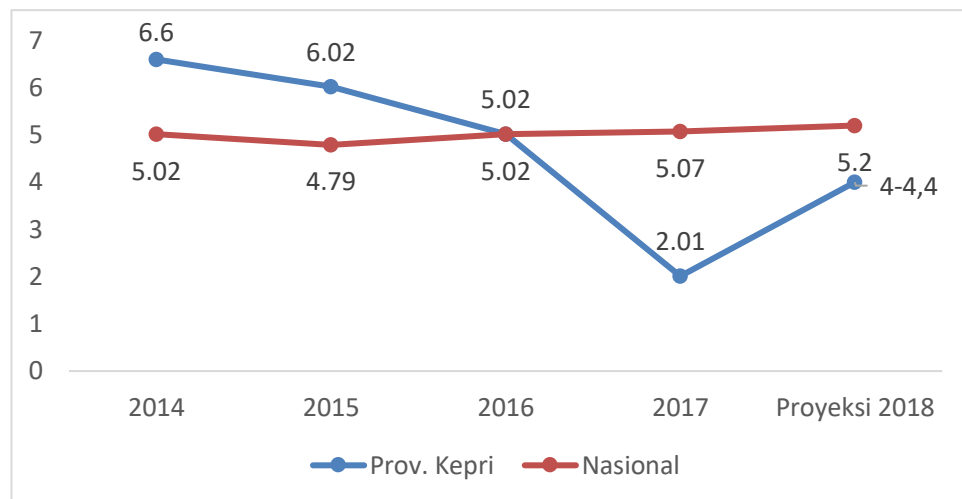
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

1. Perkembangan Kondisi Perekonomian Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Kepri paling rendah terjadi pada 2017, yaitu hanya tumbuh sebesar 2,01 persen. Angka tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi terendah sepanjang sejarah Kepri. Hal ini terjadi seiring dengan tren pelemahan pertumbuhan investasi, terutama di Kota Batam. Batam menyumbang kontribusi PDRB sebesar 70 persen untuk Kepri. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kepri menurun akibat pelemahan ekonomi dunia, khususnya di sektor minyak dan gas (migas). Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor industri berbasis migas dan galangan kapal juga mengalami pelemahan.

Sejalan dengan langkah Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Daerah, pada tahun 2018 investasi mulai meningkat, pariwisata tumbuh pesat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2018 berada di angka antara 4 sampai 4,4 persen.



Sumber: BPS, Berita resmi statistik Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau, 2018

Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2014-2018 (Year on Year) (%)

Investasi (PMA) di Kepri tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017. Pada tahun 2018 Nilai Realisasi Investasi (PMA) mencapai sebesar 5.574 milyar rupiah, menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 13.823 milyar rupiah. Sementara itu Nilai Realisasi Investasi (PMDN) meningkat dari tahun 2017 sebesar 1.398 milyar rupiah menjadi sebesar 3.232 milyar rupiah pada tahun 2018.

Angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kepri pada tahun 2018 mencapai sebanyak 2,31 Juta orang, meningkat dari tahun 2017 sebanyak 2,07 juta orang. Kunjungan Wisatawan Nusantara tahun 2018 sebanyak 3,547 orang, meningkat dari tahun 2017 sebanyak 2,89 juta orang.

b. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan kondisi yang positif, yaitu terus mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar Rp 163.261,57 miliar dan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 229.743,12 miliar. Saat ini pada Triwulan III tahun 2018 (y-on-y) PDRB Provinsi Kepulauan Riau masih menunjukkan nilai Rp 65.185,72 miliar. Perkembangan PDRB atas harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 3.2.



Tabel 3.2
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2013-2017 (Milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.816,52	6.449,93	7.076,95	7.678,38	7.942,44
2.	Pertambangan dan Penggalian	26.035,58	28.435,90	31.400,49	33.098,37	33.000,79
3.	Industri Pengolahan	63.641,75	69.122,84	74.966,24	80.842,35	84.434,95
4.	Pengadaan Listrik, Gas	1.918,47	2.052,65	2.218,91	2.468,48	2.689,98
5.	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	198,35	211,31	233,26	252,52	284,13
6.	Konstruksi	29.380,04	33.227,47	36.456,42	38.848,43	41.409,19
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.048,14	13.197,86	15.424,15	18.066,68	20.233,11
8.	Transportasi dan Pergudangan	4.609,38	5.374,60	6.260,55	7.070,85	7.771,38
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	3.086,31	3.481,01	3.951,43	4.358,14	5.061,47
10.	Informasi dan Komunikasi	2.870,45	3.255,46	3.603,55	3.969,12	4.575,79
11.	Jasa Keuangan	4.366,64	4.839,37	5.280,74	5.792,54	6.271,00
12.	Real Estate	2.367,49	2.639,90	2.863,61	3.171,44	3.518,74
13.	Jasa Perusahaan	7,84	8,32	9,15	10,10	11,67
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.722,47	4.038,04	4.627,75	5.158,22	5.990,48
15.	Jasa Pendidikan	2.117,87	2.286,14	2.569,03	2.931,37	3.428,41
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.390,85	1.518,62	1.737,40	1.882,15	2.119,22
17.	Jasa Lainnya	683,43	740,56	858,96	980,77	1.075,07
	Produk Domestik Regional Bruto	163.261,57	180.879,98	199.538,59	216.579,90	229.801,14

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka (BPS, 2018)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan kondisi yang positif, yaitu terus mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar Rp 146.356 miliar dan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 166.191 miliar. Kemudian pada Triwulan III tahun 2018 (y-on-y) masih



sebesar Rp 43.675 miliar. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan
Tahun Dasar 2010 Tahun 2013-2017 (Milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.000,01	5.378,15	5.689,22	5.977,99	5.899,68
2.	Pertambangan dan Penggalian	22.111,06	23.270,78	25.417,33	26.933,15	25.718,20
3.	Industri Pengolahan	53.173,70	56.338,04	59.498,19	61.497,86	62.458,86
4.	Pengadaan Listrik, Gas	1.209,17	1.326,22	1.400,52	1.523,11	1.621,70
5.	Pengadaan Air	184,03	187,76	193,11	203,26	223,77
6.	Konstruksi	23.802,36	25.954,83	26.871,95	28.073,93	29.042,76
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.955,71	10.803,00	11.738,60	12.858,55	13.665,03
8.	Transportasi dan Pergudangan	3.717,76	3.939,82	4.161,12	4.448,87	4.681,70
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	2.665,83	2.842,91	3.002,93	3.159,14	3.536,02
10.	Informasi dan Komunikasi	2.874,48	3.076,75	3.230,70	3.469,62	3.736,38
11.	Jasa Keuangan	3.750,61	3.967,87	4.087,05	4.323,70	4.474,48
12.	Real Estate	2.110,29	2.245,19	2.340,43	2.443,35	2.536,59
13.	Jasa Perusahaan	7,44	7,59	7,80	8,28	8,88
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.028,83	3.150,36	3.386,49	3.619,47	3.788,41
15.	Jasa Pendidikan	1.827,20	1.905,30	2.022,48	2.201,37	2.428,19
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.250,99	1.311,57	1.405,32	1.467,87	1.618,90
17.	Jasa Lainnya	594,37	619,10	659,67	712,98	758,86
	Produk Domestik Regional Bruto	137.263,85	146.325,23	155.112,88	162.922,50	166.198,42

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka (BPS,2018)



Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2013-2017 didominasi oleh tiga sektor perekonomian utama yaitu: (1) sektor industri pengolahan; (2) sektor konstruksi dan (3) sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor industri pengolahan fluktuatif pada kisaran antara 37,33% - 39,02%. Kontribusi sektor konstruksi juga fluktuatif pada kisaran antara 17,03%-18,21%. Sementara itu kontribusi sektor pertambangan dan penggalian menurun dari sebesar 15,96% pada tahun 2013 menjadi 14,36 % pada tahun 2017, seperti terlihat pada Tabel 2.22.

Tabel 3.4
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun 2013-2017 (Persen)

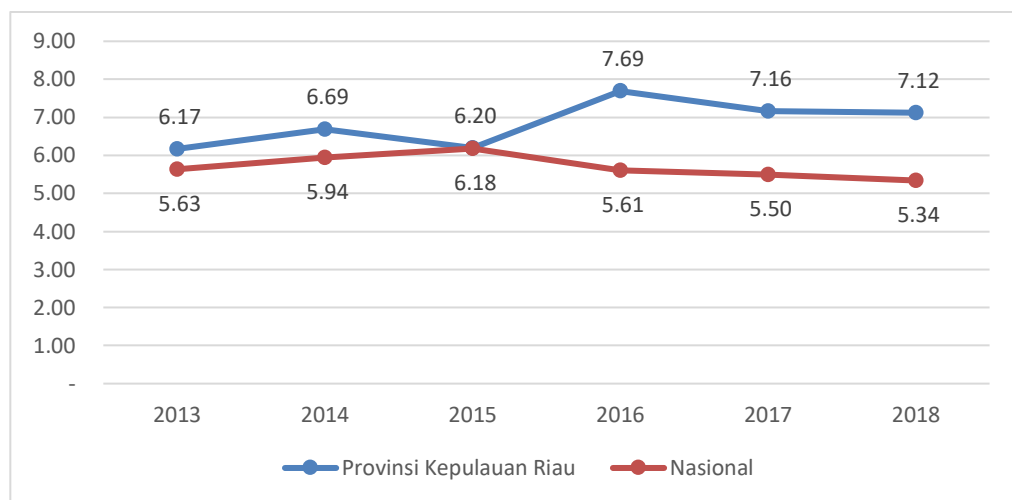
No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,57	3,40	3,57	3,55	3,46
2.	Pertambangan dan Penggalian	15,96	15,26	14,27	15,28	14,46
3.	Industri Pengolahan	39,02	38,70	38,63	37,33	36,75
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara DingindanProduksi Es	1,17	1,05	1,09	1,14	1,17
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12
6.	Konstruksi	18,11	18,21	17,03	17,94	18,02
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,64	7,02	8,03	8,34	8,81
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,80	3,37	3,22	3,26	3,27
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,89	2,32	2,16	2,01	2,20
10.	Informasi dan Komunikasi	1,76	1,71	1,87	1,83	1,99
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,67	2,65	2,60	2,67	2,73
12.	Real Estate	1,45	1,44	1,48	1,46	1,53
13.	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0	0,01
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	2,28	2,27	2,45	2,38	2,61
15.	Jasa Pendidikan	1,30	1,25	1,26	1,35	1,49
16.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	0,85	0,83	0,85	0,87	0,92
17.	Jasa Lainnya	0,42	0,41	0,45	0,45	0,47
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka (BPS, 2018)

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus 2018 mencapai 7,12 persen, mengalami penurunan TPT jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2017 sebesar 7,12 persen. Tingkat

pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT Nasional yaitu sebesar 5,50%.



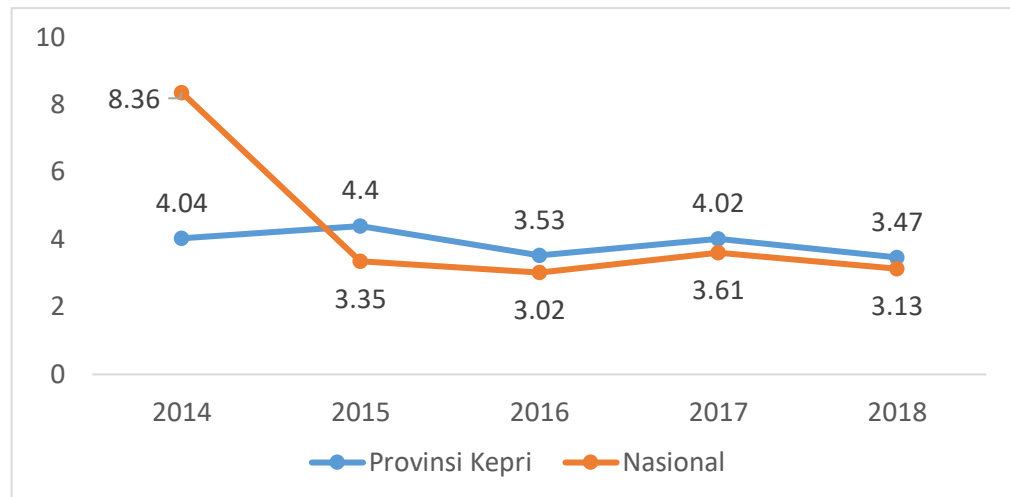
Sumber : BPS Prov. Kepulauan Riau, 2019

Gambar 3.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2013-2018

d. Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan kegiatan industri. Laju inflasi gabungan dua kota di provinsi kepulauan kepri di pada tahun 2017 sebesar 4,02%, lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional sebesar 3,61%. Capaian inflasi Provinsi Kepri yang lebih tinggi dibandingkan nasional terutama komoditas volatile food menjadi penyumbang terbesar inflasi. Perkembangan laju inflasi gabungan dua kota dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Inflasi tahun kalender (Januari s.d Desember 2018) dan inflasi tahun ke tahun (Desember 2018 terhadap Desember 2017) Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,47 persen. Dari 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,20 persen dan 0,85 persen. Inflasi Kepri lebih tinggi dibandingkan inflasi di tingkat nasional. Inflasi yang terkendali tersebut ditunjang oleh kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah.

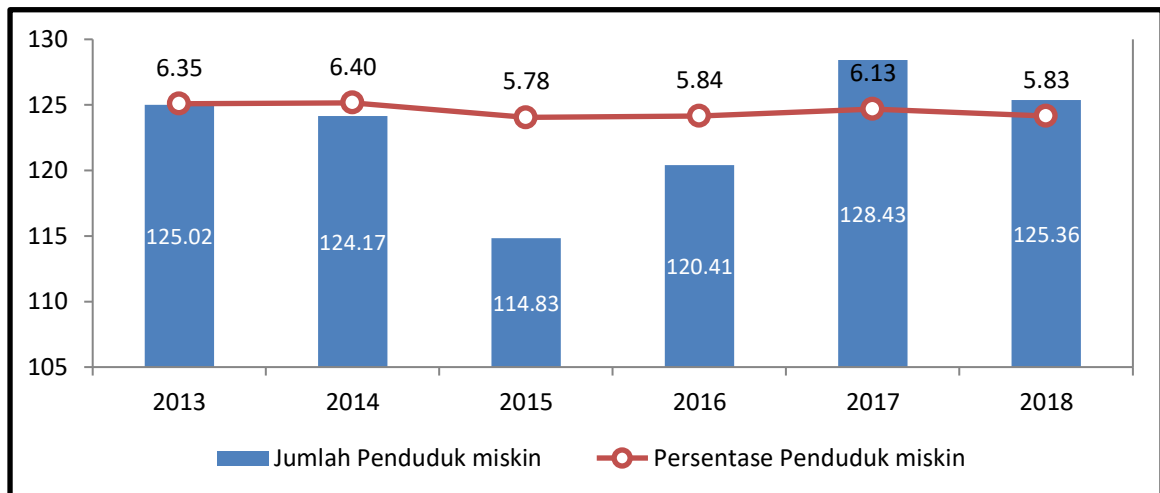


Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Kepulauan Kepri, 2018

Gambar 3.3 Laju Inflasi di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2014-2018 (%)

e. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dalam lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan kecenderungan semakin menurun, yaitu dari sebesar 6,35% pada tahun 2013 menjadi 5,83% pada tahun 2018. Namun dilihat dari kondisi tiga tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat, yaitu tahun 2016 sebesar 5,84%, tahun 2017 naik menjadi 6,13% dan tahun 2018 kembali naik menjadi 5,83%. Selain itu secara absolut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu tahun 2016 sebanyak 120,41 ribu jiwa dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 128,43 ribu jiwa, kemudian turun menjadi 125,36 ribu jiwa pada tahun 2018. Secara rinci perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Sumber : BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, 2019

Gambar 3.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2018 (September)

2. Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2020

Kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 diharapkan semakin membaik sejalan dengan kondisi perekonomian nasional dan dunia. Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dunia dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan RPJMD pada tahun 2020 sebesar $4+1\%$, dan inflasi dijaga pada kisaran angka $3,50\pm 1$, Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan sebesar $6,74\%$, Persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar $5,52\%$, dan Indeks Gini diproyeksikan sebesar $0,35\pm 0,01$. Target indikator makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi			Proyeksi	
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	2,01	4-4,4	4 ± 1	5 ± 1
2	Laju Inflasi	%	3,53	4,02	3,47	$3,50\pm 1$	$3,50\pm 1$
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,69	7,16	7,12	6,88	6,74
4	Indeks Gini	Indeks	0,350	0,359	0,339	$0,35\pm 0,01$	$0,35\pm 0,01$
5	Persentase penduduk miskin	%	5,84	6,13	5,83	5,53	5,52

Sumber: Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021



3. Strategi dan Arah kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka mencapai target indikator makro tahun 2020, Arah pengembangan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui:
 1. Mengoptimalkan realisasi APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota, dan DAK di wilayah Kepulauan Riau khususnya belanja modal, serta melaksanakan dan memonitor perkembangan proyek pembangunan infrastruktur agar dapat berjalan dengan baik sebagai pendorong perekonomian untuk mendukung perkembangan investasi swasta dan kinerja ekspor Kepri;
 2. Mendorong tindak lanjut terhadap tujuh usulan program strategis yang telah disetujui oleh Presiden RI yaitu pembangunan Jembatan Batam-Bintan, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Suh, KEK Galang Batang, KEK Pulau Asam, pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, pengembangan dan modernisasi Bandar Udara Nadim serta pembangunan LRT Batam;
 3. Penguatan kerja sama antara dunia industri dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan di lokasi produksi (*teaching factory*) disertai perbaikan fasilitas pembelajaran dan penyusunan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri prioritas nasional serta kebutuhan pasar tenaga kerja;
 4. Mendorong kegiatan *Research & Development* (R&D) khususnya untuk industri unggulan berbasis ekspor agar dihasilkan produk bernilai tambah tinggi (dapat bekerja sama dengan universitas lokal);
 5. Memaksimalkan potensi maritim Kepri untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pengembangan industri maritim bersifat lintas sektor mencakup industri perkapalan, pelayaran, perikanan, pariwisata bahari, pelayanan dan bahkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan kemaritiman membutuhkan koordinasi lintas sektor serta strategi kebijakan yang terintegrasi dan konsisten;
 6. Optimalisasi penggunaan sistem OSS yang dapat memberikan pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah serta memberi kepastian berusaha untuk menarik investasi baru ke wilayah Kepri;
 7. Menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui percepatan reformasi struktural terutama terkait dengan aspek kemudahan perizinan serta stabilitas keamanan di wilayah Kepri;



8. Mendorong percepatan realisasi dari investasi-investasi baik PMA maupun PMDN yang telah didaftarkan agar dapat mendorong kinerja investasi Kepri serta membuka lapangan kerja baru;
9. Pengembangan bidang pendidikan untuk menciptakan SDM yang unggul sebagai modal dasar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
10. Mengembangkan sektor pariwisata jasa pendukungnya sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Meningkatkan kenyamanan wisatawan dengan penyediaan fasilitas dasar yang prima (transportasi publik, pelabuhan dan bandara yang nyaman), meningkatkan kebersihan, kemudahan akses informasi dan transportasi ke tempat wisata dan jaminan keamanan;
 - Mendorong penyediaan jasa pada sektor pariwisata untuk memberikan variasi paket wisata sesuai dengan preferensi wisatawan;
 - Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pariwisata rutin yang lebih atraktif;
 - Meningkatkan kualitas SDM khususnya terkait kemampuan berbahasa dan pelayanan pariwisata agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja pada sektor pariwisata;
 - Memberikan insentif bagi penyedia jasa transportasi agar dapat menyediakan rute penerbangan serta menambah jadwal penerbangan ke destinasi-destinasi wisata di wilayah Kepri;
 - Mengintensifkan promosi pariwisata dan sosialisasi penerbitan aturan mengenai kemudahan kunjungan *yacht* dan *cruise*;
 - Mengembangkan destinasi dan aktivitas wisata baru seperti aktivitas watersport dan *diving*;
 - Pengembangan teknologi informasi serta membuat Pusat Informasi Pariwisata Kepri yang terintegrasi; dan
 - Mendorong penyediaan produk UMKM berkualitas tinggi yang dapat dijadikan sebagai cinderamata asal Kepri.
- b. Mengendalikan Inflasi agar tetap terjaga, melalui:
 - 1) Mendorong pengembangan bahan pangan lokal untuk menekan inflasi dari kelompok *volatile food* serta mendorong kegiatan *urban farming* dengan skala yang lebih luas seperti penanaman komoditas sayuran yang menjadi penyumbang inflasi seperti bayam, kangkung dan kacang panjang;



- 2) Melakukan koordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan HET serta menghimbau seluruh distributor untuk tidak menaikkan harga dan tidak menahan serta menimbun stok persediaan bahan pokok;
- 3) Mengintensifkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang telah disepakati serta mendorong KAD baru untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan makanan ke Kepri;
- 4) Melakukan pemetaan terhadap pasokan dan produksi bahan pangan yang menjadi komoditas penyumbang inflasi *volatile food*;
- 5) Tetap menjaga kelancaran arus bongkar muat dan distribusi angkutan barang komoditas pangan strategis yang berpotensi menyumbang inflasi pada saat perubahan cuaca;
- 6) Penguatan peran UMKM khususnya yang bergerak pada usaha berbasis komoditas ketahanan pangan (yang menjadi penyebab utama inflasi *volatile food*) dari sisi kelembagaan, peningkatan akses, maupun penambahan waktu *monitoring* pengembangan;
- 7) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Pertamina untuk memastikan tersedianya pasokan dan lancarnya distribusi BBM dan LPG khususnya BBM dan LPG Subsidi;
- 8) Melanjutkan koordinasi yang telah baik antara Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia dalam hal pembentukan waktu kebijakan penyesuaian harga khususnya untuk kelompok *administered prices*;
- 9) Mengintensifkan komunikasi dan kerjasama antara pemerintah melalui TPID dengan distributor maupun pelaku usaha untuk membangun komitmen bersama dalam rangka pengendalian inflasi.

3.2 Kerangka Pendanaan dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Sesuai dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2020 diproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp 3.524.822.111.112,00; belanja daerah sebesar Rp 3.577.558.809.948,00; dan Penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp 52.736.698.837,00. Hasil proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tercantum pada Tabel 3.3.



Tabel 3.6
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No	Uraian	Realisasi 2018	2019	2020
A	Pendapatan Daerah	3.508.986.122.592,43	3.524.822.111.112	3.763.708.865.241
1	Pendapatan Asli Daerah	1.229.850.189.235,43	1.330.934.087.038	1.457.807.050.027
a	Pajak Daerah	1.113.893.774.187,00	1.137.274.337.038	1.233.244.612.527
b	Retribusi Daerah	12.925.782.765,00	100.359.250.000	121.649.162.500
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.095.498.858,00	3.307.500.000	3.472.875.000
e	Lain-Lain PAD Yang Sah	99.935.133.425,43	89.993.000.000	99.440.400.000
2	Dana Perimbangan	2.278.002.933.357,00	2.187.676.024.074	2.299.677.695.215
a	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	537.458.002.746,00	373.831.670.044	406.265.528.398
b	Dana Alokasi Umum	1.150.516.752.000,00	1.185.032.299.880	1.220.583.268.876
c	Dana Alokasi Khusus	590.028.178.611,00	628.812.054.150	672.828.897.941
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.133.000.000,00	6.212.000.000	6.224.120.000
a	Hibah	1.133.000.000,00	1.212.000.000	1.224.120.000
b	Dana Penyesuaian	0	5.000.000.000	5.000.000.000
c	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0
B	Belanja Daerah	3.420.106.239.029,97	3.577.558.809.948	3.809.237.353.418
1	Belanja Tidak Langsung	1.477.990.546.940,00	1.634.140.542.086	1.713.525.272.935
a	Belanja Pegawai	656.535.130.492,00	684.378.517.502	709.951.563.255
b	Belanja Bunga	0	-	-
c	Belanja Hibah	345.546.786.200,00	421.601.323.134	422.444.525.781
d	Belanja Bantuan Sosial	2.510.000.000,00	13.658.565.862	13.685.882.994
e	Belanja Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	471.497.381.616,00	499.840.148.529	552.781.313.847
f	Belanja Bantuan Keuangan	1.645.873.632,00	12.661.987.059	12.661.987.059
g	Belanja Tidak Terduga	255.375.000,00	2.000.000.000	2.000.000.000
2	Belanja Langsung	1.942.115.692.089,97	1.943.418.267.862	2.095.712.080.483
a	Belanja Pegawai	245.409.687.096,00	252.644.374.822	272.442.570.463
b	Belanja Barang dan Jasa	1.076.006.005.043,17	1.232.127.181.825	1.404.127.093.924
c	Belanja Modal	620.699.999.950,80	458.646.711.215	419.142.416.097



No	Uraian	Realisasi 2018	2019	2020
	Surplus/Defisit	75.845.070.130,62	(52.736.698.837)	(45.528.488.177)
III	Pembiayaan			
1	Penerimaan Pembiayaan	39.427.248.919,45	52.736.698.837	45.528.488.177
a	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	
b	Penerimaan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi	0	0	
c	Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir	0	0	
d	Penggunaan SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	39.427.248.919,45	52.736.698.837	45.528.488.177
e	Pencairan Dana Cadangan	0	0	
2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
a	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
b	Penyertaan Modal Pemerintah	0	0	
c	Pembayaran Pokok Utang	0	0	
d	Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	
e	Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan	0	0	
	Pembiayaan Netto	39.427.248.919,45	52.736.698.837	45.528.488.177
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	115.272.319.050,07	0	0

Sumber: Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah



Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau diuraikan sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian secara komprehensif tentang potensi pajak daerah dan retribusi daerah agar data potensi dapat dihitung secara akurat.
- b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembayaran pajak dengan menambah kantor samsat keliling, samsat bergerak (berkantor pada tiap-tiap kantor kecamatan), pembayaran dengan online system dan mengupayakan kerjasama pembayaran pajak melalui perbankan.
- c. Melakukan kebijakan-kebijakan berkenaan denda pajak.
- d. Menetapkan kepastian hukum dalam proses pemungutan khususnya sektor Pajak Air Permukaan (PAP) dan Retribusi Labuh Tambat.
- e. Meningkatkan kompetensi SDM personil pemungutan di Unit Pelayanan Teknis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan perangkat daerah Penghasil dalam menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka mengupayakan/menggali potensi retribusi baru.
- g. Meningkatkan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat khususnya yang berkenaan dengan teknis setoran penerimaan Dana Perimbangan ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau dialokasikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.



- e. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tidak langsung diutamakan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib, mengikat dan prioritas utama seperti: Belanja Gaji Pegawai; Belanja Bunga; dan Belanja Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota. Selanjutnya dialokasikan belanja tidak langsung lainnya seperti : belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota serta belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung diprioritaskan untuk pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah, prioritas tahun 2020, selanjutnya dialokasikan untuk pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan kewenangan daerah provinsi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan mendukung prioritas pembangunan nasional di Provinsi kepulauan Riau.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari: Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi, Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir dan Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari: Penyertaan Modal Pemerintah, Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan. Kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau diuraikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 didahului dengan pengkajian terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, arah kebijakan pembangunan tahun 2020, prioritas nasional tahun 2020, dan isu strategis daerah tahun 2020.

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah: ***"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"***.

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sebagai Bunda Tanah Melayu

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

b. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).

c. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi



masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.

d. Ramah Lingkungan

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

e. Unggul di Bidang Maritim

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada kemaritiman (*maritim oriented*). Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi "**Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim**", misi yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.

- a. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
- b. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.



- d. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- e. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
- f. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
- h. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
- i. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

3. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2021 dikelompokkan sesuai dengan Misi sebagai berikut.

Misi 1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

1. Melestarikan Budaya Melayu dan Nilai – nilai Agama, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah.
 - b. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama.
2. Meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat

Misi 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.

1. Meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik
 - b. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi
 - b. Meningkatnya akses pelayanan air bersih.



- c. Berkurangnya kawasan kumuh.
- d. Meningkatkan rasio elektrifikasi.

Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.

- 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan
 - b. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.

Misi 4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

- 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
 - b. Angka kemiskinan menurun.
- 2. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Misi 5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan

- 1. Meningkatkan pengembangan perekonomian pariwisata dan kemaritiman, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan
 - b. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
- 2. Meningkatkan Produksi Pertanian dan ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya produksi pertanian
 - b. Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan

Misi 6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

- 1. Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM.

Misi 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

- 1. Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri memanfaatkan bahan baku lokal, dengan sasaran:



- a. Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal
- b. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan

Misi 8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

1. Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran:
 - a. Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan.

Misi 9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah.
 - b. Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Secara rinci keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 tercantum pada Tabel 4.1



Tabel 4.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau
dan target Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Tahun
											2020
	Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.	Melestarikan Budaya Melayu dan nilai-nilai agama	Tingkat Kelestarian Budaya Melayu	%	11,16	48,41	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	1. Persentase bangunan yang berciri khas melayu	Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta yang berciri khas melayu dibagi Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta dikali 100	%	49,70
								2. Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	Jumlah warisan budaya yang lestari dibagi jumlah warisan budaya dikali 100	%	21,68
			Indeks kerukunan antar umat beragama	%	67,9	70,00	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama	3. Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina x 100	%	80
								4. Persentase santri yang menjadi hafiz	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	%	80
		Meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	%	72,84	75,00	Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat	5. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	185
								6. Angka kriminalitas	Jumlah kasus kriminalitas	Kasus	4.865
	Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.	Meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota	Tingkat Konektivitas antar kab/kota	%	60,88	95	Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	7. Persentase jalan provinsi berkondisi baik	Panjang jalan provinsi berkondisi baik dibagi panjang jalan dikali 100	%	73,24
							Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi	8. Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang tersedia dibagi Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang seharusnya tersedia dikali 100	%	92,86
								9. Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	Jumlah Kapal Penyeberangan (roro) yang tersedia dikali 100	%	100



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Tahun
											2020
		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	%	65,21	88,49		10. Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut yang tersedia dibagi jumlah Pelabuhan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	91,18
								11. Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	Jumlah Kapal Angkutan Laut yang tersediadibagi Kapal Angkutan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	88,89
							Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi	12. Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	Luas wilayah yang memiliki Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) layak dibagi Luas wilayah dikali 100	%	83,48
							Meningkatnya akses pelayanan air bersih	13. Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	Luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi Luas wilayah dikali 100	%	97,59
							Berkurangnya kawasan kumuh	14. Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	Ha	379,57
							Meningkatnya rasio elektrifikasi	15. Rasio Elektrifikasi	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	92,50
	Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia	Indeks Pendidikan dalam IPM	Ind	0,62	0,68	Meningkatnya kualitas pendidikan	16. Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 ke atas	tahun	10,31
								17. Persentase SMA/SMK/SLB yang terakreditasi minimal B	Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB yang terakreditasi B dibagi Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB dikali 100	%	82,00
			Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) (%)	%	9,03 (2016)	7,03	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.	18. Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari kerja yang terdaftar dikali 100	%	67,43
								19. Persentase calon tenaga kerja yang terserap/diterima di perusahaan	Jumlah calon tenaga kerja yg diterima di perusahaan dibagi jumlah tenaga kerja yang terdaftar di disnaker dengan 100	%	62



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Tahun
											2020
	Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,99	75,19	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	20. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Jumlah Kematian Ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000	per 100.000 KH	129
								21. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	JumlahKematian Bayi (AKB) dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000	per 1.000 KH	31
								22. Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita)	Jumlah bayi usia 0-59 bulan 29 hari dengan statis gizi kurus (<i>underweight</i>) dibagi jumlah Jumlah bayi usia 0-59 bulan 29 hari dikali 100	%	16,5
							Angka kemiskinan menurun	23. Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	5,83
		Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,20	94,75	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	24. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,50
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	60,79	62,5		25. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,25
	Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.	Meningkatkan pengembangan perekonomian pariwisata dan kemaritiman	Nilai Tukar Nelayan	%	109,36	110,57	Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan	26. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	305.850
								27. Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.852
								28. Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.328
			Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	%	3,04	23 (dari tahun 2016)	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	29. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,4



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Tahun
											2020
		Meningkatkan Produksi Pertanian dan ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	98,16	100	Meningkatnya produksi pertanian	30. Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Ton	44.644
								31. Jumlah Produksi Tanaman Palawija	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.742
								32. Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	Ton	1.020
		Skor pola pangan harapan	skor	83,8	93,5	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan		33. Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10
								34. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	92,00
	Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.	Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5±1	Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM	35. Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp Milyar	7.900
								36. Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	800
								37. Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	Jumlah Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi dibagi Jumlah Koperasi dan UKM dikali 100	%	21,22
	Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.	Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri memanfaatkan bahan baku lokal	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5±1	Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal	38. Jumlah industri berbahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	2.117
								39. Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Juta US \$	1.478,75
							Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	40. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB dikali 100	%	8,44

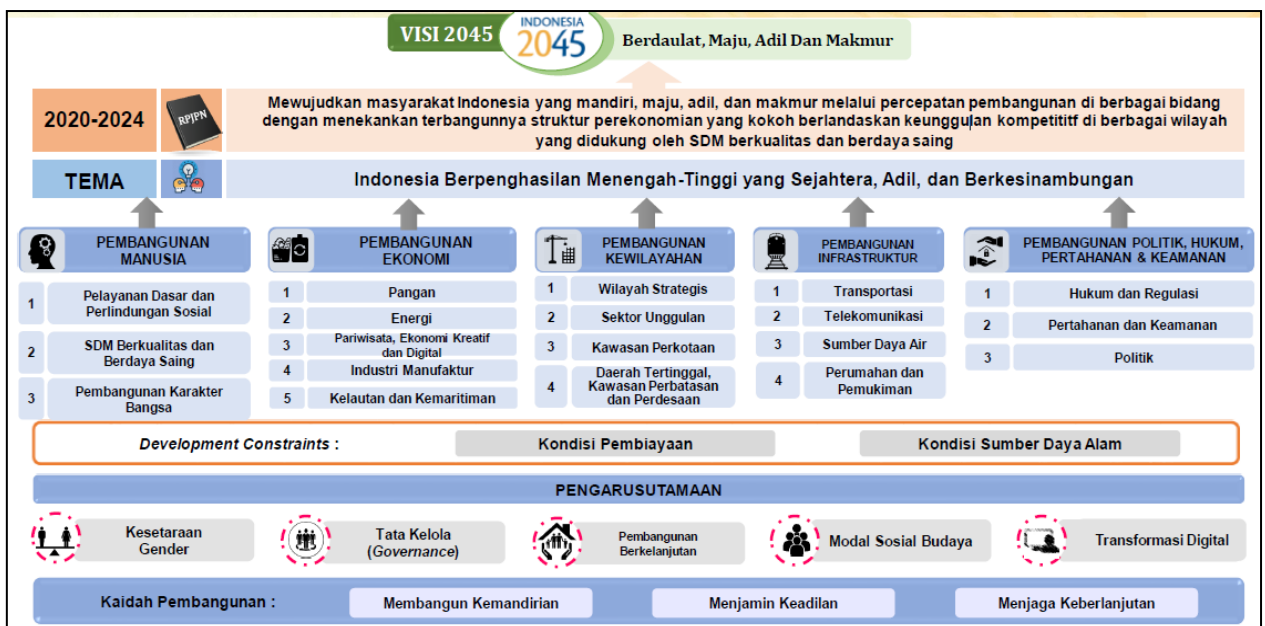


No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Tahun
											2020
	Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.	Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	ind	66,97	69,8	Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan	41. Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	Jumlah waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu dibagi Jumlah waduk yang dilakukan pengujian dikali 100	%	90,91
								42. Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	Luas RTH publik di kawasan perkotaan dibagi Luas wilayah dikali 100	%	10,84
	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	An	41,15	75	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah	43. Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai Perhitungan IPP ASN Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	78
								44. Nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	BB
								45. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E	B
								46. Nilai Keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100	65
								47. Nilai e- government	Nilai e- government	Skala nilai 1-4	2,4
							Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	48. Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,457
								49. Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini	WTP
								50. Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3



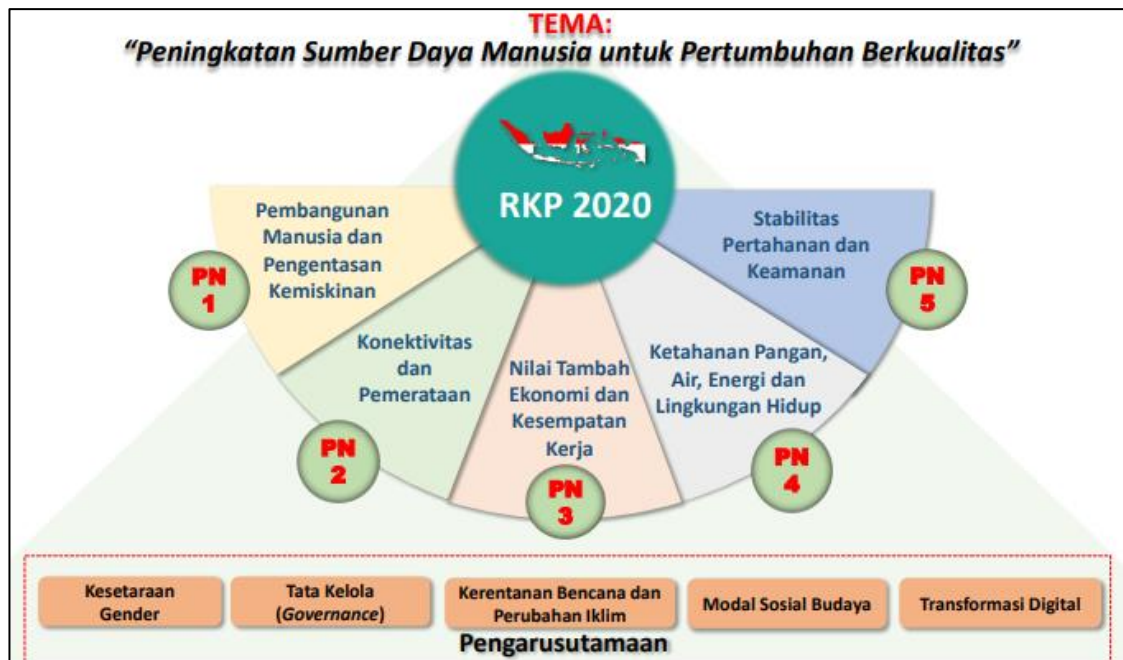
4.2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

Berdasarkan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024, Visi 2045 yaitu Indonesia Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPD, RPJMN tahun 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Tema Pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yaitu “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”



Gambar 4.1 Kerangka Pembangunan dalam Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020, tema pembangunan nasional tahun 2020 yaitu: “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan kedalam 5 prioritas, yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Konektivitas dan Pemerataan; (3) Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Penjabaran lima prioritas pembangunan nasional tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

a. Pembangunan Manusia

Kebijakan Strategis Prioritas Nasional 1:

- 1) Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
- 2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- 3) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
- 4) Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
- 5) Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Program Prioritas pada Prioritas Nasional 1:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
- 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- 3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
- 4) Pengentasan Kemiskinan
- 5) Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa



b. Penguatan Konektivitas

Kebijakan Strategis Prioritas Nasional 2:

- 1) Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- 2) Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- 3) Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- 4) Membangun konektivitas transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- 5) Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- 6) Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Program Prioritas PN 2:

- 1) Perluasan Infrastruktur Dasar
- 2) Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
- 3) Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
- 4) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
- 5) Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi

c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Kebijakan Strategis Prioritas Nasional 3

- 1) Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- 2) Mempercepat transformasi struktural.
- 3) Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- 4) Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- 5) Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Program Prioritas pada Prioritas Nasional 3

- 1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
- 2) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil
- 3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
- 4) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- 5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

d. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

Kebijakan Strategis Prioritas Nasional 4 meliputi:

- 1) Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- 2) Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- 3) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- 4) Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- 5) Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Program Prioritas pada Prioritas Nasional 4 meliputi:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
- 2) Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- 3) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
- 4) Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
- 5) Penguatan Ketahanan Bencana

e. Stabilitas Keamanan Nasional

Kebijakan Strategis Prioritas Nasional 5 meliputi:

- 1) Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- 2) Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional.
- 3) Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- 4) Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- 6) Meningkatkan keamanan siber

Program Prioritas pada Prioritas Nasional 5 meliputi:

- 1) Penguatan Kemampuan Pertahanan
- 2) Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
- 3) Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
- 4) Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas



5) Peningkatan Keamanan Siber

4.3. Arah Kebijakan Tahun 2020 berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD tahun 2016-2021

Berdasarkan dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021, Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan kualitas Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, iklim investasi yang kondusif, dan Pemerataan Infrastruktur guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya”**. Prioritas pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

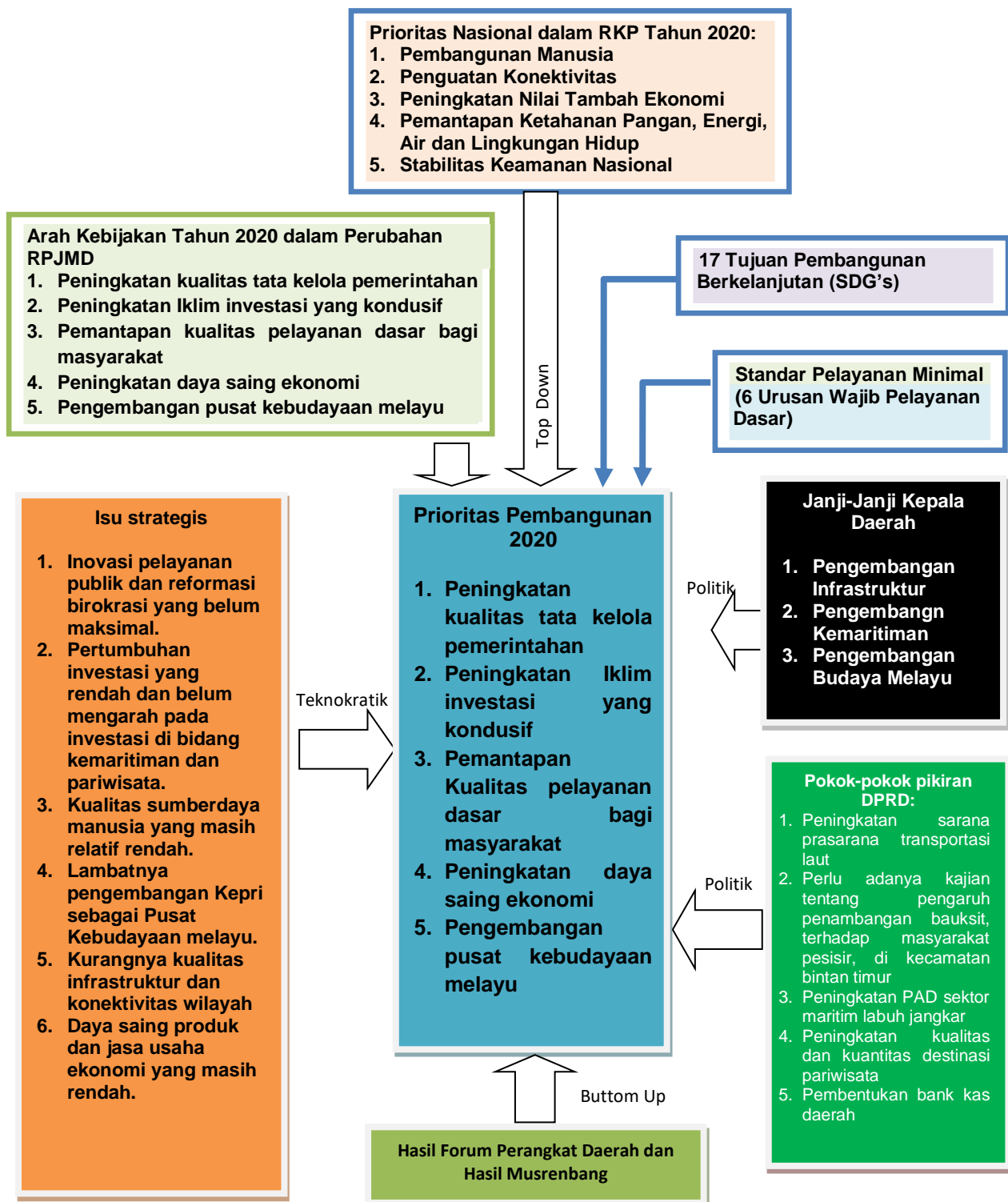
- a. **Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan**, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik; Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas fiskal daerah; Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.
- b. **Peningkatan Iklim investasi yang kondusif**, dengan fokus pada peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi; peningkatan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur mengenai ketenteraman, ketertiban, serta antisipasi potensi gangguan keamanan.
- c. **Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
- d. **Peningkatan daya saing ekonomi**, dengan fokus pada pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan; pengembangan perdagangan; peningkatan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, pengembangan pariwisata bahari, dan pemerataan sarana prasarana perhubungan.
- e. **Pengembangan pusat kebudayaan melayu**, dengan fokus pada promosi potensi budaya melayu Kepri, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

4.4. Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 dilakukan dengan memperhatikan arah Kebijakan Tahun 2020 dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2020, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Standar Pelayanan Minimal; Isu



strategis (pendekatan teknokratik), Janji-janji kepala daerah dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik), serta hasil Konsultasi publik (pendekatan Bottom up) sebagaimana terlihat pada skema berikut ini.



Gambar 4.1 Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2020 berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020 dalam RPJMD, Prioritas RKP tahun 2020, SDG's, SPM, Isu Strategis daerah, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD.

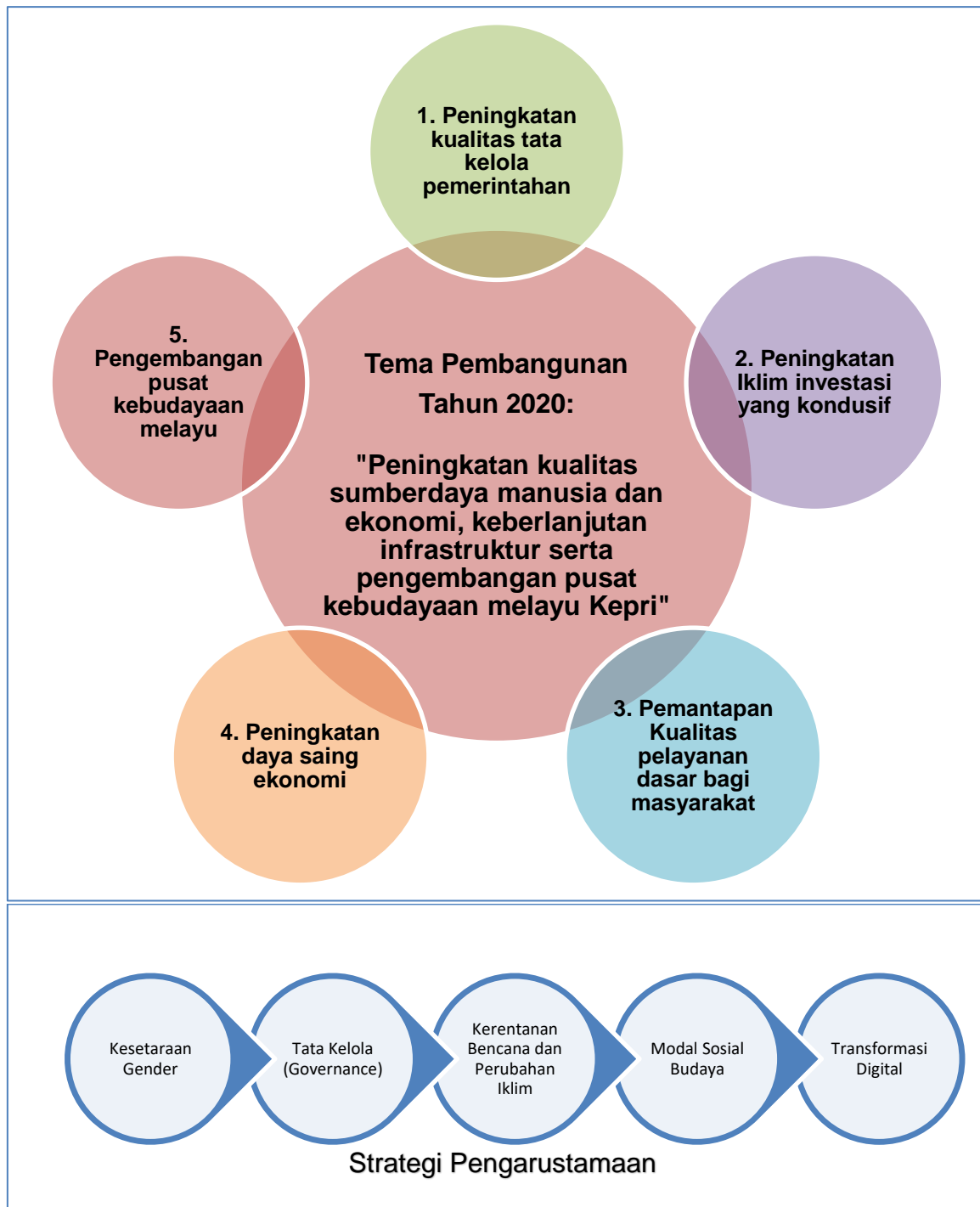


Mendasarkan hasil perumusan prioritas diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2020 yaitu: **“Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”**.

Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yaitu:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
2. Peningkatan Iklim investasi yang kondusif
3. Pemantapan Kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat
4. Peningkatan daya saing ekonomi
5. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

Dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas sektor, dilakukan pengarusutamaan meliputi: Kesetaraan gender; Tata Kelola (Governance); Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim; Modal Sosial Budaya; dan Transformasi Digital.



Gambar 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2020



Penjabaran prioritas dan strategi / arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2020

Prioritas Tahun 2020	Strategi / arah kebijakan
1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik yang berorientasi percepatan cakupan layanan dan pelayanan prima yang memuaskan seluruh lapisan masyarakat. b. Penerapan sistem pemerintahan yang terbuka (open goverment) melalui keterbukaan informasi publik, peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan, dan peningkatan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah dan DPRD. c. Pengembangan e-goverment dalam rangka perbaikan manajemen kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah. d. Pengembangan budaya kerja yang disiplin, profesional, taat aturan, penerapan sistem manajemen pegawai berbasis kompetensi dan merit system secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan, penilaian, penataan, pengembangan kompetensi, sistem penilaian kinerja). e. Penerapan sistem perencanaan penganggaran terpadu berbasis kinerja. f. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung penguatan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. g. Peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan intensifikasi pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan iklim investasi yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> a. Perluasan kesempatan kerja dengan mendorong investasi di berbagai sektor unggulan melalui optimalisasi <i>digital promotion</i> potensi dan peluang investasi, serta pemberian kemudahan perijinan investasi. b. Peningkatan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban; kerjasama dengan berbagai pihak dalamantisipasi potensi konflik sosial, SARA dan gangguan keamanan; dan peningkatan kualitas penanganan bencana.
3. Pemantapan kualitas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutu pendidikan menengah atas melalui peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana



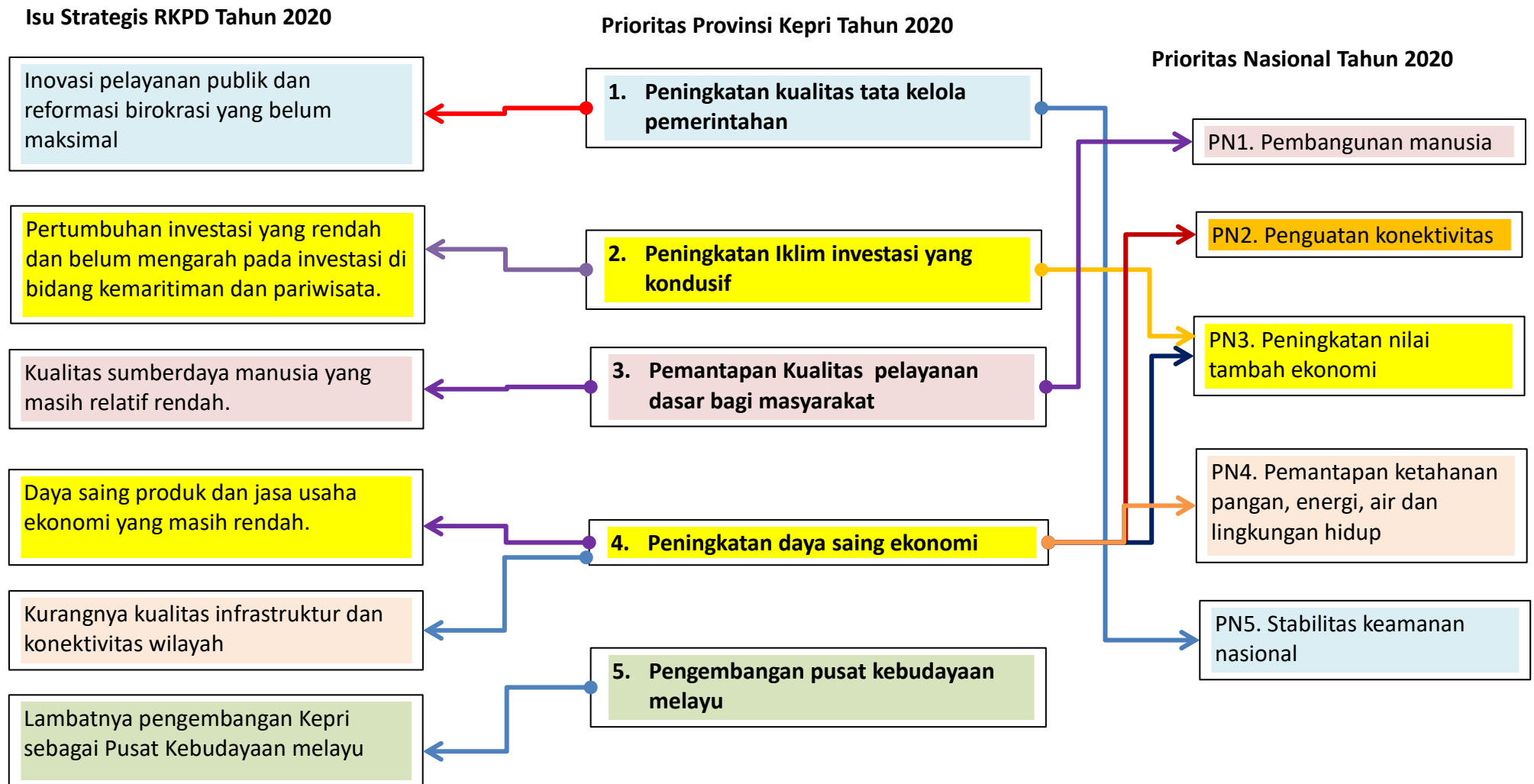
Prioritas Tahun 2020	Strategi / arah kebijakan
dasar bagi masyarakat	<p>pendidikan, distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum berbasis skill, attitude, dan learning culture, penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi.</p> <p>b. Peningkatan budaya literasi kepada masyarakat secara luas.</p> <p>c. Penguatan promotif dan preventif kesehatan dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif melalui pelaksanaan GERMAS, PHBS, penanganan stunting, penuntasan ODF, dan penguatan peran Posyandu.</p> <p>d. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar.</p> <p>e. Pembudayaan olahraga melalui pemassalan olahraga didukung penyediaan sarana dan prasarana olahraga.</p> <p>f. Peningkatan kualitas keluarga melalui pelayanan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber-KB.</p> <p>g. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pelaksanaan pemberdayaan perempuan, pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak, implementasi pengarusutamaan gender, serta optimalisasi layanan perlindungan perempuan dan anak.</p>
4. Peningkatan daya saing ekonomi	<p>a. Peningkatan kualitas, diversifikasi produk dan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk potensial dan unggulan.</p> <p>b. Pengembangan usaha Koperasi dan UMKM melalui penguatan modal usaha, pemasaran dan standarisasi kualitas produk agar mampu berdaya saing, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi.</p> <p>c. Pengembangan usaha perdagangan melalui peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, fasilitasi kerjasama ekspor, dan pemantauan pasokan dan harga pangan pokok.</p> <p>d. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan petani, dan jaminan ketersediaan dan harga sarana produksi pertanian.</p> <p>e. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan melalui peningkatan keterampilan nelayan dan pembudidaya ikan, penyediaan sarana dan</p>



Prioritas Tahun 2020	Strategi / arah kebijakan
	<p>prasarana penangkapan dan pembudidayaan ikan, peningkatan kapasitas dan kualitas unit usaha pengolahan ikan.</p> <p>f. Pengembangan pariwisata bahari dan pariwisata religi dengan memadukan aspek pengembangan destinasi wisata, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan (aksesibilitas) menuju obyek wisata, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata penguatan kemitraan pelaku usaha dan jasa pariwisata, dan penyelenggaraan event-event pariwisata.</p> <p>g. Pemantapan ketahanan pangan daerah melalui perbaikan sistem logistik dan pemantauan pasokan dan harga pangan agar tetap terjaga, sehingga mampu menekan angka inflasi.</p> <p>h. Penurunan pengangguran melalui: peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja dan penguatan program link and match antara supply dan demand pasar kerja.</p> <p>i. Pengentasan kemiskinan melalui: (1) penyediaan kebutuhan dasar penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan terutama nelayan, petani, buruh, pelaku UKM, dan kelompok rentan lainnya dalam bentuk beasiswa, jaminan kesehatan, beras sejahtera, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni; (2) penguatan sumber penghidupan yang berkelanjutan dengan pengembangan kewirausahaan, penguatan modal usaha kecil, pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan usaha ekonomi perempuan; dan (3) Penguatan peran kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program Penanggulangan kemiskinan yang terpadu.</p> <p>j. Pemerataan sarana prasarana perhubungan dan transportasi laut, infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi orang, barang dan jasa, dan menunjang aksesibilitas menuju destinasi pariwisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, bandara dan terminal, dan Peningkatan PAD sektor maritim labuh jangkar</p> <p>k. Peningkatan penanganan kawasan kumuh, peningkatan akses air bersih dan sanitasi.</p> <p>l. Pemantapan penataan lingkungan pada kawasan pusat pemerintahan Provinsi (dompok)</p>



Prioritas Tahun 2020	Strategi / arah kebijakan
	m. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan n. Peningkatan pengelolaan energi baru dan terbarukan
5. Pengembangan pusat kebudayaan melayu	a. Promosi potensi budaya melayu Kepri, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.



Gambar 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2020 dengan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020 dalam RPJMD, Prioritas RKP tahun 2020 dengan Isu Strategis RKPD



Perincian prioritas pembangunan daerah tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	a. Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik yang berorientasi percepatan cakupan layanan dan pelayanan prima yang memuaskan seluruh lapisan masyarakat. b. Penerapan sistem pemerintahan yang terbuka (open government) melalui keterbukaan informasi publik, peningkatan partisipasi publik dalam proses	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai	78	Program Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase Jumlah inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah	%	20,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
			Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	BB	Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan standar pelayanan publik	%	90,00	Sekretariat Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E	B		Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh kementerian	%	69,00	Sekretariat Daerah
			Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100	65		Persentase SOP pada seluruh OPD yang tersusun.	%	86,00	Sekretariat Daerah
			Nilai e-government	Skala nilai 1-4	2,4		Persentase SOP pada slrh OPD yang telah diimplementasikan	%	96,00	Sekretariat Daerah
							Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik	Skor SKM	74,00	Sekretariat Daerah



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	perencanaan dan pengawasan pembangunan, dan peningkatan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah dan DPRD. c. Pengembangan e-government dalam rangka perbaikan manajemen kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah. d. Pengembangan budaya kerja yang disiplin, profesional, taat aturan, penerapan sistem manajemen pegawai					Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri	Skala nilai 0-100	65,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
						Program e-government	Nilai e- government Provinsi Kepri	Skala nilai 1-4	2,40	Dinas Komunikasi Dan Informatika
							Persentase Domain dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatkan	%	55,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	65,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan	%	84,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat	Kasus	10 Kasus	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	berbasis kompetensi dan merit system secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan, penilaian, penataan, pengembangan kompetensi, sistem penilaian kinerja). e. Penerapan sistem perencanaan penganggaran terpadu berbasis kinerja.									Sumber Daya Manusia
							Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik	%	94,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Indeks Kepuasan Pelayanan ASN	indeks	B	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi	%	30,78	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Program perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
							Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	86,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
							Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	%	100,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
							Persentase kegiatan prioritas yang didanai	%	81,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
							Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	%	>34,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	f. Peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan intensifikasi pajak dan retribusi daerah.	Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,457	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,457	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
	g. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung penguatan sistem pengendalian intern		Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Opini Level	WTP 3		Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah	%	38,73	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	pemerintah daerah.		Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3		Persentase tunggakan Pajak Daerah yang tertagih	%	22,00	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	96,77	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
							Persentase kepuasan pelayanan	%	95,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan	%	79,22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
							Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan (pagar, patok, papan nama)	%	86,67	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
						Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah	Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri	Status	WTP	Inspektorat daerah
							Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	Inspektorat daerah
							Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Zona	Hijau	Inspektorat daerah
						Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P	%	90,00	Inspektorat daerah
							Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri	Status	Hijau	Inspektorat daerah
2. Peningkatan Iklim investasi yang kondusif	a. Perluasan kesempatan kerja dengan mendorong investasi di berbagai sektor unggulan melalui optimalisasi digital promotion potensi dan	Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing UMKM	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp Milyar	7.900	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Milyar	7.900	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	800		Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Milyar	800	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	a. Pengembang an usaha Koperasi dan UMKM melalui penguatan modal usaha, pemasaran dan standarisasi kualitas produk agar mampu berdaya saing, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi.		Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	21,22	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	150	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	106	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	88,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	83,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	55,80	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							Persentase KSP/USP sehat	%	38,30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
							Pertumbuhan koperasi	%	2,50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif	%	0,62	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	21,22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	b. Peningkatan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban; kerjasama dengan berbagai pihak dalam antisipasi potensi konflik sosial, SARA	Meningkatnya penciptaan rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	185	Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	185	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
			Angka kriminalitas	Kasus	4.865		Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri	orang	46	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
						Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase demo yang berjalan aman	%	97,00	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	dan gangguan keamanan; dan peningkatan kualitas penanganan bencana					Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase konflik sosial tertangani	%	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	Pilgub: 61,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	84,21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase desa/kel tangguh bencana	%	2,16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat	a. Peningkatan mutu pendidikan menengah atas melalui peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10,31	Program Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,31	Dinas Pendidikan
			Persentase SMA/SMK/SLB yang terakreditasi minimal B	%	82,00		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK	%	89,00	Dinas Pendidikan
							Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	71,00	Dinas Pendidikan
							Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK	%	77,00	Dinas Pendidikan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	pendidikan, distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum berbasis skill, attitude, dan learning culture, penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi.						Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK	%	0,40	Dinas Pendidikan
							Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik	%	88,50	Dinas Pendidikan
							Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	%	90,00	Dinas Pendidikan
							Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	unit	50	Dinas Pendidikan
							Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	1:36	Dinas Pendidikan
						Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	%	95,00	Dinas Pendidikan
						Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi	%	55,00	Dinas Pendidikan
							Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	%	55,00	Dinas Pendidikan
							Rata-rata Nilai Ujian Nasional(UN) SMA/MA/SMK/MAK	Angka	54,50	Dinas Pendidikan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	b. Penguatan promotif dan preventif kesehatan dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif melalui pelaksanaan GERMAS, PHBS, penanganan stunting, penuntasan ODF, dan penguatan peran Posyandu. c. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	129	Program Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	129	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	31		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	31	Dinas Kesehatan
			Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	16,5		Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	16,50	Dinas Kesehatan
							Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	%	70,00	Dinas Kesehatan
			Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Prevalensi HIV	%	0,5	Dinas Kesehatan			
				Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	170	Dinas Kesehatan			
				Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	83,00	Dinas Kesehatan			
				Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	91	Dinas Kesehatan			



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	dengan standar.						API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,29	Dinas Kesehatan
							Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	93,00	Dinas Kesehatan
							Prevalensi tekanan darah tinggi	%	28,10	Dinas Kesehatan
						Program pelayanan kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	57,14	Dinas Kesehatan
							Persentase Puskesmas terakreditasi	%	50,00	Dinas Kesehatan
							Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	78,00	Dinas Kesehatan
							Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	Paripurna	RSUD Prov Kepri Tanjungpinang
							Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	Peripurna	RSUD Prov Kepri Tanjung Uban
						Program peningkatan kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	80,00	RSUD Provinsi Tanjungpinang



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
						pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban	%	78,00	RSUD Prov Kepri Tanjung Uban
						Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	63,00	Dinas Kesehatan
							Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang	%	68,00	Dinas Kesehatan
							Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	69,00	RSUD Prov Tanjungpinang
							Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	70,00	RSUD Prov Kepri Tanjung Uban
	d. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pelaksanaan pemberdayaan perempuan, pengembang	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,50	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase anggaran responsive gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	6,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	an Kabupaten/kota Layak Anak, implementasi pengarusutamaan gender, serta optimalisasi layanan perlindungan perempuan dan anak.		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,25	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000 Perempuan	30,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
						Program Perlindungan Anak	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	%	57,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
							Rasio Kekerasan terhadap Anak	Per 10.000 anak	3,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
4. Peningkatan daya saing ekonomi	b. Peningkatan kualitas, diversifikasi produk dan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk	Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	2.117	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	9	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Juta US \$	1.478,75	Program Pengembangan Industri Unggulan	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	38,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	potensi dan unggulan.						Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas	orang	135.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
						Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	2.700	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	2.117	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	12,28	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	c. Pengembangan usaha perdagangan melalui peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, fasilitasi kerjasama ekspor, dan pemantauan pasokan dan	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,44	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	juta US \$	1.478,75	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$	9.500.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	10.500	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	harga pangan pokok						Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,44	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
						Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	%	< 10%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	%	95,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	d. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Ton	44.644	Program peningkatan kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	99,30	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
			Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.742		Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	1,24	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	petani, dan jaminan ketersediaan dan harga sarana produksi pertanian.		Jumlah Produksi Padi	Ton	1.020	Program Peningkatan produksi pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Padi (ton)	ton	1.020	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
							Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.742	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
							Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	44.644	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
							Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	32.103	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
						Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	5,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	e. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan melalui peningkatan keterampilan nelayan dan pembudidaya ikan, penyediaan sarana dan prasarana penangkapan dan pembudidayaan ikan, peningkatan kapasitas dan kualitas unit usaha pengolahan ikan.	Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	305.850	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	305.850,75	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.852		Nilai Tukar Nelayan (NTN)		110,33	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.328	Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.852,66	Dinas Kelautan Dan Perikanan
							Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		108,23	Dinas Kelautan Dan Perikanan
						Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan Hasil perikanan	Ton	1.328,88	Dinas Kelautan Dan Perikanan
						Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US \$	31.792.408	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	f. Pengembangan pariwisata bahari dan pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau	hari	2,15	Dinas Pariwisata



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	religi dengan memadukan aspek pengembangan destinasi wisata, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan (aksesibilitas) menuju obyek wisata, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata penguatan kemitraan pelaku usaha dan jasa pariwisata, dan penyelenggaraan event-event pariwisata.					Program Pengembangan Industri Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,50	Dinas Pariwisata
						Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	Juta orang	2,40	Dinas Pariwisata
							Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	Juta orang	1,60	Dinas Pariwisata
							Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	15.050	Dinas Pariwisata
						Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	51,50	Dinas Pariwisata
	g. Pemantapan ketahanan pangan daerah melalui perbaikan sistem logistik	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan,	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	92,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	dan pemantauan pasokan dan harga pangan agar tetap terjaga, sehingga mampu menekan angka inflasi.		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	92,00		Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
						Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor	89,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	h. Penurunan pengangguran melalui: peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja dan penguatan program link and match antara supply	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	67.43	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	48,13	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Persentase calon tenaga kerja yang terserap/diterima di perusahaan	%	62		Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	43,13	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
							Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	88,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
							Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman	%	16,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
						Program Penempatan dan perluasan	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	62,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	dan demand pasar kerja.					Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,43	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
							Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,74	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	i. Pengentasan kemiskinan melalui: (1) penyediaan kebutuhan dasar penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan terutama nelayan, petani, buruh, pelaku UKM, dan kelompok rentan lainnya dalam bentuk beasiswa, jaminan kesehatan, beras sejahtera, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni; (2) penguatan	Angka kemiskinan menurun	Persentase penduduk miskin	%	5,83	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	53,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Unit BUMDesa	50,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	1,38	Dinas Sosial
							Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	0,31	Dinas Sosial



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	sumber kehidupan yang berkelanjutan dengan pengembangan kewirausahaan, penguatan modal usaha kecil, pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan usaha ekonomi perempuan; dan (3) Penguatan peran kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program Penanggulangan						Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	41,19	Dinas Sosial
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,31	Dinas Sosial
							Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	9,91	Dinas Sosial
							Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	28,72	Dinas Sosial
							Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	1,96	Dinas Sosial
							Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	78,37	Dinas Sosial



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	n kemiskinan yang terpadu.						Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	65,41	Dinas Sosial
	j. Pemerataan sarana prasarana perhubungan dan transportasi laut, infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi orang, barang dan jasa, dan menunjang aksesibilitas menuju destinasi pariwisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, bandara dan	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	92,86	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	92,86	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	100		Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	100,00	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	91,18		Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyeberangan perintis	%	92,31	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	88,89		Persentase pelabuhan penyeberangan terkelola dengan baik	%	100,00	Dinas Perhubungan
						Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara	Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis	%	100,00	Dinas Perhubungan
							Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	%	75,00	Dinas Perhubungan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	terminal, dan Peningkatan PAD sektor maritim labuh jangkar						Persentase ketersediaan Bandar Udara	%	100,00	Dinas Perhubungan
						Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	91,18	Dinas Perhubungan
						Program Pembangunan Transportasi Laut	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	88,89	Dinas Perhubungan
							Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis	%	8,89	Dinas Perhubungan
							Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik	%	100,00	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	%	73,24	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis)	km	32,29	Dinas Pekerjaan Umum
							Panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi	km	52,85	Dinas Pekerjaan Umum
						Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan Provinsi berkondisi baik	%	73,24	Dinas Pekerjaan Umum
							Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik	%	83,51	Dinas Pekerjaan Umum



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	k. Peningkatan penanganan kawasan kumuh, peningkatan akses air bersih dan sanitasi.	Berkurangnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh	Ha	379,57	Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan	Luas kawasan kumuh	ha	379,57	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	%	83,48	Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi	Cakupan pelayanan Sanitasi:		69,2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							Air Limbah	%	96,36	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							Persampahan	%	64,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							Drainase	%	47,24	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya akses pelayanan air bersih	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	%	97,59	Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman	%	97,59	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	l. Pemantapan penataan lingkungan pada kawasan pusat pemerintahan Provinsi (dompak)	Meningkatnya bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun	Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun	%	22,50	Program penataan bangunan dan lingkungan	Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun	%	22,50	Dinas Pekerjaan Umum
	m. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan	.Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	90,91	Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	81,82	Dinas Lingkungan Hidup
			.Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	%	10,84		Persentase kab/kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu	%	71,43	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar	%	20,60		Dinas Lingkungan Hidup			
			Persentase Kab/kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu	%	85,71		Dinas Lingkungan Hidup			



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
							Persentase kabupaten/kota yang memenuhi standar nominasi Adipura	%	85,71	Dinas Lingkungan Hidup
	n. Peningkatan pengelolaan energi baru dan terbarukan	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	%	92,50	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,0009	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Pengembangan pusat kebudayaan melayu	a. Promosi potensi budaya melayu Kepri, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	49,70	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	49,70	Dinas Kebudayaan
			Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	%	21,68		Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi	%	49,08	Dinas Kebudayaan
						Program pengelolaan kekayaan budaya	Persentase warisan budaya tangible yang lestari	%	21,68	Dinas Kebudayaan
						Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju	%	57,97	Dinas Kebudayaan
							Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	52,61	Dinas Kebudayaan
		Meningkatnya pemahaman masyarakat	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	80	Program Pengembangan	Persentase pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	%	100,00	Sekretariat Daerah



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
		terhadap nilai-nilai agama	Persentase santri yang menjadi hafiz	%	80	Nilai-Nilai Keagamaan	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	80,00	Sekretariat Daerah

4.5. Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Pengarustamaan Pembangunan Tahun 2020

4.5.1 Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional Ke-1 (Pembangunan Manusia)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya melaksanakan pembangunan manusia sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4.4 Keterkaitan Fokus Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepri tahun 2020 dengan Prioritas Nasional ke-1 Pembangunan Manusia

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional ke-1 (Pembangunan Manusia) dijabarkan pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional Ke-1
(Pembangunan Manusia) Tahun 2020

Program Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Peningkatan koordinasi pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 	Program Rehabilitasi Sosial
2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan promotif dan preventif kesehatan dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif melalui pelaksanaan GERMAS, PHBS, penanganan stunting, penuntasan ODF, dan penguatan peran Posyandu. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar. 	Program Kesehatan Masyarakat
		Program pencegahan dan pengendalian penyakit
		Program pelayanan kesehatan
		Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu pendidikan menengah atas melalui peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum berbasis skill, attitude, dan learning culture, penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi. 	Program Pendidikan Menengah dan Khusus
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan
4) Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Pengentasan kemiskinan melalui: (1) penyediaan kebutuhan dasar penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan terutama nelayan, petani, buruh, pelaku UKM, dan kelompok rentan lainnya dalam bentuk beasiswa, jaminan kesehatan, beras sejahtera, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni; (2) penguatan sumber penghidupan yang berkelanjutan dengan pengembangan kewirausahaan, penguatan modal usaha kecil, pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan usaha ekonomi perempuan; dan (3) Penguatan peran kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program Penanggulangan kemiskinan yang terpadu. 	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		Program Penanggulangan Kemiskinan

Program Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
5) Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> Promosi potensi budaya melayu Kepri, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah. 	Program Pengembangan Nilai Budaya
		Program pengelolaan kekayaan budaya
		Program pengelolaan keragaman budaya
	<ul style="list-style-type: none"> Pembudayaan olahraga melalui pemassalan olahraga didukung penyediaan sarana dan prasarana olahraga. 	Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga

4.5.2 Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional Ke-2 (Penguatan Konektivitas)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan konektivitas sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4.5 Keterkaitan Fokus Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepri tahun 2020 dengan Prioritas Nasional ke-2 Penguatan Konektivitas



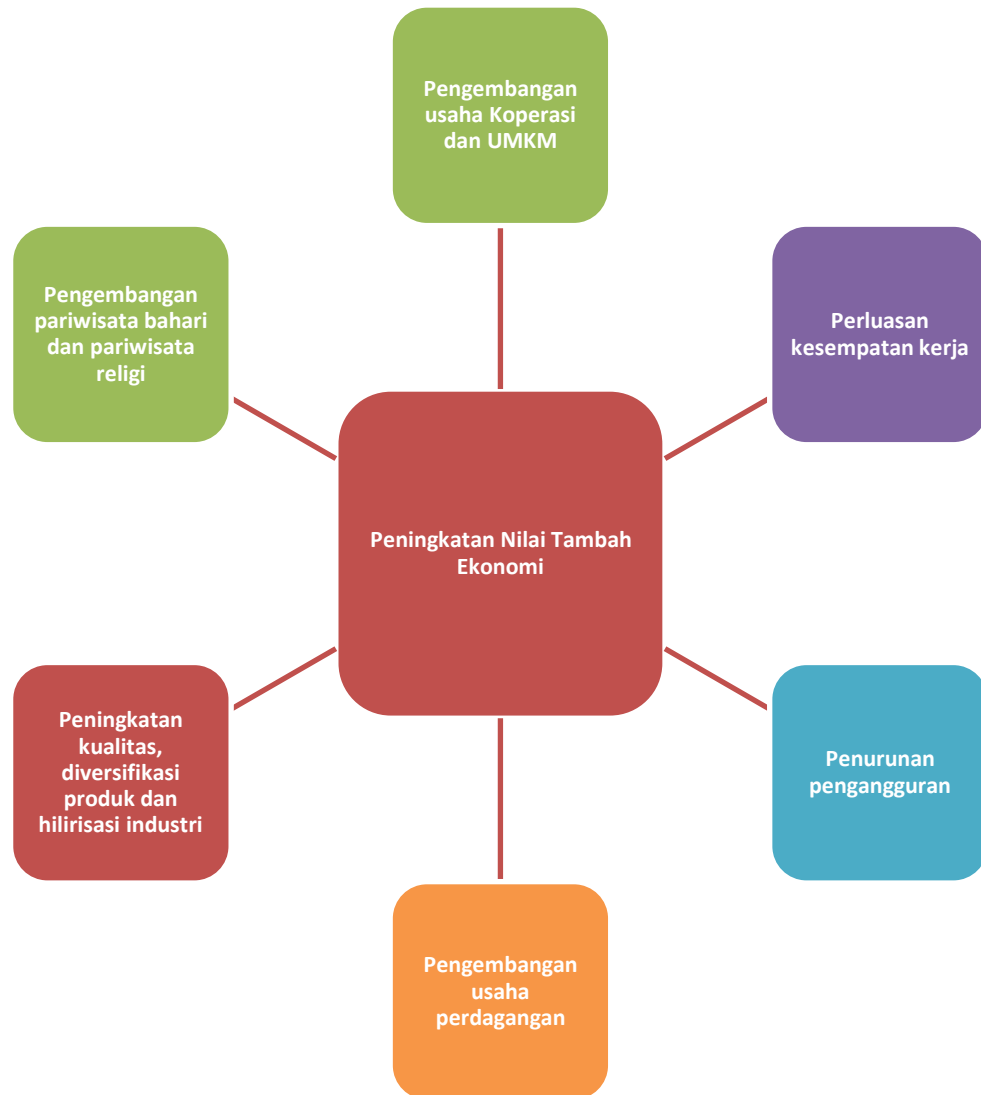
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional ke-2 (Penguatan Konektivitas) dijabarkan pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional Ke-2 (Penguatan Konektivitas) Tahun 2020

Program Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
1) Perluasan Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penanganan kawasan kumuh, peningkatan akses air bersih dan sanitasi. 	Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan
		Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum
2) Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana 	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
3) Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 4) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan sarana prasarana perhubungan dan transportasi laut, infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi orang, barang dan jasa, dan menunjang aksesibilitas menuju destinasi pariwisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, bandara dan terminal, dan Peningkatan PAD sektor maritim labuh jangkar 	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
		Program Pembangunan Transportasi Laut
		Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan
5) Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan e-government dalam rangka perbaikan manajemen kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah. 	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		Program e-government

4.5.3 Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional Ke-3 (Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan nilai tambah ekonomi sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4.6 Keterkaitan Fokus Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepri tahun 2020 dengan Prioritas Nasional ke-3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional ke-3 (Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi) dijabarkan pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional Ke-3
(Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi) Tahun 2020

Program Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan usaha Koperasi dan UMKM melalui penguatan modal usaha, pemasaran dan standarisasi kualitas produk agar mampu berdaya saing, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi. 	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
		Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
		Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi
2) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan kesempatan kerja dengan mendorong investasi di berbagai sektor unggulan melalui optimalisasi digital promotion potensi dan peluang investasi, serta pemberian kemudahan perijinan investasi. 	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan pengangguran melalui: peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja dan penguatan program link and match antara supply dan demand pasar kerja. 	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja
4) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan usaha perdagangan melalui peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, fasilitasi kerjasama ekspor, dan pemantauan pasokan dan harga pangan pokok 	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas, diversifikasi produk dan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk potensial dan unggulan. 	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
		Program Pengembangan Industri Unggulan
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pariwisata bahari dan pariwisata religi dengan memadukan aspek pengembangan destinasi wisata, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan (aksesibilitas) menuju obyek wisata, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata penguatan kemitraan pelaku usaha dan jasa pariwisata, dan penyelenggaraan event-event pariwisata. 	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Program Pengembangan Industri Pariwisata
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

4.5.4 Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional Ke-4 (Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4.7 Keterkaitan Fokus Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepri tahun 2020 dengan Prioritas Nasional ke-4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional ke-4 (Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup) dijabarkan pada Tabel 4.7 berikut ini.



Tabel 4.7

**Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional Ke-4
(Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup) Tahun 2020**

Program Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
1) Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan energi baru dan terbarukan 	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi
2) Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan ketahanan pangan daerah melalui perbaikan sistem logistik dan pemantauan pasokan dan harga pangan agar tetap terjaga, sehingga mampu menekan angka inflasi. 	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan
		Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan petani, dan jaminan ketersediaan dan harga sarana produksi pertanian. 	Program peningkatan kesejahteraan Petani
		Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan melalui peningkatan keterampilan nelayan dan pembudidaya ikan, penyediaan sarana dan prasarana penangkapan dan pembudidayaan ikan, peningkatan kapasitas dan kualitas unit usaha pengolahan ikan. 	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan
3) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses air bersih 	Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum
4) Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan 	Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
5) Penguatan Ketahanan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana 	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

4.5.5 Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional Ke-5 (Stabilitas Keamanan Nasional)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan Stabilitas Nasional sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4.8 Keterkaitan Fokus Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepri tahun 2020 dengan Prioritas Nasional ke-5 Stabilitas Nasional

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional ke-5 (Stabilitas Keamanan Nasional) dijabarkan pada Tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional Ke-5
(Stabilitas Keamanan Nasional) Tahun 2020

Program Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
1) Penguatan Kemampuan Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menjadi kewenangan daerah 	Tidak menjadi kewenangan daerah
2) Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menjadi kewenangan daerah 	Tidak menjadi kewenangan daerah
3) Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung penguatan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. 	Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik yang berorientasi percepatan cakupan layanan dan pelayanan prima yang memuaskan seluruh lapisan masyarakat. 	Program Pengembangan Inovasi Daerah
		Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan budaya kerja yang disiplin, profesional, taat aturan, penerapan sistem manajemen pegawai berbasis kompetensi dan merit system secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan, penilaian, penataan, pengembangan kompetensi, sistem penilaian kinerja). 	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sistem perencanaan penganggaran terpadu berbasis kinerja. 	Program perencanaan Pembangunan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung penguatan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. 	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah
4) Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. 	Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
		Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
	kerjasama dengan berbagai pihak dalam antisipasi potensi konflik sosial, SARA dan gangguan keamanan.	Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
5) Peningkatan Keamanan Siber	• Tidak menjadi kewenangan daerah	Tidak menjadi kewenangan daerah

4.5.6 Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Strategi Pengarustamaan Pembangunan (Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Transformasi Digital) Tahun 2020

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya melaksanakan Strategi Pengarustamaan Pembangunan (Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Transformasi Digital) sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4.9 Keterkaitan Fokus Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepri tahun 2020 dengan Strategi Pengarustamaan Pembangunan (Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Transformasi Digital)

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional ke-5 (Stabilitas Keamanan Nasional) dijabarkan pada Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Strategi Pengarustamaan Pembangunan (Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Transformasi Digital) Tahun 2020

Pengarustamaan	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
1. Gender	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pelaksanaan pemberdayaan perempuan, pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak, implementasi pengarustamaan gender, serta optimalisasi layanan perlindungan perempuan dan anak. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender 	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		Program Perlindungan Anak
2. Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik yang berorientasi percepatan cakupan layanan dan pelayanan prima yang memuaskan seluruh lapisan masyarakat. 	Program Pengembangan Inovasi Daerah
		Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan budaya kerja yang disiplin, profesional, taat aturan, penerapan sistem manajemen pegawai berbasis kompetensi dan merit system secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan, penilaian, penataan, pengembangan kompetensi, sistem penilaian kinerja). 	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sistem perencanaan penganggaran terpadu berbasis kinerja. 	Program perencanaan Pembangunan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung penguatan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. 	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah
		Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. 	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pengarustamaan	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
3. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana 	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
4. Modal Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah. Peningkatan gotong royong dan jiwa sosial masyarakat 	Program Pengembangan Nilai Budaya
5. Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan e-government dalam rangka perbaikan manajemen kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah. 	Program e-government
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sistem pemerintahan yang terbuka (open government) melalui keterbukaan informasi publik, peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan, dan peningkatan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah dan DPRD. 	Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik

4.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencapai target indikator sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka, dengan target sebagai berikut :

Tabel 4.10
Target Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin
dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1	Karimun	6,78	6,20	5,25
2	Bintan	7,50	3,40	6,50
3	Natuna	4,50	3,80	4,90
4	Lingga	6,78	12,01	3,95
5	Kepulauan Anambas	2,9	4,05	5,77
6	Kota Batam	4,55	3,39	5,38
7	Kota Tanjungpinang	5,22	9,14	5,62
	Provinsi Kepulauan Riau	5±1	5,83	6,74



Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota sebagai berikut :

1) Kabupaten Karimun

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dengan arah kebijakan :
 - (1) Pengembangan pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan sehingga produksi pertanian dapat berorientasi pasar.
 - (2) Peningkatan intensifikasi produk hortikultura dan agribisnis peternakan dengan pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan di perkotaan.
 - (3) Perlu didukung sarana dan prasarana produksi yang kontinuitas terkait dengan intensifikasi dan diversifikasi pola tanam.
- b) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan produk perikanan dengan arah kebijakan:
 - (1) Peningkatan pemanfaatan lahan non produktif sebagai lahan budidaya perikanan darat (ikan lele, gurame dan nila).
 - (2) Pengembangan budidaya perikanan laut dengan sistem jaring apung atau keramba didukung pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontiniu.
 - (3) Intensifikasi produk perikanan air tawar maupun laut serta produk olahannya di kawasan minapolitan.
- c) Mengembangkan industri campuran dan industri strategis padat karya dan berorientasi ekspor (manufaktur).
- d) Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik (pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat.
- e) Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas terutama kawasan pergudangan.
- f) Mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas pelabuhan bebas, terutama wisata alam, wisata minat khusus dan wisata agro.

2) Kabupaten Bintan

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya khususnya ikan kerapu dan jenis ikan lainnya dengan sistem keramba didukung pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontinyu.
- b) Mengembangkan industri manufaktur unggulan berorientasi ekspor dan industri pengolahan dengan penataan kawasan industri pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri, pengembangan kawasan sentra-sentra industri kecil, pengembangan industri pengolahan hasil laut, dan pengembangan industri hasil pertanian dan perkebunan.
- c) Mengembangkan kawasan wisata terpadu, eksklusif, kawasan wisata terbuka umum dan wisata minat khusus, dengan prioritas pada rehabilitasi jalan Provinsi yang digunakan sebagai track event internasional di Kabupaten Bintan.



- d) Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik (pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat, dan menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas.
- e) Meningkatkan konektivitas antar pulau berupa sarana dan prasarana angkutan laut bagi penumpang dan barang khususnya di kecamatan Tambelan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar juga menjaga stabilitas harga barang serta ketahanan pangan.
- f) Meningkatkan prasarana air bersih bagi masyarakat pesisir menggunakan teknik pipa bawah laut dari sumber air bersih di pulau besar ke pulau-pulau kecil disekitarnya.
- g) Meningkatkan ketersediaan listrik di pulau-pulau kecil dengan jaringan kabel udara dan kabel bawah laut agar dapat meningkatkan rasio elektrifikasi dan ketersediaan listrik 24 jam.

3) Kabupaten Natuna

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut :

- a) Mengembangkan kawasan sesuai dengan *Masterplan* Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna;
- b) Mengembangkan infrastruktur secara berkelanjutan untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan yang diarahkan pada simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global;
- c) Mengembangkan pelabuhan transit pelayaran internasional dan pusat pelayanan akses pasar global;
- d) Mengembangkan fasilitas pada alur pelayaran internasional yang melewati Kabupaten Natuna meliputi tempat Bunkering BBM dan STS Oil.
- e) Mengembangkan industri migas, industri perkapalan, industri petrokimia, dan industri berbasis perikanan, dengan arah kebijakan pada Pembangunan sarana dan prasarana pendukung; Pengembangan fasilitas pada alur pelayaran internasional; dan Pembangunan infrastruktur penunjang.
- f) Mengembangkan destinasi dan pemasaran wisata bahari, ekowisata dan minat khusus di Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiapi, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu seduyung, dan Batu catur, dengan mendatangkan investor dan membangun kemitraan antara pelaku usaha dan masyarakat, dan Peningkatan kualitas SDM pariwisata.
- g) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan produk kelautan dengan arah kebijakan :
 - (1) Pengembangan perikanan budidaya air laut, air tawar, air payau, dan rumput laut dengan penyediaan jaring apung atau keramba didukung Pemenuhan obat, bibit dan pakan ikan secara kontinyu, Pengembangan industri maupun sarana dan prasarana pengolahan perikanan, Bantuan modal bagi nelayan melalui koperasi, dan Pelatihan SDM Perikanan.
 - (2) Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan dengan pembangunan Techno Park, BBIP SMK Kelautan dan Perikanan di Kecamatan



Bunguran Timur; Budidaya Kerapu dan Napoleon di Kecamatan Bunguran Barat; Sentra Rumput Laut di Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga; Sentra Bisnis Perikanan Tangkap Terintegrasi di Kecamatan Pulau Tiga; serta penyediaan sarana prasarana serta sentra bisnis perikanan tangkap di Kecamatan Pulau Tiga.

- (3) Pengembangan Perikanan Tangkap dengan fokus pada Penguatan kelembagaan kelompok dengan kemitraan; Pengembangan armada penangkapan ikan; Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan; Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap; dan Pembinaan kelompok nelayan.
- h) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dengan arah kebijakan:
 - (1) Penyediaan sarana dan prasarana produksi hasil pertanian dan peternakan yang berkelanjutan.
 - (2) Peningkatan Pelatihan SDM Pertanian, perkebunan dan peternakan, dan pengembangan teknologi hasil pertanian.
 - (3) Pengembangan industri perkebunan
 - (4) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan

4) Kabupaten Lingga

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai berikut :

- a) Mengembangkan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan pada zona kawasan pertanian Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga, didukung dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan perikanan, dan pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pertanian.
- b) Meningkatkan produksi perikanan dengan mengoptimalkan eksploitasi pada zona Kawasan tangkap terdapat pada seluruh perairan Kabupaten Lingga, dan pengembangan budidaya pada zona Kawasan Perikanan budidaya meliputi Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep Selatan. Peningkatan produksi dengan dukungan prasarana pelabuhan dan dermaga perikanan, penyediaan alat tangkap, dan pemberdayaan nelayan.
- c) Mengembangkan budidaya perikanan dan garam dengan penyediaan sarana dan prasarana budidaya, pelaksanaan pemetaan potensi dan kelayakan lahan tambak.
- d) Mengembangkan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pemasaran wisata untuk mendukung pengembangan kawasan wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam dan wisata bahari dengan prioritas pada:
 - (1) KPP Senayang, meliputi: Kawasan Pulau Benan dan Sekitarnya; Tajur Biru, Pulau Sebangka dan Sekitarnya; Pulau Pena'ah, Batu Berlubang dan Sekitarnya.
 - (2) KPP Lingga, meliputi: Pembangunan dan pengembangan Kawasan Damnah, Mepar, Kawasan Tugu Khatulistiwa, Air Terjun Resun, Pantai Pasir Panjang.



- (3) KPP Singkep, meliputi: pembangunan dan pengembangan Kawasan Pemandian Air Panas, Batu Ampar, Sergang dan Pulau Berhala.
- e) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan Kawasan Strategis di Kabupaten Lingga.

5) Kabupaten Kepulauan Anambas

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Anambas diuraikan sebagai berikut :

- a) Pembangunan dan pengembangan simpul transportasi udara dan laut sehingga tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas di Kepulauan Anambas, meliputi pengembangan bandar udara, terminal ferry dan terminal angkutan darat yang terletak di Palmatak.
- b) Mengembangkan sumber daya energi alternatif yang bersumber dari energi arus pasang surut air laut, terutama di alur celah antar pulau yang mempunyai kecepatan arus yang cukup besar, serta sumber energi alternatif dari sumber angin dan tenaga surya.
- c) Mengembangkan Pelabuhan Check Point di Kabupaten Kepulauan Anambas (Tarempa) guna mempermudah akses wisatawan luar negeri terhadap pariwisata di Kepulauan Anambas.
- d) Mengembangkan perikanan tangkap dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti Alat Pengangkapan Ikan, pelabuhan perikanan, pabrik es, fasilitasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar terapung (Solar Packed Dealer Nelayan [SPDN]), meningkatkan kuota ketersediaan BBM untuk nelayan, Pemberdayaan nelayan, dan meningkatkan koordinasi penanganan illegal fishing.
- e) Mengembangkan perikanan budidaya dengan pembangunan BBI, Keramba Jaring Apung/keramba, Fasilitas pendukung paska panen, kapal nelayan, dan Pemberdayaan pembudidaya ikan; serta Menyiapkan rumput laut dan kerang mutiara sebagai produk unggulan baru.
- f) Mengembangkan produk perikanan hasil olahan.
- g) Mengembangkan pulau Matak sebaga pusat/ sentra pengembangan industri dan ketenagakerjaan, dan pulau Jemaja sebagai pusat/ sentra pengembangan pariwisata, perikanan dan pertanian.
- h) Mengembangkan industri pendukung pertambangan migas lepas pantai, Industri Ship Service, industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah, industri kerajinan rumah tangga untuk mendukung pariwisata, industri pembuatan kapal kecil, dan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.
- i) Membangun titik labuh untuk jalur pelayaran wisata, infrastruktur penunjang pariwisata, mengembangkan tiga destinasi wisata utama, dan melakukan promosi paket wisata bahari, meliputi:
 - (1) Kluster Pulau Jemaja Wisata pantai pelestarian penyu, snorkling, diving, sunset, sunrise, gua burung wallet, Rock Climbing, wiata budaya, air terjun, tracking mangrov, kayaking, kuliner, wisata sepeda wisata hutan.
 - (2) Kluster Pulau Penjalin Wisata pantai snorkling, diving, sunrise, swimming, fishing dan tracking



- (3) Kluster Pulau Temuruk Wisata pantai, snorkling, diving, sunset, sunrise, tracking swimming, fishing dan wisata kancil.
- j) Melakukan revitalisasi lahan sawah dan mengembangkan pertanian hortikultura dengan memanfaatkan potensi sawah dan lahan dipulau jemaja dan lahan cadangan di kecamatan palmatak dengan prioritas pada penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan, sertifikasi bibit unggul pertanian/ perkebunan, pengembangan pertanian areal tanam padi sawah (cetak sawah), pelatihan/ magang petani untuk peningkatan mutu beras, peremajaan tanaman cengkeh, dan penetapan blok penghasil tinggi tanaman cengkeh.

6) Kota Batam

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut:

- a) Pada Pusat Kota dikembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain), serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
- b) Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, dilakukan peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing.
- c) Pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistis setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan internasional hub” (hub international port).
- d) Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di Pulau Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis di Pulau Rempang dan/atau Galang.
- e) Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (flyover), simpang susun (interchange), jalan lintas bawah (underpass), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air.
- f) Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan



- telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman.
- g) Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, tamankota, taman lingkungan, bumi perkemahan dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;
 - h) Mengembangkan wisata kota, wisata bahari dan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), wisata minat khusus, wisata terpadu, eksklusif, wisata agro dan wisata alam. Pengembangan kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya pada Pulau-pulau kecil di wilayah Utara Kota Batam seperti P. Lengkana, P. Air Asam, Air Manis, P. Leroy, P. Sekila (Kec. Belakang Padang), P. Puteri (Kec. Nongsa), dan Pulau-pulau kecil di wilayah Selatan Kota Batam sebagai tempat Rekreasi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan P. Abang dan P. Petong
 - i) Pengembangan Zona peruntukan industri yaitu Tanjung sauh-Ngenang, Sembulang, Tanjung Gundap, P. Kepala Jeri dan P. Janda Berhias, dan Pengembangan industri Shipyard, Ship repair, Ship building, dan industri pendukung pengeboran lepas pantai, serta industri maritim lainnya di Kawasan Tanjung Gundap dan Pengembangan Kawasan Kabil-Tanjung Sauh.
 - j) Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan.

7) Kota Tanjungpinang

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut :

- a) Mengembangkan Pulau Dompak sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Rencana Induk (Masterplan) Istana Kota Piring.
- b) Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi massal perkotaan secara terintegrasi dan terhubung dengan jaringan transportasi laut dan udara.
- c) Mengembangkan Industri automotif, Industri elektronik, Industri konveksi, Industri makanan, Industri pengolahan hasil laut, dan Industri perkapalan.
- d) Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang mampu mengakomodasi pasar tradisional, termasuk kegiatan koperasi dan Usaha mikro kecil Menengah (UMKM).
- e) Mengembangkan kawasan wisata sejarah, wisata budaya dan wisata kreatif.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Elemen utama program prioritas memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, dan Perangkat Daerah pelaksana yang bertanggungjawab.

Rencana program dan kegiatan prioritas juga mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Di dalam perencanaan pembangunan terdapat sejumlah kegiatan yang diusulkan melalui mekanisme forum musyawarah perencanaan pembangunan. Rencana program yang diusulkan tidak mungkin semua akan dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan skala prioritas untuk menentukan mana kegiatan yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak dalam sebuah anggaran pembangunan. Penentuan skala prioritas program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2020 dalam rangka penyelesaian isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada Tahun 2020 merupakan program dan kegiatan yang pendanaannya secara umum bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. Namun ada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari luar APBD, yaitu dari APBN dan sumber-sumber lainnya yang datang atas partisipasi masyarakat ataupun dunia usaha.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendidikan

a. Program Pendidikan Menengah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,31
2)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK	%	89,00
3)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	71,00
4)	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK	%	77,00
5)	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK	%	0,40
6)	Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik	%	88,50
7)	Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	%	90,00
8)	Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	unit	50
9)	Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	1:36

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN,
- 2) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN
- 3) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran Pengawas Sekolah
- 4) Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan DAK SMK
- 5) Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan DAK SMA
- 6) Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan DAK SLB
- 7) Kegiatan Dana Alokasi DAK Reguler SMA
- 8) Kegiatan Dana Alokasi DAK Penugasan SMK
- 9) Kegiatan Dana Alokasi DAK Afirmasi SMA
- 10) Pembangunan USB SMA di Provinsi Kepulauan Riau
- 11) Pembangunan RKB SMA di Provinsi Kepulauan Riau
- 12) Pembangunan RKB SMK di Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Pembangunan RKB SLB di Provinsi Kepulauan Riau
- 14) Pembangunan Ruang Laboratorium SMA di Provinsi Kepulauan Riau
- 15) Pembangunan Ruang Laboratorium/RPS SMK di Provinsi Kepulauan Riau
- 16) Pembangunan Laboratorium/Ruang Praktek SLB di Provinsi Kepulauan Riau
- 17) Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya SMA di Provinsi Kepulauan Riau
- 18) Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya SMK di Provinsi Kepulauan Riau
- 19) Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya SLB di Provinsi Kepulauan Riau
- 20) Revitalisasi/Rehabilitasi SMA di Provinsi Kepulauan Riau



- 21) Revitalisasi/Rehabilitasi SMK di Provinsi Kepulauan Riau
- 22) Revitalisasi/Rehabilitasi SLB di Provinsi Kepulauan Riau
- 23) Pengadaan Meubeler SMA di Provinsi Kepulauan Riau
- 24) Pengadaan Alat Praktek/Alat Peraga SMK di Provinsi Kepulauan Riau
- 25) Pengadaan Alat Praktek/Alat Peraga SLB di Provinsi Kepulauan Riau

b. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	%	95,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Seleksi Olimpiade Guru Nasional (OSN) Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Koordinasi dan Konsolidasi Pendataan Guru SMA Se-Provinsi Kepulauan Riau

c. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi	%	55,00
2)	Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	%	55,00
3)	Rata-rata Nilai Ujian Nasional(UN) SMA/MA/SMK/MAK	Angka	54,50

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Festival dan Olimpiade Nasional
- 3) Pelaksanaan Manajemen BOS Dikdasmen
- 4) Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Kompetensi SMK



d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B	%	82,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dinas Pendidikan Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan
- 3) Koordinasi dan Pendampingan Instansi Terkait Pendukung Pengelolaan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Penyusunan Bahan Perencanaan Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

2. Kesehatan

a. Program Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	129
2)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	31
3)	Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	16,50
4)	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	%	70,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:

- 1) Asuhan Persalinan Normal Melalui P2KS Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Orientasi SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang)
- 3) Kelas Ibu Hamil Perangkat Daerah Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Orientasi PKPR dan Peer Conselor



- 5) Pelacakan Kasus Gizi Buruk
- 6) Pelatihan Konselor Menyusui
- 7) Pengadaan Taburia dalam rangka penurunan stunting
- 8) Pengadaan alat Rapid test anemia
- 9) Penyampaian Informasi/ Kampanye Kesehatan langsung kepada Masyarakat & Pengembangan Media Promkes
- 10) Pengembangan Saka Bakti Husada dalam mendukung PHBS bagi masyarakat potensial
- 11) Penguatan Kelembagaan Bidang Kesehatan
- 12) Pengawasan Kualitas Air Minum
- 13) Pertemuan Koordinasi pengelolaan Limbah medis
- 14) Pemetaan Resiko keamanan pangan
- 15) Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Kabupaten/Kota Sehat
- 16) Pengembangan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi
- 17) Peningkatan Kapasitas petugas dalam pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
- 18) Orientasi Petugas dalam P4K dan ANC Terpadu
- 19) Pembinaan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
- 20) Jambore Kader Posyandu dalam mendukung kebijakan PHBS

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan RSUD Provinsi Tanjungpinang meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengadaan logistik Perkantoran dan Penunjang Lain RS
- 2) Penyelenggaraan K3 dan sanitasi rumah sakit
- 3) Pengadaan Muebeleur RS
- 4) Pengadaan Komputer Manajemen, dan Pelayanan RS
- 5) Akreditasi Rumah Sakit
- 6) Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Kesehatan dan Penunjangnya
- 7) Pengadaan Obat dan Perlengkapan Pengelolaan Obat
- 8) Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai
- 9) Pengadaan Kelengkapan dan Penunjang Keperawatan
- 10) Standarisasi Pelayanan Keperawatan
- 11) Peningkatan Mutu dan Pengembangan Penunjang Medik
- 12) Pengadaan Kelengkapan penunjang medik
- 13) Peningkatan Sarana Prasarana Gedung RS
- 14) Pengadaan Kelengkapan penunjang non medik
- 15) Pengadaan Peralatan Kesehatan



16) Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan Medik

17) Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien

b. Program pencegahan dan pengendalian penyakit

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Prevalensi HIV	%	0,5
2)	Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	170
3)	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	83,00
4)	Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	91
5)	API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,29
6)	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	93,00
7)	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	28,10

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:

- 1) Technical dan Mentoring ARV
- 2) Pengendalian pencegahan kasus kusta di kab./kota
- 3) Pengendalian pencegahan kasus baru frambusia di kab./kota
- 4) Pengendalian Pencegahan Peningkatan kasus DBD/Malaria di Kab/Kota Se- Provinsi Kepri
- 5) Penanggulangan PD3i
- 6) Pertemuan Akselerasi Imunisasi Rutin, Lanjutan dan BIAS
- 7) Penanggulangan Penyakit Menular dan Berpotensi Wabah
- 8) Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji di embarkasi batam
- 9) Screening Kanker Serviks pada Wanita Usia Subur
- 10) Penanggulangan dan pengendalian PTM
- 11) Pelatihan PANDU PTM di FKTP se-Provinsi Kepri



- 12) Sosialisasi program PTM bagi stakeholders dan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan pengendalian Obesitas di Provinsi Kepri
- 13) Pelatihan Deteksi Dini dan Tatalaksana gangguan jiwa di FKTP
- 14) Peringatan TB DAY (Hari TB Sedunia)

c. Program pelayanan kesehatan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	57,14
2)	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	50,00
3)	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	78,00
4)	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	Paripurna
5)	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	Peripurna

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan dengan Metode Pendekatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 2) Penyelenggaraan SP3T Prov. Kepri
- 3) Pengelolaan Jamkesda Provinsi Kepulauan Riau (HIBAH)
- 4) Penguatan SDM Pelaku Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS (Penguatan Tenaga Coder RS dalam INA CBG's / Penguatan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Pemanfaatan Dana JKN/KIS)
- 5) Pengelolaan Jaminan Pelayanan Penduduk miskin
- 6) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kab/Kota Se-Prov Kepri
- 7) Pendampingan Survei Akreditasi Rumah Sakit
- 8) Penatalaksanaan sistem informasi RS (SIRS)
- 9) Peningkatan Program Ponak di RS kab/Kota
- 10) Penguatan manajemen puskesmas melalui pendekatan keluarga
- 11) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di UTD



- 12) Optimalisasi Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 13) Pertemuan Kalibrasi Sarana Prasarana Alat (SPA) di FKTP
- 14) Kontigensi Terpadu Krisis Kesehatan
- 15) Pembangunan/Rehabilitasi Dukungan sarana prasarana alat kesehatan RSUD/RS Jiwa
- 16) Penyelenggaraan Badan Pengawas RS (BPRS) Provinsi Kepri
- 17) Sarana Penunjang Laboratorium
- 18) Sarana Prasarana Alat Kesehatan Puskesmas
- 19) Pelayanan Kesehatan Aparatur
- 20) Pelayanan Kesehatan dalam rangka bakti sosial
- 21) Penunjang Program Akreditasi Puskesmas
- 22) Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK
- 23) Pengadaan alat kesehatan peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit (Puskesmas Tanjung Batu Kabupaten Karimun)
- 24) Pengadaan Generator Listrik di RSUD Tanjungpinang
- 25) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) di Puskesmas Batam dan Lingga
- 26) Pembangunan Klinik DOTS dan Layanan TB RO di RSUD Encik Mariyam Lingga dan RSUD Palmatak
- 27) Pengadaan Mesin Fogging di Bintan
- 28) Pengadaan Alat Kesehatan Pemulasaran Jenazah di RSUD Natuna
- 29) Pengadaan Alat Kesehatan Laboratorium Puskesmas di Natuna
- 30) Klinik Kesehatan Gurindam

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan RSUD Provinsi Tanjung Uban meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Muebeleur RS
- 2) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
- 3) Pengadaan rak status/file pasien di rekam medis rumah sakit
- 4) Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung layanan RS
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry RS



d. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	80,00
2)	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban	%	78,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan RSUD Provinsi Tanjungpinang meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan BLUD

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan RSUD Provinsi Tanjung Uban meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan BLUD

e. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	63,00
2)	Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang	%	68,00
3)	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	69,00
4)	Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	70,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Sarana Prasarana Poltekkes Kemenkes



- 2) Insentif Peserta Internship Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Pengangkatan Tenaga Medis Non PNS
- 4) Pengangkatan Tenaga Paramedis Non PNS
- 5) Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas
- 6) Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
- 7) Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan RSUD Provinsi Tanjungpinang meliputi sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Medik
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Medik/Non Medik
- 3) Pendidikan dan pelatihan SDM manajemen
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Perawat/Bidan

f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar	%	85,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- 2) Pengelolaan instalasi farmasi prov kepri
- 3) Upaya Peningkatan Penggunaan Obat Rasional (POR)
- 4) Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Produksi dan distribusi Kefarmasian
- 5) Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat)

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan RSUD Provinsi Tanjung Uban meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kecil Rumah Sakit (APBD)



g. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan	%	100,00
2)	Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pertemuan perencanaan, penganggaran dan evaluasi program tingkat Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Peningkatan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan asistensi pembangunan kesehatan
- 3) Pra-Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 4) Sosialisasi Juknis dan Penyusunan RKA DAK
- 5) Koordinasi kenaikan pangkat PNS Dinkes Provinsi Kepulauan Riau dengan BKPP/BKN
- 6) Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional Kesehatan
- 7) Peningkatan kapasitas pengelola kepegawaian melalui Diklat
- 8) Rapat Koordinasi Kepegawaian Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Review Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Kesehatan Prov. Kepri
- 10) Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan
- 11) Pengelolaan e-disiplin pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan RSUD Provinsi Tanjungpinang meliputi sebagai berikut:

- 1) Asistensi Advokasi, Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Peningkatan mobilisasi dana penerimaan RS
- 3) Dukungan Rumah Sakit Pendidikan



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	48,64
2)	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	74,10
3)	Jumlah titik rawan banjir	Lokasi	18,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air (Kegiatan Perencanaan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air)
- 2) Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan, dan Optimalisasi/Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi, dan Daerah Pengairan Lainnya (Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan, dan Optimalisasi/Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi, dan Daerah Pengairan Lainnya)
- 3) Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan, dan Optimalisasi/Rehabilitasi Waduk/Embung dan Bangunan Penampung Lainnya (Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan, dan Optimalisasi/Rehabilitasi Waduk/Embung dan Bangunan Penampung Lainnya)
- 4) Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai (Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai)
- 5) Kegiatan Pembangunan, Perbaikan, dan Pengaturan Sistem Sungai/Saluran Utama (Kegiatan Pembangunan, Perbaikan, dan Pengaturan Sistem Sungai/Saluran Utama)
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kota Tanjungpinang & Kabupaten Bintan (Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kota Tanjungpinang & Kabupaten Bintan)
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kota Batam (Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kota Batam)
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Karimun (Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Karimun)
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Lingga (Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Lingga)
- 10) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Natuna (Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Natuna)



- 11) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Kepulauan Anambas (Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Kepulauan Anambas)
- 12) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Teknis di Bidang Sumber Daya Air (Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Teknis di Bidang Sumber Daya Air)

b. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase jalan Provinsi berkondisi baik	%	73,24
2)	Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik	%	83,51

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Batam
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Jembatan pada ruas status jalan Provinsi
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan/Jembatan di Kawasan Pulau Dompak



c. Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis)	km	32,29
2)	Panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi	km	52,85

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
- 2) Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan
- 3) Kegiatan Pendamping DAK
- 4) Kegiatan pembangunan jalan di Kota Tanjungpinang
- 5) Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Bintan
- 6) Kegiatan pembangunan jalan di Kota Batam
- 7) Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Karimun
- 8) Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Lingga
- 9) Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Natuna
- 10) Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 11) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan jembatan
- 12) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kota Tanjungpinang
- 13) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Bintan
- 14) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kota Batam
- 15) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Karimun
- 16) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Lingga
- 17) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Natuna
- 18) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 19) Kegiatan Tahun Jamak Penataan Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang
- 20) Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Antar Pulau (Connectivity) di Kabupaten Karimun
- 21) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan/Jembatan di Kawasan Pulau Dompak



- 22) Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Teknis di Bidang Bina Marga
- 23) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 24) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang
- 25) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan
- 26) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Batam
- 27) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun
- 28) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga
- 29) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna
- 30) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 31) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Jembatan pada ruas status jalan Provinsi
- 32) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan/Jembatan di Kawasan Pulau Dompak

d. Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI	%	90,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan dan Peraturan Jasa Konstruksi
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan SIPJAKI Provinsi, dan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan IUJK dan SIPJAKI Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Survey Identifikasi dan Pemetaan Tenaga Kerja Konstruksi Provinsi
- 4) Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota



- 5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konstruksi
- 6) Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Pembinaan Pengawasan dan Pengaturan

e. Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi)	Orang	200

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Jasa Konstruksi
- 2) Kegiatan Survey Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi di Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Mobile Training Unit (MTU)
- 4) Kegiatan Pengoperasian, Pemeliharaan dan Prasarana Pendukung Mobile Training Unit (MTU)
- 5) Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Tenaga Konstruksi Pemerintah
- 6) Pelatihan/Pendidikan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
- 7) Kegiatan Tenaga Ahli Konstruksi melalui SIBIMA (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi)

f. Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase capaian kontribusi retribusi laboratorium pengujian jasa konstruksi terhadap total retribusi daerah	%	0,06



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 7) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Laboratorium Pengujian Konstruksi
- 8) Kegiatan Kalibrasi dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Pengujian Konstruksi
- 9) Kegiatan pengembangan SDM dan Operasional Laboratorium Pengujian Konstruksi
- 10) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Peralatan

g. Program pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya	%	85,71

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi kepulauan Riau
- 2) Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Penataan Ruang di Provinsi Kepri

h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda	perda	3

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyusunan Kajian Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Kegiatan Legalisasi Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Kepri
- 4) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau



- 7) Kegiatan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Kepulauan Riau

4. Pertanian

a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Pertanian
- 2) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Aset Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanian
- 3) Kegiatan Studi LARAP
- 4) Inventarisasi Kepemilikan Lahan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Pertanian di Provinsi Kepulauan Riau

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Luas kawasan kumuh	ha	379,57

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Batam
- 2) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Bintan
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Karimun
- 4) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Lingga



- 5) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Natuna
- 6) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Tanjungpinang
- 7) Kegiatan Penyediaan Perumahan (Pembangunan Rumah Khusus Bagi Medis dan Para Medis di Kec. James Kab. Kep. Anambas)

b. Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman	%	97,59

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan pada kawasan Strategis Provinsi Pulau Dompak
- 2) Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Anambas
- 3) Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Bintan
- 4) Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Karimun
- 5) Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Lingga
- 6) Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Natuna
- 7) Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kota Tanjungpinang
- 8) Kegiatan Pemeliharaan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Bintan
- 9) Kegiatan Pemeliharaan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kota Tanjungpinang

c. Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Cakupan pelayanan Sanitasi :		69,2
2)	Air Limbah	%	96,36
3)	Persampahan	%	64,00
4)	Drainase	%	47,24

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah
- 2) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Drainase di Batam
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Drainase di Karimun
- 4) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Drainase di Lingga
- 5) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Drainase di Natuna
- 6) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Drainase di Tanjungpinang

d. Program penataan bangunan dan lingkungan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun	%	22,50

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana Perkantoran Pemerintahan lainnya
- 2) Kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana Perkantoran Pemerintahan Provinsi
- 3) Kegiatan Penyediaan Sarana Ruang Olahraga pada kawasan Permukiman
- 4) Kegiatan Penyediaan Sarana Ruang Olahraga skala kota/kabupaten
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Kepri



- 6) Kegiatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
- 7) Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas
- 8) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bintan
- 9) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Kota Batam
- 10) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Kota Tanjungpinang
- 11) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Lingga
- 12) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Anambas
- 13) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Natuna
- 14) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Karimun

6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

a. Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	185
2)	Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri	orang	45

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPNS Se-Provinsi Kepri
- 2) Kegiatan Koordinasi Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Perda Provinsi Kepri
- 3) Kegiatan Kodifikasi Perda dan Perkada Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Anggota Satpol PP Provinsi Kepri
- 5) Operasi Kendaraan Dinas dan Objek Vital Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Kepri
- 6) Kegiatan Pengawasan Dan Penegakan Perda dan perkada Prov Kepri



- 7) Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Produk Hukum Daerah Prov Kepri
- 8) Razia Bersama Kedisiplinan PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Pelaksanaan Sekretariat PPNS Pada Satpol PP Provinsi Kepri

b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase demo yang berjalan aman	%	97,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengendalian pengawasan dan pengamanan Satpol PP Provinsi Kepri
- 2) Pengamanan dan pengawasan aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di Wilayah Provinsi Kepri dan Kabupaen/Kota Se-Provinsi Kepri
- 3) Kegiatan Monitoring dan Pendataan Daerah rawan Gangguan Trantib
- 4) Kegiatan pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah dan Hari-Hari Besar Nasional serta Keagamaan
- 5) Kegiatan Peningkatan Operasional Pengaturan, Pengawalan, dan Patroli (TURJAWALI)
- 6) Kegiatan Peningkatan pelaksanaan Deteksi Dini
- 7) Kegiatan kaji Banding Operasi ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat

c. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan	%	75,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Pos Terpadu



- 2) Pendataan dan Pembuatan Kartu Anggota Satlinmas
- 3) Pengadaan Perlengkapan Pos Satlinmas Se-Provinsi Kepri
- 4) Pelatihan Penanggulangan Deteksi Dini Dalam Bencana Bagi Anggota Satlinmas
- 5) Pemberian Penghargaan Kepada Anggota Satlinmas Yang Berprestasi
- 6) Sosialisasi pentingnya kelinmasan
- 7) Pemantapan Program Optimalisasi Kinerja Keamanan Lingkungan
- 8) Pelatihan Dasar Bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau

d. Program Penanggulangan Kebakaran

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran	%	85,71

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemetaan Rawan Kebakaran Di provinsi Kepulauan Riau

e. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase konflik sosial tertangani	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Aksesibilitas Rakyat dan Pengusaha Mikro terhadap Lembaga Keuangan dan Perbankan di Provinsi Kepri (Belanja Kegiatan Aksesibilitas rakyat dan Pengusaha Mikro)
- 2) Peningkatan Peran FKUB (Belanja Kegiatan Peningkatan Peran FKUB)
- 3) Pembinaan Generasi Muda di bidang kewaspadaan dini di Provinsi Kepulauan Riau (Belanja Kegiatan Pembinaan Generasi Muda di Bidang Kewaspadaan Dini)



- 4) Revitalisasi nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Perguruan Tinggi/Pelajar dan Masyarakat (Belanja Kegiatan nilai-nilai pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi/Pelajar dan Masyarakat)
- 5) Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kesbangpol di Prov. Kepri. (Belanja Kegiatan Monev)
- 6) Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Provinsi Kepulauan Riau (Belanja Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan)
- 7) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau (Belanja Kegiatan Timdu)
- 8) Pertemuan Forum Kesbangpol Se-Provinsi Kepulauan Riau (Kegiatan Pertemuan Forum Kesbangpol Se-Provinsi Kepri)
- 9) Pembinaan dan Pengembangan Forum Dialog Penyelesaian Konflik di Daerah (Kegiatan dan Pengembangan Forum Dialog Penyelesaian Konflik Daerah)
- 10) Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan (Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan)
- 11) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya dalam Rangka Penguatan Persatuan dan Kesatuan bangsa (Kegiatan Pelaksanaan dan Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya dalam rangka Penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa)
- 12) Lokakarya Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan dan Patriotisme (Belanja Lokakarya Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Patriotisme)
- 13) Harmonisasi antar Organisasi Keagamaan di Provinsi Kepri (Belanja Kegiatan Harmonisasi antar Organisasi Keagamaan di Provinsi Kepri)
- 14) Strategi dan Prilaku Perekonomian Masyarakat Guna Membangun Ketahanan Ekonomi (Belanja Strategi dan Prilaku Perekonomian Masyarakat Guna Membangu Ketahanan Ekonomi)
- 15) Forum Dialog Pencegahan dan Penanganan Konflik Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi (Belanja Kegiatan Dialog Pencegahan Konflik SDA Ekonomi)
- 16) Penguatan Implementasi Sumber Daya Alam dalam memperkuat ketahanan Ekonomi (Belanja Kegiatan Penguatan SDA dalam memperkuat Ketahanan Ekonomi)
- 17) Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagi Pelajar/Mahasiswa (Belanja Kegiatan Kesadaran Bela Negara)
- 18) Perkemahan Wawasan Kebangsaan
- 19) Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing



- 20) Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
- 21) Peningkatan Peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- 22) Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Provinsi Kepri
- 23) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- 24) Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa terhadap Produk Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau
- 25) Bulan Cinta Tanah Air di Provinsi Kepulauan Riau
- 26) Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
- 27) Pemetaan Wilayah Potensi Konflik di Provinsi Kepulauan Riau
- 28) Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (Belanja Kegiatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah)
- 29) Revolusi Mental di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau (Kegiatan Revolusi Mental di 7 Kab/Kota)
- 30) Temu Generasi Antar Umat Beragama se Provinsi KEPRI
- 31) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Belanja Forkopimda)
- 32) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Narkotika) Kota Batam (Belanja Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Narkotika) Kota Batam)

f. Program pendidikan politik masyarakat

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	Pilgub: 61,50
2)	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	84,21

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Monitoring Ormas/LSM Penerima Bansos dan Update Data base Ormas/LSM (Belanja Monitorig Ormas/LSM Penerima Bansos dan Update Database Ormas/LSM)
- 2) Peningkatan kapasitas Politik kaum Perempuan di Provinsi Kepri. (Belanja Kegiatan Peningkatan Kpasitas Politik Kaum Perempuan)



- 3) Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik (Belanja Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol)
- 4) Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Tugas-tugas Kesatuan Bangsa dan Politik (Belanja Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan tugas-tugas Kesbangpol)
- 5) Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Ormas (Belanja Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Ormas)
- 6) Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Pemantauan Pelaksanaan Pileg/Pilpres/Pilgub/Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Bimbingan Politik bagi Pemuda Pemudi Kepri

g. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase desa/kel tangguh bencana	%	2,16

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Publikasi BPBD
- 2) Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana Se-Provinsi Kepri
- 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 4) Pembentukan dan pemantapan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kab/kota
- 5) Sosialisasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana di Kab/Kota
- 6) Kajian Risiko Bencana (KRB)

h. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase kejadian bencana kab/kota yang tertangani dengan baik	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Siaga Darurat Bencana



- 2) Peningkatan Kapasitas TRC dalam membantu korban bencana
- 3) Pengadaan Logistic dan Peralatan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab/Kota
- 4) Pendistribusian Logistic dan Peralatan Penanggulangan Bencana ke Kab/Kota
- 5) Pengadaan Perlengkapan TRC dalam Penanggulangan Bencana
- 6) Manajemen Peralatan dan Logistik Pergudangan

i. Program Pemulihan Pasca Bencana

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah wilayah pasca bencana yang terpulihkan	Jumlah	2

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Teknis DALA
- 2) Inventarisasi Wilayah Pasca Bencana Provinsi Kepri
- 3) Evaluasi dan Verifikasi Pasca Bencana
- 4) Penyusunan DED Wilayah Pasca Bencana
- 5) Bimbingan Teknis penyusunan Proposal pasca bencana
- 6) Penyusunan estimasi pembiayaan pasca bencana
- 7) Pembuatan batas/ tanda aman bencana
- 8) Pemulihan dampak Sosial/ Ekonomi/ Psikologis Pasca Bencana

7. Sosial

a. Program Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	1,38
2)	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	0,31
3)	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	41,19



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme UEP
- 2) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme KUBE
- 3) Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme UEP
- 4) Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme KUBE
- 5) Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme UEP
- 6) Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme KUBE
- 7) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme Bankessos
- 8) Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme Bankessos
- 9) Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme Bankessos

b. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,31
2)	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	9,91
3)	Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	28,72
4)	Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	1,96
5)	Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	78,37
6)	Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas	%	65,41

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:



- 1) Pelayanan Sosial Lanjut Usia
- 2) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- 3) Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)
- 4) Rehabilitasi Sosial Tunasosial dan Korban Perdagangan Orang
- 5) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	25,00
2)	Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	60,35

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- 2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- 3) Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkesos)

d. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	51,51
2)	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	62,94
3)	Persentase pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial	%	100,00



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 2) Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
- 3) Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
- 4) Penguatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

e. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan	unit	2,00
2)	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara	unit	3,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- 2) Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial

f. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial	%	10,32
2)	Persentase kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendapat monitoring dan evaluasi	%	50,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan Sosial
- 2) Monev Program Kesejahteraan Sosial



- 3) Rapat Koordinasi Program Kesejahteraan Sosial
- 4) Pengendalian Pendistribusian Beras Sejahtera
- 5) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun
- 6) Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 7) Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Sosial

8. Tenaga kerja

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	48,13
2)	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	43,13
3)	Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	88,00
4)	Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman	orang	16,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Biaya Rutin Dukungan BLK Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pelatihan Garmen Apparel (Menjahit)
- 3) Pelatihan Teknik Las
- 4) Pelatihan Teknik Listrik
- 5) Pelatihan Operator Alat Berat
- 6) Pelatihan Tata Boga
- 7) Pelatihan Bahasa Inggris
- 8) Pelatihan Design Grafis
- 9) Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Paramedis
- 10) Pelatihan dan Sertifikasi Quality Control Scaffolding
- 11) Pelatihan dan Sertifikasi Perancah
- 12) Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Listrik
- 13) Pelatihan Akutansi Berbasis Komputer
- 14) Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Dokter
- 15) Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut
- 16) Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Pembangkit Level 1



- 17) Pelatihan dan Sertifikasi Auditor SMK3
- 18) Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ikat/Rigger
- 19) Pelatihan dan Sertifikasi Operator K3 Migas
- 20) Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Maintenance & Repair Scaffolding
- 21) Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Umum
- 22) Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Akutansi Pratama
- 23) Pelatihan dan Sertifikasi Forklift
- 24) Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas AK3 Migas
- 25) Pelatihan Welding Inspector Level 1
- 26) Pelatihan Servis Sepeda Motor.
- 27) Pelatihan Komputer
- 28) Pelatihan teknik Pendingin
- 29) Pelatihan Listrik Otomasi (Electrical Otomation)
- 30) Pelatihan Pembuatan Kapal dari Bahan Fiber
- 31) Pelatihan Kewirausahaan
- 32) Pelatihan Air Brush
- 33) Pelatihan Teknik Manufaktur (Asisten Operator Mesin Bubut)
- 34) Pelatihan Pengelasan SMAW
- 35) Rehabilitasi Bangunan BLKPP
- 36) Pelatihan Otomotif Body Repair
- 37) Pemasangan Konstruksi Baliho
- 38) Pelatihan dan Sertifikasi Las 3G
- 39) Pelatihan dan Sertifikasi Las 6G
- 40) Pelatihan dan Sertifikasi Las DNT-MT
- 41) Pelatihan dan Sertifikasi Las DNT-PT
- 42) Balai Latihan Kerja (BLK) (Pembangunan Balai Latihan Kerja Kab. Karimun)

b. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	62,00
2)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,43
3)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,74



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Teknis Pelayanan Penempatan di Kota/Kab. (Bimtek IPK, Petugar Antar Kerja, Pengantar Kerja)
- 2) Bimbingan Teknis Pemandu Wira Usaha Baru
- 3) Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja Asing di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Pelatihan Pemagangan (Dalam Negeri)
- 5) Pemberdayaan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Infrastruktur
- 6) Pemberdayaan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Produktif/ Manufaktur
- 7) Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Pendamping
- 8) Satuan Tugas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Pelayanan Peningkatan, Pendataan dan Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia di Layanan Terpadu Satu Pintu
- 10) Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Secara Terpadu Satu Pintu

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan tenaga kerja

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	90,00
2)	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3	%	3,00
3)	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	85,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Perusahaan
- 2) Bimtek Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program K3 dan BPJS di Perusahaan-Perusahaan Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
- 5) Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
- 6) Operasional UPTD Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun
- 7) Operasional UPTD Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam



- 8) Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja
- 9) Operasional Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau
- 10) Dukungan Keselamatan Kerja Nelayan

d. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	%	27,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Peningkatan Peran Lembaga Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan LKS Tripartit Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Kepri
- 5) Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP)
- 6) Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kinerja Bersama (PKB)
- 7) Pelatihan Keterampilan Teknik Bernegosiasi Bagi Pelaku Hubungan Industrial
- 8) Bimtek Struktur dan Skala Upah

9. Transmigrasi

a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah warga (KK) yang ditempatkan sesuai dengan rencana penempatan	KK	2.730
2)	Jumlah kawasan transmigrasi	Kawasan	3



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Focus Group Discussion Pembinaan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 2) Fasilitasi Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi Pada Kabupaten Anambas dan Lingga
- 4) Survei Identifikasi Lokasi dan Koordinasi Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 5) Optimalisasi dan Pembukaan Lokasi Transmigrasi

10. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase anggaran responsive gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	6,50

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Forum Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepri
- 2) Pengembangan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG dan PPRG di Provinsi Kepri
- 3) TOT Fasilitator Gender Provinsi Kepri

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000 Perempuan	30,01



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi Pembentukan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- 2) Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan TPPO
- 3) Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan
- 4) Peningkatan Kapasitas Perempuan bidang ekonomi
- 5) Sosialisasi Program Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (Jelajah Three Ends) Tingkat Provinsi Kepri
- 6) Pembinaan Organisasi Perempuan
- 7) Pemantapan Perlindungan Hak Tenaga Kerja Perempuan, Situasi Khusus dan Kondisi Bencana
- 8) Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepri
- 9) Pelatihan Entrepreneurship bagi pelaku usaha perempuan
- 10) Capacity Building Politik Perempuan di Prov. Kepri
- 11) Lokakarya Pengembangan Politik Perempuan di Provinsi Kepri
- 12) Pengembangan dan Pemantapan Jejaring pelayanan dan perlindungan perempuan
- 13) Koordinasi dan Pemantapan Implementasi SPPT-PPKTP
- 14) Pelayanan UPTD P2TP2A Provinsi Kepri
- 15) Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan Perempuan dan Anak Korban kekerasan
- 16) Renovasi Kantor UPTD P2TP2A Provinsi Kepri
- 17) Pelayanan Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Perempuan dan anak korban kekerasan
- 18) pelatihan Keterampilan bagi anggota Dharma Wanita Persatuan prov kepri
- 19) penguatan dan pengembangan kapasitas Dharma Wanita Persatuan prov kepri
- 20) Seminar ketahanan keluarga anggota Dharma Wanita Persatuan
- 21) Pemantapan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
- 22) Sosialisasi Penguatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (He For She) Tingkat Prov. Kepri
- 23) Pembinaan dan Penguatan Forum PUSPA
- 24) Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan pada UPTD P2TP2A Provinsi Kepri
- 25) Pengembangan Sarana Prasarana UPTD P2TP2A Provinsi Kepri
- 26) Pembinaan dan Pengembangan RUMAH TERAMPIL Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Prov. Kepri
- 27) Pengembangan Industri Rumahan bagi Pelaku Usaha Perempuan Provinsi Kepri



28) Pelatihan Life Skill bagi Perempuan di Provinsi Kepri

c. Program Perlindungan Anak

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	%	57,14
2)	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Per 10.000 anak	3,70

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kelembagaan Forum Anak
- 2) Ajang Temu Anak Povinsi Kepri
- 3) Pengembangan Taman Pengasuhan Anak (TPA) Percontohan Provinsi Kepri
- 4) Penguatan dan Pengembangan PATBM
- 5) Penguatan dan Pengembangan KPPAD
- 6) Pengembangan Kota Layak anak (SRA, PRA, Rapat Gugus Tugas)
- 7) Peningkatan Kapasitas Orangtua dan Anak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak
- 8) TOT bagi toma, toga, mubaligh/ Penceramah dan lembaga pemerhati anak
- 9) Pengembangan Pusat Konsultasi Keluarga (PUSPAGA) dan klinik tumbuh kembang anak

d. Program Kualitas Keluarga

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill	%	1,32

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga
- 2) Pengembangan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga



3) Pembinaan dan Pengembangan UPPKS

11. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program keluarga berencana

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Pembentukan Kampung KB	Angka	1
2)	Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR)	%	49,73

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemantapan dan Pembinaan BKB, BKL, BKR (Tri Bina)
- 2) Sosialisasi dan Advokasi, KIE tentang Pengendalian Penduduk dan KB di Prov. Kepri
- 3) Pengembangan dan Pembentukan Program Kampung KB Terintegrasi
- 4) Pengembangan Program KKBPKD Tingkat Provinsi Kepulauan Riau

12. Pangan

a. Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	92,00
2)	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Cadangan Pemerintah Provinsi
- 2) kegiatan Penyusunan Analisis Ketersediaan Pangan
- 3) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
- 4) Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM dalam pengumpulan data dan analisis harga, distribusi & akses pangan
- 5) Kegiatan Analisis Data Harga Pangan
- 6) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Distribusi pangan masyarakat



- 7) Kegiatan Penyusunan Analisis Jaringan Distribusi Pangan Masyarakat
- 8) Kegiatan Identifikasi dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
- 9) Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan

b. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor	89,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan lahan pekarangan
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- 3) Kegiatan Kampanye B2SA dan Gelar Pangan Lokal
- 4) Kegiatan Promosi Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal
- 5) Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk
- 6) Pengembangan Pangan Pokok Lokal
- 7) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 8) Analisis Penanganan Kerawanan Pangan

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Angka Rawan Pangan	%	17,06

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Dukungan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan
- 2) Kegiatan Pemetaan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau

d. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	80,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan.
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan
- 3) Kegiatan Pengawasan Bahan Kimia Berbahaya Pada Produk Pangan
- 4) kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Pangan
- 5) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan
- 6) Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi Produk Pangan

e. Program Pengembangan SDM dan Penyuluh Pertanian

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	38,18

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pendampingan Penyusunan Program Penyuluhan
- 2) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan
- 3) Apresiasi Bagi Penyuluh Pertanian Teladan (PNS, THL TB PP, Swadaya), Balai Penyuluhan, Petani dan Kelembagaan Tani Berprestasi
- 4) Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian

13. Pertanian

a. Program peningkatan kesejahteraan Petani

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	99,30
2)	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	1,24



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
- 2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani
- 3) PENAS Petani Nelayan
- 4) PEDANA Petani Nelayan Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Pemberdayaan manajemen & Teknis perluasan Sawah
- 6) Sekolah Lapang Budi Daya Pertanian
- 7) Pemberdayaan manajemen & Teknis Perkebunan

b. Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Produksi Padi (ton)	ton	1.020
2)	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.742
3)	Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	44.644
4)	Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	32.103

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Produksi Padi
- 2) Peningkatan Produksi Palawija
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan
- 4) Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan
- 5) Pengembangan dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Rakyat
- 6) Pengembangan Tanaman Lada.
- 7) Pengembangan Kelapa
- 8) Peningkatan Layanan Kantor UPTD Balai Benih Induk
- 9) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Balai Benih Induk
- 10) Pelayanan Laboratorium Balai Benih Induk
- 11) Pengembangan Tanaman Induk dan Kebun Pembibitan Tanaman Pertanian
- 12) Pengembangan Tanaman Induk dan Kebun Pembibitan Tanaman Perkebunan
- 13) Pengawasan dan Pendampingan Cetak sawah di Provinsi Kepulauan Riau
- 14) Pengembangan Tanaman Pertanian Melalui Bantuan Pupuk Organik Cair untuk Petani



- 15) Pengembangan Tanaman Pertanian Melalui Bantuan Pupuk Dolomit untuk Petani
- 16) Pengembangan Tanaman Pertanian melalui Bantuan Pestisida untuk Petani
- 17) Peningkatan Produksi Hortikultura
- 18) Registrasi Lahan Hortikultura
- 19) Demplot Budidaya Pertanian
- 20) Hibah Pengadaan Alat Pertanian Kelompok Tani Se-Kepri
- 21) Pengadaan Bibit Tanaman Cengkeh dan Pala Untuk Masyarakat Kab.Kepulauan Anambas
- 22) Pengadaan Bibit Tanaman Kelompok Tani Kabupaten Karimun
- 23) Pengadaan Pupuk Tanaman Kelompok Tani Kabupaten Karimun
- 24) Pengadaan Bibit Tanaman Kelompok Tani Kabupaten Lingga
- 25) Kegiatan Pengadaan Pupuk Subsidi

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar	%	0,020
2)	Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Kecil	%	0,002
3)	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	57,60

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
- 2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Satwa
- 3) Peningkatan Peranan Pusat Kesehatan Hewan
- 4) Pengembangan Puskesmas dan Laboratorium Diagnostik Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 5) Peningkatan Pelayanan UPTD Puskesmas dan Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet
- 6) Peningkatan Peranan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



- 7) Pencegahan Penularan Penyakit Zoonosis dan Penerapan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan)

d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	5,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat.
- 2) Pengembangan Pembibitan Ternak
- 3) Peningkatan Pelayanan SPIB (Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan)
- 4) Peningkatan Pelayanan Lab Pakan
- 5) Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Hasil Peternakan
- 6) Hibah Pengadaan Sapi Bali Kelompok Tani Se-Kepri
- 7) Hibah Pengadaan Bibit Kambing Kelompok Tani Se-Kepri

e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Peternak yang memanfaatkan teknologi tepat guna	%	5,56
2)	Persentase Kelompok Tani Menerapkan Teknologi pertanian/perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	%	4,73

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna.
- 2) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan Dukungan Teknologi Mekanisasi
- 3) Pasar Tani dan Promosi Kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 4) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
- 5) Kegiatan Kerjasama Ekspor Produk Hortikultura Provinsi Kepulauan Riau



14. Lingkungan hidup

a. Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	69,20
2)	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	90,91
3)	Persentase kab/kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu	%	85,71
4)	Persentase pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar	%	18,50
5)	Persentase Kab/kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu	%	100,00
6)	Persentase kabupaten/kota yang memenuhi standar nominasi Adipura	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan monitoring evaluasi kinerja pengelolaan air limbah industri di 7 kab/Kota dalam wilayah kepulauan riau
- 2) Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Laut di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Kegiatan Pemantauan Penilaian Kota Bersih dan Hijau (ADIPURA)
- 4) Pemantauan Implementasi Dokumen RKL-RPL/UKL-UPL kab kota
- 5) Pengelolaan Rutinitas Laboratorium Lingkungan Hidup
- 6) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Komisi Amdal Daerah
- 7) Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan Izin Lingkungan Secara Online
- 8) Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Bersih
- 9) Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Provinsi Kepulauan Riau
- 10) Pengelolaan Persampahan Limbah Domestik di Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 11) Kegiatan Pengawasan Penataan Peraturan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Industri
- 12) Kegiatan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3
- 13) Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau



- 14) Pengelolaan Limbah B3 Akibat Tumpahan Minyak di Kawasan Pesisir Kab. Bintan
- 15) Inventarisasi Gas Rumah Kaca
- 16) Pengawasan Tingkat Ketaatan Peraturan Lingkungan Hidup (PROPER)
- 17) Inventarisasi Emisi Pencemaran Udara
- 18) Pembangunan dan Pembinaan Kampung Iklim
- 19) Kegiatan Pengadaan Peralatan Bank Sampah
- 20) Pengadaan Kapal Pembersih dan Pengangkut Sampah
- 21) Gerakan Tanjungpinang Peduli Sampah
- 22) Workshop Bank Sampah Induk Bank Sampah Batam

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional	Sekolah	35
2)	Luas kawasan mangrove yang terehabilitasi	ha	6

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pemulihan Kerusakan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
- 4) Koordinasi Percepatan Pelaksanaan reklamasi Lahan Ex Tambang di Provinsi Kepulauan Riau

c. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Peningkatan Website dan Materi Publik Expose DLHK Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia
- 5) Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Program Kegiatan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 6) Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
- 7) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 8) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 9) Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 10) Penyusunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- 11) Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

15. Kehutanan

a. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase terbentuk dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau	%	100,00
2)	Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,05
3)	Luas lahan kritis ter rehabilitasi	ha	230
4)	Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat	%	83,33
5)	Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	%	90,00



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi hutan dan lahan
- 2) Penyusunan dokumen rencana pengelolaan pada KPHP Bintan-Tanjungpinang
- 3) Penyusunan dokumen rencana pengelolaan pada KPHP Lingga
- 4) Penyusunan dokumen rencana pengelolaan pada KPHP Natuna
- 5) Penyusunan dokumen rencana pengelolaan pada KPHP Anambas
- 6) Penyusunan dokumen rencana pengelolaan pada KPHL Batam
- 7) Sosialisasi peraturan Pengelolaan hasil hutan kayu
- 8) Monitoring dan evaluasi perizinan didalam kawasan hutan
- 9) Inventarisasi Sumberdaya Hutan dalam Rangka Mendukung Program Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat
- 10) Pengendalian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Hasil Hutan
- 11) Pos Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 12) Koordinasi, pendampingan, fasilitasi dan pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Kemitraan
- 13) koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan pada KPH
- 14) Kordinasi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan serta Pengamanan Kawasan Hutan
- 15) Koordinasi Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) pada KPH
- 16) Operasionalisasi KPH Bintan-Tanjungpinang
- 17) Operasionalisasi KPH Batam
- 18) Operasionalisasi KPH Karimun
- 19) Operasionalisasi KPH Natuna
- 20) Operasionalisasi KPH Lingga
- 21) Operasionalisasi KPH Anambas
- 22) Rehabilitasi Lahan Wilayah KPH Bintan Tanjungpinang
- 23) Rehabilitasi Lahan Wilayah KPH Batam
- 24) Rehabilitasi Lahan Wilayah KPH Karimun
- 25) Rehabilitasi Lahan Wilayah KPH Lingga
- 26) Rehabilitasi Lahan Wilayah KPH Natuna
- 27) Rehabilitasi Lahan Wilayah KPH Anambas
- 28) Koordinas dan Pengendalian Serta Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pada KPH
- 29) Identifikasi, Inventarisasi dan Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Hutan



- 30) Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS
- 31) Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTRL)
- 32) Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan DAS
- 33) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS
- 34) Peringatan Hari Bakti Rimbawan dan Hari Menanam Pohon Indonesia
- 35) Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Wilayah KPH Bintan - Tanjungpinang
- 36) Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Wilayah KPH Batam
- 37) Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Wilayah KPH Karimun
- 38) Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Wilayah KPH Lingga
- 39) Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Wilayah KPH Natuna
- 40) Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Wilayah KPH Anambas
- 41) Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Batam
- 42) Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Natuna
- 43) Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Bintan - Tanjungpinang
- 44) Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Lingga
- 45) Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Karimun
- 46) Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Anambas
- 47) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Pada KPH
- 48) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Usaha Perhutanan Sosial dan Kemitraan pada KPH
- 49) Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PKSM dan Pencinta Alam
- 50) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Batam
- 51) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Bintan - Tanjungpinang
- 52) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Karimun
- 53) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Lingga
- 54) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Natuna



- 55) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Anambas
- 56) Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Wilayah KPH Bintan-tanjungpinang
- 57) Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Wilayah KPH Batam
- 58) Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Wilayah KPH Karimun
- 59) Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Wilayah KPH Lingga
- 60) Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Wilayah KPH Natuna
- 61) Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Wilayah KPH Anambas
- 62) Penyusunan dokumen rencana pengelolaan pada KPHP Karimun
- 63) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan pada KPH
- 64) Pembangunan Kantor KPH Bintan-Tanjungpinang
- 65) Pembangunan Kantor KPH Lingga
- 66) Sosialisasi Prosedur Izin Pinjam Pakai Hutan

16. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Rasio penduduk ber-KTP	%	98,00
2)	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	%	80,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Hibah pengadaan mobil operasional pelayanan administrasi kependudukan kab/kota
- 2) Konsolidasi Data dan Pemutakhiran Database kependudukan
- 3) Hibah Pengadaan Peralatan Perekaman dan Cetak e-KTP
- 4) Persiapan/ Implementasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 5) Hibah Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota
- 6) Supervisi Dokumen Peristiwa Penting Lainnya
- 7) Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran
- 8) Pemeliharaan Data Center SIAK



17. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	53,45

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan 10 Program Pokok PKK
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa
- 3) Pembinaan dan Penguatan Sekretariat Pokjanal Posyandu
- 4) Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
- 5) Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Adat Desa dan Desa Adat
- 6) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
- 7) Peningkatan Kapasitas BPD
- 8) Sosialisasi Peran dan Fungsi lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat dalam Penanggulangan HIV Aids dan Pemakai Narkoba
- 9) Peningkatan Kapasitas Pendamping Lokal Desa (PLD) Provinsi Kepri

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Unit BUMDesa	50,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi Pembentukan BUM Desa
- 2) Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan
- 3) Pendampingan penguatan kapasitas kelembagaan BUM Desa
- 4) Rapat Kerja Lintas OPD Pengelolaan Kelompok UEM



- 5) Monitoring dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- 6) Bimbingan Teknis/ Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- 7) Bantuan Keuangan Peningkatan Kelompok Ekonomi Masyarakat
- 8) Pendampingan Pembinaan Peningkatan Kelompok Usaha Masyarakat

c. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah TTG yang memperoleh Paten	Unit	1
2)	Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat	%	16,67

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Provinsi Kepri
- 2) Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional
- 3) Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)
- 4) Forum Inovator dan Inventor TTG Provinsi Kepri

d. Program Peningkatan Pembangunan dan Pemerintahan Desa

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Desa Cepat Berkembang	Desa	42

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Rapat Kerja Pemerintahan Desa
- 2) Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan
- 3) Rakernis Kepala Desa
- 4) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 5) Rapat Konsolidasi Entry Data Profil Desa/ kelurahan
- 6) Penataan Batas Desa Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Pembinaan Penataan Kewenangan Desa Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Sistem Komunikasi Antar Desa (SISKADES)



18. Perhubungan

a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	92,86
2)	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	100,00
3)	Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis	%	92,31
4)	Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Dompok, Selat Belia, Pelabuhan Sijantung dan Pelabuhan Penagi
- 2) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat (Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat)
- 3) Pengawasan dan Pemantauan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau (Pengawasan dan Pemantauan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau)

b. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	92,19

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengadaan dan pemasangan APILL
- 2) Perawatan Rutin Prasarana dan Fasilitas LLAJ di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat
- 4) Forum Komunikasi Lalu Lintas Jalan



- 5) Pemilihan Abdi Yasa Teladan
- 6) Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Pengadaan dan Pemasangan LPJU (Pengadaan dan Pemasangan LPJU)

c. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas	%	18,50
2)	Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis	%	65,71

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Halte
- 2) Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Type B
- 3) Pembangunan Bangunan Gedung dan Alat Uji (KIER) Kendaraan

d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis	%	100,00
2)	Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	%	75,00
3)	Persentase ketersediaan Bandar Udara	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Rutinitas Pengelolaan Gedung VIP Bandara RHF Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara (Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara)
- 3) Pembinaan, Pengawasan dan Pengkoordinasian Bandar Udara dan Angkutan Penerbangan.



e. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	91,18

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan Pelabuhan di wilayah kepri (Pemeliharaan Pelabuhan di wilayah Kepri)
- 2) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Anambas (Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Anambas)
- 3) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Natuna (Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Natuna)
- 4) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Lingga (Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Lingga)
- 5) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Batam (Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Batam)
- 6) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Tanjungpinang (Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Tanjungpinang)
- 7) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Karimun (Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Karimun)
- 8) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Bintan (Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Bintan)
- 9) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Pelayaran dan Badan Usaha (Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Pelayaran dan Badan Usaha)
- 10) Rutinitas Pengelolaan Pelabuhan Se-Kepri (Rutinitas Pengelolaan Pengelolaan Pelabuhan Se-Kepri)
- 11) Evaluasi Hirarki Pelabuhan Se-Kepri (Evaluasi Hirarki Pelabuhan se- Kepri)

f. Program Pembangunan Transportasi Laut

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	88,89
2)	Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis	%	88,89
3)	Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengadaan/Pembangunan Sarana Transportasi Laut (Pengadaan/Pembangunan Sarana Transportasi Laut)
- 2) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Batam (Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Batam)
- 3) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Tanjungpinang (Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Tanjungpinang)
- 4) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Karimun (Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Karimun)
- 5) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Bintan (Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Bintan)
- 6) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Lingga (Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Lingga)
- 7) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Natuna (Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Natuna)
- 8) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Anambas (Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Anambas)
- 9) Pembinaan, Pengawasan, Sosialisasi dan Monitoring Wilayah Laut Kepri (Pembinaan, Pengawasan, sosialisasi dan monitoring wilayah laut kepri)

g. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2030
1)	Persentase peningkatan retribusi pendapatan dari urusan perhubungan	%	30,00



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Pendapatan Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Optimalisasi Pendapatan retribusi jasa kepelabuhanan)
- 2) Optimalisasi Pendapatan Retribusi Izin Angkutan Laut (Optimalisasi Pendapatan retribusi izin angkutan laut)

19. Komunikasi & Informatika

a. Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri	Skala nilai 0-100	65,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan aspirasi dan opini publik
- 2) Pengelolaan media pengaduan berbasis teknologi
- 3) Penguatan Kelembagaan PPID
- 4) Penguatan dan Layanan Desk Informasi Publik , Kepri Smart Province, dan co Working Space
- 5) Penguatan Website Diskominfo Provinsi Kepri
- 6) Pengelolaan Portal Website Pemprov Kepri
- 7) Pembuatan Konten Media dalam Rangka Layanan Komunikasi dan Informasi Publik
- 8) Penguatan dan Pengembangan Komisi Informasi Provinsi Kepri
- 9) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
- 10) Penyelesaian Sengketa Informasi
- 11) Pengembangan Kemitraan dan Hubungan Media Komunikasi Berbasis TIK
- 12) Pengelolaan Komunikasi Publik OPD di Lingkungan Pemprov Kepri
- 13) Diseminasi Informasi Program Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah Melalui Pertunjukkan Rakyat
- 14) Diseminasi Informasi Program Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah Melalui Media Online
- 15) Pengelolaan Isu dengan Inteligen Media Management (IMM)
- 16) Partisipasi Pameran TI Tingkat Provinsi Kepri
- 17) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kepri Smart Province



b. Program e-government

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Nilai e- government Provinsi Kepri	Skala nilai 1-4	2,40
2)	Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggara negara	%	55,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Smart Apps Competition
- 2) Pengelolaan Domain dan Subdomain
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Jaringan TIK
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan TIK
- 5) Audit Keamanan Informasi
- 6) Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Pemerintahan
- 7) Pengembangan dan Review Rencana Induk TIK Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 9) Pelatihan Multimedia Tingkat Dasar Bagi Umum dan Pelajar Tingkat Provinsi Kepri
- 10) Pelatihan Programmer Dasar Bagi Para Start Up Tingkat Provinsi Kepri

20. Statistik

a. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektor

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral Provinsi Kepri	%	30,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Survey dan Kompilasi Statistik Sektor
- 2) Peningkatan SDM Bidang Statistik



21. Persandian

a. Program Persandian Untuk pengamanan informasi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	%	40,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Persandian pada OPD dan Kab/Kota se Provinsi Kepri
- 2) Pelatihan penerapan sertifikat elektronik pada pemerintah provinsi
- 3) IT Security assesment pada aplikasi dan domain e-gov milik pemerintah daerah provinsi
- 4) Kontra penginderaan pada sarana penting di pemerintah provinsi
- 5) Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi

22. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Koperasi Aktif	%	58,80
2)	Persentase KSP/USP sehat	%	38,30
3)	Pertumbuhan koperasi	%	2,50

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Diseminasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian (terlaksananya kegiatan diseminasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian)
- 2) Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (terlaksananya kegiatan gerakan masyarakat sadar koperasi)
- 3) Penataan dan penguatan Organisasi dan tatalaksana Koperasi (terlaksananya Penataan dan Penguatan organisasi dan Tata Laksana Koperasi)
- 4) Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi (Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi pengembangan koperasi)



- 5) Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Melalui Pembentukan Koperasi (Terfasilitasinya Pembentukan koperasi bagi kelompok usaha.)
- 6) Diklat Perkoperasian (Terlaksananya kegiatan diklat perkoperasian)
- 7) Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP (terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Se-Provinsi Kepulauan.)
- 8) Diklat Aparatur Pengawas Koperasi (Terlaksananya Diklat Aparatur Pengawas Koperasi)
- 9) Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi Wanita se-Provinsi Kepri (Terlaksananya kegiatan pelatihan perkoperasian bagi koperasi wanita se-provinsi kepri)
- 10) Pembinaan Penyelenggara RAT Koperasi (terlaksananya Pelatihan Penyelenggaraan RAT Koperasi.)
- 11) Pembinaan Pengawasan Koperasi (terlaksananya kegiatan pembinaan pengawasan koperasi)
- 12) Sosialisasi Waspada Investasi Ilegal (meningkatnya pengetahuan tentang Waspada Investasi Ilegal)
- 13) Rakor Pengawas Koperasi se-Provinsi Kepri (terwujudnya koperasi yang akuntabel)
- 14) Pengembangan Potensi Koperasi berbasis Syariah (meningkatnya pengetahuan tentang Koperasi Berbasis Syariah)
- 15) Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Koperasi bagi Usaha Koperasi (berkembangnya usaha koperasi dan mampu bersaing dengan dunia usaha lain.)
- 16) Pembinaan Pengelolaan Teknologi Keuangan bagi Koperasi (koperasi yang pengelolaan keuangannya masih manual dapat beralih ke sistem)
- 17) Peningkatan Kualitas SDM Koperasi bagi Perangkat Organisasi Koperasi (tersedianya perangkat organisasi koperasi yang kompeten dan tersertifikasi di Provinsi Kepulauan Riau)

b. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif	%	0,62



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Fasilitas dan Promosi Hasil Produksi KUKM melalui Pameran (Terlaksananya Fasilitas dan Promosi Hasil Produksi KUKM melalui Pameran)
- 2) Peningkatan standarisasi mutu dan sertifikasi produk (Terlaksananya Pelatihan Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk)
- 3) Pengenalan dan Promosi Hasil Produk KUKM Prov. Kepri (Terlaksananya kegiatan pengenalan dan promosi hasil produk KUKM prov.kepri)
- 4) Galery KUKM Provinsi Kepri (Tersedianya promosi hasil produk KUKM)
- 5) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan data KUKM (Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data KUKM)
- 6) Dukungan biaya pembuatan akta notaris pendirian koperasi dan izin operasional KSP/USP (Terfasilitasinya Biaya Pembuatan Akta Pendirian Koperasi dan Izin Operasional KSP/USP)
- 7) Workshop Peningkatan Usaha bagi PKL (Terlaksananya Workshop bagi PKL)
- 8) Partisipasi dalam festival Bahari Kepri (Partisipasi dalam festival Bahari Kepri)
- 9) Promosi Hari Besar Daerah (Tersedianya tempat KUKM mempromosikan produk)
- 10) Pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Pendampingan KUKM)
- 11) Penyediaan DED Balatkap Provinsi Kepulauan Riau (Terlaksananya Penyediaan DED Balatkap Provinsi Kepulauan Riau)
- 12) Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi (Terlaksananya Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi)

c. Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	21,22

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Bimtek Evaluasi kebijakan pelaksanaan PUG bidang KUKM (Terlaksananya kegiatan bimtek evaluasi kebijakan pelaksanaan PUG bidang KUKM)



- 2) Fasilitasi Penataan dan Pemberdayaan PKL (Terlaksananya Fasilitasi Penataan dan Pemberdayaan PKL)
- 3) Pelatihan dan Pengembangan kewirausahaan bagi UKM (Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi UKM)
- 4) Pelatihan manajemen berbasis online bagi Koperasi (Terlaksananya pelatihan manajemen berbasis online bagi koperasi)
- 5) Pelatihan Pengolahan Makanan Hasil Laut Bagi Koperasi Nelayan (Terlaksananya pelatihan pengolahan makanan hasil laut bagi koperasi nelayan)
- 6) Pembinaan kepada Penerima pinjaman Dana Bergulir (Terlaksananya Pembinaan kepada Penerima pinjaman Dana Bergulir)
- 7) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Bimbingan Teknis Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi Usaha Kecil (Terlaksananya Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Bimbingan teknis manajemen usaha dan kewirausahaan bagi usaha kecil)
- 8) Pengembangan Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau (Terlaksananya pengembangan produk unggulan provinsi Kepulauan Riau)
- 9) Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Wawasan bagi Aparatur (Terlaksananya peningkatan dan pengembangan kapasitas wawasan bagi aparatur)
- 10) Seminar Kewirausahaan bagi Koperasi Provinsi Kepulauan Riau (Terlaksananya Seminar Kewirausahaan bagi Koperasi Provinsi Kepulauan Riau)
- 11) Publikasi Produk UKM Provinsi Kepulauan Riau (Terlaksananya Publikasi Produk UKM Provinsi Kepulauan Riau)
- 12) Pelatihan Pengembangan Kemasan Produk UKM (Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kemasan Produk UKM)
- 13) Peningkatan Wawasan Pembiayaan Melalui KUR Bagi KUKM (meningkatkan pengetahuan pembiayaan melalui KUR)
- 14) Peningkatan Daya Saing Produk UKM Berskala Ekspor (Terlaksananya Pelatihan peningkatan daya saing produk UKM berskala ekspor)
- 15) Pembinaan Pengembangan Usaha kuliner UKM (Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha kuliner)
- 16) Magang Pengolahan Tempurung Kelapa (terlaksananya Magang dan Pengembangan Kewirausahaan bagi masyarakat)
- 17) Fasilitasi Kemitraan KUKM dengan BUMN (Terlaksananya fasilitasi kemitraan KUKM dengan BUMN)



- 18) Forum Bedah Koperasi pada Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (terbinanya koperasi yang berkualitas dan berwawasan dalam berkoperasi.)
- 19) Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Usaha bagi UKM (Jumlah UKM yang dapat mengembangkan akses pemasaran)
- 20) Penataan Laporan Keuangan bagi UKM (Jumlah UKM yang tertata laporan keuangan nya)
- 21) Diklat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Aparatur (Aparatur yang Paham Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan)
- 22) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pusat Kuliner (Terlaksananya Pembangunan Saran dan Prasarana Pusat Kuliner)
- 23) Magang Pengolahan Hasil Laut (Terlaksananya Magang Pengolahan Hasil laut)
- 24) Pusat Pengemasan Produk KUKM (Tersedianya Tempat Alat memproduksi Kemasan Peroduk KUKM)

23. Penanaman Modal

a. Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Milyar	7.900
2)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Milyar	800

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Kebijakan Penanaman Modal
- 2) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal
- 3) Task force, fasilitasi dan asistensi pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal
- 4) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah untuk Pengembangan Penanaman Modal
- 5) Konsolidasi Investasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal
- 6) Survey Indeks Kepuasan Investor Terhadap PTSP



b. Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	150
2)	Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	106

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi Kerjasama Investasi
- 2) Kerjasama Media Publikasi
- 3) Pembuatan Bahan Promosi
- 4) Promosi Dalam Negeri
- 5) Promosi Investasi Luar Negeri
- 6) Pelatihan Pemasaran dan Promosi Potensi Daerah
- 7) Pelatihan Teknis Penyusunan Bahan Promosi

c. Program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	88,00
2)	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	83,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP
- 2) Sosialisasi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan PTSP
- 3) Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan
- 4) Verifikasi lapangan permohonan Perizinan
- 5) Gelar Sidang Tim Teknis Perizinan
- 6) Rapat Kerja Teknis PTSP dengan Kabupaten Kota dan SKPD Teknis
- 7) Pencegahan dan penyelesaian kasus perizinan dan non perizinan
- 8) Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- 9) Penyusunan Sarana dan Prasarana Pengaduan



- 10) Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
- 11) Workshop Strategi Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- 12) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kebijakan dan Pelaporan Layanan PTSP
- 13) Evaluasi Penyelenggaraan PTSP KAbupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 14) Pembuatan Aplikasi Pelayanan Perijinan PTSP

24. Kepemudaan dan olah raga

a. Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah pemuda pelopor	Orang	850

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Paskibraka Provinsi dan Pengiriman Paskibraka Provinsi dan Tingkat Nasional
- 2) Pelatihan pencegahan masuknya paham radikalisme dikalangan generasi muda
- 3) Pelatihan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda dan Mahasiswa
- 4) Pelatihan kepeloporan pemuda
- 5) Festival Band se Kepri
- 6) Workshop/Gallery Pemuda
- 7) Gebyar Pemuda Kepri
- 8) Bela Negara Bagi Pemuda
- 9) Pemantapan ESQ Untuk Pemuda dan Mahasiswa

b. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah pemuda yang berwirausaha	Orang	35

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) pelatihan kewirausahaan bagi pemuda



c. Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/nasional/internasional	Penghargaan	18
2)	Jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan masyarakat	Event	16

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kejurnas PPLPD Cabang Olahraga Karate
- 2) Kejurnas PPLPD Cabang Olahraga Pencak Silat
- 3) Kejurnas PPLPD Cabang Olahraga Taekwondo
- 4) PPLPD Cabang Olahraga Dayung
- 5) PPLPD Cabang Olahraga Karate
- 6) PPLPD Cabang Olahraga Layar
- 7) PPLPD Cabang Olahraga Pencak Silat
- 8) PPLPD Cabang Olahraga Taekwondo
- 9) Sharing PPLPD Cabang Olahraga Bulu Tangkis, Tinju dan Takraw
- 10) PPLPD Tarung Derajat
- 11) Senam Sehat Bersama dan Bersepeda Bersama
- 12) Kejurnas PPLPD Cabang olahraga Sepakbola
- 13) KEPRI 10 K
- 14) Kejurnas PPLPD Cabang Olahraga Dayung
- 15) Try Out PPLPD Tarung Derajat
- 16) Try Out PPLPD Layar
- 17) POPDA
- 18) POPWIL
- 19) Penunjang Pengiriman Atlet/Pelatih Perwakilan Kepri
- 20) Penunjang Penyelenggaraan Olahraga
- 21) PPLPD Cabang Sepak bola
- 22) Lomba Jong Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 23) Lomba Sampan Layar Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 24) Lomba Memancing Ikan Se-Provinsi Kepulauan Riau



- 25) Lomba Dayung Sampan Kolek
- 26) Pelaksanaan Tuan Rumah Kejurnas PPLPD Sepakbola
- 27) Pekan Olahraga Perbatasan
- 28) Kejuaraan Daerah Tenis Lapangan Antar Pelajar
- 29) Kejuaraan Sepakbola U-15

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase sarana dan prasarana yang dibangun terhadap kebutuhan masyarakat	%	80,95

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengadaan alat-alat olahraga
- 2) Pengadaan Alat-Alat Olahraga Renang Pengcab Tanjungpinang
- 3) Pengadaan Matras PPLP Tinju Prov. Kepri
- 4) Pemetaan Sarana dan Prasarana Olahraga 3 Kabupaten/Kota
- 5) Hibah Pembangunan Lapangan Sepak Bola Berstandar Nasional di Kabupaten Natuna
- 6) Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Natuna
- 7) Hibah Pembangunan Lapangan Sepak Bola Berstandar Nasional di Kabupaten Kep. Anambas
- 8) Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Anambas
- 9) Hibah Pembangunan Panggung Pemuda di Kabupaten Lingga
- 10) Hibah Pembangunan Lapangan Voli Type B di Kabupaten Lingga
- 11) Hibah Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola Dusun Rejai Bakong Serumpun
- 12) Hibah Pembangunan Lapangan Sepakbola Desa Pulau Bukit Katan Bidare
- 13) Hibah Pembangunan Gedung Olahraga Kelurahan Daik
- 14) Hibah Pembangunan Sarana Olahraga Beserta Tribun Desa sungai Pinang Lingga Timur
- 15) Hibah Pembangunan Lapangan Sepakbola Desa keton Lingga Timur
- 16) Hibah Pembangunan Stadion Mini Lapangan Sepakbola Ahmad Jubir Rahman, Desa Sungai Buluh Singkep Barat
- 17) Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Mahkota Gelamit Desa Kote Singkep Pesisir
- 18) Hibah Pembangunan Lapangan Futsal Desa Berhala lalang Singkep Selatan
- 19) Hibah pembangunan Lapangan Sepakbola Dusun Tg. Ambat, Desa pulau batang temiang Pesisir
- 20) Revitalisasi Lapangan Sepakbola Sultan mahmud Riayat Syah



- 21) Revitalisasi lapangan Sepakbola Desa Kote, Singkep Pesisir
- 22) Tribun lapangan bola kaki desa Mosai kec. Lingga, Kab. Lingga
- 23) Pagar lapangan sepak bola kelurahan senayang Kab. Lingga
- 24) Rumput lapangan sepak bola senayang Lingga
- 25) Hibah Pembangunan Gedung Olah Raga di Daek, kab. Lingga
- 26) Karpet lapangan futsal desa Kembaran Kec. Senayang Lingga
- 27) Hibah Pembangunan Lapangan Sepak Bola Berstandar Nasional di Kota Tanjungpinang
- 28) Hibah Pembangunan Lapangan Voli Type B di Kota Tanjungpinang
- 29) Revitalisasi Rumput Lapangan Bola Sulaiman Abdullah, Kota Tanjungpinang
- 30) Hibah Pembangunan Tribun Mini, Pembangunan Bench dan Revitalisasi Rumput Lapangan Sepakbola Batu X, Kota Tanjungpinang
- 31) Hibah Pembangunan Pagar dan Revitalisasi Rumput Lapangan Sepakbola Abdul Majid Km. 13, Kota Tanjungpinang
- 32) Hibah Pembangunan Arena Panjat Tebing Boulder, Kota Tanjungpinang
- 33) Tribun lapangan sepak bola bukit batu, Kab. Bintan
- 34) Tribun lapangan sepak bola gunung lengkuas , Kab.Bintan
- 35) Hibah Pembangunan Lapangan Sepak Bola Berstandar Nasional di Kabupaten Karimun
- 36) Hibah Revitalisasi Atap GOR Badang Perkasa Kabupaten Karimun
- 37) Hibah Pembangunan lapangan Olahraga Multifungsi yayasan darul Mukmin, Kab. Karimun
- 38) Pembangunan Batu Miring Tribun Lapangan Volly di Kec. Moro, Kab. Karimun
- 39) Pembangunan Lapangan Sepak Bola Beserta Tribun Mini Legenda Malaka Kelurahan Taman Baloi Batam Kota
- 40) Rehabilitasi Stadion Hang Lengkir Belakang Padang
- 41) Pembangunan Pagar dan tribun Mini Lapangan Sepakbola Tanjung Uncang, Kelurahan tanjung Uncang Kec. Batu Aji
- 42) Pembangunan Pagar lapagnan Sepak Bola Sungai Langkai, Kelurahan Sungan langkai, Kecamatan Sagulung
- 43) Tribun dan rumput lapangan sepak bola pulau Terung, Kota Batam
- 44) Hibah Rehabilitasi Sarana Olahraga Makorem 033 Wirapratama Provinsi Kepulauan Riau
- 45) Pembangunan Lapangan Sepak Bola Untuk Latihan di Pulau Dompak
- 46) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Sirkuit Motocross Dompak
- 47) Pengadaan Meubeler Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
- 48) Lanjutan Pembangunan Sport Hall di Dompak
- 49) Pembangunan Lapangan Tennis Indor Pulau Dompak
- 50) DED Gelanggang Pemuda
- 51) Pengadaan MArching Band Pramuka Provinsi Kepulauan Riau
- 52) Revitalisasi Lapangan Pendamping Sport Centre Kabupaten Karimun
- 53) Pembangunan Mess PPLPD Kepri
- 54) Pembangunan Lapangan Futsal Pulau Dompak



55) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama PPIPD Cabang Olahraga Sepakbola

e. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah kader pemuda anti narkoba	Orang	65

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Pencegahan Penggunaan Narkoba dan Bahaya HIV/AIDS di Kalangan Generasi Muda
- 2) Penyuluh Narkoba bagi Pemuda/Pemudi dan Siswa/Siswi Se-Provinsi Kepulauan Riau

25. Kebudayaan

a. Program pengembangan nilai budaya

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	49,70
2)	Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi	%	49,08

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Gita Bahana Nusantara
- 2) internalisasi nilai melalui permainan tradisional
- 3) Bedah Gurindam Dua Belas
- 4) Pelatihan Teknik Pembuatan Tudong Manto
- 5) Pencatatan dan Pengusulan Karya Budaya Takbenda Provinsi Kepulauan Riau Menjadi WBTB Indonesia
- 6) Pelatihan Pembuatan Tanjak
- 7) Pagelaran WBTB Kepri Yang Ditetapkan Sebagai WBTB Indonesia
- 8) Sosialisasi perda bangunan berciri khas melayu
- 9) Perda Penerapan Muatan Lokal Budaya Melayu di Ruang Publik



- 10) Kajian Sejarah dan Budaya di Provinsi Kepulauan Riau
- 11) Lawatan Sejarah di Kepulauan Riau
- 12) Seri Pengenalan Sejarah Budaya Melayu
- 13) Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh Sejarah dan Tradisi
- 14) Penguatan dan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Data Kebudayaan
- 15) Pengembangan Sistem eBook Kebudayaan
- 16) Inventarisasi Data Kebudayaan Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 17) Penyusunan Pergub tentang Bangunan Berciri Khas Melayu
- 18) Pengadaan Ornamen Berciri Khas Melayu
- 19) Inventarisasi Data Bangunan Berciri Khas Melayu
- 20) Penyusunan Perda tentang Pelestarian Budaya Melayu

b. Program pengelolaan kekayaan budaya

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase warisan budaya tangible yang lestari	%	21,68

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Gerakan Cinta Cagar Budaya
- 2) Pelestarian Cagar Budaya
- 3) Pembangunan Museum Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Penyelamatan Benda-Benda Bersejarah
- 5) Sosialisasi Perda Pelestarian Cagar Budaya
- 6) Studi teknis pelestarian Cagar Budaya
- 7) Penilaian Penetapan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Bimtek Cagar Budaya dan Permuseuman
- 9) Pengelolaan Koleksi Museum/Gallery
- 10) Monitoring Pembinaan Tenaga Cagar Budaya
- 11) Penelitian Perahu Lancang Kuning Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Kepulauan Riau
- 12) Rapat Kordinasi Bidang Cagar Budaya Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Penataan Cagar Budaya Bukit Kerang
- 14) Penataan Komplek Makam Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah



- 15) Kajian Istana Kota Piring
- 16) Pengembangan Wisata Budaya dan Alam Kab. Lingga

c. Program pengelolaan keragaman budaya

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju	%	57,97
2)	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	52,61

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Gebyar Budaya Kepri di TMII
- 2) Parade Tari Daerah dan Nusantara
- 3) Anugerah Bidang Kebudayaan
- 4) Seleksi Festival Kesenian Nasional
- 5) Partisipasi Event Bidang Kebudayaan
- 6) Gelar budaya nusantara
- 7) Lokakarya Manajemen Seni Pertunjukan
- 8) Pekan Raya Melayu Kepulauan Riau
- 9) Pameran Kebudayaan
- 10) Penghargaan Bagi Organisasi Pelestari Budaya dan Seni
- 11) Penyelenggaraan Event Organisasi Seni dan Budaya
- 12) Workshop Seni Kriya
- 13) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Organisasi Budaya
- 14) Pengelolaan, Pemeliharaan, Promosi Budaya dan Operasional Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII Jakarta
- 15) Pekan Budaya Nasional
- 16) Dukungan MTQ Tingkat Provinsi
- 17) Pengadaan Alat Kesenian Marawis, Rebana dan Kompang
- 18) Festival Kampung Melayu Batam
- 19) Festival Dragon Boat Dabo Singkep



26. Perpustakaan

a. Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	29,75
2)	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka	%	62,49

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Bahan Pustaka Umum Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pengadaan Bahan pustaka untuk TMB, TKBM dan Desa Kelurahan Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Kerjasama Dengan Pengarang
- 4) Pemeliharaan, Perawatan Buku Perpustakaan dan Arsip
- 5) Bedah buku
- 6) Lomba Minat Baca
- 7) Peningkatan Pelayanan Perpustakaan dan Arsip
- 8) Pengolahan Bahan Pustaka
- 9) Pengadaan Buku Digital Penunjang Perpustakaan Digital berbasis WEB
- 10) Pengadaan Buku untuk sekolah SMA, SMK sederajat
- 11) Pengadaan Bahan Pustaka Untuk perguruan tinggi, kesehatan dan rumah ibadah
- 12) Pengadaan Bahan Pustaka Untuk Perpustakaan Khusus
- 13) Pengadaan Bahan Pustaka untuk Kabupaten /Kota
- 14) Alih Media dan Alih Bahasa Naskah Kuno Perpustakaan dan Arsip
- 15) Pendampingan lomba
- 16) Pendataan Perpustakaan dalam Rangka Akreditasi Perpustakaan
- 17) Penguatan Pelayanan Kearsipan
- 18) Revitalisasi Perpustakaan

b. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	IKM Pelayanan Perpustakaan	poin	88

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengkajian Pengembangan Minat Baca
- 2) Pemilihan Pustakawan Berprestasi Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Gerakan Masyarakat Minat Baca
- 4) Pemilihan LKD dan Unit Kearsipan Terbaik

27. Kearsipan

a. Program Pengelolaan dan Pengolahan Arsip

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan	%	2,14

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Lomba Tertib Arsip dan Pengelola Arsip Terbaik
- 2) Pameran Arsip
- 3) Penelusuran, Pendataan dan Penarikan Arsip
- 4) Pengelolaan Arsip Prov Kepri

b. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola Kearsipan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku	%	93,62

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Mutu SDM Arsip
- 2) Bimtek Pengolahan dan Penataan Arsip
- 3) Pembinaan dan pengawasan Kearsipan



- 4) Penataan dan pengelolaan arsip OPD dan BUMD Prov Kepri
- 5) Diorama Arsip

28. Kelautan dan Perikanan

a. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	305.850,75
2)	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		110,33

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Antang
- 2) Pelaksanaan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
- 3) Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
- 4) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Antang
- 5) Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil
- 6) Pengembangan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
- 7) Pengembangan Kapal Perikanan
- 8) Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan
- 9) Dukungan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan
- 10) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Karimun
- 11) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Natuna
- 12) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Lingga
- 13) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 14) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kota Batam
- 15) Pembangunan Rumah Singgah Nelayan Kabupaten/ Kota
- 16) Kegiatan Pengadaan Jaring dan Keramba Apolo
- 17) Rencana Pembangunan Induk Pelabuhan Perikanan, Kabupaten Lingga
- 18) Dukungan Anggaran Kelompok Nelayan
- 19) Bantuan BBM Nelayan
- 20) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Batu Licin, Kabupaten Bintan
- 21) Pengadaan Alat Tangkap Nelayan Jaring Tenggiri
- 22) Alat Tangkap Kapal dengan Bobot 3-5 GT Kabupaten Natuna



- 23) Pembangunan Gudang Barang pada Pelabuhan Ikan di Kabupaten Natuna
- 24) Rutinitas Kantor UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
- 25) Pengadaan Keramba Apung untuk Kelompok Nelayan Se-Provinsi Kepri
- 26) Hibah Pengadaan Sampan Mesin Ketingting Nelayan Se-Kepri
- 27) Pengadaan Lampu Air Garam bagi Masyarakat Kepulauan, Masyarakat Terpencil dan Nelayan di Provinsi Kepri
- 28) Pengadaan Kapal Pompong 7 GT untuk Kelompok Nelayan Kab. Kepulauan Anambas
- 29) Pengadaan Pompong Nelayan Kecamatan Se-Kabupaten Natuna

b. Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.852,66
2)	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		108,23

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya
- 2) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
- 3) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
- 4) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
- 5) Pengembangan Budidaya Rumput Laut
- 6) Peningkatan Kapasitas Unit Perbenihan (UPTD Provinsi BBI Pengujan)
- 7) Peningkatan Mutu Benih dan Sistem Budidaya Ikan
- 8) Dukungan Penyediaan Benih Ikan Laut di Balai Benih Ikan di Provinsi Kepri
- 9) Alat Pembuat Pakan Kabupaten Natuna

c. Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan	Ton	1.328,88



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 2) Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan
- 3) Promosi dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
- 4) Pengadaan Mesin Industri Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Lingga

d. Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US \$	31.792.408

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Operasional UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMPPKP)
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
- 3) Pengembangan Sistem Jaminan Mutu Hasil Perikanan

e. Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III	Kawasan	4
2)	Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Dokumen/ Peraturan	1 (Pergub Rencana pengelolaan wp3K)

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)



f. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	% Jumlah kasus Iuu Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan Penertiban Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 2) Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
- 3) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Karimun
- 4) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna
- 5) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lingga
- 6) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 7) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kota Batam
- 8) Pelaksanaan Program COREMAP CTI

g. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase kelompok (KUB, Poklamsar, Pokdakan) yang dibina disuluh	%	16,95

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pendamping Perikanan Lapangan
- 2) Pengembangan Sumberdaya Manusia



29. Pariwisata

a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau	hari	2,15

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah
- 2) Penataan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Kabupaten/Kota
- 3) Peningkatan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata
- 4) Pengadaan Sarana dan Fasilitas Pendukung Daya Tarik Wisata
- 5) Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona
- 6) Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kepulauan Riau
- 7) Pembinaan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata
- 8) Penganugerahan Kelompok Sadar Wisata, Desa Wisata dan Pengelola Daya Tarik Wisata
- 9) Bimbingan Teknis Tata Kelola Homestay
- 10) Pembentukan Generasi Muda PI dan Gudep Pariwisata Kepri
- 11) Rintisan dan Diversifikasi Objek dan Daya Tarik Wisata Baru
- 12) Bimbingan Teknis Tata Kelola Destinasi Wilayah Perbatasan
- 13) Pembinaan dan Pengembangan Satuan Karya (Saka) Pariwisata
- 14) Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unit Usaha Pariwisata
- 15) Identifikasi Data Potensi Pengembangan Objek Wisata di Kepulauan Riau
- 16) Pengadaan Sarana Prasarana Wisata Alam di Taman Wisata Alam Gunung Gundul Bunguran Tengah Natuna
- 17) Penataan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Kabupaten Natuna
- 18) Pengadaan Sarana dan Fasilitas Pendukung Daya Tarik Wisata Bahari Kabupaten Lingga

b. Program Pengembangan Industri Pariwisata

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,50



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Bimtek Penerapan Pendaftaran Usaha dan Standar Usaha Pariwisata
- 2) Workshop Pengembangan Wisata MICE
- 3) Pengembangan Pola Perjalanan Wisata Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Fasilitasi Sertifikasi Auditor Pariwisata
- 5) Rapat Koordinasi Industri Pariwisata
- 6) Penyelenggaraan Forum Asosiasi Industri Pariwisata
- 7) Pelatihan Kemudahan Investasi dan Perizinan Pariwisata
- 8) Pelatihan Peningkatan Daya Saing Industri Bidang Makan Minum

c. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	Juta orang	2,40
2)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	Juta orang	1,60
3)	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	15.050

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Promosi Pariwisata Nusantara
- 2) Promosi Pariwisata Mancanegara
- 3) Pengadaan Direktori Pariwisata
- 4) Penyelenggaraan Festival Bahari Kepri
- 5) Festival Gunung Daek
- 6) Penyelenggaraan Familiarization Trip
- 7) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
- 8) Kampanye Wonderful Riau Islands di Luar Daerah
- 9) Kampanye Wonderful Riau Islands Pada Event Pariwisata Daerah
- 10) Peningkatan Branding Wonderful Riau Island Pada Event Internasional di Bintan dan Batam
- 11) Festival Layang - layang Internasional
- 12) Festival Pulau Penyengat



- 13) Sea Eagle Boat Race
- 14) Festival Pulau Senoa
- 15) Festival Padang Melang
- 16) Penyelenggaraan International Tour de Kepri
- 17) Penyelenggaraan Festival Barongsai
- 18) Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah
- 19) Batam Borderless Jazz Festival
- 20) Kenduri Seni Melayu
- 21) Wonderful Riau Island Pada Event Religi
- 22) Lomba Foto Pariwisata
- 23) Dompok Festival
- 24) Penyelenggaraan Moon Run
- 25) Trikora Festival
- 26) Nagoya Street Festival
- 27) Festival Tanjak
- 28) Festival Dingkis Kepri

d. Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	51,50

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
- 2) Laporan Analisa dan Evaluasi Kunjungan Wisman dan Wisnus
- 3) Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata
- 4) Workshop Media Sosial
- 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata
- 6) Pelatihan Media Sosial Bagi Pelaku Kelembagaan Pariwisata Kepri
- 7) Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- 8) Pengembangan Jaringan Kerja Sama Kelembagaan Pariwisata
- 9) Forum Kelembagaan Pariwisata
- 10) Peningkatan SDM Aparatur Pariwisata



e. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif aktif	%	30,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kepri Creative Food
- 2) Penyusunan Action Plan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau
- 3) Gelar Produk Ekonomi Kreatif
- 4) Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif
- 6) Pengadaan Souvenir Kreatif
- 7) Kompetisi Ekonomi Kreatif
- 8) Pameran Foto Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 9) Partisipasi dalam Event Produk Kreatif dan Karya Produk Kreatif Kepri di Tingkat Nasional
- 10) Identifikasi Produk & Pelaku Ekonomi Kreatif

30. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	%	75,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah
- 2) Penyusunan Kajian Akademis Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Penyusunan Zona Konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah
- 4) Identifikasi Cekungan Air Tanah



- 5) Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG)
- 6) Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah
- 7) Inventarisasi Potensi Air Tanah Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Penyusunan Kajian Potensi Sumber Daya Mineral
- 9) Penyebarluasan Informasi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah
- 10) Pemasangan Instalasi Air Bersih ATB
- 11) Penelitian Mengenai Air Permukaan di Pulau Bintan

b. Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	85,00
2)	Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	85,00
3)	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah	%	1,50

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan
- 3) Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
- 4) Bimbingan Teknis Keselamatan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan Pertambangan
- 5) Bimbingan Teknis Pengelolaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
- 6) Pendataan Penambangan Tanpa Izin (PETI)
- 7) Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral
- 8) Pengelolaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat
- 9) Pengelolaan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan Mineral
- 10) Penyusunan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kepri



c. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Rasio Elektrifikasi	%	92,50
2)	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	97,85

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Listrik Rumah Penduduk Miskin
- 2) Pemeliharaan Listrik Desa di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Penyediaan Pembangkit Listrik Genset di Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Pengadaan dan Pemasangan PJU di Provinsi Kepri
- 5) Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Pengadaan Gardu Distribusi di Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Listrik di Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Fasilitas Studi Interkoneksi Antar Pulau di Provinsi Kepri
- 9) Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perkotaan di Batam (Penerangan Lampu Jalan)
- 10) Penyediaan Penyelenggaraan PSU Permukiman Kawasan Perkotaan (Penerangan Lampu Jalan)
- 11) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Tanjungpinang (Penerangan Lampu Jalan)
- 12) Lampu Jalan
- 13) Penghidupan Listrik

d. Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan	%	82,00



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan se-Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pengawasan Ketenagalistrikan se- Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Peningkatan Keselamatan Teknis dan Lingkungan Ketenagalistrikan di Provinsi Kepri
- 4) Penyusunan dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Fasilitasi dan Koordinasi Pengusahaan Ketenagalistrikan

e. Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (<i>Energy Mixed</i>)	%	0,0009

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pendataan, Pembinaan, Sosialisasi dan Peningkatan Penerapan Konservasi Energi
- 3) Monitoring dan Inventarisasi Data Potensi Pembangkit Aneka Energi Baru
- 4) FS dan DED Potensi Energi Baru Terbarukan
- 5) Pemeliharaan Aset Energi Baru Terbarukan
- 6) Pengawasan, Pembinaan, Inventarisasi dan Sinkronisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi
- 7) Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Penerangan Lampu Jalan Liberty RT 03/ RW 02 Kelurahan Batu 9
- 10) Pengadaan PJU Solar Cell Pulau Penyengat
- 11) Pemasangan dan Pengadaan Lampu Jalan Kabupaten Lingga
- 12) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kabupaten Kepulauan Anambas
- 13) Pemasangan dan Pengadaan Lampu Jalan Kabupaten Karimun
- 14) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)



15) Pemeliharaan Solar Cell di SMK Batam

31. Perdagangan

a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	persen	< 10%
2)	Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	Persen	95,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengendalian dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok
- 2) Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Amdal Pasar Induk Batam
- 4) Pembuatan Website/Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Berbasis Android
- 5) Pameran Komoditi Unggulan Dalam Negeri
- 6) Pelatihan dan Sosialisasi Sistem Informasi Antar Pulau (SIPAP) dan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT)
- 7) Sosialisasi dan Penerapan Sistem Pasar Lelang di Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
- 9) Pembangunan Gudang di Kabupaten Kep. Anambas
- 10) Pengadaan Cold Storage Mobile
- 11) Revitalisasi Pasar Inpres Kijang Kab. Bintan
- 12) Pengadaan Cold Storage Permanen di Kota Tanjungpinang
- 13) Pembangunan Gudang Penagi Kab. Natuna
- 14) Revitalisasi Pasar di Kab. Lingga
- 15) Partisipasi Pada Pameran Perdagangan dalam Negeri
- 16) Pengadaan Papan Display / Informasi Harga Bapok
- 17) Bantuan Pengadaan Gerobak Untuk Pelaku Usaha Perdagangan

b. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)	%	28,00
2)	Persentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen (melalui BPSK)	%	100,00
3)	Persentase jenis komoditas dan atau alat yang mendapat pelayanan pengujian mutu barang atau kalibrasi	%	52,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- 2) Pengawasan dan Penyidikan Barang Beredar dan Jasa Pembinaan dan penegakan hukum

c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	juta US \$	1.478,75
2)	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$	9.500.000
3)	Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	10.500
4)	Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	24
5)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,44

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Desiminasi Regulasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
- 2) Pameran Dagang dan Promosi Luar Negeri
- 3) Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Ekspor di Dalam Negeri
- 4) Koordinasi Antar Lembaga
- 5) Partisipasi Pada Pameran MIHAS di Malaysia
- 6) Partisipasi Pameran Internasional Islam di Malaysia
- 7) Pelatihan SKA Online Bagi Pelaku Usaha



- 8) Pameran Produk Prospek Ekspor di Dalam Negeri
- 9) Partisipasi pada Pameran World Expo Dubai 2020
- 10) Pameran Perdagangan di Luar Negeri Jepang
- 11) Galery dan Pusat Pemasaran Produk Unggulan Ekspor Kepri
- 12) FTA Center di Provinsi Kepri
- 13) Pelatihan Prosedur Impor untuk Pemula
- 14) Pelatihan Prosedur Ekspor untuk Pemula
- 15) Pendampingan DDS (Designer Dispatch Service) Provinsi Kepulauan Riau
- 16) Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Impor Provinsi Kepri
- 17) Business Matching Perdagangan Luar Negeri
- 18) Sosialisasi Perjanjian Perdagangan Internasional
- 19) Pemetaan Produk Unggulan Ekspor Provinsi Kepulauan Riau
- 20) Pelatihan Ekspor dan Impor berbasis Internet
- 21) Sistem Informasi Ekspor dan Impor
- 22) Pelatihan Negosiasi Bisnis (Teknik Negosiasi) dan Kontrak Dagang Ekspor

32. Perindustrian

a. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	9

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Masterplan, FS, dan Business Plan Sentra Industri Pengolahan hasil Laut di Kab. Lingga
- 2) Penyusunan Masterplan, FS, dan Business Plan Sentra Industri Pengolahan Sagu Kab.Lingga

b. Program Penataan Struktur Industri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Industri Besar	Unit	790
2)	Jumlah kawasan industri	kawasan	26
3)	Jumlah Kelompok Klaster Industri	Klaster	1

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Database Sektor Industri Manufaktur di Provinsi Kepulauan Riau (Tersedianya Database Sektor Industri Manufaktur Provinsi Kepulauan Riau)
- 2) Pelatihan Peningkatan Skill Kompetensi SDM di Sektor Industri Manufaktur (Meningkatnya Skill SDM Sektor Industri Manufaktur)
- 3) Jasa Pembuatan dan Pelatihan Aplikasi Registrasi Mesin Pelinting Rokok berbasis Android dengan Teknik Scan Barcode Reader (Tersedianya Aplikasi Registrasi Mesin Pelinting Rokok berbasis Android dengan Teknik Scan Barcode Reader)
- 4) Penyusunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Penataan Revitalisasi Sentra Industri Pengolahan Kedelai (Tahu dan Tempe) Kota Tanjungpinang (Penyusunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Penataan Revitalisasi Sentra Industri Pengolahan Kedelai (Tahu dan Tempe) Kota Tanjungpinang Terlaksananya Kegiatan)
- 5) Bantuan Sarana Pemasaran Produk Hasil pertanian Dan Perkebunan (Tersedianya Sarana Pemasaran Produk Hasil Pertanian dan Perkebunan)
- 6) Bantuan Sarana dan Prasarana Alat-alat Permesinan/Produksi Industri Pengolahan Berbasis Komoditas Unggulan (Tersedianya Alat-alat Permesinan/Produksi Industri Pengolahan berbasis Komoditas Unggulan)

c. Program Pengembangan Industri Unggulan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	38,00
2)	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas	orang	135.000



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Pengolahan Pangan, Farmasi, Kosmetik dari Rumput Laut di Prov. Kepri
(Pelatihan Pengolahan Pangan, Farmasi, Kosmetik dari Rumput Laut di Prov. Kepri)
- 2) Penyusunan Businessplan dan FS Industri Pengolahan Gambir Di Kab. Karimun
(Tersedianya BusinessPlan dan FS Industri Pengolahan Gambir di Kab. Karimun)
- 3) Pelatihan Pengolahan Gambir di Prop. Kepri (Pelatihan Pengolahan Gambir di Prov. Kepri)
- 4) Penyusunan Businessplan dan FS Industri Pengolahan Kelapa di Kec Letung Kab. Kep. Anambas (Tersedianya BusinessPlan dan FS Industri Pengolahan Kelapa di Kec Letung Kab. Kep. Anambas)
- 5) Penyusunan FS, Masterplan & Business Plan Hydrolisat Protein Ikan di Kab. Natuna, Kab. Lingga dan Kab. Bintan (Tersedianya FS, Masterplan & Business Plan Hydrolized Protein Ikan)
- 6) Pelatihan Pengolahan Hasil Kelautan Perikanan sebagai Bahan Baku Industri dan Produk Pangan, Kosmetik dan Farmasi (Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Kelautan Perikanan sebagai Bahan Baku Industri dan Produk Pangan, Kosmetik dan Farmasi)

d. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	2.700
2)	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	2.117
3)	Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	12,28

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Dukungan Operasional Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Fasilitas Galery /Showroom /Display Produk bagi Pelaku IKM
- 3) Pelatihan kewirausahaan CEFE dan AMT bagi Pelaku IKM



- 4) Pelatihan Pembuatan Cendera Mata Berbahan baku Lokal
- 5) Partisipasi dalam Pameran Produk Kepri di Dalam Daerah
- 6) Partisipasi dalam Pameran Produk Kepri di Luar Daerah
- 7) Kegiatan Fasilitasi dan Dukungan Operasional dan Pengembangan Klinik Kemasan & Design
- 8) Bantuan Sertifikat Halal dan PIRT Bagi Produk Pangan IKM
- 9) Fasilitasi Magang bagi wirausaha baru ke sentra-sentra industri di pulau jawa
- 10) Peningkatan Mutu Olahan Pangan Berbahan Baku Ikan/Hasil Laut
- 11) Pendataan dan Pengembangan Database IKM Provinsi Kepulauan Riau
- 12) Gelar Produk IKM Kepri
- 13) Pelatihan Pengasinan dan Pengasapan Ikan
- 14) Pelatihan Aneka Kerajinan Bagi IKM
- 15) Pelatihan Peningkatan Mutu Industri Pangan dan Bantuan Peralatan bagi IKM
- 16) Partisipasi dalam Pameran Produk Pangan Kepri
- 17) Bantuan Peralatan Tenun Bukan Mesin Bagi pengembangan IKM Tenun Daerah
- 18) Fasilitasi Legalitas Usaha Bagi Pelaku IKM
- 19) Pelatihan Pengolahan Limbah Tulang Ikan
- 20) Pelatihan Teknik Dasar Animasi bagi Wirausaha Baru
- 21) Pelatihan Produk-Produk Kreatif Berbahan Baku Limbah Plastik, PVC, Kaca Bagi Wirausaha Baru
- 22) Pelatihan Upgrading Kemasan Bagi IKM Pangan Unggulan
- 23) Pelatihan Aneka Produk Berbahan Baku Kelapa
- 24) Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi Kelompok IKM
- 25) Pelatihan Pengolahan Pangan bagi IKM Pangan
- 26) Pelatihan Menjahit
- 27) Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Kelompok Industri Mikro Kecil dan Kewirausahaan

e. **Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi**

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Industri yang bersertifikasi di Provinsi Kepri	persen	0

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Workshop Pengembangan Kapasitas SDM Industri berbasis kompetensi di Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Industri Kepri

33. Fungsi Perencanaan Pembangunan

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100,00
2)	Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	86,00
3)	Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	%	100,00
4)	Persentase kegiatan prioritas yang didanai	%	81,00
5)	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	%	>34,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) Prov. Kepri
- 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- 3) Rapat Teknis Sinkronisasi Program Kegiatan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 4) Fasilitasi Rapat Teknis Penyusunan Program/Kegiatan Badan Perencanaan dan Litbang
- 5) Rapat Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja OPD
- 6) Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
- 7) Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2020
- 8) Penyusunan KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021
- 9) Penyusunan Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020



- 10) Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
- 11) Koordinasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala PD Pemerintah Provinsi Kepri

b. Program perencanaan Perekonomian

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Perencanaan Strategis Pengembangan Ekonomi lokal
- 5) Penyusunan regulasi, perencanaan dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Penyusunan perencanaan dan sinkronisasi pembangunan bidang kemaritiman Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di provinsi Kepulauan Riau
- 8) Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau

c. Program Perencanaan sosial budaya

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	100,00



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Perencanaan Pendidikan Provinsi Kepri 2021-2026
- 2) Penyusunan Perencanaan Kesehatan Provinsi Kepri 2021-2026
- 3) Perencanaan dan Pembinaan Urusan Pangan dan Gizi Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Penguatan perencanaan dan pemantauan Penanggulangan HIV AIDS
- 5) Penguatan Kualitas Perencanaan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Penanggulangan Bencana
- 6) Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Kab/Kota Sehat se Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Penguatan Prioritas Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan
- 8) Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan
- 9) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Peyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAD P4GN)

d. Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai amanat pemerintah	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penguatan Perencanaan Urusan Perumahan dan Pemukiman di Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Penguatan Perencanaan Bidang Air Minum, Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Penguatan Perencanaan Bidang Transportasi dan Telekomunikasi Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Forum OPD Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
- 5) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD GRK



- 6) Penguatan Perencanaan Program Pembangunan Bidang Energi, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan

e. Program Perencanaan Pemerintahan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sesuai amanat pemerintah	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Forum Perencanaan OPD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
- 2) Optimalisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Rencana Aksi Daerah PPK
- 3) Sinkronisasi Penguatan Perencanaan dan Kebijakan Sektor Pemerintahan Umum
- 4) Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Riau

f. Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase kerjasama yang diimplementasikan	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebijakan Gubernur se-Sumatera
- 2) Kerjasama Penyusunan Perencanaan Kebijakan Provinsi Kepulauan
- 3) Penyusunan Perencanaan Kebijakan Kerjasama Sosek Malindo

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau

h. Program Pengendalian dan Evaluasi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
- 2) Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Pembangunan Daerah Prov. Kepri
- 3) Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten / Kota
- 4) Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten / Kota
- 5) Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

34. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase dokumen hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	65,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Coaching Penerapan Inovasi Daerah pada OPD Provinsi Kepri
- 2) Kerjasama Inovasi Daerah dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Lainnya
- 3) Penguatan Inovasi dan Teknologi se-Provinsi Kepulauan Riau

b. Program Pengembangan Inovasi Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Jumlah inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah	%	20,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kajian Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Penelitian Potensi Hilirisasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Penelitian tentang Nilai Inflasi di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 4) Supervisi Pengorganisasian Kelitbangan di Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Kajian Pengembangan Industri Pengolahan dalam rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kepri
- 6) Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Kepri
- 7) Pengembangan Jejaring Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Kajian Strategis Program Peningkatan Keunggulan Komparatif Komoditas Utama Sektor Perikanan
- 9) Kajian Pengembangan Produk Rumput Laut
- 10) Kajian Rencana Induk Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
- 11) Fasilitasi Penguatan Fungsi Kelitbangan
- 12) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk Kab/ Kota Se Provinsi Kepri
- 13) Kajian mandiri isu aktual untuk mengakomodir kebijakan pembangunan daerah yang bersifat aksidental



- 14) Kajian Tentang Dampak Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Terhadap Kondisi Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau
- 15) Kajian Optimalisasi Pengelolaan Barang / Aset Milik Daerah Provinsi Kepri
- 16) Kajian tentang strategi pengembangan Pemberdayaan masyarakat perbatasan
- 17) Focus Group Discussion (FGD) Penelitian dan Pengembangan dengan Perguruan Tinggi Se-Kepri
- 18) Penelitian Produk Kelautan di Provinsi Kepulauan Riau Yang Berdaya Saing Tinggi
- 19) Rapat Koordinasi Kelitbangan Se Provinsi Kepulauan Riau
- 20) Peningkatan Fungsi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Kepri Tahun 2020
- 21) Penguatan Fungsi Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020
- 22) Analisis Hasil Pencapaian RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
- 23) Analisis tentang Strategi Pengembangan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
- 24) Kajian Ilmiah Stok Rajungan di Kepulauan Riau sebagai Komoditas Ekspor berbasis perikanan tangkap
- 25) Jurnalisme Kepemiluan (Peran Pers) Terhadap Pesta Demokrasi di Kepulauan Riau

35. Fungsi Keuangan Daerah

a. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,457
2)	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah	%	38,73
3)	Persentase tunggakan Pajak Daerah yang tertagih	%	22,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT Anambas
- 2) Verifikasi dan Monitoring Keberatan Pajak
- 3) Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
- 4) Forum Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam rangka penggalan sumber - sumber PAD Prov. Kepri



- 5) Forum Kerjasama Pembinaan Kesamsatan oleh Tim Pembina Samsat Kepri
- 6) Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Lingga
- 7) Kegiatan Penyusunan dan Updating Data NJKB Tahun 2020
- 8) Optimalisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PBB-KB dan PAP)
- 9) Penagihan Pajak Daerah Melalui Upaya Paksa
- 10) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD Batam Center
- 11) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Batam Center
- 12) Pemutakhiran Data dan Piutang WP UPT PPD Batam Center
- 13) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT PPD Batam Center
- 14) Forum Tim Teknis Kesamsatan Wilayah Batam
- 15) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD Tanjungpinang
- 16) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Tanjungpinang
- 17) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT PPD Tanjungpinang
- 18) Forum Tim Teknis Kesamsatan Wilayah Tanjungpinang
- 19) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD Karimun
- 20) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Karimun
- 21) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT PPD Karimun
- 22) Forum Tim Teknis Kesamsatan Wilayah Karimun
- 23) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB UPT PPD Bintan
- 24) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Bintan
- 25) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT PPD Bintan
- 26) Forum Tim Teknis Kesamsatan Wilayah Bintan
- 27) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB UPT PPD Lingga
- 28) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Lingga
- 29) Pengelolaan Samsat Layanan Unggulan UPT PPD Lingga
- 30) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB UPT PPD Natuna
- 31) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Natuna
- 32) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT PPD Natuna
- 33) Forum Tim Teknis Kesamsatan Wilayah Natuna dan Kep.Anambas
- 34) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD Batu Aji
- 35) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Batu Aji
- 36) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT PPD Batu Aji
- 37) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB UPT PPD Kijang
- 38) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Kijang
- 39) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Kijang
- 40) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD Tanjung Batu



- 41) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Tanjung Batu
- 42) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD Anambas
- 43) Revisi Perda Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 44) Revisi Perda Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

b. Program peningkatan koordinasi pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan	%	90,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Evaluasi dan rekonsiliasi Penerimaan Dana Transfer Daerah
- 2) Sosialisasi Ketentuan Cukai Hasil Tembakau

c. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	jumlah jenis inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi	Jenis Layanan	e Samsat dan e payment
2)	Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat	%	30,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan dan Manajemen Website dan Media Informasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
- 2) Pemeliharaan Sistem Kesamsatan
- 3) Pengadaan Perangkat Teknologi Kesamsatan
- 4) Pengembangan sistem notifikasi



- 5) Sinkronisasi Sistem Kesamsatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Polda Kepri
- 6) Pengembangan Layanan Samsat Elektronik
- 7) Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

d. Program peningkatan Kualitas pelayanan dan informasi Publik

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Rata- rata lamanya waktu pelayanan Samsat (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor)	waktu (menit)	25
2)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT	kategori (scoring)	Sangat Baik (8.25)

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyebaran Informasi Pajak Daerah dan Layanan Samsat Dispenda Kepri
- 2) Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan PAD Lainnya
- 3) Pengadaan Dashboard Informasi Pajak Daerah
- 4) Penyusunan Dokumen Mutu dan Resertifikasi ISO Samsat Batam
- 5) Monitoring dan Evaluasi PAD
- 6) Penyusunan IKM Terhadap Pelayanan Publik Kantor Samsat Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Penyebaran Informasi Pajak Daerah dan Layanan Samsat BP2RD Kepri

e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	96,77
2)	Persentase kepuasan pelayanan	%	95,00



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Sinkronisasi Akuntansi Data Aset Dengan Data Simda BMD Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- 3) Rekonsiliasi dana bergulir
- 4) Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Triwulan Seluruh OPD(baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung)
- 5) Sinkronisasi dan rekonsiliasi penerimaan daerah
- 6) Penyusunan Pedoman RKA-PD
- 7) Pengelolaan Penggajian PNS Prov Kepri
- 8) Rekonsiliasi Belanja dengan Bank
- 9) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 10) Pengembangan Sistem Manajemen Tata Kelola Keuangan Daerah Melalui SDM Aparatur
- 11) Update dan Sosialisasi Peraturan Keuangan Daerah
- 12) Forum Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perbendaharaan
- 14) Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah
- 15) Penyusunan Perkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 16) Pengendalian Pelaksanaan APBD
- 17) Intensifikasi dan koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dalam Perencanaan Keuangan Daerah
- 18) Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Transfer Pemerintah Provinsi Kep. Riau
- 19) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- 20) Sinkronisasi Penatausahaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
- 21) Penyusunan APBD Provinsi Kepulauan Riau
- 22) Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau
- 23) Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
- 24) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 25) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
- 26) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD Provinsi Kepulauan Riau
- 27) Peningkatan Pengendalian Pengelolaan Kas Daerah
- 28) Peningkatan Penyerapan Anggaran



- 29) Sinkronisasi dan Verifikasi Saldo Awal pada OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 30) Penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 31) Pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Daerah
- 32) Rekonsiliasi Penyerapan Anggaran OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 33) Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan dan Evaluasi Anggaran
- 34) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
- 35) Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
- 36) Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah
- 37) Koordinasi Penataan Keuangan dan Kekayaan Daerah
- 38) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Anggaran

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan	%	79,22
2)	Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan (pagar,patok,papan nama)	%	86,67

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pengembangan / Peningkatan Kapasitas manajemen BMD
- 3) Apraisal terhadap Tanah Jalan Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD
- 5) Rapat Kerja Pengelola Barang Milik Daerah Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Peningkatan Status Kepemilikan Aset Tanah Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Monitoring Evaluasi Kebutuhan Barang Milik Daerah



- 8) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Peningkatan Pelayanan Asrama Haji
- 10) Optimalisasi Aset Sebagai Potensi Peningkatan PAD
- 11) Update Simda BMD Prov. Kepri
- 12) Monitoring Barang Milik Daerah
- 13) Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- 14) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 15) Sosialisasi Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau
- 16) Monev Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

g. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Rata-rata Nilai hasil evaluasi APBD dan LPP APBD Kabupaten/Kota	Skor	A

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kabupaten/Kota
- 2) Evaluasi APBD Kabupaten/ Kota
- 3) Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/ Kota
- 4) Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Bagi Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Pembinaan Percepatan Penyusunan Perubahan APBD Kab/Kota
- 6) Penyusunan Data Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota



36. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	65,00
2)	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan	%	84,00
3)	Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat	Kasus	10 Kasus
4)	Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik	%	94,00
5)	Indeks Kepuasan Pelayanan ASN	indeks	B

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Pasca Diklat
- 2) Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Pengelolaan Website (Tersedianya Informasi Kegiatan BKPSDM)
- 4) Pengurusan Administrasi Pemberhentian Pegawai
- 5) Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Penilaian Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai
- 8) Pengurusan Administrasi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Pembiayaan PNS Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 10) Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 11) Survei Indeks Kepuasan Pegawai
- 12) Administrasi Kepangkatan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Kepengurusan Layanan Administrasi Kepegawaian



- 14) Pemberian Tanda Kehormatan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 15) Seleksi penerimaan dan pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 16) Penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Tersedianya sejumlah PPPK sesuai dengan formasi yang dibutuhkan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau)
- 17) Seleksi Jabatan Administrator dan Pengawas Aparatur Sipil Negara
- 18) Ujian Dinas dan penyesuaian Ijazah PNS se-Provinsi Kepulauan Riau
- 19) Seleksi penerimaan Mutasi Pindah Masuk Pegawai ke Provinsi Kepulauan Riau
- 20) Gelar Sidang dan Mutasi Pegawai
- 21) Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan
- 22) Pembinaan dan Monev Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 23) Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Sertifikasi Profesi
- 24) Pengelolaan sistem elektronik kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 25) Pengembangan Aplikasi Manajemen ASN (Sejumlah layanan kepegawaian secara elektronik)
- 26) Kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Tugas Belajar dan Izin Belajar
- 27) Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai (Sejumlah Pegawai dimonitoring dan Evaluasi Disiplinnya)
- 28) Rapat koordinasi penyusunan formasi jabatan formasi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Tersedianya Formasi Jabatan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau)
- 29) Diklat Pimpemdagri Administrator
- 30) Diklat Pimpemdagri Pengawas
- 31) Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- 32) Pembekalan Petugas LO MTQ Provinsi Kepulauan Riau
- 33) Pelaksanaan Pemdampingan Khalifah MTQ Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi	%	30,78

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Diklat Kepemimpinan Tk. IV
- 2) Diklat Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris
- 3) Pengiriman Diklat dan Kursus Singkat Non Gelar bagi Pejabat Fungsional (Sejumlah PNS Terkirim untuk Mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis)
- 4) Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis
- 5) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
- 6) Bimtek Peningkatan Kapasitas bagi SDM Aparatur BKPSDM
- 7) Pengiriman Diklat peningkatan Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Kediklatan
- 8) Advokasi Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Pengiriman Peserta Diklat dan Kursus Singkat Non Gelar bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi
- 10) Diklat Pimpemdagri Administrator
- 11) Diklat Pimpemdagri Pengawas
- 12) Uji Sertifikasi Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Diklat Fungsional Arsiparis
- 14) Diklat Kepemimpinan bagi Pejabat Pengawas
- 15) Diklat Kepemimpinan bagi Pejabat Administrator
- 16) Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- 17) Pembekalan Petugas LO MTQ Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020
- 18) Pelaksanaan Pendampingan Khafilah MTQ Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

37. Sekretariat DPRD

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP	%	94,00
2)	Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP	%	94,00
3)	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Skor	68,00
4)	Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Hearing/dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
- 2) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- 3) Penunjang Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kepri
- 4) Penyusunan Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
- 5) Publik Hearing DPRD Provinsi Kepri
- 6) Rapat - rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD
- 8) Rapat Kerja Pimpinan DPRD Se-Indonesia
- 9) Penguatan Peran dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
- 10) Kegiatan Penunjang Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau
- 11) Kegiatan Penunjang Kehumasan dan Dokumentasi Anggota DPRD
- 12) Kegiatan Penunjang Pimpinan DPRD

b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP	%	94,00
2)	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Angka	12,00



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pembuatan Naskah Akademis
- 2) Pembahasan Ranperda dan Produk Hukum DPRD
- 3) Pembuatan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Sosialisasi Peraturan Daerah

c. Program Peningkatan Publikasi, Komunikasi dan Informasi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Media Massa yang berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	MoU	95
2)	Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi	Orang Kali	135

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Parlemenaria
- 2) Kegiatan Reses

38. Sekretariat Daerah

a. Biro Pemerintahan dan Perbatasan

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Peringkat	Tinggi
2)	Presentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Asistensi Asosiasi Pemerintah Provinsi Se Indonesia (APPSI)
- b) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri



- c) Refleksi Hari Otonomi Daerah
- d) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- e) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
- f) Pembuatan Sistem Aplikasi Administrasi Pelayanan Elektronik Government
- g) Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- h) Asistensi dan Koordinasi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan
- i) Pembinaan Penyusunan LPPD Kab/Kota
- j) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- k) Pembinaan Penyelenggaraan Urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil seProvinsi Kepulauan Riau
- l) Pembinaan Penyelenggaraan Urusan di Bidang ketertiban Umum se Provinsi Kepulauan Riau
- m) Koordinasi Penerapan SPM se- Provinsi Kepri
- n) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
- o) Pengumpulan dan Penyusunan Kode dan Data Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- p) Penataan Wilayah Kec/ Kel/ Desa di provinsi Kepulauan Riau

2) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Fasilitas Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota	%	100,00
2)	Persentase lokasi prioritas dan PKSNI yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Rapat Koordinasi Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau
- b) Koordinasi dan Konsultasi pengelolaan perbatasan
- c) Penegasan Batas Daerah
- d) Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah di bidang pemetaan



b. Biro Hukum

1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Jumlah	7

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Penyusunan Peraturan Daerah
- b) Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Produk Hukum Daerah
- c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- d) Evaluasi dan Implementasi Produk Hukum Daerah
- e) Penyusunan Naskah Akademis Perda
- f) Pendampingan Penyusunan Perda Provinsi Kepri
- g) Harmonisasi Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
- h) Harmonisasi Penyusunan Keputusan Kepala Daerah
- i) Harmonisasi Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama dan Hibah

2) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Monitoring Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- c) Kajian Produk Hukum Kab / Kota



- d) Rakor bidang Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota
- e) Harmonisasi Penyelesaian Permasalahan Produk Hukum Kab/Kota
- f) Harmonisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota
- g) Harmonisasi Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota

3) Program Pembinaan Hukum

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ranperda yang diusulkan pemrakarsa yang diakomodir dalam propemperda	%	80,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Penyusunan PROPEMPERDA (Program Pembentukan Peraturan Daerah)

4) Program Fasilitas Bantuan dan Layanan Hukum

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	persentase perkara perdata dan TUN yang dihadapi oleh pemprov yang tertangani	%	50,00
2)	jumlah kasus masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum oleh pemprov kepri	Kasus	5
3)	Jumlah MoU antara Gubernur Kepri dengan LBH dan atau OBH yang terverifikasi	Dokumen	3

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Penyuluhan Hukum
- b) Fasilitas penyelesaian permasalahan hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di pengadilan (Litigasi)



- c) Fasilitas penyelesaian sengketa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau daerah di luar pengadilan (Non litigasi)
- d) Rapat koordinasi dan fasilitasi RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) Tahun 2016-2021
- e) Bantuan Hukum untuk orang miskin
- f) Pemberian Bantuan Hukum kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri
- g) Fasilitas Pembentukan Kab/Kota Peduli HAM

c. Biro Administrasi Pembangunan

1) Program e-Government

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah sistem informasi administrasi pembangunan yang terintegrasi	Unit Sistem	7

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Aplikasi Single Base Map Pembangunan Provinsi Kepri
- b) Pengelolaan Website Biro Administrasi Pembangunan
- c) Pengembangan Dashboard Development Summary
- d) Pemantauan dan Partisipasi Pelaksanaan E-Government

2) Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	%	Fisik 100,00 Keu 95,00



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Pengendalian Umum Program Kegiatan Pembangunan
- b) Penguatan Sistem Pengendalian Kinerja Pembangunan
- c) Rakor TEPPRA se Provinsi Kepri
- d) Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan se-Provinsi Kepulauan Riau
- e) Peresmian Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
- f) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- g) Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
- h) Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- i) Peningkatan Koordinasi Pelaporan Dana Alokasi Khusus
- j) Peningkatan Koordinasi Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- k) Kompilasi dan Profil Kegiatan Strategis di Provinsi Kepri

3) Program Peningkatan Administrasi Pembangunan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase dokumen administrasi pembangunan tersusun tepat waktu	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Pameran Tematik Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
- b) Koordinasi, Sinkronisasi Perumusan dan Kebijakan Isu Strategis Pembangunan
- c) Penyusunan Capaian Pembangunan Provinsi Kepri
- d) Pelaksanaan Tugas Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kepulauan Riau
- e) Optimalisasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri
- f) Overview Pembangunan Kepulauan Riau



4) Program Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah	Kab/Kota	5

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Kepri

d. Biro Administrasi Layanan Pengadaan

1) Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	%	83,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Penyusunan Katalog Lokal
- b) Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- c) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- d) Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- e) Lokakarya Terkait Proses Barang dan Jasa Pemerintah
- f) Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa
- g) Peningkatan Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemprov Kepri
- h) Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa
- i) Visitasi Pembuktian Faktual Kualifikasi, Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan



2) Program e-procurement

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (E-Procurement)	%	80,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- Peningkatan Pelayanan LPSE Kepri
- Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE KEPRI
- Peningkatan Pengguna SPSE
- Peningkatan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
- Peningkatan Pelaksanaan E-Purchasing dan Katalog Elektronik
- Peningkatan Penyusunan Perencanaan Pengadaan pada SIRUP
- Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Se-Provinsi Kepulauan Riau
- Pengelola Website Biro Administrasi Layanan Pengadaan

e. Biro Umum

1) Program Pelayanan KDH/WKDH yang difasilitasi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah layanan kedinasan KDH/WKDH yang sesuai prosedur	layanan	2
2)	Jumlah layanan rumah tangga KDH/WKDH yang dilayani sesuai prosedur	layanan	2

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah
- Kunjungan Kerja/Inspeksi Wakil Kepala Daerah
- Pengadaan Kelengkapan Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan Gubernur
- Pengadaan Kelengkapan Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan Wakil Gubernur



- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jabatan Gubernur
- f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jabatan Wakil Gubernur
- g) Kegiatan harian Kepala Daerah
- h) Kegiatan Harian Wakil Kepala Daerah
- i) Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- j) Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

2) Program Dukungan Pelayanan Umum

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase pelaksanaan pelayanan umum sesuai SOP	%	100,00
2)	Skor Kepuasan Masyarakat	Skor	85

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- c) Penyediaan Makan dan Minum
- d) Penyediaan Jasa Transportasi
- e) Penyediaan Jasa Sewa Sarana Perkantoran/Ruang/Tempat/Gedung Perkantoran
- f) Rutinitas Gedung Daerah dan Wisma Daerah
- g) Penyediaan BBM dan Kebutuhan Kendaraan Dinas/Jabatan
- h) Kebutuhan Rumah Tangga Wisma Daerah

3) Program Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah yang terjamin keamanannya	%	100,00



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
2)	Persentase barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah yang dikelola sesuai dengan standar	%	90,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Pemeliharaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b) Asuransi Barang Milik Daerah
- c) Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Bangunan Milik Daerah
- d) Pendukung Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda Provinsi Kepulauan Riau
- e) Pengamanan Aset Milik Daerah
- f) Monitoring Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Setda Provinsi Kepulauan Riau
- g) Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda Prov. Kepri
- h) Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda Prov. Kepri
- i) Pengadaan Genset

f. Biro Kesejahteraan Rakyat

1) Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	%	100,00
2)	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	80,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Safari Ramadhan
- 2) Pengajian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Gema Shalawat dan Pawai Santri Provinsi Kepulauan Riau



- 4) Safari Dakwah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Penyusunan/Pengembangan Data Base Bidang Keagamaan
- 6) Pelaksanaan TC Peserta STQ/MTQ Kafilah Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Pelaksanaan STQ/Mtq Tingkat Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Pagelaran Marhaban dan Zikir Kepulauan Riau
- 9) Penyelenggaraan Ibadah Umrah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 10) Nikah Masal
- 11) Rakor Kerukunan Antar Umat Beragama
- 12) Pelatihan Fardhu Kifayah
- 13) Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan
- 14) Zikir Akbar Provinsi Kepulauan Riau
- 15) Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional
- 16) Gebyar Muharam Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 17) Kepri Bertakbir Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 18) Festival Anak Saleh Provinsi Kepulauan Riau
- 19) Pelatihan Dewan Hakim
- 20) Pembinaan Remaja Mesjid Se-Kepri
- 21) Pendidikan dan Pembinaan Muallaf
- 22) Tabligh Akbar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 23) Pembinaan Mubaligh Provinsi Kepulauan Riau
- 24) Wisuda Hafizh Quran Provinsi Kepulauan Riau
- 25) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Rumah Ibadah dan Organisasi Keagamaan Provinsi Kepulauan Riau

2) Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat tingkat provinsi	%	100,00
2)	Persentase Pembinaan , Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan	%	100,00
3)	Persentase Pembinaan , Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan	%	100,00



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Rakor Kesra Se-Provinsi Kepulauan Riau
- b) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- c) Rakor TP UKS Se-Provinsi Kepulauan Riau
- d) Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau
- e) Rakor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- f) Rakor Bidang Pemuda dan Olah Raga
- g) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Batam
- h) Rakor Pemberdayaan dan Pengembangan Majelis Taklim Provinsi Kepulauan Riau
- i) Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Sakinah
- j) TOT Peningkatan Budaya dan Minat Baca bagi Masyarakat Pesisir Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
- k) Pelatihan Zakat Kontemporer
- l) Pelatihan Manajemen Wakaf
- m) TOT Remaja Masjid
- n) Peningkatan Kinerja KPA (Komisi Penanggulangan AIDS)
- o) Rakor Warga Peduli AIDS Se-Provinsi Kepulauan Riau
- p) Pembinaan Pola Hidup Masyarakat Sehat

g. Biro Administrasi Perekonomian

1) Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Pembangunan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah rekomendasi Bidang Produksi dan Distribusi yang dihasilkan	rekomendasi	5
2)	Jumlah rekomendasi Bidang Umum dan Sinkronisasi Urusan yang dihasilkan	rekomendasi	2
3)	Jumlah rekomendasi Bidang Sarana	rekomendasi	5



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
	Pengembangan Perekonomian yang dihasilkan		
4)	Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan	rekomendasi	7
5)	Jumlah koordinasi bidang perekonomian yang terlaksana	Angka	14
6)	Jumlah monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian yang dilaksanakan	Laporan	7

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan/ CSR di Provinsi Kepri
- b) Koordinasi, Sinkronisasi Perumusan dan Kebijakan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepri.
- c) Koordinasi, Sinkronisasi Perumusan dan Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri.
- d) Koordinasi, Sinkronisasi Perumusan dan Kebijakan di Bidang Industri dan Perdagangan Provinsi Kepri.
- e) Koordinasi, Sinkronisasi Perumusan dan Kebijakan di Bidang Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri.
- f) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Produksi dan Distribusi Perekonomian Dalam Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepri
- g) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Di Provinsi Kepri
- h) Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- i) Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Penanaman Modal Dan PTSP
- j) Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Urusan Koperasi Dan UMKM
- k) Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Urusan Pariwisata
- l) Pemberdayaan Pelaku Usaha Terkait Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
- m) Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Bidang Persandian dan Statistik



n) Koordinasi, Sinkronisasi Perumusan dan Kebijakan di Bidang Kominfo

2) Program peningkatan kinerja BUMD

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD	Skor	40,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus BUMD
- Penyusunan Kebijakan Pengembangan BUMD
- Penyusunan Kajian Kebutuhan Daerah dan Kelayakan Pendirian Bank Kepri
- Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan BUMD Provinsi Kepulauan Riau

h. Biro Organisasi dan Korpri

1) Program kelembagaan organisasi pemerintah daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	%	94,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- Pendampingan Penerapan Pergub tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Prov. Kepri
- Evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja
- Rapat Koordinasi Bidang Organisasi Kab/ Kota
- Rapat Kerja dan Monev Pengurus Korpri
- Penataan Kelembagaan Organisasi Kab/Kota



2) Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022
1)	Persentase Jabatan yang telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	%	90,00
2)	Persentase Perangkat daerah yang telah memiliki dokumen evaluasi jabatan	%	90,00
3)	Persentase jabatan struktural yang telah disusun standar kompetensi Jabatan managerial sesuai ketentuan	%	99,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Rapat Kerja Bidang Analisa Jabatan Provinsi Kepulauan Riau
- b) Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas Provinsi Kepulauan Riau
- c) Reviu Penyusunan Evaluasi Jabatan Provinsi Kepulauan Riau
- d) Koordinasi Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Provinsi Kepri

3) Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan standar pelayanan publik	%	90,00
2)	Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh kementerian	%	69,00
3)	Persentase SOP pada seluruh Opd yang tersusun.	%	86,00
4)	Persentase SOP pada slrh OPD yang telah diimplementasikan	%	96,00
5)	Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik	Skor SKM	74,00



Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelayanan Publik Provinsi dan kab/Kota
- b) Evaluasi Penerapan SOP Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri
- c) Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan
- d) Penyusunan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas Provinsi Kepulauan Riau
- e) Pembinaan dalam Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat se Provinsi Kepri
- f) Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- g) Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan
- h) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Kepri
- i) Rapat Koordinasi Pembinaan Publik dan Pengembangan Kualitas Aparatur Pelayanan Publik
- j) Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Riau
- k) Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- l) Pembinaan Peningkatan Pelayanan Prima
- m) Pembinaan dalam Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4) Program pembentukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	72

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Rapat Kerja Penerapan Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau
- b) Pencanangan Revolusi Mental se-Provinsi Kepulauan Riau
- c) Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi Sekretaris Daerah Se-Provinsi Kepri
- d) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab/Kota se- Provinsi Kepri



- e) Rakornas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi)

5) Program Kesejahteraan Anggota Korpri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Provinsi	Angka	NA
2)	Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Nasional	Angka	NA

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- Peningkatan Partisipasi Anggota Korpri
- Senam sehat bersama anggota KORPRI/ ASN
- Pembinaan Keterampilan Bagi Anggota Korpri Provinsi Kepulauan Riau
- Pembinaan Seni Budaya Bagi Anggota Korpri
- Pelaksanaan MTQ Korpri Tk. Nasional
- Pembinaan MTQ Korpri Tk. Provinsi Kepri

i. Biro Humas, Protokol dan Penghubung

1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDh/WKDh

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Pelayanan KDh/WKDh Bidang Kehumasan, Keprotokolan, dan Penghubung dan Kerjasama Yang Sesuai Dengan SOP	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- Fasilitasi Pelayanan Kunjungan Tamu



- b) Pembuatan dan Pendokumentasian Naskah Sambutan KDh/WKDh
- c) Pengelolaan Manajemen Tamu di Kantor Gubernur Kepri
- d) Pembuatan Buku Jadwal Kerja Harian Pemerintah Daerah Tahun 2017
- e) Peningkatan Pelayanan KDh/ WKDh dan Unsur Pimpinan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Melakukan Kunjungan Kerja dan Aktivitas Kerja di Dalam Daerah Maupun di Luar Daerah
- f) Tupoksi Keprotokolan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- g) Penunjang Acara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2) Program Pengembangan Publikasi, Komunikasi dan informasi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Jumlah Media Massa Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Media Massa	10,00
2)	Persentase Media Informasi Yang Digunakan	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a) Penyediaan Kegiatan Publikasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- b) Pengelolaan Sarana Informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- c) Pameran Foto Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- d) Peliputan Media Massa Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- e) Penunjang Penyusunan Strategi Humas, Peliputan dan Pengelolaan Informasi Media Center serta Pemantauan Media Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- f) Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

3) Program Fasilitasi dan Kerjasama dengan Berbagai Pihak

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri yang Difasilitasi di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri	Kegiatan	4



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
2)	Jumlah Kerjasama Yang Difasilitasi Oleh Bagian Penghubung dan Kerjasama di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri	Mou	10

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- Monitoring dan Evaluasi Paguyuban Masyarakat Kepri
- Pengelolaan Asrama Mahasiswa/Mahasiswi Kepri di Luar Prov Kepulauan Riau
- Pelaksanaan Pameran dan Promosi Lainnya di Luar Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- Pengelolaan, Pemeliharaan, Promosi Budaya Anjungan Daerah Prov. Kepri di TMII Jakarta
- Kerjasama Antar Lembaga/ Daerah

39. Fungsi Pengawasan

a. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi	%	100,00
2)	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Level	3
3)	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau	%	100,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- Pelatihan Kantor Sendiri / In House Training
- Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Se- Provinsi Kepulauan Riau



- 3) Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang Pengawasan/ Aparatur Pengawasan
- 4) Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Tenaga Pengawasan

b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai	%	70,00

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Program Sistem E-Audit
- 2) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Manajemen Pengawasan
- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR)

c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri	Status	WTP
2)	Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3
3)	Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Zona	Hijau

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) pada Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu/ Audit On Call dan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat di Wilayah Pemprov Kepri



- 3) Peningkatan Koordinasi Dengan Aparat Pengawasan Pemerintah dan Instansi Terkait Lainnya (Itjen Kemdagri, KPK, BPK, BPKP, MENPAN, dan Itjen Terkait Serta Instansi Lainnya)
- 4) Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
- 5) Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- 6) Pemeriksaan Reguler Komprehensif pada SKPD di lingkungan Pemprov Kepri
- 7) Intensifikasi Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
- 8) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri
- 9) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 10) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
- 11) Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 12) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- 14) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Provinsi Kepulauan Riau
- 15) Monev Dana Desa
- 16) Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir
- 17) Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 18) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- 19) Reviu Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
- 20) Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK
- 21) Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah
- 22) Reviu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

d. Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2080
1)	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P	%	90,00
2)	Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri	Status	Hijau

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a. Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan.
- b. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- c. Sosialisasi Anti KKN dalam rangka pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri
- d. Koordinasi TP4D dengan Kejaksaan
- e. Monev Laporan Gratifikasi
- f. Survey Penilaian Integritas
- g. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- h. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi
- i. Aksi Saber Pungli

40. Program Rutin Pada Tiap Perangkat Daerah

Selain program-program pembangunan, setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan beberapa program penunjang sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain: Penyediaan jasa administrasi Keuangan; Penyediaan jasa tenaga pendukung; dan Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain: Pengadaan peralatan gedung Kantor; Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor Penyediaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana/Ruangan Perkantoran; Penyediaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana/Ruangan Perkantoran.

c. Program Peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain: pengadaan pakaian dinas dan pakaian hari-hari tertentu.



d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain: Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Non Formal, Bintel dan Kursus.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain: Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Penyusunan Laporan Keuangan perangkat daerah.

f. Program pengembangan data/informasi

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain: Pengelolaan Website; pengelolaan sistem informasi.

g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain: Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah.

h. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil Pengawasan

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain: Monitoring Evaluasi dan Pelaporan hasil pembangunan.



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau diambil dari Bab V Perubahan RPJMD yang merupakan penjabaran dari misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020
1.	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta yang berciri khas melayu dibagi Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta dikali 100	%	49,70
2.	Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	Jumlah warisan budaya yang lestari dibagi jumlah warisan budaya dikali 100	%	21,68
3.	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina x 100	%	80
4.	Persentase santri yang menjadi hafiz	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	%	80
5.	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	185
6.	Angka kriminalitas	Jumlah kasus kriminalitas	Kasus	4.865
7.	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	Panjang jalan provinsi berkondisi baik dibagi panjang jalan dikali 100	%	73,24
8.	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang tersedia dibagi Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang seharusnya tersedia dikali 100	%	92,86
9.	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	Jumlah Kapal Penyeberangan (roro) yang tersedia dikali 100	%	100



No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020
10.	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut yang tersedia dibagi jumlah Pelabuhan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	91,18
11.	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	Jumlah Kapal Angkutan Laut yang tersediadibagi Kapal Angkutan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	88,89
12.	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	Luas wilayah yang memiliki Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) layak dibagi Luas wilayah dikali 100	%	83,48
13.	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	Luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi Luas wilayah dikali 100	%	97,59
14.	Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	Ha	379,57
15.	Rasio Elektrifikasi	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	92,50
16.	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 ke atas	tahun	10,31
17.	Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B	Jumlah sekolah SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi B dibagi Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB dikali 100	%	82,00
18.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja dibagi Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja yang terdaftar dikali 100	%	67,43
19.	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari kerja yang terdaftar dikali 100	%	62
20.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Jumlah Kematian Ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000	per 100.000 KH	129
21.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (AKB) dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000	per 1.000 KH	31
22.	Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dengan statis gizi kurus (underweight) dibagi jumlah Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dikali 100	%	16,5
23.	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	5,68
24.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,50
25.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,25
26.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	305.850,75
27.	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.852,66
28.	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.328,88



No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020
29.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,4
30.	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Ton	44.644
31.	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.742
32.	Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	Ton	1.020
33.	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10
34.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	92,00
35.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp Milyar	7.900
36.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	800
37.	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	Jumlah Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi dibagi Jumlah Koperasi dan UKM dikali 100	%	21,22
38.	Jumlah industri berbahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	2.117
39.	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Juta US \$	1.478,75
40.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB dikali 100	%	8,44
41.	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	Jumlah waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu dibagi Jumlah waduk yang dilakukan pengujian dikali 100	%	90,91
42.	Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	Luas RTH publik di kawasan perkotaan dibagi Luas wilayah dikali 100	%	10,84
43.	Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai Perhitungan IPP ASN Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	78
44.	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	BB
45.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E	B
46.	Nilai Keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100	65
47.	Nilai e- government	Nilai e- government	Skala nilai 1-4	2,4
48.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,457



No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020
49.	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini	WTP
50.	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3

6.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang pada Tabel 6.2.



Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1)	Pertumbuhan Ekonomi	(Jumlah PDRB tahun n dikurangi PDRB tahun sebelumnya) dibagi PDRB tahun sebelumnya dikali 100	%	5±1	Seluruh PD
2)	Laju Inflasi	Laju Inflasi	%	3,50±1	Seluruh PD
3)	Indeks Gini	Indeks Gini	Indeks	0,35±0,01	Seluruh PD
4)	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	5,83	Seluruh PD
5)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,95	Seluruh PD
B	Aspek Pelayanan Umum				
1.	Pendidikan				
6)	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 ke atas	tahun	10,31	Dinas Pendidikan
7)	Persentase SMA/MA/SMK/SM AK/SLB yang terakreditasi minimal B	Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB yang terakreditasi B dibagi Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB dikali 100	%	82,00	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan				
8)	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Jumlah Kematian Ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000	per 100.000 KH	129	Dinas Kesehatan
9)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (AKB) dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000	per 1.000 KH	31	Dinas Kesehatan
10)	Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dengan status gizi kurus (<i>underweight</i>) dibagi jumlah Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dikali 100	%	16,5	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
11)	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	Panjang jalan provinsi berkondisi baik dibagi panjang jalan dikali 100	%	73,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pertanahan



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
4.	Pertanahan				
12)	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi	Jumlah permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi dibagi Jumlah permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikali 100	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pertanahan
5.	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
13)	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	Luas wilayah yang memiliki Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) layak dibagi Luas wilayah dikali 100	%	83,48	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14)	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	Luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi Luas wilayah dikali 100	%	97,59	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15)	Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	%	379,57	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16)	Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	Luas RTH publik di kawasan perkotaan dibagi Luas wilayah dikali 100	%	10,84	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat				
17)	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	185	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
18)	Persentase konflik sosial tertangani	Jumlah potensi konflik sosial tertangani dibagi jumlah potensi konflik sosial dikali 100	%	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19)	Persentase desa/kel tangguh bencana	Jumlah desa/ kel yang tangguh dalam menghadapi bencana dibagi Jumlah desa/ kel dikali 100	%	2,16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
7.	Sosial				
20)	Persentase keluarga miskin yang meningkat pendapatannya melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Jumlah keluarga miskin yang meningkat pendapatannya melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibagi jumlah populasi keluarga miskin dikali 100	%	2,02	Dinas Sosial
8.	Tenaga kerja				
21)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Jumlah Pengangguran Terbuka dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100	%	6,74	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
22)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja dibagi Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja yang terdaftar dikali 100	%	67.43	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
9.	Transmigrasi				
23)	Jumlah warga (KK) yang ditempatkan sesuai dengan rencana penempatan	Jumlah warga (KK) yang ditempatkan sesuai dengan rencana penempatan	KK	2.730	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				
24)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
11. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
26)	Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR)	Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi dibagi Jumlah PUS dikali 100	%	49,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12. Pangan					
27)	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV<10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
28)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	92,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
13. Pertanian					
29)	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Ton	44.644	Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Ketahanan Pangan
30)	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.742	Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Ketahanan Pangan
31)	Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	Ton	1.020	Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Ketahanan Pangan
14. Lingkungan hidup					
32)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
15.	Kehutanan				
33)	Luas lahan kritis terehabilitasi	Luas lahan kritis terehabilitasi	ha	230	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
16.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
34)	Rasio penduduk ber-KTP	Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah mencetak KTP dibagi Jumlah penduduk wajib KTP dikali 100	%	98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35)	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	Jumlah anak (0-18 tahun) berakte kelahiran dibagi Jumlah anak (0-18 tahun) dikali 100	%	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
36)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	BUMDesa	50,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18.	Perhubungan				
37)	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang tersedia dibagi Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang seharusnya tersedia dikali 100	%	92,86	Dinas Perhubungan
38)	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	Jumlah Kapal Penyeberangan (roro) yang tersedia dikali 100	%	100,00	Dinas Perhubungan
39)	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut yang tersedia dibagi jumlah Pelabuhan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	91,18	Dinas Perhubungan



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
40)	Persentase ketersediaan Kapal Angkatan Laut	Jumlah Kapal Angkatan Laut yang tersediadibagi Kapal Angkatan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	88,89	Dinas Perhubungan
19. Komunikasi dan Informatika					
41)	Nilai Keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100	65	Dinas Komunikasi dan Informatika
42)	Nilai e- government	Nilai e- government	Skala nilai 1-4	2,4	Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Statistik					
43)	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral Provinsi Kepri	Jumlah data/statistik sektoral Provinsi Kepri yang disusun dibagi jumlah sektor dikali 100	%	30	Dinas Komunikasi dan Informatika
21. Persandian					
44)	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100	%	40	Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Koperasi dan UKM					
45)	Persentase UKM yang naik kelas/aktif	Jumlah UKM yang naik kelas/aktif dibagi jumlah UKM dikali 100	%	0,62	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
46)	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	Jumlah Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi dibagi Jumlah Koperasi dan UKM dikali 100	%	21,22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23. Penanaman Modal					
47)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp Milyar	7.900	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
48)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	800	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Kepemudaan dan olah raga					
49)	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/ internasional	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/ internasional	Penghargaan	18	Dinas Kepemudaan dan olah raga
25. Kebudayaan					
50)	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta yang berciri khas melayu dibagi Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta dikali 100	%	49,70	Dinas Kebudayaan
51)	Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	Jumlah warisan budaya yang lestari dibagi jumlah warisan budaya dikali 100	%	21,68	Dinas Kebudayaan
26. Perpustakaan					
52)	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	(Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang tahun sekarang dikurangi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015) dibagi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015 dikali 100	%	29,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27. Kearsipan					
53)	Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan	(Jumlah arsip tahun sekarang dikurangi jumlah arsip tahun 2015) dibagi jumlah arsip tahun 2015 dikali 100	%	2,14	
28. Kelautan dan Perikanan					
54)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	305.850,75	Dinas Kelautan dan Perikanan
55)	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.852,66	Dinas Kelautan dan Perikanan



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
56)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.328,88	Dinas Kelautan dan Perikanan
29. Pariwisata					
57)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,4	Dinas Pariwisata
30. Energi dan Sumber Daya Mineral					
58)	Rasio Elektrifikasi	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	92,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
31. Perdagangan					
59)	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Juta US \$	1.478,75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
60)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB dikali 100	%	8,44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
32. Perindustrian					
61)	Jumlah industri berbahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	2.117	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33. Perencanaan Pembangunan					
62)	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	Jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dibagi jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang di kali 100	%	>34,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
63)	Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	Jumlah kegiatan dalam renja Perangkat Daerah (PD) yang sama dengan renstra PD dibagi jumlah kegiatan dalam renja PD dikali 100	%	86,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
34. Penelitian dan Pengembangan					
64)	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dibagi Jumlah hasil kelitbangan dikali 100	%	60,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
35.	Keuangan				
65)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,457	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
66)	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah
36.	Sekretariat DPRD				
67)	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	%	68	Sekretariat DPRD
37.	Kepegawaian				
68)	Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai Perhitungan IPP ASN Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	78	Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
38.	Sekretariat Daerah				
69)	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina x 100	%	80	Biro Kesejahteraan Rakyat
70)	Persentase santri yang menjadi hafiz	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	%	80	Biro Kesejahteraan Rakyat
71)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E	B	Biro Organisasi dan Korpri
72)	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	72	Biro Organisasi dan Korpri
39.	Pengawasan				
73)	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	BB	Inspektorat, Barenlitbang, Biro Organisasi dan Korpri
74)	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	Inspektorat Daerah
75)	Level Maturitas SPIP Provinsi	Level Maturitas SPIP Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	Inspektorat Daerah



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
	Kepulauan Riau				
C	Aspek Daya Saing				
76)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	88	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan Daerah yang berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RKPD berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2023, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

Terdapat keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen yang lebih tinggi kedudukannya yang bersifat makro, dalam hal ini RPJMD dan menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional yaitu dokumen RKPD. Hal ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif dan optimal untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus selaras dengan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2020.

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan disepakati dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif.

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar disosialisasikan kepada semua masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait agar bisa diketahui oleh semua pihak.
2. Perangkat Daerah (PD) berkewajiban melaksanakan program-program RKPD Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020 berpedoman pada RKPD Tahun 2020;



3. Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau agar mempedomani RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten/Kota tahun 2020;
4. Guna menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pemantauan secara berkala, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam perencanaan, perumusan kebijakan pembangunan, dan pengawasan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2020.
6. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah harus bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD 2020.

Pelaksanaan program pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 perlu didukung komitmen bersama antara pemerintah masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan dukungan semua pihak, hasil yang diperoleh akan mampu mengarah pada pencapaian Visi jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 yaitu: **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"**.